



**IMPLEMENTASI PROGRAM
JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA)
DALAM MENEKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI KOTA SEMARANG**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister

Oleh :

**Tiara Ayunindya Larashati
NIM: 231003631010597**

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Publik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PROGRAM
JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA)
DALAM MENEKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI KOTA SEMARANG

Tiara Ayunindya Larashati

NIM: 231003631010597

Program Studi : Magister Administrasi Publik

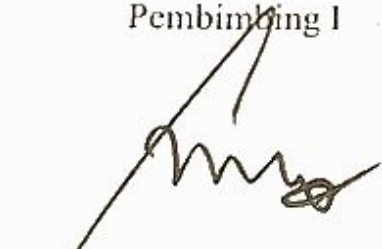
TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera dibawah ini

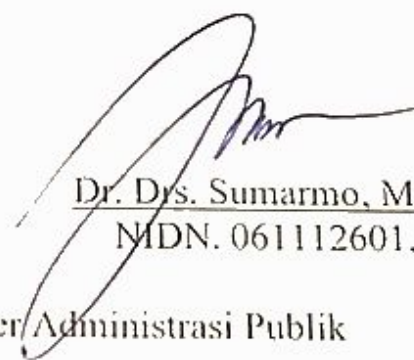
Semarang, Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing I


Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si
NIDN. 0603075501

Pembimbing II


Dr. Drs. Sumarmo, M.Si
NIDN. 061112601.

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik


Dr. Dra. Tri Liestari Hadiati, M.Si
NIDN. 0618056501

LEMBAR PENGESAHAN


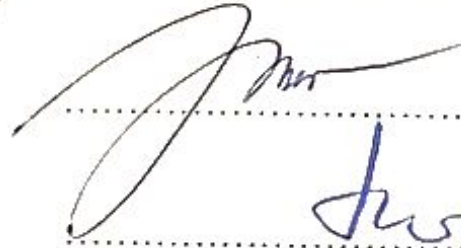

Berdasarkan laporan panitia ujian tesis Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT di Kota Semarang**

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Tim Penguji dan disahkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal seperti di bawah ini.

Semarang, Maret 2025

1. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si
Ketua Tim Penguji/Pembimbing
2. Dr. Drs. Sumarmo, M.Si
Penguji I
3. Dr. Dra. Tri Liestari Hadiati, M.Si
Penguji II


.....

.....

.....

Mengesahkan,

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG



Prof. Dr. Dra. Rini Werdiningsih, M.S
NIDN. 0621105901

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Semarang”

Penulisan tesis ini telah disusun dengan maksimal dan dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dalam proses penulisan tesis, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang membantu memperlancar penulisan tesis ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi pada pembuatan tesis ini.

Terlepas dari semuanya itu penulis menyadari, bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari susunan kata, tata bahasa yang penulis gunakan, maupun substansi isi dari tesis ini sendiri, oleh karena maka kritik dan saran membangun penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan substansi tesis ini. Penulis mohon dibukakan pintu maaf kepada semua pihak apabila ada hal – hal yang kurang berkenan dalam penyampaian tesis ini.

Akhir kata besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan khususnya bagi peneliti lain yang bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan

Semarang, 5 Maret 2025

Penulis



TIARA AYUNINDYA LARASHATI

NIM: 231003631010597

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, Tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor) di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini

Semarang, 5 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



TIARA AYUNINDYA LARASHATI

NPM: 231003631010597

UCAPAN TERIMA KASIH

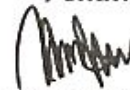
Dalam penyelesaian Tesis ini penulis mendapat bantuan dan perhatian yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si. selaku Rektor UNTAG Semarang sekaligus dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pengarahannya dan bimbingan dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
2. Prof. Dr. Dra. Rini Werdiningsih, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAG Semarang.
3. Dr. Dra. Tri Lestari Hadiati, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara / Niaga dan selaku Penguji Tesis.
4. Dr. Sumarmo, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pengarahannya dan bimbingan dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas ilmu yang telah bapak berikan selama ini.
5. Ayah, Ibu dan Suami tercinta yang senantiasa memberikan doa, bantuan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Namun penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga tesis ini dapat berguna sebagai tambahan informasi dan pengetahuan.

Semarang, 5 Maret 2025

Penulis



TIARA AYUNINDYA LARASHATI

NIM: 231003631010597

ABSTRAK

Tingginya kasus KDRT di Kota Semarang menuntut perhatian lebih dalam pencegahan dan perlindungan bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat perlindungan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Semarang serta menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambatnya. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang digunakan sebanyak 8 orang. Teknik analisis data yang digunakan melalui tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini adalah 1) Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam menekan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang menunjukkan variasi dalam efektivitasnya. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi aparatur, dan struktur birokrasi. Pemanfaatan media sosial, pertemuan rutin, serta koordinasi yang baik terbukti meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pelaporan dan penanganan KDRT. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih serta pemanfaatan anggaran yang optimal mendukung keberlangsungan program. Namun, tantangan masih ditemukan dalam keterbatasan pelatihan, kurangnya fasilitas pendukung, serta budaya kerja aparatur yang belum sepenuhnya responsif terhadap kasus KDRT. 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program ini berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta keberlanjutan evaluasi dan pelatihan. Dukungan dari warga dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor positif yang memperkuat pelaksanaan program, sementara keterbatasan anggaran dan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan tugas menjadi hambatan yang perlu diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif, penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, serta regulasi yang lebih mendukung koordinasi antarinstansi guna memastikan respons yang cepat dan tepat dalam menangani kasus KDRT..

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kepemimpinan, Kolaborasi Lintas Sektor, JPPA, KDRT

ABSTRACT

The high number of domestic violence (KDRT) cases in Semarang City demands greater attention to prevention and victim protection, particularly for women and children. Collaborative efforts between the government, educational institutions, and the community are needed to raise awareness and strengthen protection. This study aims to analyze the implementation of the Women's and Children's Protection Network (JPPA) Program in reducing domestic violence (KDRT) in Semarang City and to examine its supporting and inhibiting factors. This research employs a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The study involved eight informants. The data analysis technique follows three main stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. The findings of this study are as follows: 1) The implementation of the Women's and Children's Protection Network (JPPA) Program in reducing cases of Domestic Violence (KDRT) in Semarang City demonstrates varying effectiveness. The success of this program largely depends on communication, resources, officer disposition, and bureaucratic structure. The use of social media, regular meetings, and good coordination have proven to enhance communication effectiveness in reporting and handling domestic violence cases. Additionally, the availability of trained human resources and optimal budget utilization supports the sustainability of the program. However, challenges remain, including limited training, lack of supporting facilities, and a work culture among officials that is not yet fully responsive to domestic violence cases. 2) The supporting and inhibiting factors in the implementation of this program are closely related to community participation, inter-agency coordination, and the continuity of evaluation and training. Community support and the use of information technology serve as positive factors that strengthen program implementation, while budget constraints and a lack of consistency in task execution pose challenges that need to be addressed. To enhance the program's effectiveness, an adaptive communication strategy, capacity building for officials through continuous training, and regulations that better support inter-agency coordination are necessary to ensure a swift and appropriate response to domestic violence cases.

Keywords: Policy Implementation, Leadership, Cross-Sector Collaboration, JPPA, Domestic Violence (KDRT)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SKEMA.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
1.3. Rumusan Masalah	17
1.4. Tujuan Penelitian	17
1.5. Manfaat Penelitian	17
1.5.1. Manfaat Teoritis	17
1.5.2. Manfaat Praktis.....	18
BAB II TELAAH PUSTAKA	20
2.1. Penelitian Terdahulu	20
2.2. Kajian Pustaka	30
2.2.1. Teori Implementasi Kebijakan	30
2.2.2. Teori Kepemimpinan.....	43
2.2.3. Teori Kolaborasi Lintas Sektor.....	45
2.2.4. Konsep Pencegahan KDRT Serta Perlindungan Perempuan dan Anak.....	47

2.2.5. Efektivitas Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di Kota Semarang.....	51
2.2.6. Kebijakan Publik	53
2.2.7. Peraturan Perundang-undangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	66
2.2.7.1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak	67
2.2.7.2. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	68
2.2.7.3. Peraturan Walikota Semarang No. 5 tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang.....	71
2.3. Kerangka Pemikiran.....	73
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	76
3.1. Lokus Penelitian.....	76
3.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian	77
3.3. Fokus Penelitian.....	78
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	79
3.5. Model Konseptual	80
3.6. Penentuan Informan	81
3.7. Teknis Analisis Data	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	86
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	86
4.1.1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang	86
4.1.2. Tugas DP3A Kota Semarang.....	87
4.1.3. Fungsi DP3A	87
4.1.4. Struktur Organisasi DP3A Kota Semarang	89
4.2. Hasil Penelitian	90
4.2.1. Deskripsi Umum Informan.....	90
4.2.2. Deskripsi Implementasi Program JPPA Dalam Menekan KDRT Di Kota Semarang.....	94

4.2.2.1. Komunikasi	95
4.2.2.2. Sumber Daya	106
4.2.2.3. Disposisi	119
4.2.2.4. Struktur Birokrasi	135
4.2.3. Deskripsi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program JPPA Dalam Menekan KDRT Di Kota Semarang	142
4.2.3.1. Deskripsi Faktor Pendukung dan Penghambat pada Dimensi Komunikasi	142
4.2.3.2. Deskripsi Faktor Pendukung dan Penghambat pada Dimensi Sumber Daya	144
4.2.3.3. Deskripsi Faktor Pendukung dan Penghambat pada Dimensi Disposisi	146
4.2.3.4. Deskripsi Faktor Pendukung dan Penghambat pada Dimensi Struktur Birokrasi	148
4.3. Pembahasan.....	149
4.3.1. Analisis Implementasi Program JPPA Dalam Menekan KDRT Di Kota Semarang	149
4.3.2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program JPPA Dalam Menekan KDRT Di Kota Semarang	156
4.3.2.1. Dimensi Komunikasi	156
4.3.2.2. Dimensi Sumber Daya.....	157
4.3.2.3. Dimensi Disposisi.....	158
4.3.2.4. Dimensi Struktur Birokrasi	159
BAB V PENUTUP.....	161
5.1. Kesimpulan	161
5.2. Saran	162
5.3. Rekomendasi.....	164
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kekerasan di Kota Semarang Periode 2020 – 2024	2
Tabel 1. 2 Gambaran KDRT Kota Semarang dengan Kota lain Periode 2020– 2024.....	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Perbandingan Kasus KDRT di Kelurahan Kemijen dan Tegalsari.....	76

DAFTAR SKEMA

Skema 2. 1 Dampak langsung dan tidak langsung dalam Implementasi	33
Skema 2. 2 Model <i>Collaborative Governance</i> (Emerson, 2012).....	45
Skema 2. 3 Model <i>Collaborative Governance</i> (Ansell & Gash, 2008)	46
Skema 3. 1 Proses Analisis Data.....	84

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	75
Bagan 4. 1 Struktur Organisasi DP3A Kota Semarang.....	90

DAFTAR SINGKATAN

KDRT	= Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KTA	= Kekerasan Terhadap Anak
KTP	= Kekerasan Terhadap Perempuan
JPPA	= Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak
PTT	= Pusat Pelayanan Terpadu
SDM	= Sumber Daya Manusia
DP3A	= Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TP2TP2A	= Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
SOP	= Standar Operasional Prosedur
DP3AP2KB	= Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
DPPKBP3A	= Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
UPTD	= Unit Pelaksana Teknis Daerah
PPA	= Perlindungan Perempuan dan Anak
HAM	= Hak Asasi Manusia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian	- 1 -
Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Penelitian Kepada Kepala DP3A Kota Semarang	- 2 -
Lampiran 3 Surat Permohonan Ijin Penelitian Kepada Lurah Tegalsari	- 3 -
Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Penelitian Kepada Lurah Kemijen	- 4 -
Lampiran 5 Pedoman Wawancara Untuk Instansi	- 5 -
Lampiran 6 Pedoman Wawancara Untuk Korban KDRT.....	- 11 -
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara	- 14 -
Lampiran 8 Hasil Wawancara dengan Dr. Noegroho Edy Rijanto selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang	- 18 -
Lampiran 9 Hasil Wawancara dengan Ata Nuridha, SH. Selaku Kepala Sub Koordinator JPPA	- 26 -
Lampiran 10 Hasil Wawancara dengan Catur Karyanti, SE. Selaku Kepala UPTD PPA Kota Semarang	- 33 -
Lampiran 11 Hasil wawancara dengan Fauzan selaku Ketua Forum JPPA Kota Semarang	- 40 -
Lampiran 12 Hasil wawancara dengan Iis Amalia, S.Psi., M.Psi. Selaku Psikolog UPTD PPA Kota Semarang.....	- 47 -
Lampiran 13 Hasil wawancara dengan Mugi Marjoko, SH. Selaku Lurah Tegalsari kecamatan Candisari	- 56 -
Lampiran 14 Hasil wawancara dengan Bambang Sumbodo, SH. Selaku lurah Kemijen Kecamatan Semarang Timur.....	- 64 -
Lampiran 15 Hasil Wawancara dengan Korban KDRT berinisial SN	- 72 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan dengan luas 373,70 km² ini menghadapi tantangan besar dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang kompleks dan multifaktoral yang memerlukan penanganan serius di berbagai daerah, termasuk Kota Semarang. Kekerasan fisik, verbal, dan psikis terhadap Perempuan dan anak menjadi bentuk KDRT yang paling umum terjadi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi masalah yang sudah berlangsung lama dan kompleks di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kerangka hukum ini diperkuat dengan peraturan daerah yang mencakup berbagai aspek. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan ketersediaan layanan yang melindungi dan menegakkan hak-hak perempuan dan anak di seluruh Indonesia (Salsabila *et al*, 2023).

Di Indonesia, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi dan bahkan meningkat. Kekerasan ini muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik (sering disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT), penganiayaan psikologis (seperti penghinaan verbal), pelecehan seksual (termasuk

pelecehan seksual dan pernikahan paksa), dan penelantaran (gagal memenuhi kebutuhan dasar) (Bagus, 2022). Banyaknya korban kekerasan ini menimbulkan kekhawatiran yang serius, mengingat dampak besar terhadap kesejahteraan mereka secara keseluruhan, dan beberapa kasus bahkan menyebabkan gangguan kesehatan mental (Syaura, 2022).

Pada tahun 2021 saja korban kekerasan khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kota Semarang sendiri telah mencapai 423 kasus, Jumlah tersebut sangatlah signifikan karena menjadikan Kota Semarang menjadi salah satu daerah dengan angka kekerasan tertinggi. Sementara itu, data perbandingan kasus KDRT Kota Semarang dengan kota lainnya periode 2020 – 2024 menunjukkan adanya peningkatan korban yang lebih banyak.

Tabel 1. 1
Data Kekerasan di Kota Semarang Periode 2020 – 2024

No	Kecamatan	2020			2021			2022			2023			2024		
		KDRT	KTA	KTP	KDRT	KTA	KTP	KDRT	KTA	KTP	KDRT	KTA	KTP	KDRT	KTA	KTP
1	Mijen	7	3	1	7	0	1	6	2	1	2	3	0	5	4	0
2	Gunung pati	8	2	0	6	3	1	5	2	3	3	3	1	3	3	1
3	Banyumanik	5	0	0	2	0	2	5	8	1	7	1	0	3	5	0
4	Gajah mungkur	7	0	2	4	3	1	4	3	2	3	5	1	5	1	2
5	Semarang selatan	6	3	0	2	3	2	0	2	1	3	2	0	4	3	2
6	Candisari	1	1	0	0	3	2	1	2	0	3	0	2	1	4	0
7	Tembalang	9	3	2	17	2	2	7	5	2	9	3	0	7	6	1
8	Pedurungan	12	5	1	4	1	1	14	6	2	7	5	3	16	2	1
9	Genuk	4	2	1	1	1	0	3	7	0	7	4	0	6	1	1
10	Gayamsari	12	5	1	7	4	2	6	4	1	9	3	1	9	3	1
11	Semarang timur	20	8	2	22	6	1	22	5	2	28	15	1	21	15	4
12	Semarang utara	2	1	0	2	1	0	15	12	2	12	9	3	18	14	5
13	Semarang tengah	5	2	0	4	1	4	8	6	1	6	6	5	4	0	0
14	Semarang barat	4	4	0	5	2	1	7	3	3	9	7	6	4	1	3
15	Tugu	2	1	0	3	0	0	2	1	1	3	5	0	3	2	0
16	Ngaliyan	4	0	0	6	1	1	7	4	0	3	4	1	7	5	1
JUMLAH		108	40	10	92	31	21	112	72	22	114	75	24	116	69	22

Sumber: Website DP3A (2024)

Tabel 1.1 menyajikan data kekerasan di Kota Semarang dari tahun 2020 hingga 2024, dengan kategori yang mencakup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), dan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) berdasarkan kecamatan. Selama lima tahun tersebut, jumlah kasus KDRT menunjukkan tren yang relatif fluktuatif namun cenderung meningkat. Kasus KDRT tertinggi di Kota Semarang terjadi di Kecamatan Semarang Timur dengan fluktuasi tiap tahunnya yaitu: tahun 2020 sebanyak 20 kasus, tahun 2021 meningkat menjadi 22 kasus, tahun 2022 stagnan di 22 kasus, tahun 2023 meningkat menjadi 28 kasus, dan tahun 2024 turun menjadi 21 kasus. Sedangkan KDRT terendah di Kota Semarang tersebar di beberapa kecamatan yang berbeda yaitu tahun 2020 di kecamatan Candisari sebanyak 1 kasus, tahun 2021 masih di kecamatan Candisari sebanyak 0 kasus, tahun 2022 di kecamatan Semarang Selatan sebanyak 0 kasus, tahun 2023 di kecamatan Mijen sebanyak 2 kasus, dan tahun 2023 di kecamatan Candisari sebanyak 1 kasus.

Untuk kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) tertinggi di Kota Semarang tahun 2020 terjadi di Kecamatan Candisari sebanyak 8 kasus, tahun 2021 juga terjadi di kecamatan Semarang Timur yang turun menjadi sebanyak 6 kasus, tahun 2022 terjadi di kecamatan Semarang Utara sebanyak 12 kasus, tahun 2023 terjadi di kecamatan Semarang timur sebanyak 15 kasus, dan tahun 2024 juga terjadi di kecamatan Semarang timur masih dengan sebanyak 15 kasus. Sedangkan untuk kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) terendah di Kota Semarang sebanyak 0 hingga 1 kasus terjadi berbagai kecamatan di tiap tahunnya, yaitu tahun 2020 di kecamatan Banyumanik dan Gajah Mungkur; tahun 2021 di kecamatan Mijen, Banyumanik, dan Tugu; tahun 2023 di kecamatan Candisari; dan tahun 2024 di

kecamatan Semarang Tengah. Serta tahun 2022 terjadi 1 kasus KTA terjadi di kecamatan Tugu

Untuk kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) tertinggi selama tahun 2020 terjadi di kecamatan Semarang Timur sebanyak 2 kasus, tahun 2021 terjadi di kecamatan Semarang Tengah sebanyak 4 kasus, tahun 2022 terjadi di kecamatan Semarang Barat sebanyak 3 kasus, tahun 2023 terjadi di kecamatan 6 kasus di kecamatan Semarang Barat, dan tahun 2024 terjadi di kecamatan Semarang Utara sebanyak 5 kasus. Sedangkan kasus KTP terendah (tidak terjadi KTP) selama tahun 2020 dengan 0 kasus terjadi diberbagai kecamatan yang tersebar diantaranya: 9 kecamatan tahun 2020 yaitu kecamatan Gunung Pati, Banyumanik, Semarang Selatan, Candisari, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan. 3 kecamatan di tahun 2021 yaitu kecamatan Genuk, Semarang Utara, dan Tugu. 3 kecamatan di tahun 2022 yaitu kecamatan Candisari, Genuk, dan Ngaliyan. 5 kecamatan di tahun 2023 yaitu kecamatan Mijen, Banyumanik, Semarang Selatan, Tembalang, Genuk, dan Tugu. 4 kecamatan di tahun 2024 yaitu kecamatan Mijen, Banyumanik, Semarang Tengah, dan Tugu.

Secara keseluruhan, data terendah kasus KDRT diperoleh selama tahun 2020 yaitu 108 kasus dan meningkat di tahun 2024 menjadi 116 kasus. Sedangkan kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA), data terendah kasus KTA diperoleh selama tahun 2020 yaitu 40 kasus dan meningkat di tahun 2024 menjadi 69 kasus. Sementara itu, kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), data terendah kasus KTP diperoleh selama tahun 2020 yaitu 10 kasus dan meningkat di tahun 2024 menjadi 22 kasus.

Di sisi lain, kategori KTA menunjukkan jumlah kasus yang bervariasi dan terkadang ada kecamatan yang tidak mencatatkan kasus sama sekali, seperti di Kecamatan Mijen pada tahun 2021. Sedangkan KTP menunjukkan pola serupa, dengan total kasus yang cenderung lebih rendah dibandingkan KDRT dan KTA, seperti yang terlihat di Kecamatan Genuk yang tidak mencatatkan kasus KTP selama periode tertentu. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan kompleksitas situasi kekerasan di Kota Semarang, di mana KDRT menjadi masalah yang paling mencolok dengan peningkatan jumlah kasus yang signifikan. Hal ini menandakan perlunya upaya yang lebih terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk menangani isu-isu kekerasan, termasuk program pencegahan dan penanganan yang lebih efektif di level kecamatan untuk mengurangi angka kekerasan dalam jangka panjang.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang dan beberapa kota lain di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi, seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanganan telah dilakukan, angka KDRT masih memprihatinkan dan menunjukkan bahwa masalah ini memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan, serta masyarakat secara umum. Data ini menjadi bukti bahwa langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk menekan angka kejadian KDRT dan melindungi para korban.

Pemilihan Kota Yogyakarta dan Bandung sebagai pembanding didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Yogyakarta dan Bandung memiliki karakteristik sebagai kota besar dengan populasi yang padat dan tingkat urbanisasi

yang tinggi, mirip dengan Kota Semarang. Hal ini memungkinkan adanya kesamaan faktor-faktor sosial ekonomi yang berpotensi memengaruhi tingkat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kedua, kedua kota tersebut juga merupakan pusat pendidikan dan kebudayaan, yang secara teori dapat memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial seperti KDRT, namun kenyataannya angka KDRT di sana masih cukup tinggi. Dengan demikian, perbandingan antara Semarang, Yogyakarta, dan Bandung dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika KDRT di wilayah perkotaan di Indonesia.

Tabel 1. 2
Gambaran KDRT Kota Semarang dengan Kota lain Periode 2020– 2024

Tahun	Kota					
	Semarang		Yogyakarta		Bandung	
	Jml Kasus	Terselesaikan	Jml Kasus	Terselesaikan	Jml Kasus	Terselesaikan
2020	108	86	145	113	250	205
2021	92	71	246	184	262	196
2022	112	81	223	156	362	253
2023	114	63	218	118	443	248
2024	116	71	238	203	303	184

Sumber: DP3A (2020-2024)

Tabel 1.2 menunjukkan gambaran kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang dibandingkan dengan Yogyakarta dan Bandung selama periode 2020–2024. Secara umum, jumlah kasus KDRT di Bandung cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan dua kota lainnya, dengan puncak tertinggi pada 2023 sebanyak 443 kasus. Yogyakarta mengalami fluktuasi, dengan lonjakan signifikan pada 2021 (246 kasus) dan 2024 (238 kasus), sementara Kota Semarang memiliki jumlah kasus yang relatif stabil, berkisar antara 92 hingga 116 kasus per tahun. Dari segi penyelesaian kasus, Yogyakarta menunjukkan peningkatan

signifikan pada 2024 dengan 203 kasus terselesaikan, sedangkan Bandung mengalami penurunan penyelesaian kasus pada tahun yang sama. Kota Semarang cenderung memiliki tingkat penyelesaian yang lebih rendah dibandingkan dua kota lainnya, dengan persentase penyelesaian kasus yang fluktuatif, menunjukkan adanya tantangan dalam penanganan KDRT di wilayah tersebut.

Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya dilakukan melalui beberapa langkah, baik secara hukum maupun non-hukum. Secara hukum, korban dapat melaporkan kejadian ke kepolisian untuk mendapatkan perlindungan dan menindaklanjuti kasus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang memungkinkan pelaku dikenakan sanksi pidana. Selain itu, layanan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), LSM, atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat membantu korban dalam aspek psikologis, hukum, dan sosial. Mediasi juga sering digunakan, terutama dalam kasus yang tidak berujung pada tindak pidana berat, dengan melibatkan konselor atau tokoh masyarakat untuk mencari solusi terbaik bagi korban dan keluarganya. Di sisi pencegahan, edukasi tentang hak-hak perempuan dan anak, serta program rehabilitasi bagi pelaku, menjadi langkah penting untuk mengurangi angka KDRT di masyarakat.

Tingginya angka ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam penanganan dan pencegahan KDRT di Kota Semarang, mengingat dampak psikologis dan fisik yang ditimbulkannya pada korban, serta pentingnya penguatan perlindungan bagi anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak.

Tingginya jumlah kasus di beberapa kecamatan ini menunjukkan bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

KDRT menjadi perhatian serius karena dampaknya yang luas, tidak hanya terhadap korban, tetapi juga terhadap lingkungan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan urgensi implementasi kebijakan yang efektif untuk melindungi kelompok rentan ini (Arminda *et al.*, 2023). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk menekan angka kekerasan ini melalui program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA).

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) merupakan lembaga yang fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta upaya untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan mereka (Kertati *et al.*, 2022). Dibentuk di tingkat lokal seperti kelurahan, JPPA melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk tim PKK, LPMK, Karangtaruna, dan Forum Anak, untuk memperkuat jaringan perlindungan ini (Bagaskara, 2022). Fungsinya mencakup sosialisasi pencegahan kekerasan, pendampingan korban, dan koordinasi dengan penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan (Kertati *et al.*, 2022). JPPA telah diimplementasikan sebagai upaya meningkatkan efektivitas dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam perlindungan mereka.

Dengan adanya JPPA ini, diharapkan langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. Peningkatan sumber daya manusia, penyesuaian struktur birokrasi, dan komunikasi yang efektif adalah beberapa aspek yang perlu diperkuat dalam implementasi program JPPA agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal dalam menekan angka KDRT di kota Semarang.

Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di Kota Semarang bertujuan untuk membangun sistem terpadu dalam menangani kasus KDRT. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi korban. Meskipun ada upaya signifikan dalam implementasi kebijakan ini, penelitian menunjukkan bahwa berbagai tantangan masih menghambat efektivitas program. Faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menjadi penentu keberhasilan implementasi JPPA.

Komunikasi yang efektif dan meluas ke seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program JPPA. Namun, masih terdapat kendala dalam melibatkan partisipan laki-laki, yang juga berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Selain itu, sumber daya manusia yang tersedia belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal. Struktur birokrasi yang ada, meskipun sesuai dengan standar prosedur operasional, memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk dapat menangani kasus-kasus

kekerasan dengan lebih efektif. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam manajemen sumber daya dan komunikasi antar lembaga terkait.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan berhubungan erat dengan tingginya angka kekerasan. Oleh karena itu, kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota sangat diharapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan tingkat kekerasan dapat ditekan secara signifikan. Evaluasi terhadap efektivitas program JPPA ini penting untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, sehingga tujuan utama, yaitu menekan angka KDRT di Kota Semarang, dapat tercapai dengan lebih efektif..

Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) sangat penting dalam menekan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Semarang. Berdasarkan hasil observasi awal, mayoritas kasus KDRT disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang pas-pasan atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masalah ekonomi ini sering kali menjadi akar permasalahan yang memicu terjadinya KDRT, yang dapat berupa kekerasan fisik (memukul, menendang, menampar), kekerasan psikis (menghina dengan perkataan yang menyakiti hati), kekerasan seksual (pelecehan seksual, pemerkosaan atau pemaksaan dalam hubungan suami istri), penelantaran (tidak menafkahi secara sewajarnya atau memberikan batasan nafkah), serta bentuk kekerasan lain seperti berkata kasar dan tidak senonoh.

JPPA dirancang untuk menyediakan sistem perlindungan yang komprehensif bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Program

ini mencakup langkah-langkah preventif dan kuratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan adanya JPPA, diharapkan dapat memberikan layanan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mendukung pemulihan mereka dari trauma kekerasan.

Selain itu, implementasi JPPA juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong pelaporan kasus kekerasan sehingga bisa segera ditangani. Hal ini penting karena kekerasan dalam rumah tangga sering kali tersembunyi dan tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk rasa malu atau takut akan stigma sosial.

Dengan mengatasi faktor-faktor penyebab kekerasan seperti masalah ekonomi dan meningkatkan edukasi serta akses terhadap bantuan hukum dan psikologis, JPPA dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka KDRT di Kota Semarang. Implementasi yang efektif dari program ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian memiliki kepentingan yang sangat tinggi, karena beberapa alasan krusial. Pertama, KDRT adalah masalah sosial yang serius dan merugikan, terutama bagi perempuan dan anak, yang mana Kota Semarang telah mencatat peningkatan signifikan dalam kasus KDRT. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanganan KDRT melalui peran JPPA. Kedua, dengan adanya JPPA di 46 kelurahan di Kota Semarang, penelitian

ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas JPPA dalam meningkatkan perlindungan bagi korban. Ketiga, penelitian ini akan mengkaji implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi, dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani KDRT, sehingga pemerintah dan lembaga terkait dapat memperkuat perlindungan bagi korban. Terakhir, penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, tokoh agama, dan relawan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, memperkuat sinergi dalam upaya perlindungan di Kota Semarang.

Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena maraknya kasus KDRT di Kota Semarang yang menuntut evaluasi terhadap efektivitas JPPA sebagai struktur perlindungan, terutama dalam penerapan kebijakan dan strategi pencegahan di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti tantangan implementasi kebijakan, pentingnya kolaborasi lintas sektor, dan memberikan saran untuk peningkatan kapasitas JPPA, termasuk dalam hal SOP dan sumber daya, untuk meningkatkan responsivitas dalam menangani KDRT.

Pembentukan Jaringan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (JPPA) oleh Pemerintah Kota Semarang merupakan langkah serius dalam menangani masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang semakin meningkat. JPPA dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memberikan

perlindungan dan pemberdayaan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT. Dalam konteks ini, JPPA berfungsi sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mengimplementasikan program-program yang bertujuan mengurangi kekerasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu gender dan perlindungan anak (Kertati, 2022). Dengan adanya JPPA, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam penanganan kasus KDRT, serta memberikan dukungan yang lebih komprehensif bagi korban.

Selain itu, keberadaan JPPA juga penting untuk memperkuat penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. JPPA dapat berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak, serta mekanisme hukum yang tersedia bagi mereka yang menjadi korban KDRT. Dengan demikian, JPPA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak di Kota Semarang (Kertati, 2022). Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, JPPA diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi angka KDRT dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di daerah tersebut.

Pembentukan Jaringan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (JPPA) berakar dari kebutuhan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kerangka hukum yang lebih sistematis. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 telah menetapkan dasar hukum bagi inisiatif ini dengan mencakup aspek-

aspek penting seperti pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan untuk perempuan dan anak. Melalui perda ini, pemerintah daerah diminta untuk merumuskan kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan program, tetapi juga memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama perempuan dan anak, mendapatkan perhatian dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif yang mendukung hak-hak perempuan dan anak.

Sebagai langkah konkret dalam implementasi Perda 5/2016, Peraturan Wali Kota No. 5 Tahun 2018 diluncurkan untuk membentuk JPPA. Dalam kerangka perwal ini, JPPA menjadi wadah koordinasi di antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Fokus utama JPPA meliputi pengembangan program-program yang secara langsung mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelatihan, serta advokasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu terkait. Dengan dibentuknya JPPA, diharapkan akan tercipta sinergi antarpemangku kepentingan, yang tidak hanya mengoptimalkan sumber daya tetapi juga memberikan mekanisme yang lebih baik dalam pelaksanaan dan evaluasi program-program yang berkenaan dengan perempuan dan anak. Hal ini menjadi penting untuk mencapai tujuan akhir, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul Proposal Tesis
“IMPLEMENTASI PROGRAM JARINGAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) DALAM MENEKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA SEMARANG”

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian lapangan yakni dilakukan dengan melakukan wawancara pegawai yang menangani pelayanan publik pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang terkait dengan judul penelitian: Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Semarang.

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari:

1. Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di Kota Semarang memiliki beberapa materi utama yang mencakup:
 - a. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan: Meningkatkan kesadaran dan kesetaraan gender serta menghapus segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.
 - b. Perlindungan Anak: Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak
 - c. Peningkatan Kemandirian Lembaga: Meningkatkan kemampuan dan kemandirian lembaga serta organisasi yang terlibat dalam program
 - d. Pelayanan dan Penyuluhan Hukum: Memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum untuk memantapkan sistem perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

- e. Pelatihan dan Ketrampilan: Melakukan berbagai kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - f. Penelitian dan Pendataan: Melakukan penelitian dan pendataan masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh perempuan dan anak.
 - g. Sosialisasi dan Pembentukan JPPA: Melakukan sosialisasi dan pembentukan JPPA di berbagai kelurahan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.
2. Peran Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di Kota Semarang dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Penelitian akan mengevaluasi efektivitas JPPA dalam pencegahan melalui sosialisasi, layanan konseling, dan pendampingan korban, serta menilai kolaborasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dalam menyediakan dukungan medis, hukum, dan psikologis. Selain itu, penelitian akan mengkaji upaya pengembangan kapasitas anggota JPPA dan memperkuat kerjasama dengan stakeholder untuk meningkatkan kesadaran dan efektivitas penanganan kasus kekerasan.
 3. Perwal No. 5 Tahun 2018 dalam perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang. Penelitian akan mengevaluasi penerapan regulasi ini oleh pemerintah, khususnya dalam operasionalisasi Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), serta dampaknya terhadap pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Selain itu, penelitian akan menilai koordinasi antar stakeholder dan mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas regulasi tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Perumusan Masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Semarang?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Semarang?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Semarang.
2. Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Semarang.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman tentang teori-teori kebijakan publik, memberikan wawasan yang lebih mendalam, dan diharapkan hasilnya dapat berguna sebagai sumber pengetahuan tambahan

serta menjadi referensi penting dalam literatur akademis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi informasi yang sudah ada, menambahkan perspektif baru, dan menjadi landasan perbandingan untuk penelitian mendatang.

1.5.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor DP3A Kota Semarang

Diharapkan pembentukan JPPA dapat meningkatkan efektivitas dalam pencegahan KDRT dan perlindungan hak-hak korban. JPPA memungkinkan DP3A mengembangkan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan KDRT, serta menyediakan dukungan psikologis dan legal bagi korban. Dengan kolaborasi antara DP3A dan organisasi masyarakat, program ini dapat lebih terfokus, memungkinkan pengumpulan data akurat mengenai insiden KDRT dan efektivitas langkah-langkah yang diambil, sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan sumber referensi untuk pijakan penelitian berikutnya secara lebih terperinci dengan tema yang sejenis

c. Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dalam pengaplikasian pengetahuan yang diperoleh selama kuliah melalui melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akademik.

d. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan memperkuat strategi pencegahan dan penanganan kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut dan pengalokasian sumber daya yang lebih efektif untuk perlindungan perempuan dan anak.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dalam upaya mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berbagai praktik terbaik global telah diidentifikasi dan dapat dibandingkan dengan program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di Semarang. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak, serta dukungan komunitas, merupakan elemen kunci dalam mengurangi insiden KDRT dan meningkatkan kesejahteraan individu yang terdampak.

Salah satu praktik terbaik yang diadopsi di berbagai negara adalah penggunaan pendekatan berbasis komunitas untuk mendukung korban KDRT. Misalnya, program yang mengintegrasikan dukungan kesehatan mental dan pendidikan bagi korban telah terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan dan kemampuan mereka untuk mencari bantuan (Su et al., 2021). Di Semarang, JPPA juga berupaya untuk melibatkan komunitas dalam mendukung korban KDRT, meskipun tantangan dalam hal stigma sosial dan aksesibilitas layanan masih menjadi kendala (Ponnamperuma & Kudagama, 2022).

Selain itu, intervensi yang berfokus pada peningkatan kapasitas pengambilan keputusan perempuan, seperti yang ditemukan dalam penelitian di Iran, menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang mengedepankan harga diri dan

efikasi diri dapat mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (Taaki et al., 2023; Barez et al., 2022). Program JPPA di Semarang dapat mengambil pelajaran dari pendekatan ini dengan mengembangkan modul pelatihan yang berfokus pada penguatan kapasitas perempuan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keselamatan mereka dan anak-anak mereka.

Pentingnya intervensi dini juga ditekankan dalam literatur, di mana identifikasi dan dukungan bagi perempuan hamil yang mengalami KDRT dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan ibu dan bayi (Vahdani et al., 2023). Program JPPA dapat memperkuat komponen ini dengan menyediakan layanan kesehatan yang terintegrasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk mengenali tanda-tanda KDRT pada pasien mereka.

Dalam konteks pendidikan, penelitian menunjukkan bahwa sekolah dapat berfungsi sebagai tempat yang efektif untuk melakukan skrining kekerasan dan intervensi kesehatan mental (Ponnamperuma & Kudagama, 2022). JPPA di Semarang dapat memperluas jangkauannya dengan bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk mengimplementasikan program-program yang mendidik siswa tentang KDRT dan cara-cara untuk melindungi diri mereka sendiri dan teman-teman mereka.

Akhirnya, penting untuk mencatat bahwa pendekatan berbasis bukti, seperti program perubahan perilaku bagi pelaku kekerasan, telah menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung pada konteks dan pelaksanaan (Arrigo et al., 2025; Boxhall & Birch, 2022). Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian program JPPA di Semarang sangat penting untuk memastikan efektivitasnya dalam

mengurangi KDRT. Dengan demikian, meskipun JPPA di Semarang telah mengadopsi beberapa praktik terbaik global, masih ada ruang untuk perbaikan dan inovasi yang dapat meningkatkan dampak program dalam mengatasi KDRT.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran implementasi kebijakan, peran lembaga, dan strategi kolaborasi dalam penanganan KDRT serta perlindungan perempuan dan anak di berbagai daerah. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diterapkan, berbagai kendala seperti sumber daya dan koordinasi masih memengaruhi efektivitas program. Penelitian ini menggunakan kajian-kajian terdahulu tersebut untuk memahami tantangan dan keberhasilan dalam implementasi program JPPA di Kota Semarang. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Arminda et al. (2023) meneliti kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Semarang, menemukan bahwa kendala utama dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, penelitian ini belum mengkaji peran JPPA dalam pencegahan KDRT.
2. Putri et al. (2023) mengkaji program perlindungan anak di Wonogiri, yang meskipun sudah berjalan sesuai regulasi, belum efektif menekan angka kekerasan. Fokus penelitian ini terbatas pada kekerasan terhadap anak, sedangkan penelitian saat ini mencakup KDRT terhadap perempuan dan anak di Semarang.
3. Salsabila et al. (2024) menyoroti kendala kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Tangerang, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan

kurangnya sumber daya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang karena tidak membahas implementasi JPPA.

4. Bagus (2022) meneliti pemberdayaan perempuan korban KDRT di Kota Batu melalui pelatihan ekonomi. Fokusnya lebih pada aspek sosial dan ekonomi korban, berbeda dengan penelitian saat ini yang menekankan implementasi JPPA sebagai pencegahan KDRT.
5. Bagaskara (2022) meneliti peran DP3A Kota Semarang dalam menangani KDRT terhadap anak selama pandemi, dengan hambatan seperti ketidaksinkronan kebijakan. Berbeda dengan penelitian ini, fokusnya lebih pada peran DP3A, bukan program JPPA.
6. Fanani et al. (2020) membahas kepemimpinan transformasional dalam kebijakan publik nasional. Kesamaannya terletak pada peran pemimpin daerah, tetapi penelitian ini berskala nasional, sedangkan penelitian saat ini lebih spesifik pada JPPA di Semarang.
7. Mauludin (2018) meneliti kolaborasi triple helix dalam pengembangan ruang publik di Bandung. Persamaannya ada pada kolaborasi pemerintah dan LSM, tetapi penelitian ini tidak membahas isu KDRT secara langsung.
8. Mahfudz (2021) meneliti *collaborative governance* dalam penanganan KDRT di Surabaya melalui TP2TP2A. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas keterbatasan sumber daya, sementara penelitian sekarang menekankan kendala SDM dan infrastruktur dalam implementasi JPPA.
9. Sitanggang & Panjaitan (2023) meneliti implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan di Jakarta, dengan temuan bahwa hak anak belum

sepenuhnya terpenuhi. Fokus penelitian ini berbeda karena lebih menyoroti pemenuhan hak, bukan efektivitas JPPA seperti dalam penelitian saat ini..

Berikut ini disajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar analisis penelitian saat ini. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan perlindungan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai daerah.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Masalah Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arminda et al., (2023) Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang	Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan berlokasi pada Kota Semarang Masalah Penelitian: Tingginya tingkat kekerasan terhadap Perempuan dan anak di kota Semarang	Penerapan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan di Kota Semarang telah mengikuti Peraturan Daerah sesuai dengan Nomor 5 Tahun 2016 Kota Semarang. Meskipun demikian, terjadi peningkatan tingkat kekerasan pada tahun 2022. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi peningkatan kekerasan terhadap perempuan di Semarang termasuk komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Sama-sama meneliti tentang kebijakan perlindungan Perempuan dan anak di kota Semarang	Penelitian Arminda <i>et al.</i> , (2023) tidak menjelaskan tentang implementasi program JPPA dalam menekan KDRT di kota Semarang. Sedangkan penelitian yang sekarang menjelaskan tentang implementasi program JPPA dalam menekan KDRT di kota Semarang
2.	Putri et al., (2023) Implementasi Program Perlindungan Anak dalam Menekan Kekerasan Pada Anak di	Tujuan Penelitian: Penelitian bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Program Perlindungan Anak dalam Menekan Kekerasan Pada	Implementasi Program Perlindungan Anak di Kabupaten Wonogiri sudah terlaksana meskipun masih ada penambahan angka kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri. Dilihat	Sama-sama meneliti tentang implementasi program pemerintah dalam menekan kekerasan	Penelitian Putri et al., (2023) dilakukan di wonogiri dan hanya membahas kekerasan pada anak saja

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Masalah Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kabupaten Wonogiri	Anak di Kabupaten Wonogiri Masalah Penelitian: Fluktuatifnya tingkat kekerasan pada anak di kabupaten Wonogiri	dalam tahap pengorganisasian, bahwa Dinna PPKBP3A Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan Program Perlindungan Anak sesuai dengan segala aturan yang berlaku, bekerja sama dengan beberapa lembaga daerah dan dengan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan program perlindungan anak. Dalam tahap interpretasi, Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri sudah melaksanakan sosialisasi sebagai pelaksanaan program perlindungan anak, yang mana dalam pelaksanaan ini melibatkan banyak pihak. Sedangkan, dalam tahap aplikasi, Dinas PPKBP3A Kabupaten Wonogiri menilai keberhasilan program dari cara terima dan tanggap dari masyarakat, terutama dari korban kekerasan		Sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan dikota Semarang dan membahas KDRT pada Perempuan dan anak
3.	Salsabila <i>et al.</i> , (2024) Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perempuan dan Anak Dari Tindak	Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam melindungi	pelaksanaan DP3AP2KB di Kota Tangerang menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran dan minat masyarakat dalam mengakses informasi mengenai layanan perlindungan	Sama-sama meneliti tentang kebijakan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan	Penelitian Salsabila <i>et al.</i> , (2024) dilakukan di kota Tangerang. Sedangkan penelitian yang sekarang

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Masalah Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kekerasan di Kota Tangerang	perempuan dan anak di kota dari kekerasan Masalah Penelitian: 1. Kekurangan sumber daya manusia di UPTD PPA Kota Tangerang. 2. Peningkatan insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak (2020-2022) 3. Terbatasnya akses informasi dan kesadaran tentang hak dan layanan bagi korban kekerasan.	dan pelaporan, kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab, dan tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk satgas dan aktivis belum dibuatkan secara resmi		dilakukan di Kota Semarang beserta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program
4.	Bagus (2022) Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumahtangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu	Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemberdayaan perempuan korban KDRT yang dilakukan DP3AP2KB Kota Batu dan peran pemberdayaan perempuan dalam perekonomian rumah tangga Masalah Penelitian: penelitian berfokus pada masalah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kota Batu dan kebutuhan	Pemberdayaan perempuan terwujud melalui dua kegiatan yaitu pendampingan (sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, klasifikasi masalah, pendampingan hingga pemantauan/monitoring) dan usaha kesejahteraan sosial (pelatihan tata boga, tata rias/salon dan menjahit). Peran pemberdayaan perempuan dalam perekonomian rumah tangga yaitu cukup signifikan. Hal ini terbukti dari pekerjaan yang mereka jalani mampu menghasilkan	Sama-sama meneliti tentang KDRT	Penelitian Bagus (2022) membahas tentang pendampingan dan usaha peningkatan kesejahteraan social pada perempuan yang menjadi korban KDRT oleh DP3AP2KB Kota Batu Sedangkan penelitian yang sekarang membahas implementasi program JPPA dalam menekan KDRT di kota Semarang.

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Masalah Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		selanjutnya untuk pemberdayaan mereka	membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Pekerjaan tersebut antara lain membuat kue, penjahit dan lain sebagainya		
5.	Bagaskara (2022) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19	Tujuan Penelitian: Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan peran DP3A Kota Semarang dalam memberikan pemenuhan Hak terhadap Anak Korban KDRT pada Masa Pandemi Covid-19 Beserta factor Penghambat dan Solusinya Masalah Penelitian: Adanya peningkatan yang tajam anak korban KDRT di Kota Semarang selama Pandemi COVID-19	DP3A kota Semarang telah menjalankan peran dan peranannya sebagai organisasi pemerintahan. Kendala yang dihadapi adalah belum sinkronnya kebijakan perangkat daerah dan masih adanya ketimpangan gender di masyarakat.	Sama-sama meneliti tentang KDRT pada Perempuan dan anak di kota Semarang	Penelitian Bagaskara (2022) dilakukan di tentang peran DP3A kota Semarang Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang implementasi program JPPA dalam menekan KDRT beserta factor pendukung dan penghambatnya
6	Fanani et al (2020) Kepemimpinan Transformasional Sektor Publik	Tujuan Penelitian: Untuk mendeskripsikan tentang kebutuhan terhadap kepemimpinan transformasional di negara Indonesia. Masalah Penelitian: terjadinya degradasi moral bangsa yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan	kepemimpinan transformasional sector publik sangat dibutuhkan di Indonesia pada saat ini. Keteladanan dan keberhasilan beberapa pemimpin transformasional yang telah ada menjadi panutan bagi pemimpin dan masyarakat. Keberanian dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan kemampuan	Adanya keterlibatan aktif dari pemimpin local dalam menangani masalah yang terjadi di suatu daerah	Penelitian Fanani et al (2020) membahas kepemimpinan transformasional dalam ruang lingkup negara Indonesia Sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan membahas kepemimpinan transformasional untuk

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Masalah Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		berbangsa dan bernegara	merubah mind set masyarakat yang dipimpinnya sehingga mendukung kebijakannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuannya pemimpin transformasional dalam mentransformasikan ide dan gagasan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin menunjukkan keberhasilan yang signifikan		menangani masalah KDRT di kota Semarang
7	Mauludin (2018) <i>Collaboration Of Triple Helix Actors In The Production Of Public Space: The Tematic Park In Bandung</i>	Tujuan Penelitian: Untuk menjelaskan pentingnya kolaborasi actor-actor triple helix (pemerintah, swasta, dan Masyarakat dalam berkontribusi mengisi ruang public di Kawasan perkotaan bandung Masalah Penelitian: Para aktor dalam produksi ruang publik saling berebut untuk mendapatkan ruang dan mempraktikkan ruang mereka	Kolaborasi aktor (triple helix) diperlukan dalam produksi ruang publik di kawasan perkotaan, misalnya produksi ruang publik di taman tematik Bandung. Namun, tujuan terpenting dari ruang publik adalah ruang masyarakat sebagai aktor utama. Kontestasi ruang tidak dapat dihindari, yang pada akhirnya didasarkan pada ruang representasional.	kolaborasi pemerintah dan LSM dlm penananganan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat	Penelitian Mauludin (2019) belum membahas secara mendalam tentang penanganan KDRT Sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan diarahkan pada kolaborasi pemerintah dan LSM dlm penananganan KDRT yang hasilnya dapat meningkatkan kesadaran msyarakat untuk lapor
8	Mahfudz (2021) Desain dan Peran <i>Collaborative Governance</i> Penanggulangan	Tujuan Penelitian: untuk mengetahui desain dan peran collaborative	Desain collaborative governance dalam penanggulangan KDRT di Kota Surabaya hampir	Penanganan KDRT memerlukan kolaborasi semua OPD	Penelitian Mahfudz (2021) hanya membahas kolaborasi

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Masalah Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya	<p>governance terkait penanggulangan KDRT di Kota Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study) terkait dengan KDRT di Kota Surabaya</p> <p>Masalah Penelitian: Kasus KDRT di kota Surabaya yang mengalami kenaikan</p>	<p>melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Surabaya hingga tingkat kelurahan, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Collaborative governance dalam penanggulangan KDRT di Kota Surabaya diwujudkan dalam bentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (TP2TP2A) Kota Surabaya. Bentuk collaborative governance juga mengatur tugas dan kewajiban dari masing-masing bagian, sehingga kinerja dari TP2TP2A Kota Surabaya lebih efektif dalam penanggulangan KDRT di Kota Surabaya. Pada penelitian ini ditemukan adanya faktor unik yang mendukung berjalannya collaborative governance, yaitu faktor figur pimpinan yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk facilitative leadership/kepemimpinan fasilitatif.</p>	baik ditingkat kelurahan, swasta, LSM, dan pemerintah	<p>semua pihak yang terkait</p> <p>Sedangkan penelitian yang sekarang menambahkan pembahasan tentang keterbatasan Sumber Daya yang menjadi masalah utama dengan menggunakan teori Edward III</p>
9	Sitanggang & Panjaitan (2023) Implementasi Kebijakan	Tujuan Penelitian: Untuk menjelaskan Implementasi Kebijakan Tentang	Implementasi Program perlindungan anak di Kota Jakarta belum berjalan maksimal	Sama-sama membahas tentang Kebijakan yang terkait	Penelitian Sitanggang & Panjaitan (2023)

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan dan Masalah Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di DKI Jakarta	Perlindungan Anak dan Perempuan di DKI Jakarta Masalah Penelitian: Peningkatan kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di DKI Jakarta	karena pemenuhan hak-hak anak belum berjalan maksimal. Beberapa hak anak yang masih belum terpenuhi seperti hak atas identitas, hak atas kebutuhan dasar, hak Pendidikan dan hak sebagai orang tua.	dengan kekerasan terhadap Perempuan dan anak	dilakukan di Jakarta Sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan di Semarang

2.2. Kajian Pustaka

2.2.1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan pelaksanaan dan penerapan suatu kebijakan yang dirancang secara serius dengan mengacu pada norma tertentu guna mencapai tujuan secara maksimal (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). Usman (2002) menekankan bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, melainkan suatu tindakan terencana dalam mekanisme sistem untuk mencapai tujuan. Sementara itu, Harsono (2002) menjelaskan bahwa implementasi adalah proses penerapan kebijakan dari ranah politik ke administrasi guna menyempurnakan suatu program.

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi melahirkan

suatu kebijakan-kebijakan dalam melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. Adapun implementasi yang peneliti maksud disini adalah Implementasi Nomor 5 Tahun 2018 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang.

Menurut Subarsono (2005), teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn mencakup enam variabel utama yang memengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan yang harus jelas dan terukur, ketersediaan sumber daya manusia dan non-manusia, serta hubungan antar organisasi yang mendukung koordinasi. Selain itu, karakteristik agen pelaksana, seperti struktur birokrasi dan norma kerja, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang meliputi dukungan sumber daya dan sikap publik, juga berperan penting. Terakhir, disposisi implementor, yaitu sikap, pemahaman, dan preferensi nilai mereka terhadap kebijakan, turut menentukan keberhasilan implementasi.

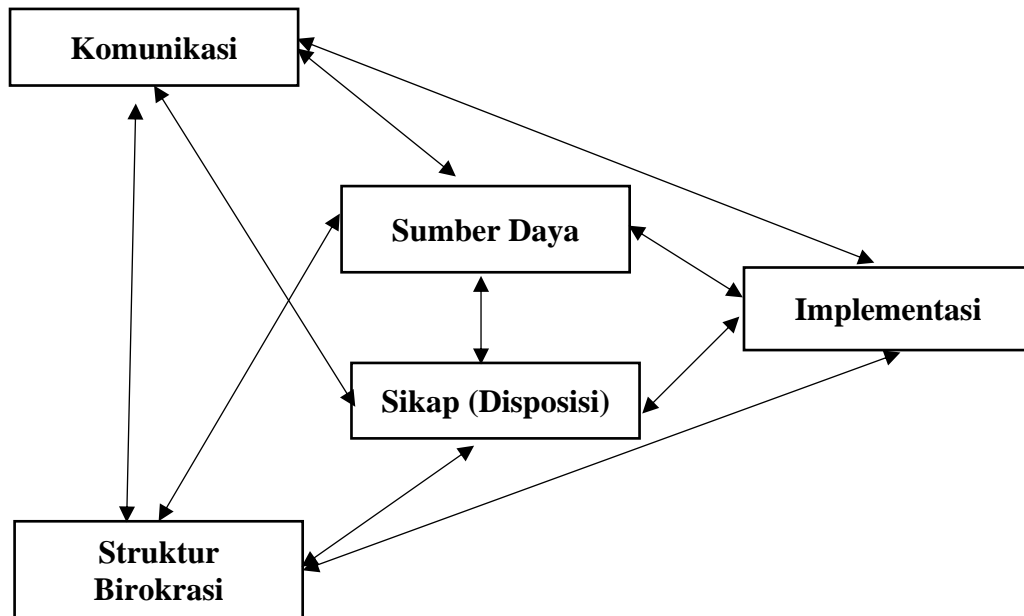
Menurut Martland (dalam Nugroho, 2003), efektivitas implementasi kebijakan ditentukan oleh empat aspek utama, yaitu kebijakan yang tepat, pelaksanaan yang tepat, target yang tepat, dan lingkungan yang tepat. Kebijakan harus relevan dan dirumuskan oleh lembaga yang berwenang, sementara pelaksanaannya harus melibatkan pemerintah serta masyarakat atau sektor swasta. Target kebijakan harus sesuai dengan rencana tanpa tumpang tindih dengan kebijakan lain. Selain

itu, lingkungan kebijakan, yang mencakup interaksi antara perumus dan pelaksana, serta lingkungan eksternal seperti opini publik, juga berperan dalam keberhasilan implementasi.

Teasi Edward III dalam Agustino (2018) menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada empat faktor kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

1. komunikasi yang efektif antar semua pemangku kepentingan, termasuk pelaksana kebijakan, harus jelas dan terbuka untuk memastikan pemahaman yang sama tentang tujuan dan langkah-langkah kebijakan.
2. kebutuhan akan sumber daya yang memadai, baik manusia maupun materiil, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal.
3. Disposisi pelaksana mencakup sikap dan niat baik pelaksana dalam melaksanakan kebijakan; sikap positif dapat mendorong keberhasilan implementasi.
4. Struktur birokrasi yang jelas dan efisien sangat diperlukan untuk mendukung alur kerja yang efektif dan menanggulangi kendala yang mungkin muncul selama proses implementasi. Kombinasi dari keempat faktor ini memungkinkan kebijakan dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Skema 2. 1
Dampak langsung dan tidak langsung dalam Implementasi



Sumber : George Edward III : Implementing Public Policy (1980)

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang

berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika d0ipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Dimensi komunikasi memiliki indikator-indikator:

- 1) Dimensi Transmisi
- 2) Dimensi Kejelasan
- 3) Dimensi Konsistensi

b. Sumber Daya

Dalam teori implementasi kebijakan Edward III, sumber daya manusia dan sumber daya finansial merupakan dua komponen penting yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Edward III berpendapat bahwa tanpa sumber daya manusia yang berkualitas dan mencukupi, pelaksanaan kebijakan tidak akan optimal karena keterbatasan tenaga profesional dalam menjalankan program-program yang dirancang. Sumber daya manusia juga berkaitan dengan kompetensi dan dedikasi petugas

atau relawan yang menjadi pelaksana, seperti yang terjadi pada program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di Indonesia. Dalam konteks ini, JPPA mengandalkan tenaga relawan, yang meskipun tidak digaji, bekerja atas dasar kepedulian sosial dan komitmen untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Keberhasilan JPPA sangat ditentukan oleh jumlah dan kapasitas relawan dalam memberikan layanan yang optimal, sehingga diperlukan pelatihan dan dukungan agar kualitas pelayanan tetap terjaga.

Sementara itu, sumber daya finansial juga diakui Edward III sebagai aspek krusial dalam implementasi kebijakan, namun JPPA tidak memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan organisasi berbasis relawan. Hal ini membuat JPPA menghadapi tantangan finansial yang signifikan dalam menjalankan kegiatannya, seperti kampanye pencegahan kekerasan dan pendampingan korban. Ketergantungan JPPA pada sumbangan masyarakat atau pihak ketiga menyebabkan keterbatasan dalam menyediakan fasilitas dan bantuan yang memadai bagi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aspek finansial bukan bagian utama dari struktur JPPA, tanpa dukungan dana tambahan, relawan JPPA mungkin sulit mencapai efektivitas maksimal dalam memberikan perlindungan dan edukasi terhadap kekerasan.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya

dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan

undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/ mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Dimensi sumber daya memiliki indikator-indikator:

- 1) Sumber Daya Manusia
- 2) Sumber Daya Anggaran
- 3) Sumber Daya Peralatan
- 4) Sumber Daya Kewenangan

c. Disposisi atau Sikap

Menurut teori Edward III, disposisi atau sikap pemimpin berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam konteks program JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak). Sikap pemimpin JPPA yang tegas, peduli, dan berorientasi pada perubahan sosial

dapat memperkuat komitmen para relawan dan mitra dalam menjalankan program. Pemimpin dengan sikap yang proaktif akan lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan, cepat bertindak dalam penanganan kasus, serta mendorong terciptanya budaya peduli dan tanggap pada relawan. Selain itu, sikap yang komunikatif dan suportif juga berperan penting dalam membangun kepercayaan dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait, seperti DP3A dan kelurahan, sehingga menciptakan koordinasi yang solid dan efektif. Disposisi pemimpin JPPA yang mendukung kolaborasi dan inovasi membantu organisasi ini beradaptasi dengan berbagai tantangan, meskipun bekerja dalam struktur yang kurang formal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Dimensi disposisi pelaksana memiliki indikator-indikator:

- 1) Disiplin Aparatur,
- 2) Kejujuran Aparatur,
- 3) Budaya Kerja Aparatur,
- 4) Sifat Demokratis

d. Struktur Birokrasi

Menurut teori Edward III, struktur birokrasi memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, karena organisasi yang memiliki struktur yang jelas akan lebih mudah mengimplementasikan program-program dengan koordinasi yang baik. Dalam konteks Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), organisasi ini terlibat dengan beberapa instansi dan memiliki struktur yang fleksibel karena berbasis relawan, tanpa pengaturan hirarki formal yang ketat seperti dalam organisasi pemerintah. Struktur JPPA cenderung berbasis jaringan, di mana setiap unit relawan di lapangan saling berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan pemerintah kelurahan.

Di dalam jaringan tersebut, relawan JPPA biasanya mengatur diri berdasarkan daerah tugas mereka, baik di tingkat kota, kabupaten, maupun kecamatan. Struktur jaringan ini membuat JPPA lebih mudah bergerak cepat dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, meskipun tanpa dukungan dari struktur birokrasi yang formal. Namun, keterbatasan ini juga menimbulkan tantangan koordinasi karena tidak adanya satuan pengarah tetap atau pemimpin resmi yang memfasilitasi komunikasi, sehingga JPPA bergantung pada kerja sama lintas organisasi dan relawan individu untuk mengisi peran koordinatif dalam jaringan.

Koordinasi merupakan aspek penting dalam teori Edward III, di mana komunikasi yang baik antara instansi terkait dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. JPPA bekerja sama erat dengan DP3A sebagai lembaga pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3A sering kali menjadi mitra utama JPPA dalam pelaksanaan program dan pemberian dukungan teknis, termasuk pelatihan bagi relawan serta konsultasi dalam menangani kasus kekerasan. Koordinasi ini dijalin melalui kegiatan bersama dan rapat koordinasi untuk memantau perkembangan kasus kekerasan dan penanganannya.

Di tingkat kelurahan, JPPA juga berkoordinasi dengan perangkat kelurahan dan masyarakat setempat untuk mendeteksi kasus kekerasan dan memberikan edukasi. Kelurahan biasanya berperan sebagai penghubung informasi antara JPPA dengan masyarakat, sehingga mereka bisa

mengidentifikasi kebutuhan khusus dari daerahnya. Koordinasi yang efektif antara JPPA, DP3A, dan kelurahan membantu memastikan bahwa program perlindungan dapat menyentuh langsung masyarakat dengan lebih cepat dan merespons kasus-kasus yang dilaporkan secara proaktif.

Dalam teori Edward III, pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dapat meningkatkan efektivitas kebijakan karena setiap individu atau kelompok memahami peran dan tanggung jawabnya. Di JPPA, tupoksi utama adalah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Relawan JPPA bertugas mendeteksi, melaporkan, dan memberikan bantuan kepada korban. Selain itu, JPPA juga bertanggung jawab dalam edukasi masyarakat tentang pencegahan kekerasan melalui berbagai program sosialisasi. Fungsi ini diperkuat oleh DP3A yang memberikan pelatihan dan dukungan kebijakan untuk meningkatkan kompetensi relawan JPPA.

Kelurahan, sebagai mitra lokal, memiliki tugas dalam mengoordinasikan laporan kekerasan yang terjadi di masyarakat dan meneruskannya ke JPPA serta DP3A. DP3A memiliki tupoksi lebih pada perencanaan dan pembinaan, serta memberikan dukungan legal dalam kasus-kasus tertentu yang membutuhkan bantuan hukum. Dengan pembagian tugas ini, JPPA dapat menjalankan tugas lapangan dengan dukungan DP3A dan kelurahan, sehingga fungsi masing-masing aktor dalam jaringan perlindungan tersebut saling melengkapi dan membangun sinergi yang efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- 2) Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
- 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
- 4) Vitalitas suatu organisasi;
- 5) Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks

membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. Dimensi struktur birokrasi memiliki indikator-indikator:

- 1) Pengangkatan Birokrasi
- 2) Insentif

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemementasi melahirkan suatu kebijakan-kebijakan dalam melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. Penulis akan menggunakan pendapat Edward III dala penelitian ini.

Dalam penelitian ini mengenai implementasi yang dilaksanakan pada Implentasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang menggunakan implementasi menurut pendapat Edward III (1980: 10) yang mengatakan bahwa pelaksanaan implementasi dapat berhasil dengan baik harus didukung empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi

2.2.2. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan

organisasi dengan mempengaruhi perilaku bawahan secara efektif (Sutrisno, 2016; Fahmi, 2016). Kepemimpinan tidak hanya tentang mengarahkan, tetapi juga membangun kerjasama dan loyalitas dalam organisasi (Hasibuan, 2010). Kepemimpinan transformasional, seperti yang dijelaskan Robbins (2017) dan Suwatno (2019), menekankan motivasi, inspirasi, serta perubahan nilai untuk mencapai efektivitas yang lebih baik. Pemimpin transformasional mampu mendorong karyawan agar melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi serta menciptakan rasa percaya dan loyalitas dalam tim.

Dalam konteks Jaringan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (JPPA) di Kota Semarang, kepemimpinan transformasional sangat relevan karena dapat menginspirasi berbagai pemangku kepentingan untuk bersatu dalam visi melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak (Robbins, 2017). Pemimpin yang efektif membangun kepercayaan dan loyalitas di antara pegawai serta mendorong kolaborasi luas dengan masyarakat dan organisasi terkait (Suwatno, 2019). Kepemimpinan ini juga harus berorientasi pada aspirasi serta tantangan yang dihadapi perempuan dan anak, sebagaimana ditekankan oleh Sodikin (2017) dan Northouse (2013), guna menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat.

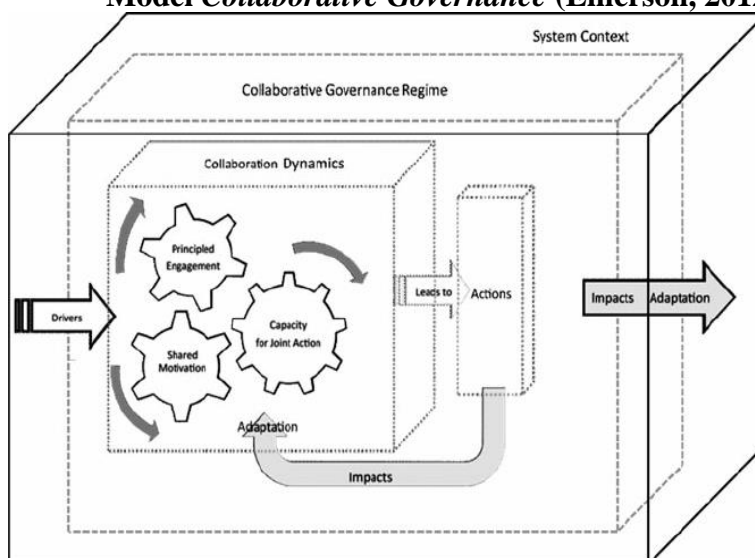
Keberhasilan implementasi JPPA sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam mengelola relawan dan menjalin hubungan dengan mitra. Kepemimpinan transformasional menjadi krusial karena melibatkan inspirasi, motivasi, dan rasa tanggung jawab sosial terhadap perlindungan perempuan dan anak (Sodikin, 2017). Pemimpin yang

kuat dan visioner dapat mengarahkan relawan untuk bekerja sama secara efektif, meskipun tanpa struktur organisasi yang ketat, sehingga JPPA dapat menjadi platform kolaboratif dalam mengatasi isu-isu kekerasan dan pemberdayaan sosial.

2.2.3. Teori Kolaborasi Lintas Sektor

Emerson (2012) mendefinisikan pemerintahan kolaboratif sebagai suatu struktur dan proses dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintahan maupun sektor non-pemerintah, di berbagai tingkat pemerintahan, serta sektor swasta. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk mencapai sasaran bersama yang tidak dapat dicapai hanya melalui lembaga pemerintah. Keberhasilan kolaborasi dalam mencapai tujuan dapat dievaluasi melalui beberapa aspek yang mencakup partisipasi setiap pemangku kepentingan, seperti keterlibatan, motivasi bersama, dan kapasitas untuk bekerjasama.

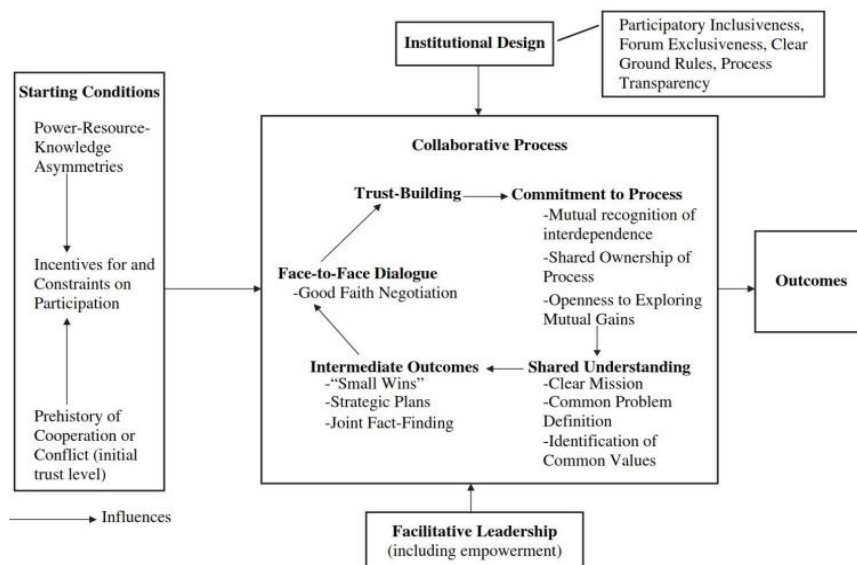
Skema 2. 2
Model Collaborative Governance (Emerson, 2012)



Ansell & Gash (2008) dalam jurnalnya *Collaborative Governance in Theory and Practice* menyatakan bahwa *Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung Pemangku kepentingan “non-state” di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset (Ansell dan Gash, 2008).

Kemudian Ansell & Gash (2008) merumuskan model collaborative governance berdasarkan kajian literatur. Hasil kesimpulan kajian tersebut digambarkan dalam 4 (empat) variabel utama (lihat gambar 3.4), yakni: terdiri dari: (1) kondisi awal; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan; dan (4) proses kolaboratif

Skema 2. 3
Model Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008)



Pemerintahan kolaboratif menurut Emerson dan Nabatchi (2015) terdiri dari tiga dimensi utama: sistem konteks, dinamika kolaborasi, dan faktor pendorong, yang mencakup lingkungan kebijakan, struktur sosial, serta kepemimpinan yang proaktif. Dalam membangun kolaborasi, kepercayaan menjadi faktor kunci, meskipun sering kali menghadapi tantangan seperti prasangka dan persaingan antar kolaborator (Bryson et al., 2006; Ansell & Gash, 2008). Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan keterlibatan aktif semua pihak dan komitmen bersama dalam menciptakan hubungan yang saling menguntungkan (Thomson & Perry, 2006). Teori Collaborative Governance Regime (CGR) dari Emerson et al. (2012) dipilih karena memberikan pemahaman dinamis tentang proses kolaborasi yang beradaptasi dengan berbagai tantangan. Dalam konteks Jaringan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (JPPA), kepemimpinan kolaboratif sangat diperlukan untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, seperti DP3A dan perangkat kelurahan, guna mengoptimalkan sumber daya serta meningkatkan efektivitas perlindungan perempuan dan anak.

2.2.4. Konsep Pencegahan KDRT Serta Perlindungan Perempuan dan Anak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) membawa akibat negatif yang berkemungkinan mempengaruhi perkembangan korban pada masa mendatang. Dengan demikian, perhatian utama harus diarahkan pada pengembangan berbagai strategi untuk mencegah terjadinya penganiayaan dan meminimalkan efeknya yang merugikan. Ada beberapa solusi untuk mencegah tindak KDRT dan

Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A), yaitu sebagai berikut :

- 1) Membangun kesadaran bahwa persoalan tindak KDRT dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) adalah persoalan sosial, bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
- 2) Sosialisasi pada masyarakat tentang tindak KDRT dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) adalah Tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum. Dengan cara mengubah pondasi KDRT di tingkat masyarakat pertama-tama dan terutama membutuhkan.
- 3) Mengampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur, dan patut menerima penghargaan.
- 4) Peranan media massa, media cetak, televisi, bioskop, radio, dan internet adalah makrosistem yang sangat berpengaruh untuk mencegah dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A). Peran media massa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) dengan cara memberikan suatu berita yang menegaskan bahwa pola budaya KDRT dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) adalah tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara, sekecil apapun bentuk dari penganiayaan.
- 5) Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta

kemungkinan menempatkan dalam shelter (tempat penampungan) sehingga para korban lebih terpantau dan terlindungi serta konselor dapat dengan cepat membantu pemulihan secara psikis.

Menurut hemat peneliti, untuk menurunkan kasus-kasus tindak KDRT dan P3A , terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keluarga dan juga masyarakat, yakni sebagai berikut :

- 1) Adanya pendidikan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemberdayaan perempuan.
- 2) Penyebaran informasi dan mempromosikan prinsip hidup bersih dan sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menolak kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah.
- 3) Menjaga komunikasi secara intensif, agar dapat saling pengertian dan memahami satu sama lain diantara anggota keluarga.
- 4) Dapat mengontrol diri agar saat pelaku melakukan tindak kekerasan, pelaku tidak semakin terpancing untuk bertindak.
- 5) Apabila menerima tindak kekerasan dari pelaku segera mencari bantuan kepada orang lain atau lembaga pelayanan sosial.
- 6) Pelaku dan korban tindak kekerasan dapat lebih memperbaiki kualitas hubungan yang dimiliki melalui lembaga profesional atau melakukan secara mandiri dengan cara memberdayakan diri untuk membaca atau berdiskusi mengenai strategi efektif dalam menghadapi konflik dengan cara lebih menghargai pendapat terutama pendapat yang berbeda dari anggota keluarga.

- 7) Melakukan kegiatan bersama keluarga untuk membuat hubungan menjadi lebih erat, seperti kegiatan menonton televisi atau film bersama di rumah, berolahraga bersama, dan lain sebagainya.
- 8) Apabila terjadi masalah atau konflik, maka dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan dapat menggunakan win-win solution, sehingga tidak ada yang merasa di rugikan dalam proses penyelesaian masalah.
- 9) Membuat penyuluhan untuk mencegah kekerasan dan mempromosikan kesetaraan gender kepada masyarakat.
- 10) Melakukan promosi sikap empati dan sikap untuk tidak menyalahkan korban melalui media.

Upaya pencegahan dan penyelesaian masalah dalam keluarga pun dapat dilakukan dengan melakukan konseling keluarga, guna meminimalisir terjadinya tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A). Menurut Sofyan S. Willis, 2000 (dalam Jaja Suteja dan Muzaki, 2019) menjelaskan bahwa konseling keluarga dapat dilakukan untuk memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga yang penyelenggaraannya yakni dengan melibatkan anggota keluarga dan memandang keluarga secara keseluruhan, yang dalam arti yaitu permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan lebih efektif untuk diatasi dengan melibatkan anggota keluarga yang lainnya, dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah untuk menemukan jalan yang terbaik dari permasalahan yang terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut,

dapat dianalisis bahwa dengan melakukan kegiatan konseling keluarga dengan proses musyawarah maka akan mampu menemukan kesepakatan bersama antara suami dan istri atau anak dan keluarganya didalam menyelesaikan permasalahan keluarga, dan dengan musyawarah inilah akan mampu menemukan solusi dalam keluarga dan mampu mengurangi pertikaian dan tindak kekerasan dalam keluarga.

2.2.5. Efektivitas Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di Kota Semarang

Efektivitas Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di Kota Semarang telah melalui proses evaluasi yang menunjukkan adanya kemajuan, namun juga tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. JPPA telah terbentuk di 46 kelurahan dengan tujuan utama untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun begitu, tingginya angka kekerasan di Kota Semarang menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Hambatan utama dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan korban kekerasan terletak pada kurangnya sosialisasi yang efektif dan keterbatasan sumber daya, yang mempengaruhi upaya untuk menjangkau lebih banyak korban dan mencegah terjadinya kekerasan di tingkat akar rumput.

Selain itu, Pemkot Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dalam keluarga sebagai langkah preventif untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Namun,

upaya ini belum memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka kekerasan. Indikator Kota Layak Anak mengharuskan adanya tindakan preventif yang lebih kuat, yang saat ini masih belum cukup efektif. Misalnya, di Kelurahan Sadeng, kader JPPA telah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, namun peran mereka lebih sering terbatas pada penanganan kasus setelah kekerasan terjadi, tanpa adanya langkah preventif yang konsisten.

Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dengan berbagai pihak, seperti Pemerintah Kota, UPTD PPA Kota Semarang, PPTK, dan JPPA, menunjukkan adanya upaya yang baik dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. JPPA berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan DP3A, yang penting untuk mendeteksi kasus kekerasan dan memberikan respons cepat. Meski begitu, penelitian merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas DP3A, terutama melalui pembaharuan standar operasional prosedur dan penguatan koordinasi antar anggota. Langkah ini diperlukan agar sistem lebih responsif dan efisien dalam menangani kasus kekerasan, serta lebih mampu melakukan pencegahan.

Evaluasi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2020 mengindikasikan pentingnya keterlibatan lebih banyak pihak untuk memastikan bahwa program ini berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

Evaluasi ini memberikan landasan bagi peningkatan efektivitas program di masa depan, dengan fokus pada identifikasi area yang memerlukan perbaikan, seperti penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta perluasan program preventif dan rehabilitatif.

Secara keseluruhan, meskipun JPPA di Kota Semarang telah menunjukkan upaya yang positif dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, masih ada tantangan yang harus diatasi. Sosialisasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, dan minimnya langkah-langkah preventif menjadi masalah utama yang perlu diperbaiki. Dengan memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kapasitas kader JPPA, dan memperluas upaya preventif, diharapkan JPPA dapat lebih efektif dalam melindungi perempuan dan anak serta mengurangi angka kekerasan di Kota Semarang.

2.2.6. Kebijakan Publik

2.2.6.1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik dalam bahasa Inggris sering didengar dengan istilah *public policy*. Definisi kebijakan publik (*public policy*) begitu beragam. Beragamnya definisi kebijakan publik dari beberapa pakar, namun pada intinya tetap saja sama yaitu apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Untuk mempermudah memahami dan memaknai kebijakan publik, maka penulis mengolaborasi dari pendapat beberapa pakar. Kebijakan publik (*public policy*) oleh Thomas R

Dye yang dikutip dari Subarsono (2019:2) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lebih lanjut Subarsono (2019:2) mendefinisikan kebijakan menurut Thomas R Dye tersebut bahwa (1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan swasta dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh George C Edwards III dan Sharkansky yang dikutip dari Widodo (2017:12) yang mengatakan bahwa Kebijakan publik merupakan apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dari pengertian kebijakan ini merupakan upaya untuk memahami serta mengartikan bahwa kebijakan merupakan (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau apa yang mempengaruhinya, (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Definisi kebijakan lain datang dari Frederick dikutip dari Islamy (2017:17) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Anderson yang dikutip dari Widodo (2017:13) mengartikan kebijakan publik sebagai

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah-masalah tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik, antara lain mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan berisi tindakan pemerintah bukan organisasi swasta
- b. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah
- c. Kebijakan publik selalu berdasarkan pada peraturan tertentu yang bersifat memaksa
- d. Kebijakan selalu berorientasi pada tujuan tertentu

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana yang telah disebutkan, maka kebijakan publik dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang berkembang di tengah masyarakat. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik (Widodo, 2017:15).

Melihat berbagai definisi mengenai kebijakan publik yang telah diuraikan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh

pemerintah untuk memecahkan suatu permasalahan. Tindakan yang dilakukan biasanya berbentuk program-program yang dibuat oleh pelaku kebijakan. Dalam kebijakan tersebut terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

2.2.6.2. Proses Kebijakan Publik

2.2.6.2.1. Formulasi Kebijakan Publik

Perumusan masalah merupakan langkah awal dalam pembuatan suatu kebijakan publik. Menurut William N. Dunn suatu perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (*agenda setting*) (Dunn, 2003: 26). Hal tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat dikarenakan adanya masalah publik yang terjadi, sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dunn pun menjelaskan bahwa:

“Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru” (Dunn, 1993: 26).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari pembuatan kebijakan publik adalah perumusan kebijakan publik dengan menyusun setiap permasalahan publik yang terjadi seperti suatu agenda. Contohnya Rancangan Undang-Undang. Merumuskan masalah publik yang benar dan tepat dapat didasarkan atau melihat dari karakteristik

masalah publik, yaitu:

1. Saling ketergantungan (*interdependence*) antara berbagai masalah.
 2. Subyektivitas dari masalah kebijakan.
 3. *Artificiality* masalah.
 4. Dinamika masalah kebijakan
- (Subarsono, 2005: 24 dan 25).

Merumuskan masalah dapat dikatakan tidaklah mudah karena sifat dari masalah publik bersifat kompleks. Oleh sebab itu lebih baik dalam merumuskan masalah mengetahui lebih dulu karakteristik permasalahannya. Pertama, suatu masalah tidak dapat berdiri sendiri oleh sebab itu, selalu ada keterkaitan antara masalah yang satu dengan yang lain. Sehingga dari hal tersebut mengharuskan dalam analisis kebijakan untuk menggunakan pendekatan holistik dalam memecahkan masalah dan dapat mengetahui akar dari permasalahan tersebut.

Kedua, masalah kebijakan haruslah bersifat subyektif, dimana masalah tersebut merupakan hasil dari pemikiran dalam lingkungan tertentu. Ketiga, yaitu suatu fenomena yang dianggap sebagai masalah karena adanya keinginan manusia untuk mengubah situasi. Keempat, suatu masalah kebijakan solusinya dapat berubah-ubah. Maksudnya adalah kebijakan yang sama untuk masalah yang sama belum tentu solusinya sama, karena mungkin dari waktunya yang berbeda atau lingkungannya yang berbeda.

2.2.6.2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Hersel Nogi

S. Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul *Kebijakan Publik yang Membumi* bahwa:

”Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi” (Dalam Tangkilisan, 2003:9).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan. Dunn mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan (*policy implemtation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132).

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Pendapat Riant Nugroho D. dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Ia mengemukakan bahwa:

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program

atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut” (Nugroho, 2004:158).

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Menurut Darwin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik (Widodo, 2001:194).

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-

faktor tersebut adalah:

1. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program.
2. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program
(Dalam Subarsono, 2005:101).

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.6.2.3. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan

produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Dalam Leo, 2006:186). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Sudarwan Danim mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah:

“Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.

2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai” (Danim, 2000:14).

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Menurut Muchsin, evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya (Muchsin dan Fadillah, 2002:110). Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

2.2.6.3. Faktor- Faktor Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mengkaji lebih baik suatu Implementasi Kebijakan Publik maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu model kebijakan. Terdapat banyak model yang dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya gunakan adalah model Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2018).

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan

mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. (Edward dalam Agustino 2018).

Variabel pertama adalah Komunikasi. Menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus diransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan didalam masyarakat.

Terdapat tiga Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

- a. Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapatingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksanaan dilapangan.

Variabel atau faktor kedua adalah Sumber daya. Edward III dalam Agustino (2018) Mengemukakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi tetapi diperlukan pulak kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Dan kedua mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

- c. Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik (Edward III dalam Agustino (2018) adalah Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan suatu kebijakan publik.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel/faktor disposisi, menurut Edward III adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil ada yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi.
- b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasikan insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagikan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. (Edward III dalam Agustino 2018).

2.2.7. Peraturan Perundang-undangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang- Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Larangan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. Penelantaran rumah tangga.

Selain Undang-undang No.23 Tahun 2004, di dalam Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) diatur disebutkan bahwa “barang siapa

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

**2.2.7.1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak**

Pasal 1

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 3) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 4) Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 5) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
- 6) Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

- 7) Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- 8) Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- 9) Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- 10) Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

2.2.7.2. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 1

- 1) Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,

lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

- 2) Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- 3) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
- 4) Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
- 5) Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar

dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

- 6) Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- 7) Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan PPT adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak yang menjadikorban tindak kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
- 8) Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri perempuan dan anak dari tindak kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- 9) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

10) Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

11) Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

2.2.7.3. Peraturan Walikota Semarang No. 5 tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang

Pasal 1

- 1) Korban tindak kekerasan adalah Perempuan dan anak yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya.
- 2) Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
- 3) Advokasi adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik didalam dan diluar pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus yang dialami.
- 4) Lembaga penyelenggara perlindungan Perempuan dan anak yang selanjutnya disebut dengan LPPPA adalah Lembaga pelayanan yang terintegrasi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari

tindakan kekerasan yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang meliputi: Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan (PPTK), dan pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat kelurahan (JPPA), dan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM)

- 5) PPT adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemda untuk memberikan pelayanan pelayanan dan rehabilitasi kepada Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan, dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis, dan rumah aman melalui rujukan
- 6) PPTK adalah pelayanan untuk Perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi pengaduan dan advokasi, layanan medis, rehabilitasi social, dan reintegrasi social dengan memadukan layanan antar lintas disiplin dan institusi di tingkat kecamatan.
- 7) Pos JPPA adalah pelayanan untuk Perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi pengaduan, Pendidikan, dan pelayanan pemantauan dengan memberdayakan potensi yang ada di lingkungan wilayah kelurahan.
- 8) Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan
- 9) RDRM adalah layanan yang diberikan oleh pemda dalam Upaya pencegahan tindak kekerasan, perlindungan anak, yang berhadapan

dengan hukum khususnya perundangan dan pemberdayaan anak di bidang kesehatan mental dan psikososial.

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2022), kerangka kerja adalah contoh konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya, program JPPA ini berlandaskan pada berbagai regulasi yang telah ditetapkan, termasuk UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Peraturan Walikota Semarang No. 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Melalui kerangka hukum ini, JPPA berusaha untuk memberikan perlindungan yang efektif dan komprehensif bagi korban KDRT di Kota Semarang.

Teori implementasi kebijakan Edward III memberikan landasan teoretis untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan JPPA. Teori ini menyoroti empat faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks JPPA, efektivitas komunikasi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat, ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, serta struktur

birokrasi yang mendukung menjadi faktor krusial dalam menekan angka KDRT di Kota Semarang.

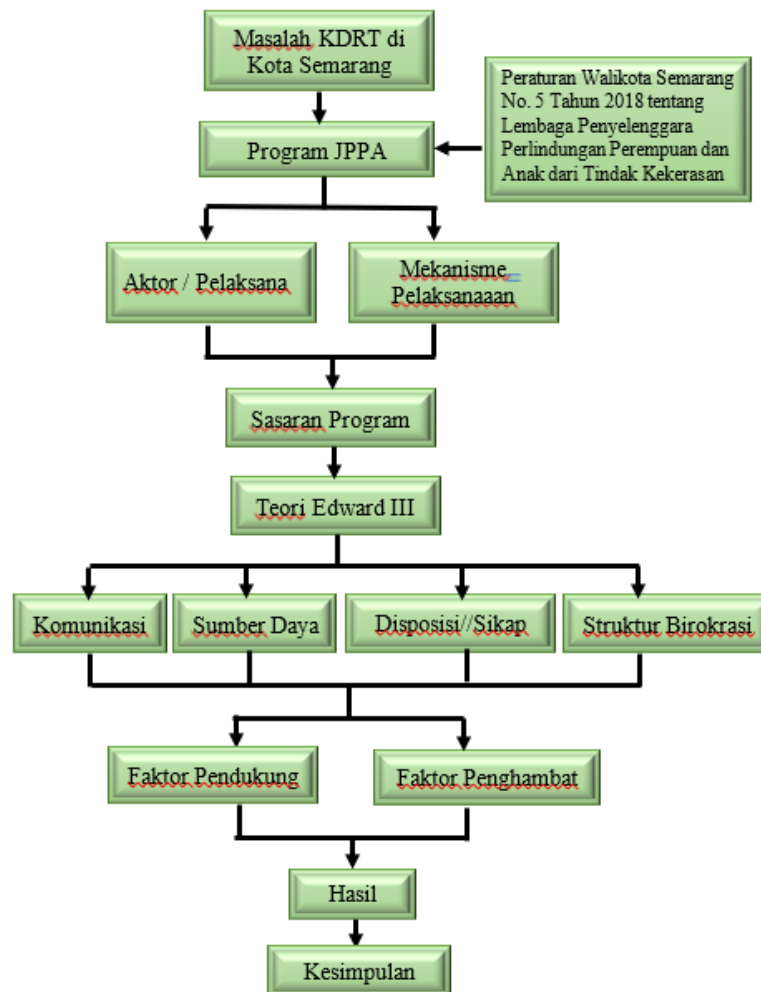
UU No. 35 Tahun 2014 memperkuat perlindungan hukum bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi dalam rumah tangga. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 lebih spesifik mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat lokal, menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi spesifik di Semarang. Selain itu, Peraturan Walikota Semarang No. 5 Tahun 2018 menetapkan pembentukan lembaga khusus yang bertugas untuk menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan bagi korban. Kerangka regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi JPPA untuk menjalankan tugasnya.

Dalam pelaksanaannya, JPPA berfokus pada pencegahan, penanganan, dan pemulihan bagi korban KDRT. Mengacu pada teori Edward III, komunikasi yang efektif antara lembaga penyelenggara dengan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak perempuan dan anak. Sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk dana, tenaga ahli, maupun fasilitas, juga diperlukan untuk mendukung operasional program. Disposisi atau komitmen dari para pelaksana program menentukan seberapa serius kebijakan ini dijalankan, sementara struktur birokrasi yang jelas dan efisien memastikan bahwa semua prosedur dapat dilakukan dengan tepat dan cepat.

Meskipun JPPA telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, tantangan masih dihadapi dalam menurunkan angka KDRT di Semarang. Peningkatan

kasus KDRT pada hingga bulai Mei 2024 menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam implementasi kebijakan ini. Evaluasi terhadap faktor-faktor seperti komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana yang mungkin tidak konsisten, dan hambatan birokrasi perlu dilakukan. Dengan memperhatikan teori Edward III, evaluasi ini dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memperkuat implementasi JPPA untuk mencapai tujuan utamanya dalam memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak di Kota Semarang.

Bagan 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokus Penelitian

Lokus penelitian “Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam Menekan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Perbandingan Kasus KDRT di Kelurahan Kemijen dan Tegalsari

Aspek Perbandingan	Kelurahan Kemijen	Kelurahan Tegalsari
Jumlah Kasus KDRT	19 kasus (tertinggi di Kota Semarang)	0 kasus
Alasan Pemilihan	Tingginya angka KDRT, membutuhkan dukungan intensif dalam implementasi JPPA	Tidak ada laporan kasus KDRT, digunakan sebagai pembanding
Tujuan Penelitian	Menganalisis bagaimana JPPA bekerja dalam mengurangi angka KDRT serta tantangan yang dihadapi	Mengidentifikasi faktor-faktor pencegah KDRT yang mungkin tidak ada di wilayah dengan kasus tinggi
Signifikansi	Memberikan wawasan terkait efektivitas JPPA dalam menangani KDRT di daerah dengan kasus tinggi	Memberikan pemahaman tentang faktor pencegahan KDRT yang dapat menjadi referensi bagi wilayah lain
Implikasi Hasil	Dapat digunakan untuk meningkatkan strategi JPPA dalam menangani kasus KDRT di daerah rawan	Dapat menjadi model atau acuan dalam upaya pencegahan KDRT di wilayah lain

Kelurahan Kemijen dan Kelurahan Tegalsari. Pemilihan Kelurahan Kemijen sebagai salah satu lokasi penelitian didasari oleh tingginya kasus KDRT yang dilaporkan di wilayah ini, yaitu sebanyak 19 kasus, menjadikannya kelurahan dengan angka KDRT tertinggi di Kota Semarang. Hal ini

menunjukkan bahwa Kemijen merupakan area yang sangat membutuhkan dukungan intensif dalam implementasi program JPPA. Melalui penelitian di kelurahan ini, diharapkan dapat dianalisis bagaimana JPPA bekerja untuk mengurangi angka kekerasan serta mengetahui tantangan yang dihadapi oleh JPPA dalam menangani kasus yang tinggi.

Sebaliknya, Kelurahan Tegalsari dipilih karena tidak ada laporan kasus KDRT (0 kasus) dalam kurun waktu yang sama, sehingga penelitian di wilayah ini berfungsi sebagai pembanding. Kondisi nol kasus di Tegalsari dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor pencegah KDRT yang mungkin tidak ada di wilayah dengan kasus tinggi seperti Kemijen. Dengan memahami perbedaan antara kedua kelurahan ini, penelitian dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang efektivitas JPPA dalam mencegah dan menangani KDRT.

3.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang didasarkan pada filsafat post positivisme, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama, untuk menyelidiki kondisi alami pada objek penelitian (Sugiyono, 2022). Peneliti memilih pendekatan ini karena ingin mendeskripsikan dan memperoleh gambaran terperinci tentang Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Semarang, dengan melakukan wawancara langsung dengan petugas yang bertanggung jawab.

Proses penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan dan prosedur tertentu untuk mengumpulkan data yang spesifik dari informan yang kemudian dianalisis secara induktif untuk menafsirkan makna data yang sudah didapat (Sugiyono, 2022) Oleh karena itu, penelitian deskriptif ini ditujukan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah ditetapkan peneliti sehingga tidak memerlukan hipotesis tertentu untuk diuji, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan (Arikunto, 2019)

Penelitian kualitatif mengedepankan pengungkapan realitas yang kompleks, melibatkan interaksi sosial, dan memberikan interpretasi yang dilakukan oleh individu. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial, terutama dari perspektif mereka yang terlibat secara langsung. Istilah "informan" dipakai untuk merujuk pada individu yang menjadi subjek dalam berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan sumber informasi lainnya. Teknik-teknik seperti observasi partisipan, observasi langsung, wawancara mendalam, analisis dokumen, dan metode tambahan digunakan untuk mendalami pandangan serta pengalaman para partisipan. Meskipun bersifat deskriptif, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenai fenomena sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2022)

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik- topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis

besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Fokus Penelitian ini adalah tentang Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Semarang beserta dengan Faktor Pendukung dan Penghambatnya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah landasan dari seluruh pengetahuan. Seorang peneliti hanya dapat melakukan pekerjaan mereka berdasarkan informasi konkret tentang realitas dunia yang didapatkan melalui pengamatan (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung fenomena yang sedang diteliti di lapangan secara terstruktur. Artinya, peneliti melakukan kunjungan langsung ke objek penelitian untuk menganalisis pelaksanaan implementasi program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) dalam menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Semarang beserta faktor-faktor yang mendukung atau menghambatnya..

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2022), Wawancara merupakan interaksi di antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui dialog tanya jawab, dimana tujuannya adalah untuk memberikan makna terkait topik tertentu. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi-struktur dengan informan yang relevan yang terdiri dari 8 orang yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian mengenai Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Semarang beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti, dilaksanakan di ruang kerja masing-masing informan, dengan durasi berkisar 60 menit.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis atau visual yang merekam peristiwa masa lalu, bisa berupa teks, gambar, atau karya lain dari orang lain. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan dokumen sebagai sumber informasi tentang peristiwa masa lalu. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai pelengkap atau tambahan bagi metode lain seperti pengamatan, observasi, dan wawancara dalam rangka melakukan penelitian. (Sugiyono, 2022).

3.5. Model Konseptual

Dalam penelitian ini model konseptual dapat dilihat sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan adalah proses administratif yang melibatkan berbagai pihak, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dengan tujuan mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan.

2. Kebijakan publik merupakan segala hal yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan, mengacu pada tindakan-tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah.
3. JPPA adalah pelayanan untuk Perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi pengaduan, Pendidikan, dan pelayanan pemantauan dengan memberdayakan potensi yang ada di lingkungan wilayah kelurahan

3.6. Penentuan Informan

Penelitian ini hanya melibatkan informan sebagai sumber data karena menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), cara untuk mendapatkan informan dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan *key person* karena peneliti sudah memiliki informasi awal tentang objek penelitian dan membutuhkan orang kunci untuk memulai proses wawancara atau observasi. Informan adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terkait dengan masalah yang diteliti, yang memungkinkan penulis untuk mengumpulkan informasi penting terkait fokus penelitian. Berdasarkan definisi informan di atas maka penulis menetapkan bahwa yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Dr. Noegroho Edy Rijanto selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang
2. Ata Nuridha, SH. Selaku Kepala Sub Koordinator JPPA
3. Catur Karyanti, SE. Selaku Kepala UPTD PPA Kota Semarang
4. Fauzan selaku Ketua Forum JPPA Kota Semarang
5. Iis Amalia, S.Psi., M.Psi. Selaku Psikolog UPTD PPA Kota Semarang
6. Mugi Marjoko, SH. Selaku Lurah Tegalsari kecamatan Candisari

7. Bambang Sumbodo, SH. Selaku lurah Kemijen Kecamatan Semarang Timur
8. Korban KDRT

3.7. Teknis Analisis Data

Menurut Sugiyono (2022), Analisis data adalah proses struktural yang melibatkan pengumpulan dan pengaturan data dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya, agar dapat dengan mudah dimengerti dan hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan model analisis data Huberman dan Miles yang dikenal sebagai model interaktif, yang terdiri dari tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Miles & Huberman, 2018 : 19).

1. Tahap reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang berasal dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Dengan kata lain, data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan peninjauan dokumen dikumpulkan, dipilah, dan dikelompokkan. Tujuan dari proses reduksi data ini adalah untuk memperjelas, mengarahkan, dan menghilangkan bagian data yang tidak relevan atau tidak diperlukan (Miles & Huberman, 2018 : 15).

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyaringan dan pemilihan informasi yang relevan dari data yang telah dikumpulkan. Data yang tidak diperlukan atau yang tidak sesuai dengan fokus penelitian akan dihapus, sementara informasi yang penting akan diorganisasi dan dikategorikan. Jika data dikumpulkan dari wawancara dengan anggota JPPA, peneliti akan

mengekstrak informasi yang berhubungan dengan tantangan dan keberhasilan program dalam menekan KDRT, serta menandai tema-tema utama yang muncul. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas data dan memfokuskan analisis pada hal-hal yang paling signifikan.

2. Tahap Penyajian Data

Menurut Miles & Huberman (2018:18), penyajian data adalah kumpulan informasi yang terstruktur yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dengan menganalisis penyajian data ini, para peneliti akan lebih mudah memahami situasi saat ini dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil (Miles & Huberman, 2018: 21).

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Penyajian dapat dilakukan melalui narasi deskriptif. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mungkin akan menyajikan temuan dalam bentuk tabel yang menunjukkan hubungan antara faktor pendukung dan penghambat implementasi JPPA, serta statistik atau kutipan dari wawancara untuk mendukung temuan tersebut. Penyajian data yang jelas membantu peneliti dan pembaca dalam memahami konteks dan nuansa dari informasi yang dikumpulkan.

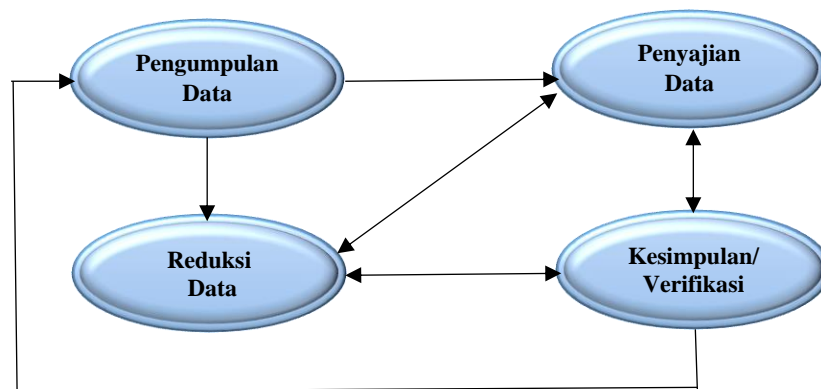
3. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dapat dijelaskan sebagai proses menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Penafsiran ini tentu saja bergantung pada pemahaman dan analisis yang dilakukan oleh peneliti. Penarikan kesimpulan ini bisa dilakukan selama proses pengumpulan data,

reduksi data, dan penyajian data. Namun, kesimpulan ini belum final karena perlu diverifikasi dengan hasil temuan di lapangan Tengah (Miles & Huberman, 2018: 22).

Pada tahap akhir, peneliti melakukan analisis mendalam untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan melibatkan pengujian hipotesis atau asumsi yang dihasilkan selama penelitian dan memastikan bahwa hasil yang dicapai dapat diandalkan. Dalam penelitian JPPA ini, peneliti akan mempertimbangkan bagaimana hasil dari berbagai sumber data saling mendukung atau bertentangan, dan melakukan verifikasi dengan mengonfrontasi hasil temuan dengan teori atau literatur yang ada. Jika diperlukan, peneliti juga dapat melakukan diskusi dengan informan untuk memastikan keakuratan interpretasi.

Skema 3. 1
Proses Analisis Data



Sumber : Miles & Huberman (2018: 22)

Dengan mengintegrasikan proses analisis data secara menyeluruh, penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan tentang implementasi program JPPA, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang lebih baik untuk peningkatan strategi dalam

menekan KDRT di Kota Semarang. Pendekatan triangulasi data dan model analisis Miles dan Huberman memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah valid dan didukung oleh bukti yang kuat dari berbagai perspektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang

DP3A Kota Semarang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah Kota Semarang bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2016. Sebelumnya lembaga yang berwenang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan dan KB). Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa DP3A dipimpin oleh seorang Plt. Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. DP3A berlokasi di Jalan Prof. Soedarto SH No.116, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269.

4.1.2. Tugas DP3A Kota Semarang

DP3A Kota Semarang merupakan salah satu dinas dikota Semarang yang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, yang ditugaskan Kepada Daerah

4.1.3. Fungsi DP3A

Kota Semarang Adapun fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 5 menyebutkan bahwa fungsi dari DP3A adalah:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota
- c. Pengkoordinasian tugas tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya.
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- h. Penyelenggaraan program dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Karena DP3A kota Semarang merupakan Salah satu jembatan dalam melindungi anak dari tindak kekerasan yaitu sebuah kebijakan yang terlahir dari

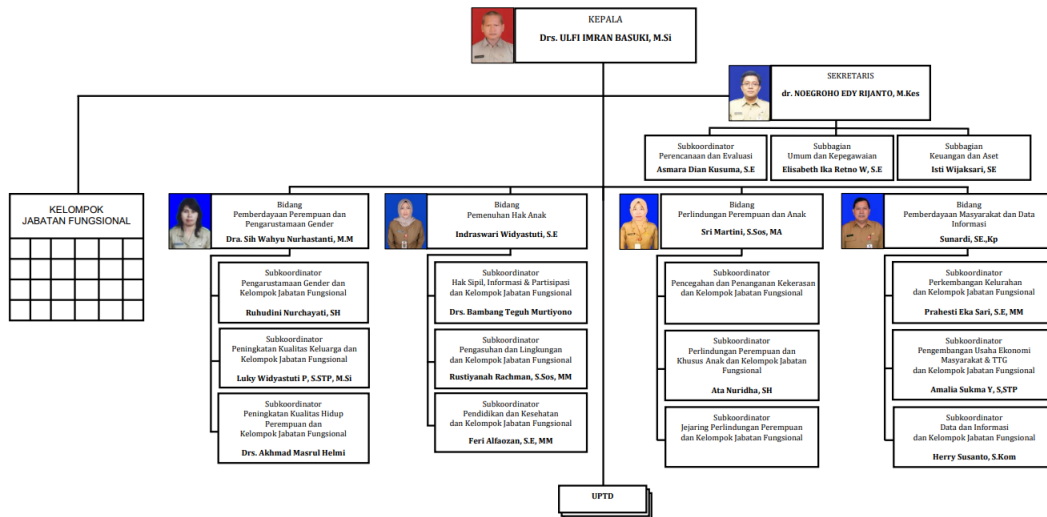
Peraturan Daerah No. 5 Bab IV Pasal 11 14 Tahun 2016 menjelaskan tentang kelembagaan yang mendukung terselenggaranya perlindungan. Banyak yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, antara lain kerjasama perlindungan dan pengawasan. Pelaksanaan perlindungan diatur dalam Peraturan Daerah Bab 5 dan 7 Pasal 15 19 Tahun 2016. DP3A Kota Semarang sebagai instansi pemerintah yang berperan penting dalam isu kekerasan terhadap anak.

4.1.4. Struktur Organisasi DP3A Kota Semarang

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Peraturan ini menetapkan bahwa DP3A memiliki kedudukan sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan susunan organisasi yang mencakup kepala dinas, sekretariat, bidang-bidang teknis, serta kelompok jabatan fungsional. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif, seperti penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan tata kerja yang telah ditetapkan untuk mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan di Kota Semarang.

Bagan 4.1 Struktur Organisasi DP3A Kota Semarang

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG



4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Deskripsi Umum Informan

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki peran strategis dalam implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Mereka terdiri dari pemangku kebijakan, pelaksana program, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pendampingan korban, seperti aparat pemerintah, tenaga pendamping sosial, dan mitra dari lembaga terkait. Dengan wawasan dan pengalaman mereka, informasi yang diberikan akan memberikan gambaran mendalam mengenai tujuan, proses implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program JPPA di lapangan. Hasil-hasil wawancara dengan informan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, Dr. Noegroho Edy Rijanto, selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang:

Saya bertanggung jawab atas implementasi Program JPPA yang fokus pada pencegahan dan penanganan KDRT terhadap perempuan dan anak. Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum, pendampingan psikososial, serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi. Kami bekerja sama dengan berbagai instansi, seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial, dalam menangani kasus yang diawali dari pengaduan masyarakat hingga pendampingan korban. Tantangan utama yang dihadapi adalah stigma sosial yang menghambat pelaporan, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antarinstansi yang masih perlu dioptimalkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2, Ata Nuridha, SH., selaku Kepala Sub Koordinator JPPA:

Saya bertanggung jawab dalam menangani kasus KDRT secara sistematis dan kolaboratif dengan tujuan menekan angka KDRT melalui layanan perlindungan yang mudah diakses serta meningkatkan edukasi masyarakat. Kasus dilaporkan melalui kantor layanan, kemudian tim reaksi cepat bekerja sama dengan pihak berwenang dan tenaga medis untuk memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban. Kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan SDM, minimnya dana, stigma sosial yang menghambat pelaporan, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3, Catur Karyanti, SE., selaku Kepala UPTD PPA Kota Semarang:

Saya telah lama berkecimpung dalam bidang perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan data informasi. Program JPPA bertujuan memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban KDRT dengan akses cepat terhadap perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan pemulihan psikologis. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, seperti aparat keamanan dan lembaga sosial, dengan mekanisme rujukan bagi korban. Tantangan terbesar adalah koordinasi antarinstansi yang masih perlu diperbaiki serta keterbatasan SDM dan anggaran dalam menjalankan program secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4, Fauzan, selaku Ketua Forum JPPA Kota Semarang:

Saya awalnya aktif dalam pengembangan kampung tematik dan wisata berbasis sejarah, hingga akhirnya terlibat dalam advokasi kasus KDRT dan dipercaya memimpin Forum JPPA Kota Semarang. Program ini bertujuan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan serta menjadi jembatan antara korban dan pihak terkait, seperti dinas sosial dan kepolisian. Kami memiliki sistem pelaporan berbasis komunitas yang memungkinkan korban melapor ke tingkat kelurahan atau kecamatan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan asesmen dan pendampingan. Tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai urusan pribadi, serta keterbatasan tenaga pendamping dan fasilitas yang mendukung program ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5, Iis Amalia, S.Psi., M.Psi., selaku Psikolog UPTD PPA Kota Semarang:

Saya bertugas dalam layanan psikologis bagi korban KDRT dan mendukung kelancaran Program JPPA di Kota Semarang. Tujuan utama program ini adalah memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban melalui pendampingan psikologis, pencegahan kekerasan, serta bantuan hukum. Kami bekerja sama dengan kepolisian, dinas sosial, dan berbagai lembaga lainnya, di mana setelah menerima laporan, kami melakukan asesmen untuk menentukan jenis perlindungan atau terapi yang diperlukan korban. Kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus serta koordinasi antar lembaga yang seringkali terhambat oleh perbedaan prosedur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6, Mugi Marjoko, SH., selaku Lurah Tegalsari Kecamatan Candisari:

Saya terlibat dalam Program JPPA untuk membantu menanggulangi kasus KDRT serta memberikan perlindungan hukum dan dukungan psikologis kepada masyarakat. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak korban KDRT dengan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Implementasi program dilakukan melalui koordinasi antara kelurahan, kepolisian, dinas sosial, dan lembaga mitra dalam menyediakan layanan pendampingan. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban serta koordinasi antarinstansi yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7, Bambang Sumbodo, SH., selaku Lurah Kemijen Kecamatan Semarang Timur:

Saya telah lama berkecimpung dalam pelayanan masyarakat dan terlibat dalam Program JPPA sejak awal diluncurkan untuk menangani KDRT. Program ini bertujuan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak serta memberdayakan masyarakat dalam menangani KDRT. Implementasi dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat serta kerja sama dengan kepolisian, puskesmas, dan LSM untuk membentuk tim penanganan KDRT. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus serta perbedaan prosedur antarinstansi yang sering memperlambat koordinasi dalam menangani kasus KDRT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT berinisial SN seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang tinggal di Semarang menyatakan bahwa:

Saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama beberapa tahun sebelum akhirnya memberanikan diri mencari bantuan. Saya pertama kali mengetahui tentang Program JPPA dari seorang teman yang juga pernah mengakses layanan ini. Setelah mengetahui tentang program ini, saya mencoba mencari informasi lebih lanjut melalui media sosial. Kemudian, saya menghubungi salah satu petugas JPPA dan JPPA tidak memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum. Namun, petugas JPPA mengarahkan korban untuk diantarkan untuk melakukan konsultasi dengan psikolog yang ada di UPTD PPA dan dibantu untuk mendapatkan pendampingan hukum oleh petugas yang ada di UPTD PPA

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di Kota Semarang berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menerima aduan, mengarahkan korban ke UPTD PPA untuk pendampingan psikologis serta perlindungan hukum, dan mengedukasi masyarakat tentang dampak KDRT. Implementasi program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk DP3A, kepolisian, lembaga sosial, dan komunitas, guna memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang optimal. Selain itu, mekanisme

penanganan kasus dilakukan melalui pendampingan tenaga psikolog, aparat hukum, dan tenaga medis, sementara upaya pencegahan difokuskan pada sosialisasi dan edukasi. Keberadaan forum JPPA di tingkat kelurahan dan kecamatan juga mempermudah koordinasi dan penjangkauan korban di tingkat akar rumput.

Namun, program ini masih menghadapi tantangan seperti stigma sosial yang membuat korban enggan melapor, perbedaan prosedur antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya pendamping dan fasilitas layanan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya, termasuk pelatihan JPPA pada November 2023 yang melibatkan ketua Forum JPPA kecamatan serta pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Keberlanjutan program ini bergantung pada komitmen pemerintah daerah dan sinergi antar lembaga, dengan kebutuhan alokasi anggaran yang memadai serta edukasi masyarakat yang berkelanjutan. Dengan koordinasi yang lebih baik dan strategi yang lebih efektif, JPPA dapat terus berkembang sebagai model perlindungan perempuan dan anak yang berkelanjutan di Kota Semarang.

4.2.2. Deskripsi Implementasi Program JPPA Dalam Menekan KDRT Di Kota Semarang

Deskripsi ini menguraikan implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam menekan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang berdasarkan teori Edward III, yang menyoroti aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis ini didasarkan pada hasil wawancara dengan berbagai pemangku

kepentingan, termasuk pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), petugas UPTD PPA, Forum JPPA, psikolog, serta aparat pemerintahan di tingkat kelurahan. Melalui wawancara ini, diperoleh gambaran mengenai bagaimana program ini dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam melindungi perempuan dan anak dari KDRT.

4.2.2.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam Program JPPA. Pada dimensi komunikasi, terdapat tiga indikator utama yang menentukan efektivitas penyampaian informasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi merujuk pada sejauh mana informasi dapat disampaikan secara menyeluruh kepada pihak terkait, kejelasan berkaitan dengan pemahaman yang tepat terhadap isi kebijakan, sementara konsistensi memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak berubah atau menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana. Ketiga indikator ini berperan dalam memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan dengan baik, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal.

1) Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa:

Informasi mengenai Program JPPA disampaikan melalui berbagai saluran, seperti pertemuan rutin, media sosial, dan kampanye publik. Pelatihan juga diberikan kepada anggota JPPA, kader, serta Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah setempat untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam menangani kasus KDRT. Kendala utama dalam komunikasi adalah penyampaian informasi yang tidak selalu jelas sehingga

perlu koordinasi dengan kader kelurahan. Tantangan lainnya adalah perbedaan pemahaman antar pemangku kepentingan, yang diatasi dengan evaluasi berkala. Solusi yang diusulkan adalah pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi komunikasi antar instansi, serta penjadwalan koordinasi yang lebih terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa:

Sosialisasi dilakukan melalui media sosial dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Kendala utama adalah akses komunikasi terbatas yang diatasi dengan melibatkan kepala desa atau perangkat lokal. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi kebijakan antara pusat dan daerah, sehingga diperlukan pertemuan rutin untuk menyamakan pemahaman. Secara keseluruhan, komunikasi cukup efektif, meskipun beberapa pihak masih memerlukan penjelasan lebih teknis. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, disarankan adanya pelatihan bagi petugas lapangan serta pemanfaatan teknologi berbasis mobile.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa:

Informasi disampaikan melalui rapat koordinasi rutin, surat resmi, dan media sosial, serta pertemuan langsung dengan masyarakat. Kendala utama adalah keterbatasan sarana komunikasi di beberapa daerah, yang diatasi dengan penggunaan WhatsApp Group. Tantangan lainnya adalah perbedaan pemahaman dan prioritas antar instansi, yang kadang menghambat kerja sama. Meskipun komunikasi cukup efektif, masih diperlukan peningkatan agar pesan lebih jelas dan dipahami oleh semua pihak. Solusi yang diusulkan adalah sistem komunikasi yang lebih terstruktur melalui platform digital untuk akses informasi secara real-time.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 menyatakan bahwa:

Komunikasi dilakukan melalui sosialisasi langsung, leaflet, dan media sosial, serta kerja sama dengan RT/RW dan organisasi lokal. Kendala utama adalah sulitnya menjangkau kelompok masyarakat yang kurang aktif, yang diatasi dengan melibatkan tokoh lokal. Koordinasi sering terhambat oleh kesibukan instansi, sehingga dibuat grup komunikasi aktif dan pertemuan rutin. Komunikasi cukup efektif, meskipun beberapa pihak masih membutuhkan pendekatan lebih lanjut. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu pemanfaatan teknologi seperti aplikasi komunitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 menyatakan bahwa:

Informasi disampaikan melalui pertemuan antar instansi, media sosial, kampanye publik, serta sosialisasi di sekolah dan komunitas. Kendala utama adalah keterbatasan akses informasi, yang diatasi dengan kerja sama

bersama puskesmas dan RT/RW. Tantangan lainnya adalah memastikan setiap pihak memahami perannya untuk menghindari kebingungan dalam penanganan kasus, yang diselesaikan dengan panduan jelas dan rapat koordinasi berkala. Komunikasi cukup efektif, namun perlu peningkatan keselarasan antar lembaga yang memiliki prioritas berbeda. Disarankan pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi digital untuk pelacakan kasus dan peningkatan koordinasi antar instansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan bahwa:

Informasi disampaikan melalui pertemuan langsung, distribusi brosur, media sosial, dan website kelurahan, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat. Kendala utama adalah keterbatasan akses informasi di beberapa wilayah, yang diatasi dengan penggunaan WhatsApp Group dan media sosial. Tantangan lainnya adalah memastikan semua pihak tetap aktif dan menghindari miskomunikasi akibat perbedaan cara kerja. Meskipun komunikasi cukup efektif, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan pemahaman yang seragam. Solusi yang diusulkan adalah penguatan teknologi komunikasi, seperti aplikasi berbasis web untuk berbagi data lebih cepat, serta pelatihan intensif terkait komunikasi yang lebih jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7 menyatakan bahwa:

Informasi disampaikan melalui pertemuan rutin, sosialisasi langsung, dan media sosial, serta pelatihan dan workshop untuk perangkat kelurahan. Kendala utama adalah minimnya akses informasi di daerah dengan teknologi terbatas, yang diatasi dengan metode door-to-door dan pertemuan tatap muka. Tantangan lainnya adalah menyamakan pemahaman antar pihak, mengingat perbedaan prosedur antara lembaga pemerintah dan LSM. Komunikasi cukup efektif, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam memastikan keselarasan pemahaman. Disarankan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi melalui platform komunikasi digital agar penyebaran informasi lebih cepat dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT berinisial SN, seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang tinggal di Semarang, menyatakan bahwa:

Saya mengetahui Program JPPA dari media sosial dan teman. Setelah menghubungi ketua JPPA kelurahan di tempat saya tinggal, saya mendapat penjelasan lebih lanjut melalui telepon dan pertemuan tatap muka. Meskipun informasi di media sosial cukup membantu, ia merasa perlu adanya pembaruan dan penjelasan yang lebih rinci agar prosedur akses layanan lebih jelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, Komunikasi dalam Program JPPA dilakukan melalui berbagai saluran, seperti pertemuan rutin, media sosial, surat edaran, dan kampanye publik. Selain itu, pelatihan bagi anggota JPPA, kader JPPA, Bhabinsa, dan Bhabinkamtibmas menjadi strategi utama dalam penyebaran informasi. Kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya menjangkau daerah terpencil, sehingga kerja sama dengan kader kelurahan, perangkat desa, dan relawan lokal menjadi solusi untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik. Tantangan lainnya adalah perbedaan pemahaman dan prioritas antar instansi, seperti kepolisian, lembaga sosial, dan pemerintah daerah, yang sering kali menyebabkan kurangnya sinkronisasi dalam implementasi program. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan koordinasi rutin serta penyusunan panduan yang jelas agar semua pihak memiliki pemahaman yang seragam.

Selain hambatan geografis dan perbedaan persepsi antar instansi, keterbatasan sarana komunikasi, terutama di daerah dengan akses teknologi yang minim, juga menjadi tantangan. Berbagai alternatif digunakan untuk mengatasi hal ini, seperti WhatsApp Group, platform komunikasi online, serta pertemuan tatap muka dan metode door-to-door. Meskipun komunikasi dalam program ini sudah cukup efektif, masih diperlukan perbaikan agar informasi dapat diterima lebih cepat dan merata. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya serta menghindari miskomunikasi. Ke depan, pemanfaatan teknologi yang lebih maksimal, seperti aplikasi berbasis komunitas dan sistem komunikasi digital

yang terstruktur, serta pelatihan komunikasi bagi petugas lapangan, diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas komunikasi dalam Program JPPA guna mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

Transmisi komunikasi dalam Program JPPA di Kelurahan Tegalsari dan Kemijen menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam efektivitas penyebaran informasi. Di Kemijen, komunikasi berjalan lebih baik karena masyarakat aktif mengikuti pertemuan rutin, memanfaatkan media sosial, serta terlibat dalam kampanye publik, sehingga informasi mengenai prosedur pelaporan KDRT lebih mudah diterima dan dipahami. Hal ini terbukti dari tingginya jumlah laporan KDRT yang tercatat, menunjukkan bahwa warga memiliki keberanian dan kesadaran untuk melapor. Sebaliknya, di Tegalsari, meskipun program JPPA telah berjalan, tantangan dalam penyebaran informasi lebih terasa, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terpapar media komunikasi atau enggan melaporkan kasus KDRT.

2) Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa:

Komunikasi dalam program JPPA dilakukan dengan memberikan panduan tertulis dan melibatkan pihak terkait dalam diskusi untuk memastikan tidak ada miskomunikasi. Walaupun instruksi umumnya sudah jelas, beberapa bagian memerlukan penyesuaian lebih lanjut, terutama bagi pihak yang baru terlibat. Jika terjadi miskomunikasi, klarifikasi dilakukan melalui pertemuan langsung atau komunikasi tertulis, dan sistem komunikasi dapat diperbaiki dengan pelatihan lebih rutin dan materi yang lebih mudah dipahami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa:

Informasi dalam program ini umumnya sudah jelas, meskipun istilah teknis terkadang sulit dipahami oleh petugas di tingkat bawah. Untuk kasus khusus seperti anak di bawah umur, penjelasan tambahan diperlukan.

Klarifikasi dilakukan melalui briefing tambahan atau diskusi grup. Kejelasan sangat penting agar program tidak terhambat, dan untuk itu, pembuatan SOP yang lebih sederhana dan infografis atau video bisa memperbaiki komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa:

Pesan yang disampaikan biasanya jelas, meskipun kadang harus diulang untuk memastikan pemahaman. Beberapa instruksi memerlukan penegasan lebih lanjut, terutama terkait prosedur teknis. Jika terjadi miskomunikasi, klarifikasi segera dilakukan. Kejelasan informasi sangat penting untuk kelancaran program, dan langkah yang bisa diambil adalah dengan membuat dokumentasi yang lebih rinci serta mengadakan pelatihan rutin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 menyatakan bahwa:

Pesan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Meskipun umumnya sudah jelas, terkadang ada kebingungan terkait prosedur tertentu. Jika terjadi miskomunikasi, segera dilakukan klarifikasi. Kejelasan informasi mendukung efektivitas program, dan untuk meningkatkan hal ini, perlu memperbanyak pelatihan serta menyediakan panduan praktis seperti video tutorial yang lebih mudah dipahami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 menyatakan bahwa:

Informasi dalam program ini dijaga kejelasannya dengan mengirimkan materi tertulis dan memberikan penjelasan langsung dalam pertemuan. Namun, masih ada kebingungan di lapangan yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Sebagian besar instruksi sudah jelas, tetapi terdapat kesulitan dalam implementasi pada situasi tertentu. Klarifikasi dilakukan dengan pertemuan dan diskusi, serta mengupdate materi dan prosedur untuk memudahkan pemahaman. Kejelasan informasi sangat penting agar program berjalan efektif, dan melibatkan lebih banyak pihak serta menggunakan alat bantu visual dan teknologi dapat membantu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan bahwa:

Pesan disampaikan dengan jelas melalui dokumen resmi dan pertemuan rutin. Secara umum, informasi sudah jelas, meskipun beberapa pihak yang baru terlibat dalam program membutuhkan penjelasan tambahan. Jika terjadi miskomunikasi, dilakukan pertemuan untuk klarifikasi. Kejelasan informasi sangat penting untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan semua pihak memahami peran mereka. Untuk meningkatkan komunikasi, perlu memperbaiki saluran komunikasi yang lebih terstruktur, seperti laporan yang lebih rinci dan meningkatkan frekuensi pertemuan langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7 menyatakan bahwa:

Para petugas sudah berusaha menyampaikan pesan dengan jelas dan tanpa bertele-tele, meskipun beberapa informasi teknis sulit dipahami oleh pihak yang tidak terbiasa. Instruksi sudah cukup jelas, tetapi kesulitan di lapangan terjadi terutama di tingkat bawah dalam implementasinya. Klarifikasi dilakukan langsung dengan mengundang pihak terkait untuk mencari solusi. Kejelasan sangat penting agar program tidak terhambat, dan mereka berupaya untuk menjaga agar informasi yang disampaikan tetap jelas. Untuk memperbaikinya, pelatihan yang lebih kuat dan penggunaan media visual atau contoh konkret dalam sosialisasi sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT berinisial SN, seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang tinggal di Semarang, menyatakan bahwa:

Awalnya ia merasa bingung dengan prosedur, tetapi petugas JPPA memberikan penjelasan rinci dan contoh kasus serupa yang membantunya memahami proses. Dalam pengurusan dokumen hukum, ia khawatir ada persyaratan yang kurang, namun petugas dengan sabar membimbingnya hingga semua dokumen lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara, Komunikasi dalam Program JPPA di Kota Semarang dijaga melalui panduan tertulis, pertemuan rutin, dan klarifikasi langsung untuk memastikan pemahaman yang jelas bagi semua pihak. Meskipun sebagian besar instruksi sudah jelas, beberapa bagian teknis masih memerlukan penyesuaian, terutama bagi pihak yang baru terlibat atau menghadapi kasus khusus. Untuk mengatasi kendala ini, disarankan pembuatan SOP yang lebih sederhana, infografis, video tutorial, dan materi pendukung lainnya agar informasi lebih mudah dipahami oleh petugas di lapangan.

Peningkatan komunikasi juga dilakukan melalui saluran yang lebih terstruktur, laporan yang lebih rinci, serta frekuensi pertemuan yang lebih tinggi. Klarifikasi segera dan feedback dari pihak terkait sangat penting untuk

memperbaiki komunikasi serta memastikan efektivitas program. Selain itu, penggunaan alat bantu visual dan pelatihan rutin akan membantu memperjelas instruksi dan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan program. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan komunikasi dalam JPPA semakin efektif dan mendukung keberhasilan perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang.

Kejelasan komunikasi dalam Program JPPA di Kelurahan Tegalsari dan Kemijen menunjukkan perbedaan yang memengaruhi tingkat pelaporan KDRT. Di Kemijen, kejelasan informasi lebih terjaga karena adanya panduan tertulis yang dipahami dengan baik, serta komunikasi yang aktif melalui pertemuan rutin dan media sosial. Petugas dan warga mendapatkan informasi yang lebih terstruktur mengenai prosedur pelaporan, sehingga masyarakat lebih sadar dan berani melaporkan kasus KDRT, yang tercermin dalam jumlah laporan yang lebih tinggi. Sebaliknya, di Tegalsari, meskipun program JPPA telah berjalan, kurangnya kejelasan dalam penyampaian informasi menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan, kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak korban, atau masih adanya keraguan terhadap perlindungan yang diberikan setelah melapor.

3) Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa:

Pihaknya menjaga konsistensi informasi melalui rapat koordinasi berkala dan selalu memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas. Ketidakkonsistenan bisa menghambat keberhasilan program, sehingga mereka sangat menjaga agar

semua pesan tetap selaras dan diinformasikan dengan tepat. Untuk memperbaiki mekanisme ini, mereka melibatkan semua pihak dalam setiap proses keputusan agar pesan yang disampaikan tetap konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa:

Konsistensi informasi cukup terjaga, meskipun terkadang perubahan kebijakan baru dapat menyebabkan kebingungannya di lapangan. Mereka segera mensosialisasikan kebijakan yang baru dan membuat revisi panduan untuk menghindari kebingungannya. Konsistensi komunikasi sangat mempengaruhi efisiensi kerja dan kepercayaan korban terhadap layanan, sehingga mereka membentuk tim khusus untuk manajemen komunikasi yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa:

Meskipun informasi yang diterima umumnya konsisten, perubahan kebijakan atau situasi yang berkembang kadang mempengaruhi pelaksanaan program. Ketidakkonsistenan pesan dapat berdampak pada kebingungan di lapangan dan ketidaktepatan dalam pelaksanaan program, oleh karena itu mereka selalu melakukan monitoring dan memastikan bahwa instruksi tetap sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 menyatakan bahwa:

Petugas sudah berusaha menjaga konsistensi dengan memberikan informasi yang sama ke semua pihak, meskipun perbedaan pemahaman bisa terjadi, terutama dalam pembaruan kebijakan. Ketidakkonsistenan dapat menghambat proses penanganan kasus, oleh karena itu mereka rutin melakukan pembaruan informasi secara tertulis dan memperkuat jalur komunikasi dengan tim di lapangan agar tidak ada kesenjangan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 menyatakan bahwa:

Walaupun konsistensi informasi cukup baik, ada perubahan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi kasus tertentu. Perubahan ini disampaikan dengan jelas ke seluruh tim, karena ketidakkonsistenan pesan bisa menyebabkan kebingungannya, menghambat penanganan kasus, dan membuat langkah yang diambil tidak sesuai kebijakan program. Untuk menjaga konsistensi, mereka menggunakan rapat koordinasi dan alat komunikasi yang terorganisir serta menyediakan dokumen standar sebagai pedoman bagi tim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan bahwa:

Konsistensi informasi yang dipertahankan oleh petugas meskipun terkadang ada perubahan yang perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ketidakkonsistenan pesan dapat menyebabkan kebingungannya dan memperlambat penanganan kasus KDRT, yang dapat menghambat keberhasilan program. Oleh karena itu, mereka memastikan bahwa setiap informasi disampaikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dan mengadakan rapat berkala untuk menghindari ketidaksesuaian informasi, agar semua pihak bekerja dengan tujuan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7 menyatakan bahwa:

Meskipun informasi yang diterima cukup konsisten, ada beberapa penyesuaian dalam prosedur operasional yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Perubahan ini selalu diinformasikan dengan jelas kepada seluruh tim, karena ketidakkonsistenan pesan dapat menyebabkan kebingungannya dan memperlambat penanganan kasus. Konsistensi komunikasi sangat berpengaruh pada keberhasilan program dalam menekan KDRT, sehingga mereka selalu memperbarui informasi dan mengkomunikasikannya secara teratur melalui platform komunikasi yang efisien dan rapat koordinasi rutin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT berinisial SN, seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang tinggal di Semarang, menyatakan bahwa:

Informasi yang diterimanya cukup seragam dan membantu, tetapi ada perbedaan kecil dalam prosedur hukum yang sempat membingungkannya. Ketidakkonsistenan informasi mengenai dokumen yang harus disiapkan membuatnya ragu dan khawatir akan menghambat proses hukum. Meskipun harus memastikan ulang dengan petugas, yang memakan waktu lebih lama, ia tetap mendapat bantuan dalam menyelesaikan proses tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, Para pihak yang terlibat dalam program perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang menjaga konsistensi komunikasi melalui rapat koordinasi berkala dan penyampaian informasi yang terstruktur. Mereka menyadari bahwa ketidakkonsistenan dalam komunikasi dapat menghambat efektivitas program, sehingga setiap perubahan kebijakan atau prosedur segera disosialisasikan agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Untuk mengatasi perubahan regulasi yang kerap terjadi, mereka

membentuk tim khusus dalam manajemen komunikasi guna memastikan bahwa semua pihak memahami informasi dengan jelas dan seragam.

Selain itu, pengawasan dan monitoring rutin dilakukan untuk memastikan bahwa semua instruksi tetap sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Penggunaan platform komunikasi yang efisien serta dokumentasi tertulis juga menjadi strategi utama dalam menjaga kesinambungan informasi dan menghindari kesenjangan koordinasi. Dengan pendekatan ini, efektivitas program dapat ditingkatkan, kepercayaan korban terhadap layanan semakin kuat, dan semua pihak dapat bergerak dengan tujuan yang sama dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Konsistensi komunikasi dalam Program JPPA di Kelurahan Tegalsari dan Kemijen menunjukkan perbedaan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Di Kemijen, koordinasi yang lebih rutin dan penyampaian informasi yang terstruktur membuat program berjalan lebih konsisten. Rapat koordinasi berkala antara JPPA, kader masyarakat, serta aparat seperti Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa memastikan bahwa setiap kebijakan baru segera disosialisasikan, sehingga tidak ada kebingungan dalam prosedur pelaporan maupun penanganan kasus. Konsistensi ini berkontribusi pada tingginya jumlah laporan KDRT karena masyarakat merasa lebih yakin bahwa mekanisme yang ada dapat berjalan dengan baik dan dapat dipercaya. Sebaliknya, di Tegalsari, meskipun program JPPA sudah ada, tingkat koordinasi yang lebih rendah dan kurangnya monitoring rutin menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara merata. Tidak adanya laporan KDRT bisa jadi bukan karena kasusnya tidak ada, tetapi

karena warga masih bingung dengan prosedur pelaporan atau merasa tidak ada kepastian dalam tindak lanjut kasus mereka.

4.2.2.2. Sumber Daya

Dimensi sumber daya merupakan aspek krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam Program JPPA. Dalam dimensi ini, terdapat empat indikator utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan program, yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Sumber daya manusia mencakup jumlah dan kompetensi petugas dalam menjalankan program, sementara sumber daya anggaran berkaitan dengan ketersediaan dana untuk mendukung operasional. Sumber daya peralatan mencakup sarana dan teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan, sedangkan sumber daya kewenangan merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga atau individu dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan. Keempat indikator ini harus tersedia secara memadai agar program dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

1) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa:

SDM sangat penting dalam penanganan korban KDRT dan edukasi masyarakat. Meskipun sebagian besar sudah terlatih, masih perlu pelatihan tambahan, terutama dalam hal penanganan pertama yang harus dilakukan saat ada aduan masuk dan aturan hukum. Kendala seperti rotasi pegawai yang cepat dan beban kerja yang tinggi memengaruhi efektivitas, namun pembagian tugas yang lebih jelas dan pelatihan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa:

SDM sangat penting untuk kesuksesan program. Secara jumlah, personel sudah cukup, tetapi kompetensinya perlu diperkuat, terutama dalam penanganan KDRT. Beberapa personel baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pendekatan yang lebih holistik. Pelatihan terstruktur, pengalaman lapangan, dan workshop antar tim akan meningkatkan kualitas SDM untuk mempercepat penanganan kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa:

SDM sangat penting dalam program ini, terutama untuk menangani korban KDRT dengan efektif. Jumlah personel masih kurang dibandingkan dengan jumlah kasus yang ada, dan pelatihan lanjutan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi. Dengan memberikan pelatihan rutin dan insentif, serta bekerja sama dengan lembaga lain, diharapkan efektivitas program bisa meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 menyatakan bahwa:

SDM sangat penting untuk keberhasilan program. Meskipun jumlah personel terbatas, sebagian besar sudah kompeten, namun pelatihan lanjutan masih diperlukan. Kendala seperti kurangnya tenaga dengan latar belakang psikologi atau hukum, serta keterbatasan dana untuk insentif menjadi tantangan. Pelatihan berkala dalam bidang hukum, psikologi, dan komunikasi akan meningkatkan kapasitas tim, memperkuat koordinasi dengan lembaga pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 menyatakan bahwa:

SDM sangat penting untuk keberhasilan Program JPPA. Meskipun jumlah personel sudah cukup, kompetensi dalam penanganan kasus KDRT yang kompleks masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkala. Kendala yang dihadapi termasuk kurangnya tenaga ahli di bidang medis dan hukum, serta tingginya beban kerja yang mempengaruhi kualitas kerja. Pelatihan intensif dan fleksibilitas waktu kerja akan membantu meningkatkan efektivitas tim dalam menangani kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan bahwa:

SDM sangat vital untuk keberhasilan Program JPPA. Jumlah personel sudah cukup, namun kompetensinya perlu ditingkatkan, terutama dalam penanganan kasus KDRT. Pelatihan khusus untuk penanganan KDRT dan keberadaan tenaga ahli untuk masalah psikologis korban masih menjadi kendala utama. Walaupun efektivitas program cukup baik, pelatihan lebih intensif dan perekrutan lebih banyak tenaga ahli seperti psikolog dan konselor sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7 menyatakan bahwa:

SDM sangat penting untuk keberhasilan program ini, terutama dalam menangani KDRT. Meskipun jumlah personel cukup, masih ada kekurangan dalam hal kompetensi, khususnya dalam menangani kasus yang lebih kompleks. Kendala utama adalah kurangnya pelatihan khusus bagi petugas di lapangan dan keterbatasan waktu untuk melibatkan mereka dalam kegiatan pelatihan mendalam. Untuk meningkatkan efektivitas, pelatihan berkala dan sistem mentoring di lapangan sangat diperlukan agar petugas lebih siap dan terampil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT berinisial SN, seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang tinggal di Semarang, menyatakan bahwa:

Fasilitas yang disediakan cukup memadai dan memberikan rasa aman. Ruang untuk pendampingan dirasakan nyaman, terutama karena adanya petugas yang selalu siap membantu.

Berdasarkan hasil wawancara, Sumber daya manusia (SDM) memegang peran krusial dalam penanganan korban KDRT dan edukasi masyarakat, sehingga pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan, terutama dalam aspek penanganan awal dan aturan hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah rotasi pegawai yang cepat, tingginya beban kerja, serta perlunya peningkatan kompetensi personel dalam menangani kasus yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini, pembagian tugas yang lebih jelas, pelatihan terstruktur, serta pengalaman lapangan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas tim dalam menjalankan program.

Meskipun jumlah personel sudah mencukupi, peningkatan kapasitas melalui pelatihan rutin, sistem mentoring, dan perekrutan tenaga ahli di bidang medis serta psikologis menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas penanganan kasus KDRT. Kolaborasi dengan lembaga lain serta pemberian

insentif juga dapat membantu menjaga motivasi dan meningkatkan kinerja tim. Dengan pendekatan ini, diharapkan program dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban KDRT.

Sumber daya manusia (SDM) dalam Program JPPA di Kelurahan Tegalsari dan Kemijen memiliki perbedaan dalam kompetensi dan efektivitas dalam menangani kasus KDRT, yang berdampak pada jumlah laporan yang masuk. Di Kemijen, SDM yang terlibat dalam program, seperti kader JPPA, aparat kelurahan, dan petugas kepolisian, telah mendapatkan pelatihan yang lebih terstruktur, sehingga mereka lebih siap dalam menangani laporan dan memberikan pendampingan kepada korban. Kesiapan ini membuat masyarakat merasa lebih percaya diri untuk melapor, sehingga jumlah kasus yang terdata lebih tinggi. Sebaliknya, di Tegalsari, meskipun jumlah personel mencukupi, masih terdapat kendala dalam peningkatan kapasitas, terutama dalam hal pemahaman prosedur hukum dan teknik pendampingan psikologis bagi korban. Selain itu, rotasi pegawai yang cepat dan beban kerja yang tinggi sering kali menghambat keberlanjutan program, menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada.

2) Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa:

Anggaran yang tersedia cukup terbatas anggaran untuk JPPA digabung dengan anggaran Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di kelurahan. Prioritas anggaran diberikan untuk penguatan kapasitas tim. Disarankan untuk mencari dana tambahan dari pihak swasta atau lembaga donor

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa:

Anggaran yang ada belum cukup dan banyaknya kebutuhan program yang harus diprioritaskan karena keterbatasan dana. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan hati-hati, tetapi keterbatasan dana tetap menjadi kendala yang menyebabkan pengurangan kegiatan seperti pelatihan dan sosialisasi. Perlu peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah serta alternatif dana dari CSR atau kemitraan dengan lembaga swasta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa:

Anggaran yang ada masih terbatas. Pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien, dengan prioritas pada operasional kantor dan layanan korban. Hambatan utama adalah keterbatasan anggaran dan prosedur pencairan yang lambat, yang berdampak pada tenaga kerja, fasilitas, dan cakupan layanan yang terbatas. Perlu memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga donor untuk mendapatkan tambahan dana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 menyatakan bahwa:

Anggaran terbatas dan banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan ketat, memprioritaskan biaya operasional utama. Keterbatasan anggaran menghambat kemampuan untuk menjangkau semua korban dan melaksanakan layanan yang optimal. Diversifikasi sumber pendanaan melalui kerjasama lebih luas dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran diperlukan untuk mendukung efektivitas program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 menyatakan bahwa:

Anggaran yang ada cukup, tetapi sering tidak sebanding dengan kebutuhan, terutama untuk pelatihan SDM dan fasilitas pendampingan korban. Pengelolaan anggaran dilakukan hati-hati, dengan prioritas pada bantuan psikologis dan hukum untuk korban. Keterbatasan dana menghambat kegiatan pelatihan dan peningkatan kualitas pendampingan. Diperlukan perencanaan anggaran yang fleksibel dan pencarian dana tambahan dari lembaga lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan bahwa:

Anggaran yang tersedia masih terbatas dan sering tidak mencukupi. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan hati-hati, memprioritaskan kegiatan yang berkaitan langsung dengan bantuan untuk korban. Hambatan terbesar adalah ketidakpastian anggaran tahunan dan pencairan yang lambat. Keterbatasan anggaran mempengaruhi efektivitas program, dan dibutuhkan alokasi dana yang lebih spesifik serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dana tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7 menyatakan bahwa:

Anggaran yang ada masih terbatas dan sering tidak mencukupi. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan hati-hati, dengan prioritas pada bantuan untuk korban. Hambatan terbesar adalah ketidakpastian anggaran tahunan dan pencairan yang lambat. Keterbatasan anggaran mempengaruhi efektivitas program, dan diperlukan alokasi dana yang lebih spesifik serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dana tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara, Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program penanganan KDRT, terutama dalam mendanai pelatihan lanjutan dan kampanye publik. Prioritas utama tetap diberikan pada penanganan korban dan penguatan kapasitas tim, tetapi keterbatasan dana membatasi jangkauan program, termasuk pendampingan korban dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menghambat keterlibatan tenaga ahli seperti psikolog dan konselor sehingga program belum dapat memberikan dampak optimal.

Selain jumlah dana yang terbatas, prosedur pencairan yang lambat dan ketidakpastian alokasi anggaran tahunan juga memperlambat operasional program. Untuk mengatasi hal ini, diversifikasi sumber pendanaan melalui kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga donor menjadi solusi yang diusulkan. Dengan adanya alokasi dana yang lebih terjamin serta fleksibilitas dalam perencanaan anggaran, efektivitas program dapat ditingkatkan, memungkinkan cakupan layanan yang lebih luas dan mendukung keberlanjutan dalam upaya penanganan kasus KDRT.

Sumber daya anggaran dalam Program JPPA di Kelurahan Tegalsari dan Kemijen menunjukkan perbedaan dalam efektivitas pemanfaatannya, yang berpengaruh pada capaian program di masing-masing wilayah. Di Kemijen,

meskipun anggaran yang tersedia masih terbatas, penggunaannya lebih optimal karena difokuskan pada penguatan kapasitas tim dan sosialisasi yang masif, termasuk melalui media sosial dan kampanye publik. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya kesadaran masyarakat serta keberanian mereka untuk melapor, yang terlihat dari tingginya jumlah kasus KDRT yang tercatat. Sebaliknya, di Tegalsari, keterbatasan anggaran lebih terasa dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan korban, sehingga pemahaman masyarakat tentang prosedur pelaporan masih rendah, yang dapat menjadi salah satu alasan tidak adanya laporan KDRT. Selain itu, prosedur pencairan dana yang lambat dan ketidakpastian alokasi anggaran tahunan turut menghambat kelancaran program, menyebabkan keterbatasan dalam pelatihan lanjutan bagi petugas serta kurangnya keterlibatan tenaga ahli seperti psikolog dan konselor.

3) Sumber Daya Peralatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa:

Peralatan yang ada masih belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal. Diperlukan sistem informasi yang lebih canggih untuk pemantauan kasus dan peralatan pelatihan. Kendala utama adalah keterbatasan dana untuk membeli peralatan canggih dan perangkat dokumentasi yang lebih modern, yang berpengaruh pada efisiensi pelaporan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa:

Fasilitas yang ada masih belum cukup, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan teknologi. Komputer dan alat komunikasi masih sangat terbatas, dan ketersediaan alat tidak merata. Di beberapa daerah, fasilitas dasar seperti kendaraan operasional masih kurang, yang memperlambat respons, terutama dalam kasus darurat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa:

Peralatan yang ada cukup untuk kegiatan sehari-hari, namun untuk kegiatan besar seperti kampanye atau pelatihan, masih membutuhkan fasilitas yang lebih lengkap dan profesional. Kendala utama adalah keterbatasan anggaran untuk membeli peralatan canggih dan kesulitan memperoleh peralatan yang tepat untuk pelatihan berbasis teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa

Beberapa fasilitas sudah cukup memadai, tetapi masih ada kekurangan, terutama dalam hal teknologi dan alat komunikasi. Kendala utama adalah keterbatasan jumlah dan kualitas peralatan, seperti alat komunikasi dan kendaraan operasional, yang menghambat respons cepat, misalnya jika tidak ada kendaraan operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 menyatakan bahwa

Peralatan masih terbatas, dengan kekurangan ruang konseling dan alat komunikasi yang efektif. Kendala utama adalah keterbatasan dana untuk membeli peralatan baru dan beberapa alat yang sudah usang, yang membuat beberapa layanan tidak maksimal, seperti pendataan kasus yang lebih sulit dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 menyatakan bahwa

Fasilitas yang ada cukup, tetapi masih ada kekurangan, terutama fasilitas untuk terapi psikologis dan pendampingan privat. Beberapa peralatan yang diperlukan masih kurang atau dalam kondisi kurang memadai, dan anggaran yang terbatas menghambat pembaruan atau pembelian peralatan baru, seperti ruang konseling yang lebih nyaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan bahwa

Peralatan yang ada cukup, namun masih ada kekurangan, terutama fasilitas untuk korban, seperti ruang konsultasi atau ruang perlindungan yang lebih memadai. Kendala utama adalah keterbatasan anggaran untuk membeli peralatan baru, beberapa peralatan sudah usang dan kurang optimal, yang menghambat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7 menyatakan bahwa

Peralatan yang tersedia masih terbatas, dan banyak yang perlu ditambah untuk mendukung pelaksanaan program dengan lebih baik, seperti alat untuk pendokumentasian kasus, sistem pelaporan yang lebih efisien, dan peralatan yang mendukung kegiatan sosialisasi. Keterbatasan peralatan membuat pelaksanaan program menjadi kurang maksimal, dan mereka

sangat bergantung pada alat sederhana yang terkadang tidak cukup untuk mendukung kebutuhan lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT berinisial SN, seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang tinggal di Semarang, menyatakan bahwa:

Fasilitas yang disediakan cukup memadai dan memberikan rasa aman. Ruang untuk pendampingan dirasakan nyaman.

Berdasarkan wawancara, Keterbatasan peralatan menjadi kendala dalam pelaksanaan program penanganan korban kekerasan, terutama dalam pemantauan kasus, komunikasi, dan pelatihan. Peralatan yang tersedia masih belum mencukupi, sementara keterbatasan dana menghambat pembelian perangkat yang lebih modern, seperti sistem pelaporan yang efisien dan alat dokumentasi kasus. Fasilitas yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, tetapi distribusi yang tidak merata di berbagai daerah menyebabkan beberapa lokasi mengalami kekurangan fasilitas dasar seperti kendaraan operasional dan komputer, yang memperlambat respons terhadap kasus darurat.

Selain itu, banyak peralatan yang sudah usang dan tidak memadai untuk kebutuhan lapangan, sehingga mengurangi efektivitas pelatihan serta layanan bagi korban. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya penambahan dan perbaikan fasilitas, baik melalui peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah maupun kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga donor. Dengan peralatan yang lebih lengkap dan modern, program dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kualitas layanan, dan menjangkau lebih banyak korban secara optimal.

Sumber daya peralatan dalam Program JPPA di Kelurahan Tegalsari dan Kemijen menunjukkan perbedaan dalam ketersediaan dan pemanfaatannya, yang berpengaruh terhadap efektivitas program. Di Kemijen, meskipun peralatan yang tersedia masih terbatas, pemanfaatannya lebih optimal berkat koordinasi yang baik antara petugas dan kader JPPA, sehingga pelaporan kasus lebih tertata dan respons terhadap korban lebih cepat. Beberapa alat komunikasi seperti komputer, ponsel, dan jaringan internet tersedia meskipun belum sepenuhnya modern, serta kendaraan operasional yang ada cukup mendukung mobilitas petugas dalam menangani kasus KDRT. Hal ini turut berkontribusi pada tingginya jumlah laporan karena masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan yang tersedia. Sebaliknya, di Tegalsari, keterbatasan peralatan lebih terasa, terutama dalam aspek dokumentasi dan komunikasi. Minimnya komputer serta jaringan komunikasi yang kurang memadai menyebabkan pelaporan kasus lebih sulit dilakukan, sementara kurangnya kendaraan operasional membuat petugas mengalami keterbatasan dalam menjangkau masyarakat secara langsung. Selain itu, banyak peralatan yang sudah usang dan tidak diperbarui, sehingga menghambat efektivitas pelatihan bagi petugas serta layanan bagi korban.

4) Sumber Daya Kewenangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa:

Kewenangan yang dimiliki saat ini sudah cukup, namun dalam beberapa situasi, perlu diperluas, terutama dalam aspek penanganan hukum dan perlindungan korban untuk mempercepat proses. Kewenangan yang ada digunakan untuk melindungi korban dan memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur. Namun, keterbatasan kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum langsung menghambat efisiensi

penanganan kasus, dan kolaborasi antar lembaga perlu diperkuat agar proses lebih cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa:

Kewenangan yang ada cukup, meskipun masih ada kebutuhan untuk tambahan kewenangan, seperti untuk mendesak pelaku menjalani rehabilitasi. Meskipun koordinasi dengan pihak kepolisian berjalan baik, ada kebingungan di tingkat lokal mengenai batas kewenangan, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat setempat. Perluasan kewenangan, terutama dalam pendampingan hukum dan akses ke dana darurat bagi korban, diharapkan dapat memperkuat posisi JPPA dalam menangani kasus lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa:

Kewenangan yang ada cukup, namun masih ada keterbatasan dalam melakukan intervensi langsung tanpa melibatkan pihak lain seperti kepolisian. Kendala utama adalah keterbatasan dalam melakukan intervensi ke rumah tangga yang mengalami KDRT tanpa laporan resmi dari korban. Penguatan kewenangan untuk pencegahan dan perlindungan korban sebelum terjadi eskalasi kekerasan serta lebih banyak ruang bagi JPPA untuk tindakan preventif diharapkan dapat mempercepat proses perlindungan korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 menyatakan bahwa:

Kewenangan masih terbatas dan lebih berperan sebagai fasilitator, tanpa kewenangan lebih dalam proses hukum atau pemulihan korban. Meskipun kerja sama dengan pihak berwenang dilakukan, terkendala dalam intervensi langsung. Beberapa kasus memerlukan tindakan cepat, tetapi terbatasnya kewenangan menghambat penyelesaian yang cepat. Diperlukan kebijakan yang memberi JPPA peran lebih besar dalam proses hukum dan rehabilitasi korban serta peningkatan koordinasi dengan pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 menyatakan bahwa:

Kewenangan yang ada cukup, namun ada kendala dalam aspek hukum karena JPPA bukan lembaga penegak hukum. Kendala utama adalah terbatasnya kewenangan dalam penanganan hukum, yang membuat proses harus bergantung pada lembaga lain. Diperlukan pemberian kewenangan lebih dalam penanganan hukum, perlindungan sementara bagi korban, dan peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menurunkan angka KDRT secara signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan bahwa:

Kewenangan yang ada cukup, meskipun ada batasan dalam menangani kasus yang melibatkan pihak berkuasa. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dinas Sosial berjalan baik, namun terkadang kewenangan tidak cukup untuk segera bertindak, terutama dalam kasus kekerasan fisik yang lebih berat. Penguatan kewenangan pada tim JPPA untuk respons cepat dan pengurangan birokrasi yang lama diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7 menyatakan bahwa:

Kewenangan yang diberikan sudah cukup, meskipun ada aspek yang perlu diperkuat, seperti memberikan perlindungan langsung kepada korban dan mempercepat penanganan kasus. Kewenangan yang ada sudah efektif dalam konteks penanganan kasus, tetapi untuk penurunan angka KDRT yang lebih luas, diperlukan kewenangan yang lebih besar, terutama dalam pencegahan, pelatihan masyarakat, dan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT berinisial SN, seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang tinggal di Semarang, menyatakan bahwa:

Petugas memiliki kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan demi keselamatannya, tetapi hambatan birokrasi terkadang memperlambat proses. Secara umum, korban merasa terbantu dengan responsivitas petugas dalam menindaklanjuti kasusnya, namun beberapa prosedur masih dapat dipercepat agar lebih efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Kewenangan yang dimiliki oleh JPPA dalam menangani kasus KDRT dinilai sudah cukup, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam aspek perlindungan hukum langsung dan intervensi preventif. Terbatasnya kewenangan dalam memberikan bantuan hukum dan mengambil keputusan mandiri sering kali menghambat proses penanganan, terutama ketika harus berkoordinasi dengan lembaga lain yang memiliki prosedur birokrasi panjang. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam perlindungan korban, terutama dalam situasi yang mendesak dan melibatkan

pihak berwenang setempat. Beberapa informan mengusulkan agar JPPA diberikan kewenangan lebih luas untuk mempercepat respons dalam kasus-kasus darurat dan memperkuat upaya pencegahan sebelum eskalasi kekerasan terjadi.

Selain itu, kewenangan JPPA dalam pendampingan hukum dan akses ke dana darurat bagi korban juga dianggap perlu diperluas agar bantuan dapat segera diberikan tanpa hambatan administratif. Saat ini, keterbatasan dalam pengambilan keputusan di lapangan sering kali memperlambat proses pemulihan korban. Untuk meningkatkan efektivitas program, penguatan kewenangan JPPA harus diiringi dengan regulasi yang mendukung serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Dengan kewenangan yang lebih luas, JPPA dapat lebih optimal dalam melindungi korban, mempercepat penanganan kasus, dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut.

Sumber daya kewenangan dalam Program JPPA di Kelurahan Tegalsari dan Kemijen menunjukkan perbedaan dalam efektivitas implementasinya, yang berpengaruh terhadap jumlah laporan dan kecepatan penanganan kasus KDRT. Di Kemijen, meskipun kewenangan JPPA masih terbatas dalam hal intervensi langsung, koordinasi yang lebih baik dengan aparat kepolisian dan lembaga hukum setempat memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap laporan kasus. Hal ini membuat masyarakat lebih berani melapor karena mereka melihat adanya tindak lanjut yang jelas dari pihak berwenang. Namun, keterbatasan dalam pengambilan keputusan mandiri masih menjadi kendala, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan tindakan segera sebelum terjadi eskalasi

kekerasan. Sebaliknya, di Tegalsari, meskipun JPPA memiliki kewenangan yang sama, keterbatasan dalam koordinasi dengan instansi terkait menyebabkan efektivitas penanganan kasus lebih rendah, yang dapat menjadi salah satu faktor mengapa tidak ada laporan KDRT yang tercatat. Ketidakjelasan mekanisme birokrasi dan hambatan administratif membuat masyarakat mungkin merasa ragu untuk melaporkan kasus karena prosesnya yang dianggap lambat atau tidak pasti.

4.2.2.3. Disposisi

Dimensi disposisi dalam konteks implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik aparatur yang terlibat dalam pelaksanaannya. Pada dimensi ini, terdapat empat indikator utama yang mendukung terciptanya komunikasi yang efektif, yaitu disiplin aparatur, kejujuran aparatur, budaya kerja aparatur, dan sifat demokratis. Disiplin aparatur memastikan bahwa petugas menjalankan tugasnya dengan tepat waktu dan sesuai prosedur, sementara kejujuran aparatur berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap komunikasi. Budaya kerja aparatur mencerminkan pola kerja yang mendukung kolaborasi dan efisiensi, sedangkan sifat demokratis menunjukkan sikap inklusif dan menghargai partisipasi semua pihak dalam pengambilan keputusan. Keempat indikator ini sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang terbuka, jelas, dan dapat dipercaya dalam setiap tahap implementasi kebijakan.

1) Disiplin Aparatur

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa:

Disiplin aparatur dalam menangani kasus KDRT umumnya baik, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan tekanan waktu. Kebijakan disiplin diterapkan melalui evaluasi berkala dengan pendekatan pembinaan. Namun, beban kerja yang tidak terprediksi sering kali mengganggu kedisiplinan. Disiplin sangat berkontribusi dalam memastikan layanan terhadap korban berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih terstruktur serta penghargaan bagi aparatur yang menunjukkan disiplin tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa:

Tingkat disiplin tim cukup baik karena kesadaran akan pentingnya tugas mereka, terutama dalam menangani kasus KDRT. Kebijakan disiplin meliputi absensi, laporan berkala, dan mekanisme sanksi bagi yang lalai. Namun, beban kerja tinggi sering kali membuat jadwal kerja tidak teratur. Disiplin sangat berkontribusi dalam memastikan semua proses berjalan sesuai jadwal. Untuk meningkatkan kedisiplinan, diperlukan penghargaan bagi anggota yang disiplin serta pelatihan manajemen waktu guna mengatasi beban kerja yang tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa:

Disiplin aparatur cukup baik, terutama karena pekerjaan ini membutuhkan respons cepat dan ketepatan dalam bertindak. Kebijakan disiplin diterapkan melalui absensi harian, laporan kinerja, dan evaluasi berkala. Namun, beban kerja tinggi menjadi kendala yang menyebabkan kelelahan, sehingga manajemen waktu perlu ditingkatkan. Disiplin sangat berkontribusi dalam mempercepat penanganan kasus dan memastikan layanan optimal bagi korban. Untuk itu, perlu adanya penghargaan bagi petugas yang disiplin dan pelatihan manajemen waktu yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 menyatakan bahwa:

Disiplin aparatur cukup baik, meskipun ada tantangan dalam menjaga konsistensi karena tugas lapangan yang membutuhkan fleksibilitas. Kebijakan disiplin diterapkan melalui aturan kehadiran, laporan berkala, dan evaluasi kinerja. Namun, anggota yang merupakan relawan sering mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara tugas pribadi dan JPPA. Disiplin sangat penting untuk menjaga struktur program dan meningkatkan respons terhadap kasus. Oleh karena itu, pemberian insentif dan peningkatan rasa kepemilikan terhadap program menjadi langkah yang perlu dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 menyatakan bahwa:

Disiplin tim cukup baik, namun ada tantangan dalam konsistensi karena beban kerja yang tinggi. Kebijakan internal menekankan ketepatan waktu dalam pelaporan dan pelaksanaan tugas sesuai SOP, dengan pendekatan berbasis kolaborasi. Kendala utama adalah keterbatasan personel dan banyaknya kasus yang harus ditangani. Disiplin sangat berkontribusi dalam memastikan program berjalan sesuai rencana. Untuk menjaga disiplin, penghargaan bagi anggota yang disiplin dan pembahasan rutin tentang pentingnya disiplin dalam pertemuan tim perlu dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan bahwa:

Disiplin aparatur cukup baik, namun terkadang dipengaruhi oleh kesibukan administratif dan jadwal padat. Kebijakan disiplin diterapkan melalui rapat evaluasi berkala dan pengawasan langsung. Kendala utama adalah perbedaan prioritas antara tugas utama dan tugas tambahan serta kurangnya pengawasan. Disiplin sangat berkontribusi dalam memastikan tim dapat merespons lebih cepat. Oleh karena itu, diperlukan sistem reward and punishment yang jelas serta komunikasi terbuka mengenai pentingnya disiplin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7 menyatakan bahwa:

Disiplin aparatur dalam Program JPPA cukup baik, meskipun masih perlu peningkatan di beberapa aspek, terutama dalam hal urgensi penanganan kasus KDRT. Kebijakan disiplin sudah diterapkan, tetapi beberapa anggota mengalami kesulitan karena beban kerja yang berat. Disiplin sangat penting dalam menjaga efektivitas program dan ketepatan waktu dalam menangani kasus. Untuk meningkatkan disiplin, diperlukan evaluasi rutin terhadap kinerja tim serta penghargaan bagi anggota yang menunjukkan kedisiplinan tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT berinisial SN, seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang tinggal di Semarang, menyatakan bahwa:

Sikap dan perilaku petugas JPPA selama proses pendampingan sangat baik, menunjukkan kesabaran dan empati. Hal ini membuatnya merasa dihargai, didengar, serta lebih nyaman dan percaya diri dalam menjalani proses pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara, Disiplin aparaturnya dalam Program JPPA umumnya sudah baik, dengan kesadaran tinggi terhadap tanggung jawab dalam menangani kasus KDRT. Namun, tantangan seperti beban kerja yang tinggi, koordinasi antarinstansi, dan kondisi lapangan yang sulit masih mempengaruhi efektivitas kerja. Kebijakan disiplin yang diterapkan meliputi absensi harian, laporan berkala, serta evaluasi kinerja secara rutin, dengan pendekatan pembinaan bagi anggota yang kurang disiplin. Namun, tugas yang tidak terduga dan tanggung jawab lain di luar JPPA sering kali mengganggu jadwal kerja, sehingga strategi pembagian tugas dan pengelolaan beban kerja yang lebih baik diperlukan agar disiplin tetap terjaga.

Untuk meningkatkan kedisiplinan, diperlukan sistem pengawasan yang lebih terstruktur serta pelatihan rutin terkait manajemen waktu dan tanggung jawab kerja. Pemberian penghargaan bagi anggota yang disiplin juga dapat menjadi motivasi tambahan, sementara komunikasi terbuka dalam tim membantu mengatasi kendala yang dihadapi. Evaluasi berkala dan sosialisasi tentang pentingnya disiplin harus terus diperkuat agar seluruh anggota memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam program ini. Dengan disiplin yang kuat, proses penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat dan efektif, memastikan layanan kepada korban KDRT lebih optimal.

Disiplin aparaturnya dalam Program JPPA di Kelurahan Tegalsari dan Kemijen menunjukkan perbedaan dalam tingkat kepatuhan terhadap aturan kerja dan efektivitas koordinasi dalam menangani kasus KDRT. Di Kemijen, tingkat disiplin lebih terjaga berkat sistem pelaporan yang lebih terstruktur serta

koordinasi rutin yang memastikan setiap petugas menjalankan tugasnya dengan baik. Absensi harian, laporan berkala, dan evaluasi kinerja dilakukan secara lebih ketat, sehingga respons terhadap laporan kasus KDRT lebih cepat dan efektif. Namun, tingginya jumlah kasus yang harus ditangani menambah beban kerja petugas, yang terkadang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas. Sebaliknya, di Tegalsari, disiplin aparaturnya cenderung kurang terlihat dalam konteks implementasi JPPA, kemungkinan karena minimnya laporan kasus yang masuk sehingga perhatian terhadap program ini menjadi kurang maksimal. Selain itu, tugas ganda yang diemban oleh banyak aparaturnya, baik dalam JPPA maupun instansi lain, sering kali mengurangi fokus mereka dalam menjalankan program ini secara optimal.

2) Kejujuran Aparatur

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa

Kejujuran dijaga melalui akurasi data dan transparansi dalam proses penanganan kasus. Budaya keterbukaan ditekankan agar tidak ada manipulasi data, dengan laporan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dibuat terbuka serta evaluasi rutin untuk menjamin kejujuran. Namun, tekanan kerja tinggi dapat menggoda beberapa anggota untuk menyembunyikan fakta demi percepatan penyelesaian kasus. Transparansi dan kejujuran sangat penting untuk menjaga kepercayaan tim dan masyarakat, yang berpengaruh pada efektivitas program. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang baik, pertanggungjawaban yang jelas, serta pelatihan tentang integritas dan etika kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa

Kejujuran adalah prinsip utama dalam tim, terutama terkait kerahasiaan data korban. Sistem pelaporan dibuat terbuka sehingga semua kegiatan dapat diaudit kapan saja. Namun, tekanan dari pihak luar, seperti keluarga pelaku atau pejabat setempat, dapat menguji integritas tim. Kejujuran sangat penting karena kepercayaan masyarakat bergantung pada transparansi yang diterapkan oleh tim. Untuk itu, diperlukan pelatihan etika kerja secara rutin

serta pengawasan internal yang ketat guna memastikan kejujuran tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa

Kejujuran dijaga dalam pencatatan dan pelaporan kasus dengan mekanisme audit serta supervisi yang ketat. Sistem pelaporan dibuat transparan bagi pihak terkait, dan evaluasi rutin dilakukan bersama pemangku kepentingan untuk menjaga akuntabilitas. Tantangan terbesar dalam menjaga kejujuran adalah tekanan dari pihak luar dalam beberapa kasus sensitif. Transparansi dan kejujuran penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan program berjalan efektif. Untuk itu, pengawasan internal harus diperkuat dan pelatihan etika kerja rutin perlu dilakukan guna mempertahankan nilai-nilai kejujuran dalam tim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 menyatakan bahwa

Akuntabilitas dalam laporan dan dokumentasi kasus sangat penting, dengan mengikuti kode etik yang mengutamakan kejujuran dan transparansi. Semua laporan diverifikasi dan disimpan dalam sistem yang dapat diakses oleh pihak terkait, serta terdapat ruang pengaduan untuk melaporkan ketidaksesuaian. Tantangan utama adalah tekanan dari pihak luar yang mencoba mempengaruhi keputusan serta keterbatasan pengawasan di lapangan. Transparansi dan kejujuran sangat penting agar korban merasa aman dan percaya, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap JPPA. Audit internal secara berkala, peningkatan budaya keterbukaan dalam tim, serta komunikasi yang jujur dan terbuka perlu terus diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 menyatakan bahwa

Kejujuran sangat penting dalam pengelolaan data kasus KDRT, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan yang harus dilakukan secara transparan. Transparansi diterapkan dalam setiap tahap pelaksanaan program agar dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka terhadap kritik. Tantangan terbesar adalah tekanan untuk menyelesaikan kasus dengan cepat, yang dapat memengaruhi integritas dalam pelaporan dan pengambilan keputusan. Tanpa transparansi dan kejujuran, kepercayaan antar tim dan pihak terkait bisa berkurang, yang dapat menghambat koordinasi. Oleh karena itu, pelatihan rutin tentang etika kerja dan integritas serta budaya keterbukaan dalam tim harus terus diperkuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan bahwa

Kejujuran dijaga melalui transparansi dan keakuratan informasi dalam setiap tindakan yang diambil. Audit internal dan pelaporan terbuka kepada

masyarakat dilakukan untuk memastikan transparansi dalam program. Tantangan utama dalam menjaga kejujuran adalah tekanan dari pihak luar, seperti keluarga korban atau pihak lain yang meminta perlakuan khusus dalam penanganan kasus. Kejujuran sangat penting untuk membangun kepercayaan antara tim, masyarakat, dan pihak terkait serta memastikan program berjalan efektif. Oleh karena itu, budaya kerja yang terbuka dan kepemimpinan yang memberikan contoh dalam transparansi harus terus ditekankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7 menyatakan bahwa

Kejujuran sangat penting dalam penanganan data dan kasus KDRT. Transparansi dan validitas data selalu menjadi prioritas, dengan pelatihan etika dan integritas yang rutin dilakukan agar kejujuran tetap terjaga. Semua proses dalam program dibuat terbuka bagi pihak berwenang, dengan laporan yang dapat diawasi oleh masyarakat dan pihak terkait. Tantangan utama adalah menjaga integritas tim di bawah tekanan atau godaan dalam menangani kasus sensitif. Kejujuran sangat berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program JPPA. Oleh karena itu, pengecekan berkala dan pengawasan internal yang ketat harus terus dilakukan agar petugas selalu terdorong untuk bersikap jujur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT berinisial SN, seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang tinggal di Semarang, menyatakan bahwa:

Beberapa tahapan atau prosedur tidak dijelaskan sepenuhnya di awal, tetapi setelah ditanyakan, saya mendapat penjelasan yang lebih mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara, Kejujuran dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dijaga melalui transparansi data serta sistem pelaporan terbuka. Setiap kasus dicatat secara akurat dan diverifikasi secara berkala untuk memastikan tidak ada manipulasi informasi. Laporan kegiatan dapat diakses oleh pihak terkait, dan mekanisme pengawasan diterapkan untuk menjaga akuntabilitas. Namun, tantangan muncul dari tekanan eksternal, seperti intervensi keluarga pelaku atau pejabat setempat, yang dapat mempengaruhi proses penanganan kasus. Dalam menghadapi hal ini, integritas

tim menjadi kunci, sehingga diperlukan pelatihan etika kerja secara rutin untuk memperkuat nilai-nilai transparansi dan tanggung jawab.

Selain sistem pelaporan yang terbuka, budaya kerja yang menjunjung kejujuran perlu diperkuat melalui pengawasan internal, audit berkala, serta ruang pengaduan bagi masyarakat. Tantangan lain adalah beban kerja tinggi yang dapat memicu penyederhanaan atau manipulasi data demi efisiensi, sehingga evaluasi rutin harus dilakukan untuk memastikan standar akurasi tetap terjaga. Kepemimpinan yang memberi contoh dalam menjaga transparansi juga berperan penting dalam membangun budaya kerja yang profesional. Dengan penerapan sistem pengawasan yang ketat dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, diharapkan kepercayaan publik terhadap program tetap terjaga, sehingga efektivitas perlindungan terhadap korban semakin optimal.

Kejujuran aparaturnya dalam Program JPPA di Kelurahan Tegalsari dan Kemijen menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam praktik transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus KDRT. Di Kemijen, dengan jumlah laporan KDRT yang lebih tinggi, transparansi dalam pencatatan dan pelaporan kasus menjadi lebih terjaga karena adanya mekanisme verifikasi berkala serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan aparat penegak hukum. Kejujuran aparaturnya di sini lebih terjamin karena sistem pelaporan yang lebih terbuka dan adanya pengawasan dari berbagai instansi terkait. Namun, tekanan dari keluarga pelaku atau pihak tertentu tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan komitmen kuat terhadap etika kerja. Sebaliknya, di Tegalsari, yang tidak memiliki laporan KDRT, ada kemungkinan bahwa tidak semua

kasus terdeteksi atau dilaporkan, sehingga aspek transparansi dalam pelaporan masih perlu diperiksa lebih lanjut. Minimnya kasus yang tercatat bisa jadi disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat atau kurangnya keterbukaan dalam sistem pelaporan, yang berpotensi memunculkan praktik penyederhanaan data.

3) Budaya Kerja Aparatur

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa:

Budaya kerja yang diterapkan dalam organisasi berorientasi pada kolaborasi dan kepedulian, dengan fokus utama pada kepentingan korban. Nilai yang dijunjung tinggi meliputi empati, keterbukaan, dan profesionalisme. Setiap anggota tim diharapkan untuk menjaga komunikasi yang jelas, saling menghargai, serta melakukan evaluasi diri demi meningkatkan profesionalisme kerja. Namun, perbedaan pandangan dalam penanganan kasus kompleks serta koordinasi antarinstansi menjadi tantangan yang kerap dihadapi. Budaya kerja yang baik mampu mempercepat respons terhadap kasus KDRT serta meningkatkan efektivitas tim dalam penanganannya. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kerja sama antarinstansi serta pelatihan soft skills seperti komunikasi dan resolusi konflik guna meningkatkan efektivitas kerja tim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa:

Budaya kerja dalam tim berfokus pada kolaborasi dan empati, di mana seluruh anggota didorong untuk bekerja sama dan mengutamakan kepentingan korban. Nilai utama yang diterapkan meliputi kerja sama, komitmen terhadap perlindungan korban, serta pendekatan berbasis solusi yang selalu ditekankan dalam pertemuan rutin. Meski demikian, perbedaan latar belakang anggota tim dari berbagai dinas terkadang mempengaruhi pola kerja mereka. Budaya kerja yang baik terbukti meningkatkan efisiensi dan solidaritas tim, khususnya dalam menangani kasus yang membutuhkan respons cepat. Untuk mengatasi tantangan ini, sesi pelatihan bersama dan kegiatan team building disarankan agar hubungan antaranggota semakin erat dan koordinasi semakin lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa:

Budaya kerja yang diterapkan berorientasi pada pelayanan cepat, empati terhadap korban, dan kerja sama tim yang solid. Setiap anggota tim siap sedia menangani kasus dengan tanggap dan profesional. Nilai-nilai seperti

responsivitas, keadilan, dan profesionalisme diterapkan dalam keseharian kerja, dengan kebiasaan berbagi informasi serta diskusi kasus secara rutin. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah perbedaan latar belakang dan metode kerja antaranggota tim. Namun, dengan komunikasi yang baik, harmoni dalam budaya kerja tetap dapat dipertahankan. Budaya kerja yang efektif terbukti meningkatkan kepuasan korban serta mempercepat penanganan kasus. Oleh karena itu, disarankan agar lebih banyak sesi pelatihan bersama dan kegiatan membangun tim untuk memperkuat rasa kebersamaan dan sinergi dalam tim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 menyatakan bahwa:

Budaya kerja yang diterapkan bersifat kolaboratif dan responsif. Setiap anggota tim didorong untuk bekerja sama dan berbagi informasi guna memastikan tidak ada korban yang terabaikan. Nilai-nilai utama yang dijunjung tinggi adalah empati, keterbukaan, dan kerja sama, serta adanya kebiasaan evaluasi setelah menangani kasus untuk peningkatan berkelanjutan. Meski demikian, perbedaan latar belakang dan cara kerja anggota tim kerap menjadi hambatan dalam koordinasi. Budaya kerja yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi korban serta memastikan setiap kasus mendapat perhatian yang layak. Untuk memperkuat koordinasi tim, disarankan adanya pelatihan kepemimpinan dan komunikasi serta peningkatan kegiatan tim guna mempererat hubungan kerja sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 menyatakan bahwa:

Budaya kerja yang diterapkan menekankan kerja sama tim dan empati terhadap korban. Setiap anggota tim didorong untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan mengutamakan kepentingan korban. Nilai utama yang diterapkan mencakup kolaborasi, empati, dan profesionalisme, dengan evaluasi rutin yang dilakukan untuk membahas pencapaian dan kendala dalam penanganan kasus. Keberagaman latar belakang dan keahlian anggota sering kali menjadi tantangan dalam membangun kolaborasi. Namun, hambatan ini dapat diatasi melalui komunikasi yang baik dan komitmen bersama terhadap tujuan program. Budaya kerja yang efektif sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan program dalam menangani kasus KDRT. Oleh karena itu, penguatan komunikasi dan koordinasi, serta kesempatan bagi anggota tim untuk berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain, sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan bahwa:

Budaya kerja yang diterapkan berbasis empati, kolaborasi, dan profesionalisme. Fokus utama adalah perlindungan korban serta penanganan kasus KDRT yang dilakukan secara teliti. Nilai-nilai utama

seperti saling menghargai, kerja sama tim, dan menjaga profesionalisme sangat ditekankan. Diskusi bersama dilakukan secara berkala guna memperbaiki metode penanganan kasus KDRT. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah perbedaan latar belakang dan pandangan anggota tim, serta tekanan eksternal yang terkadang mempengaruhi fokus kerja. Budaya kerja yang solid sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program karena memungkinkan penyelesaian tugas dengan lebih cepat dan keputusan yang lebih tepat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan rutin guna meningkatkan keterampilan kerja sama dan komunikasi serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7 menyatakan bahwa:

Budaya kerja yang diterapkan bersifat kooperatif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Suasana kerja yang terbuka dan saling mendukung diterapkan agar proses penanganan kasus dapat berjalan dengan baik. Nilai-nilai utama yang dijunjung tinggi meliputi empati, kejujuran, dan profesionalisme, dengan harapan setiap anggota tim menjaga etika dalam berinteraksi dengan korban serta sesama anggota tim. Tantangan utama dalam penerapan budaya kerja ini adalah perbedaan latar belakang dan pemahaman anggota tim, yang membuat beberapa anggota lebih berpengalaman dibanding yang lain. Membangun budaya kerja yang kooperatif di tengah perbedaan membutuhkan waktu dan kesabaran. Budaya kerja yang solid dan kooperatif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program, sebab semakin baik kerja sama tim, semakin efektif penanganan kasus. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pelatihan mengenai budaya kerja dan nilai-nilai bersama, serta penyediaan ruang bagi anggota untuk menyuarakan pendapatnya demi menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT berinisial SN, seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang tinggal di Semarang, menyatakan bahwa:

Saya merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Petugas memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan pendapat dan perasaan saya mengenai situasi yang saya hadapi. Saya merasa dihargai karena suara saya dianggap penting.

Berdasarkan hasil wawancara, Budaya kerja dalam implementasi program JPPA menekankan kolaborasi, empati, keterbukaan, dan profesionalisme untuk

memastikan penanganan kasus KDRT yang cepat dan responsif. Setiap anggota tim diharapkan menjaga komunikasi yang jelas, saling menghargai, serta berorientasi pada solusi dalam setiap tindakan. Pertemuan rutin dan evaluasi berkala dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja, sementara kebiasaan berbagi informasi dan pengalaman antaranggota tim menjadi strategi utama dalam menangani kasus secara lebih baik. Dengan lingkungan kerja yang berbasis empati dan kerja sama, perlindungan korban dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Namun, tantangan dalam penerapan budaya kerja ini tetap ada, terutama terkait perbedaan latar belakang anggota tim dan tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas koordinasi. Kompleksitas kasus yang berbeda-beda juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasi hal ini, komunikasi yang baik, evaluasi rutin, dan diskusi terbuka menjadi solusi utama dalam memperkuat kerja sama tim. Selain itu, pelatihan soft skills, kegiatan team building, dan penguatan keterampilan kepemimpinan sangat diperlukan agar budaya kerja yang solid dapat terus berkembang. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, program JPPA dapat berjalan lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT.

Budaya kerja aparatur dalam Program JPPA di Kelurahan Tegalsari dan Kemijen menunjukkan dinamika yang berbeda dalam penerapannya. Di Kemijen, di mana jumlah laporan KDRT lebih tinggi, budaya kerja cenderung lebih aktif dan responsif karena aparat dan kader JPPA sudah terbiasa menangani berbagai kasus. Kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti

kepolisian, tenaga medis, dan pendamping sosial, telah menjadi bagian dari rutinitas kerja, sehingga komunikasi dan koordinasi lebih terstruktur. Namun, tekanan kerja yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan dan berpotensi menurunkan kualitas pengambilan keputusan, sehingga diperlukan penguatan budaya kerja berbasis dukungan tim dan manajemen stres. Sebaliknya, di Tegalsari, dengan nol laporan KDRT, budaya kerja aparaturnya mungkin lebih longgar dalam hal penanganan kasus, karena mereka tidak menghadapi tekanan yang sama seperti di Kemijen. Namun, tantangan yang muncul adalah potensi kurangnya kesiapan dan kepedulian dalam mengidentifikasi serta menangani kasus KDRT yang mungkin tersembunyi di masyarakat. Budaya kerja di sini perlu diperkuat dengan peningkatan kesadaran, simulasi penanganan kasus, dan mendorong keterlibatan aktif dalam upaya pencegahan.

4) Sifat Demokratis

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa:

Prinsip demokratis diterapkan dengan melibatkan anggota tim dan pihak eksternal dalam diskusi sebelum keputusan dibuat. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dalam rapat koordinasi, dengan masukan dari berbagai pihak. Walaupun dalam situasi mendesak proses ini bisa memperlambat pengambilan keputusan, namun keterbukaan tetap dijaga. Hal ini sangat berpengaruh pada lingkungan kerja yang inklusif, meningkatkan motivasi tim, dan memperkuat kepercayaan internal, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dalam penanganan kasus KDRT. Disarankan untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dan mendorong diskusi terbuka dalam tim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa:

Seluruh anggota tim dilibatkan dalam menyusun strategi dan menyelesaikan masalah. Dalam rapat koordinasi, semua anggota diberi kesempatan untuk memberikan masukan sebelum keputusan final diambil. Meskipun proses demokratis bisa memakan waktu lebih lama, terutama dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat, sifat demokratis ini

menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan meningkatkan motivasi anggota tim. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu meningkatkan frekuensi rapat evaluasi dan menyediakan platform komunikasi terbuka, seperti grup diskusi online.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa:

Aspek demokratis diterapkan dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam merancang strategi program dan menangani kasus kompleks. Rapat koordinasi rutin diadakan, di mana setiap anggota tim dapat menyampaikan pendapat sebelum keputusan diambil. Tantangan terbesar adalah menyeimbangkan diskusi dengan kebutuhan untuk bertindak cepat dalam situasi darurat, yang kadang memerlukan keputusan tanpa banyak diskusi. Sifat demokratis berpengaruh besar dalam menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan kolaboratif. Disarankan untuk menyediakan lebih banyak forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak dan sistem umpan balik agar anggota merasa didengar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 menyatakan bahwa:

Petugas selalu berusaha menerapkan pendekatan demokratis dengan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam strategi program dan penanganan kasus. Setiap keputusan penting dibahas dalam rapat koordinasi, dengan kesempatan bagi setiap anggota untuk menyampaikan pendapat serta mengumpulkan masukan dari mitra dan pihak eksternal. Tantangan utama adalah keterbatasan waktu dalam kasus darurat, yang memaksa pengambilan keputusan cepat tanpa konsultasi panjang. Meskipun demikian, sifat demokratis membantu meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program dan menjadikan implementasi lebih efektif. Disarankan untuk memiliki forum diskusi rutin, sistem umpan balik, dan memastikan transparansi dengan memberikan akses informasi yang sama bagi seluruh anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 menyatakan bahwa:

Keputusan diambil secara demokratis dengan memberi kesempatan kepada semua anggota tim untuk menyampaikan pendapat mereka. Transparansi dalam pengambilan keputusan dijaga dengan melibatkan semua pihak terkait seperti psikolog, pekerja sosial, dan aparat hukum. Namun, saat situasi darurat, keputusan harus diambil cepat sehingga tidak semua pihak bisa dilibatkan dalam diskusi panjang. Walaupun begitu, tetap diupayakan untuk mendengar masukan yang relevan. Demokrasi dalam pengambilan keputusan sangat berpengaruh pada rasa memiliki dan tanggung jawab dalam tim, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas kerja. Disarankan untuk lebih sering mengadakan pertemuan tim untuk mendiskusikan isu penting dan memastikan partisipasi semua anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan bahwa:

Prinsip demokratis diterapkan dengan melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan, termasuk kepolisian dan Dinas Sosial. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat koordinasi dengan masukan dari semua pihak terkait. Tantangan terbesar adalah keputusan mendesak yang sulit untuk dibahas dengan semua pihak, memaksa pengambilan keputusan dilakukan cepat. Sifat demokratis sangat berpengaruh dalam menciptakan lingkungan inklusif yang meningkatkan komitmen dan keterlibatan anggota tim. Disarankan untuk memfasilitasi diskusi terbuka dan memastikan setiap keputusan dipahami oleh semua pihak, serta mengutamakan kepentingan korban KDRT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7 menyatakan bahwa:

Aspek demokratis sangat diterapkan dengan memberikan kesempatan bagi setiap anggota tim untuk menyampaikan pendapat dan masukan terkait strategi penanganan kasus. Keputusan biasanya diambil melalui konsensus, meskipun kadang ada keputusan cepat yang perlu diambil di lapangan. Proses pengambilan keputusan dimulai dengan diskusi terbuka dan rapat rutin yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian dan dinas sosial. Tantangan muncul ketika menghadapi situasi mendesak, yang membutuhkan tindakan cepat. Meskipun demikian, tetap menjaga proses yang terbuka dan melibatkan pihak terkait. Sifat demokratis berpengaruh besar dalam menciptakan lingkungan inklusif yang membuat semua anggota merasa dihargai dan didengar. Diperlukan lebih banyak forum diskusi dan melibatkan masyarakat serta korban dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT berinisial SN, seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang tinggal di Semarang, menyatakan bahwa:

Keputusan yang diambil tetap mencerminkan keinginan dan kebutuhan saya, yang membuat saya lebih percaya dan nyaman dengan proses yang sedang berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara, Prinsip demokratis dalam pengambilan keputusan diterapkan dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari tim internal maupun eksternal, melalui diskusi terbuka dan musyawarah. Setiap keputusan

penting dibahas dalam rapat koordinasi untuk memastikan partisipasi aktif dan menghasilkan keputusan yang lebih objektif serta adil. Meskipun dalam situasi mendesak keputusan harus diambil dengan cepat, transparansi dan keterlibatan pihak terkait tetap dijaga. Dengan pendekatan ini, tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif, meningkatkan rasa saling menghargai, serta mendorong anggota tim untuk berkontribusi secara aktif.

Tantangan utama dalam penerapan prinsip demokratis adalah keseimbangan antara proses musyawarah dan kebutuhan akan keputusan cepat, terutama dalam kasus KDRT yang memerlukan respons segera. Untuk mengatasi ini, diperlukan strategi yang memungkinkan pengambilan keputusan tetap inklusif tanpa menghambat efektivitas kerja. Peningkatan transparansi, penyediaan forum diskusi yang lebih luas, serta akses informasi yang merata bagi semua anggota tim menjadi langkah penting dalam memperkuat proses ini. Dengan demikian, keputusan yang diambil tetap berkualitas, mendapat dukungan luas, dan mendukung keberhasilan implementasi program secara lebih efektif.

Penerapan sifat demokratis dalam pengambilan keputusan pada Program JPPA di Kelurahan Tegalsari dan Kemijen memiliki perbedaan berdasarkan tingkat keterlibatan aparatur dan masyarakat dalam proses musyawarah. Di Kemijen, yang lebih sering menangani kasus KDRT, prinsip demokratis lebih terlihat dalam koordinasi lintas sektor, di mana setiap keputusan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, tenaga medis, dan pekerja sosial. Proses diskusi cenderung lebih aktif karena setiap keputusan memiliki dampak langsung terhadap korban, sehingga pendekatan partisipatif menjadi keharusan.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah kebutuhan akan keputusan cepat dalam situasi darurat, yang terkadang mengurangi ruang bagi musyawarah yang lebih luas. Sebaliknya, di Tegalsari, yang belum memiliki laporan kasus KDRT, sifat demokratis lebih tampak dalam diskusi mengenai program pencegahan dan edukasi, di mana peran masyarakat lebih dominan dalam menentukan langkah strategis. Namun, kurangnya pengalaman dalam menangani kasus riil dapat menyebabkan pengambilan keputusan lebih lambat ketika kasus KDRT benar-benar terjadi.

4.2.2.4. Struktur Birokrasi

JPPA memiliki sistem keanggotaan yang berbeda dari birokrasi pemerintahan pada umumnya, di mana tidak ada proses seleksi atau pemilihan anggota secara formal. Keanggotaan dalam JPPA sepenuhnya didasarkan pada kesukarelaan individu yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, insentif bagi anggota JPPA tidak berupa tunjangan kinerja seperti yang diterima ASN, melainkan dalam bentuk penghargaan non-finansial sebagai apresiasi atas kontribusi mereka. Sebagai dukungan operasional, anggota JPPA juga diberikan uang transport ketika melakukan kegiatan penjangkauan. Model ini menekankan nilai sosial dan keterlibatan masyarakat, di mana partisipasi lebih didorong oleh kepedulian dan komitmen pribadi daripada keuntungan finansial.

1) Pengangkatan Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa:

Pengangkatan dalam JPPA tidak melalui proses seleksi formal sebagaimana yang berlaku dalam birokrasi pemerintahan. Anggota JPPA bergabung berdasarkan kesukarelaan dan komitmen pribadi dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, mekanisme pengangkatan dalam JPPA lebih bersifat fleksibel dibandingkan struktur birokrasi konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa:

Keanggotaan dalam JPPA tidak melalui prosedur seleksi atau pemilihan yang ketat, melainkan terbuka bagi individu yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Keanggotaan yang berbasis kesukarelaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang tergabung memiliki motivasi yang kuat dalam menjalankan peran mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa:

Dalam struktur JPPA tidak ada mekanisme pengangkatan yang bersifat birokratis seperti dalam pemerintahan. Keanggotaan didasarkan pada kesediaan individu untuk terlibat dalam program perlindungan perempuan dan anak, sehingga lebih mengutamakan aspek partisipasi dan kepedulian sosial daripada persyaratan administratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 menyatakan bahwa:

Sistem pengangkatan dalam JPPA lebih mengandalkan keterlibatan aktif masyarakat tanpa adanya proses seleksi formal. Keanggotaan murni berdasarkan inisiatif pribadi dan niat untuk membantu upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini berbeda dengan sistem birokrasi yang biasanya memiliki tahapan seleksi yang lebih ketat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 menyatakan bahwa:

Keterlibatan dalam JPPA tidak memerlukan seleksi ketat, melainkan berdasarkan kepedulian individu terhadap perlindungan perempuan dan anak. Meskipun tidak ada mekanisme seleksi birokratis, individu yang bergabung tetap harus memahami isu-isu terkait serta memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan bahwa:

JPPA memiliki sistem pengangkatan yang berbeda dari birokrasi pemerintahan. Dalam JPPA, siapa saja yang memiliki kepedulian dan ingin berkontribusi dalam perlindungan perempuan dan anak dapat bergabung tanpa harus melalui tahapan seleksi atau pengangkatan resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7 menyatakan bahwa:

Keanggotaan dalam JPPA bersifat terbuka dan berbasis kesukarelaan. Tidak ada proses seleksi atau pengangkatan seperti dalam birokrasi pemerintahan, sehingga siapa pun yang memiliki komitmen terhadap isu perlindungan perempuan dan anak dapat turut serta dalam jaringan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT berinisial SN, seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang tinggal di Semarang, menyatakan bahwa:

Awalnya saya mengalami kesulitan dalam mengakses layanan JPPA karena banyaknya dokumen yang harus diurus dan proses administrasi yang cukup rumit. Meskipun prosesnya memakan waktu, petugas sangat membantu dengan memberikan arahan yang jelas, sehingga ia akhirnya dapat lebih mudah mengakses layanan. Selain itu, waktu tunggu sebelum mendapatkan bantuan, terutama dalam proses hukum, dirasakan cukup lama dan membuatnya cemas. Proses hukum yang panjang serta prosedur yang berbelit-belit menjadi tantangan tersendiri, meskipun petugas selalu berupaya memberikan informasi dan penjelasan terkait tahapan yang harus dilalui.

Berdasarkan hasil wawancara, JPPA menerapkan sistem keanggotaan berbasis kesukarelaan tanpa melalui proses seleksi atau pengangkatan administratif seperti dalam birokrasi pemerintahan. Setiap individu yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak dapat bergabung tanpa harus memenuhi persyaratan tertentu. Fleksibilitas ini memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, dengan keterlibatan yang didorong oleh motivasi pribadi dan tanggung jawab sosial.

Meskipun tanpa seleksi formal, anggota JPPA tetap diharapkan memiliki pemahaman tentang isu-isu perlindungan perempuan dan anak serta komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Model ini menekankan partisipasi dan kepedulian sosial, memungkinkan keterlibatan yang lebih inklusif dan memperkuat sinergi dalam menjalankan misi JPPA. Dengan demikian, JPPA dapat menjangkau lebih banyak pihak dan berfungsi secara lebih efektif dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Dalam implementasi Program JPPA di Kelurahan Tegalsari dan Kemijen, sistem pengangkatan birokrasi berbasis kesukarelaan memberikan dinamika yang berbeda dalam perekrutan dan efektivitas kerja anggota. Di Kelurahan Kemijen, yang lebih sering menangani kasus KDRT, keanggotaan JPPA cenderung terdiri dari individu yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan kasus kekerasan, baik dari latar belakang kesehatan, hukum, maupun pekerja sosial. Meskipun tidak melalui seleksi administratif formal, keterlibatan mereka lebih diarahkan pada mereka yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi, sehingga efektivitas kerja tetap terjaga. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan kualitas kerja anggota tetap sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Sebaliknya, di Kelurahan Tegalsari, yang lebih berfokus pada pencegahan, keterlibatan masyarakat dalam JPPA lebih luas dan inklusif, termasuk dari kalangan relawan yang memiliki kepedulian sosial, meskipun tidak semua memiliki pemahaman mendalam tentang isu KDRT. Fleksibilitas ini memungkinkan partisipasi lebih luas tetapi juga menghadirkan tantangan

dalam hal konsistensi dan kompetensi anggota dalam menjalankan tugas mereka.

2) Insentif

. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa:

JPPA tidak mendapatkan tunjangan kinerja seperti yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Insentif yang diberikan kepada anggota JPPA lebih bersifat non-finansial, seperti penghargaan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, JPPA hanya menerima uang transport ketika melakukan kegiatan penjangkauan ke masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa:

Tidak ada tunjangan rutin bagi anggota JPPA seperti halnya ASN. Bentuk apresiasi yang diberikan lebih kepada penghargaan non-finansial sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras mereka dalam menangani kasus-kasus perlindungan perempuan dan anak. Namun, jika anggota JPPA melakukan kegiatan penjangkauan, mereka diberikan uang transport untuk mendukung mobilitas dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa:

JPPA tidak mendapatkan insentif dalam bentuk tunjangan kinerja sebagaimana ASN. Anggota JPPA lebih mengandalkan motivasi pribadi dalam menjalankan tugasnya, dan penghargaan yang diberikan bersifat non-finansial. Meski demikian, untuk mendukung operasional mereka dalam melakukan penjangkauan kasus, tersedia uang transport yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kegiatan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 menyatakan bahwa:

Tidak ada insentif dalam bentuk tunjangan tetap bagi anggota JPPA. Motivasi utama anggota berasal dari kepedulian mereka terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Sebagai bentuk apresiasi, anggota mendapatkan penghargaan non-finansial serta uang transport ketika menjalankan tugas penjangkauan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 menyatakan bahwa:

Keanggotaan dalam JPPA tidak diikuti dengan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana yang berlaku bagi ASN. Sebagai gantinya, anggota JPPA memperoleh penghargaan dalam bentuk non-finansial sebagai

apresiasi atas kerja mereka. Selain itu, uang transport diberikan untuk membantu biaya perjalanan saat melakukan kegiatan penjangkauan ke masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan bahwa:

Insentif bagi anggota JPPA tidak berupa tunjangan kinerja seperti yang diterima oleh ASN. Penghargaan yang diberikan lebih kepada pengakuan atas dedikasi mereka, bukan dalam bentuk finansial. Namun, untuk mendukung aktivitas penjangkauan, mereka mendapatkan uang transport sebagai bentuk bantuan operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7 menyatakan bahwa:

Anggota JPPA tidak memperoleh tunjangan kinerja secara rutin. Insentif yang diberikan hanya berupa penghargaan non-finansial atas partisipasi mereka dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, mereka diberikan uang transport apabila melakukan penjangkauan ke masyarakat sebagai bentuk dukungan operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban KDRT berinisial SN, seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun yang tinggal di Semarang, menyatakan bahwa:

Prosedur hukum sebaiknya dipermudah agar tidak membingungkan dan menambah beban psikologis korban. Pendampingan hukum sejak awal tanpa menunggu lama akan membantu korban memahami hak-haknya, merasa lebih didukung, serta mempercepat proses hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, Anggota JPPA tidak menerima tunjangan kinerja seperti ASN, karena keanggotaan mereka bersifat sukarela dan didorong oleh kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak. Sebagai bentuk apresiasi, mereka mendapatkan penghargaan non-finansial yang menegaskan pengakuan atas dedikasi mereka. Selain itu, uang transport diberikan untuk mendukung mobilitas saat melakukan kegiatan penjangkauan ke masyarakat, meskipun insentif ini tidak bersifat tetap dan hanya diberikan sesuai kebutuhan operasional di lapangan.

Sistem insentif dalam JPPA lebih berfokus pada nilai sosial dan keterlibatan sukarela daripada keuntungan finansial. Tanpa tunjangan kinerja, anggota mengandalkan komitmen dan kesadaran pribadi dalam menjalankan peran mereka. Pendekatan ini mencerminkan semangat voluntarisme dalam JPPA, di mana motivasi utama anggota berasal dari tanggung jawab sosial untuk melindungi perempuan dan anak, bukan dari imbalan materi.

Dalam implementasi insentif bagi anggota JPPA di Kelurahan Tegalsari dan Kemijen, terdapat perbedaan dalam bentuk dan frekuensi apresiasi yang diberikan. Di Kelurahan Kemijen, yang lebih sering menangani kasus KDRT secara langsung, insentif lebih difokuskan pada dukungan operasional seperti uang transport dan fasilitas kerja yang memadai, mengingat mobilitas tinggi yang diperlukan dalam menangani korban dan melakukan pendampingan. Namun, karena keterbatasan anggaran, insentif ini tidak selalu tersedia secara konsisten, sehingga anggota tetap mengandalkan motivasi pribadi dalam menjalankan tugas mereka. Sementara itu, di Kelurahan Tegalsari, yang lebih berorientasi pada pencegahan dan edukasi masyarakat, bentuk insentif lebih berupa penghargaan sosial seperti sertifikat apresiasi dan kesempatan mengikuti pelatihan atau workshop yang meningkatkan kapasitas anggota. Meskipun kedua kelurahan tidak memberikan tunjangan kinerja tetap, Kelurahan Tegalsari cenderung memiliki pendekatan insentif berbasis pengembangan diri, sementara Kemijen lebih menekankan dukungan praktis untuk operasional lapangan.

4.2.3. Deskripsi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program JPPA Dalam Menekan KDRT Di Kota Semarang

Deskripsi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak) di Kota Semarang bertujuan untuk memahami tantangan dan peluang yang ada dalam upaya menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam konteks ini, faktor pendukung meliputi adanya kerjasama antara berbagai instansi dan pemangku kepentingan, serta kesadaran dan komitmen yang tinggi dari aparat yang terlibat. Di sisi lain, penghambat utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, serta prosedur birokrasi yang seringkali memperlambat respons terhadap kasus-kasus KDRT yang mendesak. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan program yang lebih efektif dan efisien.

4.2.3.1. Deskripsi Faktor Pendukung dan Penghambat pada Dimensi Komunikasi

Di Kelurahan Kemijen, faktor pendukung utama dalam dimensi komunikasi adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam pertemuan rutin serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Keaktifan warga dalam forum komunikasi memungkinkan informasi mengenai prosedur pelaporan KDRT tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, yang tercermin dalam meningkatnya jumlah laporan kasus. Selain itu, koordinasi yang teratur antara petugas JPPA, kader masyarakat, dan aparat terkait

memastikan bahwa setiap kebijakan baru segera disosialisasikan, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan yang tersedia. Sedangkan faktor pendukung lainnya meliputi adanya panduan tertulis yang terstruktur, penyelenggaraan kampanye publik yang meningkatkan kesadaran warga, serta konsistensi dalam penyampaian informasi yang membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

Faktor penghambat utama di Kelurahan Kemijen adalah masih adanya perbedaan persepsi antar instansi dalam koordinasi program, yang menyebabkan ketidaksinkronan dalam penyampaian informasi dan implementasi kebijakan. Perbedaan ini dapat menghambat efektivitas komunikasi antar pihak terkait, terutama dalam respons cepat terhadap kasus KDRT. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan evaluasi rutin serta penyusunan panduan komunikasi yang lebih jelas guna memastikan koordinasi yang lebih terarah dan efektif.

Sementara itu, di Kelurahan Tegalsari, faktor pendukung utama dalam dimensi komunikasi adalah adanya upaya jemput bola melalui pendekatan door-to-door serta pemanfaatan WhatsApp Group untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Meskipun tingkat partisipasi warga dalam forum komunikasi masih rendah, strategi ini membantu memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan interaksi dengan kelompok masyarakat yang sulit dijangkau oleh media konvensional. Sedangkan faktor pendukung lainnya mencakup kerja sama dengan kader kelurahan yang berperan sebagai penghubung informasi di

lingkungan mereka serta adanya inisiatif untuk meningkatkan pemahaman warga melalui sosialisasi langsung.

Faktor penghambat utama di Kelurahan Tegalsari adalah rendahnya partisipasi warga dalam pertemuan komunikasi serta keterbatasan akses terhadap teknologi, yang menyebabkan penyebaran informasi tidak merata dan kesadaran masyarakat tentang prosedur pelaporan KDRT masih minim. Selain itu, kurangnya monitoring rutin dan ketidakkonsistenan dalam penyampaian informasi membuat warga merasa bingung terhadap mekanisme pelaporan dan meragukan tindak lanjut kasus mereka. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif, seperti penyederhanaan SOP, penggunaan infografis dan video tutorial, serta peningkatan koordinasi dan monitoring agar penyebaran informasi lebih efektif dan konsisten di seluruh lapisan masyarakat.

4.2.3.2. Deskripsi Faktor Pendukung dan Penghambat pada Dimensi Sumber Daya

Di Kelurahan Kemijen, faktor pendukung utama dalam dimensi sumber daya adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan telah mendapatkan pelatihan yang memadai dalam menangani kasus KDRT. Kader JPPA, aparat kelurahan, dan petugas kepolisian memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur pelaporan, teknik pendampingan korban, serta koordinasi dengan instansi terkait, sehingga proses penanganan kasus berjalan lebih efektif. Sedangkan faktor pendukung lainnya mencakup adanya sarana

komunikasi yang cukup memadai seperti komputer, ponsel, dan jaringan internet yang mendukung sistem pelaporan digital, serta adanya koordinasi yang baik antara pihak JPPA dan lembaga hukum setempat, yang mempercepat tindak lanjut kasus.

Faktor penghambat utama di Kelurahan Kemijen adalah masih terbatasnya kewenangan JPPA dalam intervensi langsung terhadap kasus KDRT. Meskipun koordinasi dengan kepolisian cukup baik, keterbatasan dalam pengambilan keputusan mandiri dan akses terhadap dana darurat masih menjadi kendala dalam menangani kasus yang membutuhkan respons cepat. Selain itu, perbedaan persepsi antar instansi terkait terkadang menyebabkan ketidaksinkronan dalam implementasi program, yang dapat menghambat efektivitas penyelesaian kasus.

Sementara itu, di Kelurahan Tegalsari, faktor pendukung utama dalam dimensi sumber daya adalah adanya upaya peningkatan kapasitas kader JPPA dan petugas melalui pelatihan yang dilakukan secara bertahap. Meskipun kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan, keberadaan kader-kader yang aktif membantu dalam sosialisasi dan pendampingan korban menjadi aset penting dalam mendukung keberlanjutan program. Sedangkan faktor pendukung lainnya meliputi pemanfaatan WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi alternatif untuk mempercepat penyebaran informasi, serta adanya kerja sama dengan pihak eksternal dalam beberapa kegiatan sosialisasi.

Faktor penghambat utama di Kelurahan Tegalsari adalah keterbatasan anggaran yang berdampak pada minimnya pelatihan lanjutan bagi petugas serta

kurangnya fasilitas pendukung, seperti komputer dan kendaraan operasional, yang menghambat efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, prosedur pencairan dana yang lambat dan kurangnya koordinasi dengan lembaga hukum menyebabkan ketidakpastian dalam penanganan kasus, yang berkontribusi pada rendahnya tingkat pelaporan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan alokasi anggaran, modernisasi fasilitas, serta perbaikan sistem koordinasi antar lembaga agar Program JPPA dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban KDRT.

4.2.3.3. Deskripsi Faktor Pendukung dan Penghambat pada Dimensi Disposisi

Di Kelurahan Kemijen, faktor pendukung utama dimensi disposisi adalah tingkat disiplin aparatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelurahan lain. Hal ini didukung oleh sistem pelaporan yang lebih terstruktur, evaluasi berkala, dan koordinasi rutin antarpetugas, yang memastikan bahwa setiap laporan KDRT dapat ditangani dengan cepat dan efektif. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak seperti kader JPPA, aparat kelurahan, dan kepolisian dalam pelaksanaan program turut memperkuat komitmen mereka dalam menjalankan tugas. Sedangkan faktor pendukung lainnya adalah budaya kerja yang lebih aktif dan responsif, di mana kolaborasi lintas sektor telah menjadi bagian dari rutinitas, memungkinkan komunikasi yang lebih baik dalam menangani kasus.

Faktor penghambat utama di Kelurahan Kemijen adalah tingginya beban kerja yang dapat menyebabkan kelelahan bagi petugas, yang pada akhirnya

mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas layanan. Selain itu, tekanan dari pihak tertentu dalam beberapa kasus juga menjadi tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan serta penanganan kasus KDRT.

Sementara itu, di Kelurahan Tegalsari faktor pendukung utama dimensi disposisi adalah penerapan prinsip demokratis dalam pengambilan keputusan, terutama dalam program pencegahan KDRT. Meskipun jumlah laporan kasus masih rendah, partisipasi masyarakat dalam diskusi dan musyawarah terkait strategi program cukup aktif, sehingga program dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Sedangkan faktor pendukung lainnya adalah adanya keterlibatan berbagai pihak dalam upaya edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak, meskipun belum optimal dalam aspek penanganan langsung terhadap kasus.

Faktor penghambat utama di Kelurahan Tegalsari adalah rendahnya tingkat disiplin aparatur dalam implementasi JPPA. Minimnya laporan kasus yang masuk membuat perhatian terhadap program ini menjadi kurang maksimal, dan banyak aparatur memiliki tugas ganda yang mengurangi fokus mereka dalam menjalankan program secara efektif. Selain itu, transparansi dalam pelaporan masih menjadi tantangan, karena ada kemungkinan bahwa kasus KDRT belum sepenuhnya terdeteksi atau dilaporkan oleh masyarakat.

4.2.3.4. Deskripsi Faktor Pendukung dan Penghambat pada Dimensi Struktur Birokrasi

Di Kelurahan Kemijen faktor pendukung utama dimensi struktur birokrasi adalah adanya keanggotaan JPPA yang terdiri dari individu dengan pengalaman di bidang penanganan kasus kekerasan, seperti tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, dan pekerja sosial. Meskipun sistem perekrutan tidak melalui seleksi administratif formal, keterlibatan mereka lebih diarahkan pada individu yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi, sehingga efektivitas kerja tetap terjaga. Sedangkan faktor pendukung lainnya adalah dukungan operasional yang cukup memadai, seperti fasilitas kerja dan uang transportasi bagi anggota JPPA yang aktif di lapangan.

Faktor penghambat utama di Kelurahan Kemijen adalah kurangnya mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja anggota JPPA. Tidak adanya sistem penilaian yang terstruktur dapat menyebabkan kesenjangan dalam standar pelayanan, di mana beberapa anggota mungkin mengalami penurunan efektivitas dalam menjalankan tugas mereka seiring waktu.

Sementara itu, di Kelurahan Tegalsari faktor pendukung utama dimensi struktur birokrasi adalah fleksibilitas dalam perekrutan anggota JPPA, yang memungkinkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk relawan sosial yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Pendekatan ini membuat partisipasi lebih luas dan memperkuat jaringan dukungan komunitas dalam pencegahan KDRT. Sedangkan faktor pendukung lainnya adalah adanya insentif berbasis pengembangan diri, seperti kesempatan

mengikuti pelatihan atau workshop yang bertujuan meningkatkan kapasitas anggota JPPA.

Faktor penghambat utama di Kelurahan Tegalsari adalah kurangnya konsistensi dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas akibat tidak semua anggota memiliki pemahaman mendalam tentang isu KDRT. Minimnya pengalaman dalam menangani kasus secara langsung dapat menghambat efektivitas program, terutama jika suatu saat terjadi kasus yang memerlukan penanganan cepat. Oleh karena itu, sistem pembinaan dan pelatihan rutin perlu diperkuat agar anggota JPPA di Tegalsari dapat lebih siap dalam menjalankan perannya secara optimal.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Analisis Implementasi Program JPPA Dalam Menekan KDRT Di Kota Semarang

Program JPPA di Kelurahan Tegalsari dan Kemijen memiliki efektivitas komunikasi yang berbeda dalam menyebarkan informasi terkait pencegahan dan pelaporan KDRT. Di Kemijen, komunikasi berjalan lebih lancar karena pemanfaatan media sosial, pertemuan rutin, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam kampanye publik. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah laporan KDRT, menunjukkan bahwa masyarakat lebih sadar dan berani melaporkan kasus yang terjadi. Sebaliknya, di Tegalsari, tantangan dalam komunikasi masih terlihat, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat yang kurang terpapar informasi. Hambatan ini disebabkan oleh keterbatasan akses teknologi, rendahnya partisipasi warga dalam forum komunikasi, serta perbedaan persepsi

antar instansi dalam koordinasi program. Untuk mengatasi kendala ini, strategi komunikasi yang lebih adaptif diperlukan, seperti penyederhanaan prosedur pelaporan melalui infografis, pelatihan komunikasi bagi petugas, dan pemanfaatan WhatsApp Group guna meningkatkan jangkauan informasi.

Dari aspek sumber daya, perbedaan dalam ketersediaan dan pemanfaatan SDM, anggaran, serta fasilitas pendukung berpengaruh terhadap efektivitas program. Di Kemijen, tenaga JPPA, aparat kelurahan, dan petugas kepolisian mendapatkan pelatihan lebih baik, sehingga mereka lebih siap menangani kasus dan mendampingi korban. Pemanfaatan anggaran juga lebih optimal, dengan fokus pada peningkatan kapasitas tim dan sosialisasi publik. Sementara itu, di Tegalsari, meskipun jumlah personel mencukupi, keterbatasan dalam pelatihan, rotasi pegawai yang cepat, serta alokasi anggaran yang tidak optimal menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Minimnya peralatan pendukung seperti komputer dan kendaraan operasional juga menghambat pelaporan serta respons terhadap kasus. Oleh karena itu, strategi peningkatan kompetensi, diversifikasi pendanaan, dan pengadaan peralatan yang lebih memadai perlu diterapkan untuk meningkatkan efektivitas JPPA di kedua kelurahan.

Dari sisi disposisi aparatur, tingkat kedisiplinan, kejujuran, dan budaya kerja yang diterapkan dalam Program JPPA mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaporan KDRT. Di Kemijen, disiplin dan transparansi lebih terjaga karena adanya sistem pengawasan yang baik serta koordinasi berkala antara JPPA, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya. Namun, beban kerja yang tinggi tetap menjadi tantangan dalam menjaga

kualitas layanan. Di sisi lain, di Tegalsari, minimnya laporan KDRT dapat mengindikasikan kurangnya keterlibatan dan kesiapan aparaturnya dalam menangani kasus. Budaya kerja yang belum sepenuhnya responsif terhadap isu KDRT juga menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas program. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, pembagian tugas yang lebih jelas, serta pelatihan berkelanjutan guna membangun budaya kerja yang lebih proaktif dan responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Dari aspek struktur birokrasi, efektivitas implementasi JPPA di kedua kelurahan dipengaruhi oleh koordinasi antar instansi dan sistem regulasi yang ada. Di Kemijen, koordinasi yang lebih baik dengan aparat kepolisian dan lembaga hukum setempat memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap laporan KDRT. Namun, keterbatasan dalam kewenangan JPPA dalam pengambilan keputusan mandiri masih menjadi kendala, terutama dalam situasi darurat. Sementara itu, di Tegalsari, koordinasi yang kurang optimal menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaporan. Untuk memperbaiki efektivitas program, perlu ada penguatan regulasi yang mendukung JPPA dalam memberikan bantuan hukum awal serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait guna memastikan bahwa setiap laporan KDRT dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Implementasi Program JPPA dalam menekan KDRT di dua kelurahan di Kota Semarang dapat dianalisis menggunakan teori Edward III, teori

kepemimpinan, dan teori Collaborative Governance. Berdasarkan teori Edward III, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di Kelurahan Kemijen, efektivitas komunikasi yang tinggi melalui media sosial dan pertemuan rutin membuat masyarakat lebih sadar dan aktif melaporkan kasus KDRT. Sebaliknya, di Tegalsari, hambatan komunikasi seperti rendahnya akses informasi dan kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan kesadaran terhadap program ini masih terbatas. Dari sisi sumber daya, tenaga JPPA di Kemijen lebih terlatih dan didukung dengan anggaran yang lebih optimal dibandingkan Tegalsari, di mana keterbatasan pelatihan dan fasilitas menghambat pelaksanaan program. Sementara itu, dari aspek disposisi, aparatur di Kemijen menunjukkan kedisiplinan dan keterlibatan yang lebih tinggi, sedangkan di Tegalsari masih terdapat tantangan dalam responsivitas terhadap laporan KDRT. Struktur birokrasi yang lebih baik di Kemijen memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dengan kepolisian dan lembaga hukum, sedangkan di Tegalsari koordinasi yang lemah menjadi kendala dalam respons cepat terhadap kasus KDRT.

Dari perspektif teori kepemimpinan, efektivitas Program JPPA sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam mengelola tim dan mengoordinasikan berbagai pihak terkait. Di Kelurahan Kemijen, kepemimpinan transformasional terlihat dalam cara pemimpin JPPA menginspirasi dan memotivasi tim serta masyarakat untuk aktif dalam program perlindungan perempuan dan anak. Pemimpin di sana berhasil membangun

budaya kerja yang responsif, memperkuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder, dan mendorong inovasi dalam strategi sosialisasi. Sebaliknya, di Tegalsari, kepemimpinan yang lebih transaksional, dengan fokus pada aturan formal tanpa pendekatan yang lebih proaktif, mengakibatkan keterbatasan dalam keterlibatan masyarakat dan efektivitas program. Oleh karena itu, kepemimpinan yang lebih visioner, partisipatif, dan adaptif diperlukan agar JPPA di kedua kelurahan dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya.

Sementara itu, teori Collaborative Governance menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor harus didukung oleh komunikasi yang efektif, kepercayaan antar pemangku kepentingan, dan koordinasi yang baik. Di Kemijen, kolaborasi antara JPPA, kepolisian, dan masyarakat berjalan lebih efektif karena adanya komunikasi yang terbuka dan komitmen bersama dalam menangani kasus KDRT. Sebaliknya, di Tegalsari, lemahnya koordinasi antar lembaga menghambat efektivitas program, menyebabkan respons terhadap kasus menjadi lebih lambat. Untuk meningkatkan keberhasilan JPPA di kedua wilayah, pendekatan Collaborative Governance perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, pembangunan mekanisme komunikasi yang lebih sistematis, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam merancang dan menjalankan program pencegahan KDRT.

Hasil penelitian Arminda et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan di Kota Semarang telah mengikuti regulasi yang ada, masih terdapat peningkatan angka kekerasan

pada tahun 2022 akibat tantangan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Temuan ini mendukung penelitian terkait Program JPPA di Kota Semarang, di mana kendala komunikasi seperti keterbatasan akses komunikasi dan perbedaan pemahaman antarinstansi menghambat efektivitas program. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komunikasi yang lebih terstruktur melalui pemanfaatan teknologi dan pelatihan bagi petugas lapangan guna memastikan penyebaran informasi yang akurat dan konsisten. Dengan demikian, peningkatan efektivitas komunikasi dapat membantu mengurangi risiko kesalahan koordinasi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan perlindungan yang tersedia.

Dalam konteks sumber daya, penelitian Salsabila et al. (2024) menemukan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Tangerang adalah kurangnya sumber daya manusia, yang menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab serta minimnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang resmi bagi petugas di lapangan. Temuan ini sejalan dengan kendala yang dihadapi dalam Program JPPA di Kota Semarang, di mana beban kerja tinggi, kurangnya tenaga ahli medis dan psikologis, serta keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam efektivitas program. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, sistem mentoring, serta perekrutan tenaga profesional sangat diperlukan untuk memastikan layanan pendampingan korban dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, penambahan anggaran dan kerja sama dengan sektor swasta serta lembaga donor menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan dana

yang selama ini menghambat pengadaan fasilitas dan layanan yang lebih baik bagi korban kekerasan.

Terkait aspek disposisi, penelitian Fanani et al. (2020) menyoroti pentingnya kepemimpinan transformasional dalam sektor publik, di mana keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada keteladanan, keberanian dalam mengambil keputusan, serta kemampuan pemimpin dalam mentransformasikan gagasan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Program JPPA, aspek disiplin, transparansi, dan budaya kerja sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan. Tantangan seperti beban kerja tinggi dan koordinasi antarinstansi memerlukan pemimpin yang mampu menciptakan sistem pengawasan yang efektif serta membangun budaya kerja kolaboratif. Selain itu, prinsip demokratis dalam pengambilan keputusan harus tetap dijaga, dengan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dalam proses musyawarah dan memiliki akses terhadap informasi yang transparan. Dengan kepemimpinan yang kuat dan adaptif, implementasi Program JPPA dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar dalam perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

Dalam hal birokrasi, penelitian Mahfudz (2021) tentang collaborative governance dalam penanggulangan KDRT di Kota Surabaya menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk OPD, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan melalui pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (TP2TP2A). Penelitian ini mendukung perlunya kolaborasi lintas

sektor dalam Program JPPA di Kota Semarang, terutama dalam menghadapi tantangan birokrasi seperti keterlambatan administrasi dan kesulitan dalam mendapatkan SDM dengan keahlian khusus. Dengan mengadopsi pendekatan collaborative governance, proses seleksi aparatur dapat dilakukan lebih fleksibel, sementara pemberian insentif yang lebih adil dan berbasis kinerja dapat meningkatkan motivasi petugas dalam menangani kasus KDRT. Selain itu, penyederhanaan prosedur administratif dan sinkronisasi kebijakan antarperangkat daerah menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perlindungan bagi perempuan dan anak dapat diberikan secara cepat dan efektif.

4.3.2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program JPPA Dalam Menekan KDRT Di Kota Semarang

4.3.2.1. Dimensi Komunikasi

Dalam implementasi Program JPPA, komunikasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penyebaran informasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Di Kelurahan Kemijen, keberhasilan komunikasi ditandai dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pertemuan rutin serta pemanfaatan media sosial sebagai alat utama dalam sosialisasi. Faktor ini mendukung peningkatan pemahaman warga tentang prosedur pelaporan KDRT, sehingga mereka lebih aktif dalam melaporkan kasus. Selain itu, koordinasi yang baik antara petugas JPPA, kader masyarakat, dan aparat penegak hukum memastikan setiap informasi baru tersampaikan dengan cepat dan efektif. Sebaliknya, hambatan utama dalam komunikasi di Kemijen adalah perbedaan persepsi

antarinstansi dalam implementasi program, yang menyebabkan ketidaksinkronan penyampaian informasi dan kebijakan.

Di Kelurahan Tegalsari, strategi komunikasi yang diterapkan lebih berorientasi pada pendekatan langsung, seperti kunjungan door-to-door dan pemanfaatan WhatsApp Group untuk memperluas jangkauan informasi. Meskipun partisipasi dalam forum komunikasi masih rendah, inisiatif ini membantu meningkatkan keterlibatan kelompok yang sulit dijangkau oleh media konvensional. Selain itu, peran kader kelurahan sebagai penghubung informasi memperkuat upaya penyebaran pesan program JPPA. Namun, tantangan utama di Tegalsari adalah rendahnya partisipasi warga dalam pertemuan komunitas dan keterbatasan akses terhadap teknologi, yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara merata. Kurangnya monitoring dan inkonsistensi dalam penyampaian informasi juga berkontribusi terhadap rendahnya pemahaman warga tentang mekanisme pelaporan KDRT.

4.3.2.2. Dimensi Sumber Daya

Sumber daya manusia dan fasilitas pendukung menjadi elemen penting dalam efektivitas implementasi Program JPPA. Di Kelurahan Kemijen, faktor pendukung utama adalah ketersediaan SDM yang terlatih dalam menangani kasus KDRT, baik dari segi pelaporan, pendampingan korban, maupun koordinasi dengan instansi terkait. Sarana komunikasi seperti komputer dan jaringan internet juga mempermudah sistem pelaporan digital, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kewenangan JPPA dalam mengambil keputusan secara

mandiri serta kurangnya akses terhadap dana darurat, yang menyebabkan respons terhadap kasus tertentu menjadi lebih lambat.

Di sisi lain, di Kelurahan Tegalsari, upaya peningkatan kapasitas kader JPPA melalui pelatihan menjadi faktor pendukung yang signifikan. Meskipun kompetensi SDM masih dalam tahap pengembangan, keterlibatan kader yang aktif dalam sosialisasi dan pendampingan korban membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program ini. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama, menghambat penyelenggaraan pelatihan lanjutan serta pengadaan fasilitas penting seperti komputer dan kendaraan operasional. Selain itu, lambatnya pencairan dana dan kurangnya koordinasi dengan lembaga hukum juga memperlambat proses penanganan kasus, sehingga mengurangi efektivitas program.

4.3.2.3. Dimensi Disposisi

Komitmen dan sikap petugas dalam menjalankan program JPPA sangat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan. Di Kelurahan Kemijen, tingkat disiplin aparatur yang tinggi serta evaluasi berkala menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa setiap laporan KDRT dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Kolaborasi antara kader JPPA, aparat kelurahan, dan kepolisian menciptakan budaya kerja yang lebih aktif dan responsif. Namun, tingginya beban kerja bagi petugas menjadi tantangan yang dapat memengaruhi kualitas layanan. Selain itu, tekanan dari pihak tertentu dalam beberapa kasus juga berpotensi menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus KDRT.

Sementara itu, di Kelurahan Tegalsari, prinsip demokratis dalam pengambilan keputusan menjadi faktor pendukung utama, terutama dalam menyusun strategi pencegahan KDRT. Meskipun jumlah laporan kasus masih rendah, diskusi dan musyawarah yang melibatkan masyarakat memungkinkan program untuk lebih disesuaikan dengan kondisi lokal. Namun, rendahnya disiplin aparatur dalam menjalankan tugasnya menjadi penghambat utama, karena banyak petugas yang memiliki tugas ganda sehingga perhatian terhadap program JPPA kurang optimal. Transparansi dalam pelaporan juga masih menjadi tantangan, karena ada kemungkinan kasus KDRT yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya terdeteksi atau dilaporkan.

4.3.2.4. Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program JPPA. Di Kelurahan Kemijen, keberhasilan program didukung oleh keterlibatan individu dengan pengalaman di bidang perlindungan perempuan dan anak, seperti tenaga kesehatan dan aparat penegak hukum. Dukungan operasional dalam bentuk fasilitas kerja dan insentif bagi anggota JPPA juga membantu kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Namun, kurangnya mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja anggota menjadi kendala dalam menjaga standar pelayanan yang konsisten. Tanpa sistem penilaian yang terstruktur, efektivitas anggota dalam menjalankan tugasnya dapat menurun seiring waktu.

Di Kelurahan Tegalsari, fleksibilitas dalam perekrutan anggota JPPA menjadi faktor pendukung yang memungkinkan keterlibatan relawan sosial

yang peduli terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Hal ini memperluas jaringan dukungan komunitas dalam pencegahan KDRT. Selain itu, insentif berbasis pengembangan diri, seperti kesempatan mengikuti pelatihan, menjadi daya tarik bagi anggota untuk meningkatkan kapasitas mereka. Namun, hambatan utama dalam struktur birokrasi adalah kurangnya konsistensi dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas, karena tidak semua anggota memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu KDRT. Minimnya pengalaman dalam menangani kasus secara langsung juga menghambat efektivitas program, terutama dalam situasi yang memerlukan respons cepat. Oleh karena itu, sistem pelatihan dan pembinaan yang lebih terstruktur perlu diterapkan agar anggota JPPA dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil pada penelitian ini adalah:

1. Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam menekan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang menunjukkan variasi dalam efektivitasnya. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi aparatur, dan struktur birokrasi. Pemanfaatan media sosial, pertemuan rutin, serta koordinasi yang baik terbukti meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pelaporan dan penanganan KDRT. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih serta pemanfaatan anggaran yang optimal mendukung keberlangsungan program. Namun, tantangan masih ditemukan dalam keterbatasan pelatihan, kurangnya fasilitas pendukung, serta budaya kerja aparatur yang belum sepenuhnya responsif terhadap kasus KDRT.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program ini berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta keberlanjutan evaluasi dan pelatihan. Dukungan dari warga dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor positif yang memperkuat pelaksanaan program, sementara keterbatasan anggaran dan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan tugas menjadi hambatan yang perlu diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif,

penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, serta regulasi yang lebih mendukung koordinasi antarinstansi guna memastikan respons yang cepat dan tepat dalam menangani kasus KDRT.

5.2. Saran

Berikut adalah beberapa saran konstruktif untuk mengatasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program JPPA, yaitu:

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
 - a. Mengembangkan kampanye sosialisasi yang lebih luas dan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan warga dalam program JPPA.
 - b. Memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi interaktif antara pemerintah, JPPA, dan masyarakat guna mempercepat respons terhadap kasus KDRT.
2. Memperkuat Koordinasi Antarinstansi
 - a. Membentuk forum koordinasi yang melibatkan berbagai instansi terkait (Dinas Sosial, Kepolisian, LSM, dan layanan kesehatan) dengan sistem komunikasi yang lebih terintegrasi.
 - b. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas dalam penanganan kasus KDRT agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

3. Mengoptimalkan Evaluasi dan Pelatihan
 - a. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta menyesuaikan strategi implementasi.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi aparaturnya yang bertugas dalam penanganan KDRT agar mereka memiliki keterampilan dan pemahaman yang lebih baik dalam memberikan layanan.
4. Memanfaatkan Teknologi Informasi secara Maksimal
 - a. Mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan kasus secara cepat dan aman.
 - b. Menggunakan data analitik untuk memantau tren kasus KDRT, sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
5. Mengatasi Hambatan Anggaran dan Konsistensi Pelaksanaan
 - a. Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk mendapatkan dukungan pendanaan tambahan.
 - b. Mengusulkan kebijakan anggaran yang lebih proaktif, termasuk alokasi dana yang lebih berkelanjutan untuk mendukung operasional dan program pelatihan.
 - c. Menyusun mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai dengan rencana tanpa hambatan administratif.

Dengan strategi ini, diharapkan program JPPA dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan organisasi terkait untuk meningkatkan efektivitas Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):

1. Implementasi Peningkatan Strategi Komunikasi

a. Optimalisasi Media Sosial dan Teknologi Digital

Memanfaatkan platform digital seperti WhatsApp Group, Facebook, dan Instagram sebagai sarana sosialisasi, edukasi, serta pelaporan KDRT yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

b. Sosialisasi Berbasis Komunitas

Mengadakan pertemuan rutin di tingkat RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap JPPA.

c. Penyederhanaan Informasi

Membuat materi sosialisasi dalam bentuk infografis dan video pendek yang mudah dipahami masyarakat, terutama bagi kelompok dengan akses terbatas terhadap informasi.

2. Implementasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Pelatihan Rutin bagi Aparatur dan Relawan JPPA

Mengadakan pelatihan berkala terkait penanganan kasus KDRT, teknik komunikasi efektif, dan pemanfaatan teknologi dalam pelaporan kasus.
 - b. Peningkatan Kapasitas Psikososial Petugas JPPA

Memberikan pendampingan psikologis bagi aparatur yang menangani kasus KDRT agar mereka memiliki kesiapan emosional dan mental yang baik.
 - c. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan LSM

Menggandeng akademisi dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan pendampingan dan pelatihan berbasis penelitian terbaru terkait penanganan KDRT.
3. Implementasi Penguatan Budaya Kerja dan Disposisi Aparatur
 - a. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja JPPA di tingkat kelurahan untuk memastikan konsistensi dan efektivitas layanan.
 - b. Pemberian Insentif dan Penghargaan

Memberikan insentif bagi petugas yang menunjukkan kinerja baik serta penghargaan bagi masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung program JPPA.

c. Penerapan SOP yang Jelas dan Konsisten

Menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang lebih tegas dalam menangani laporan KDRT agar petugas memiliki pedoman kerja yang lebih jelas.

4. Implementasi Penguatan Struktur Birokrasi dan Regulasi

a. Peningkatan Koordinasi Antarinstansi

Memastikan adanya komunikasi yang terstruktur antara JPPA, kepolisian, rumah sakit, dan lembaga hukum untuk mempercepat penanganan kasus KDRT.

b. Pemberian Kewenangan yang Lebih Luas untuk JPPA

Menyusun regulasi yang memberikan JPPA kewenangan lebih besar dalam memberikan perlindungan awal bagi korban KDRT sebelum intervensi dari kepolisian atau lembaga hukum lainnya.

c. Alokasi Anggaran yang Lebih Optimal

Meningkatkan anggaran bagi program JPPA, terutama untuk penyediaan fasilitas pendukung seperti hotline pengaduan, kendaraan operasional, dan sarana teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustino, Leo. (2018). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Indradi, S. S. (2016). *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans. Publishing.
- Indrajit, R. E. (2020). *Konsep dan Strategi Electronic Government*. Yogyakarta: Andi.
- Islamy, Muh.Irfan, (2017), *Kebijakan Publik*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis*. (Fourth Ed). SAGE Publication
- Pasolong, Harbani. (2018). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Solichin, Abdul Wahab. 2017. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. (2019). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2022). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2017. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertja
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)*, Jakarta Pusat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Widodo, Joko. (2017). *Analisis Kebijakan Publik:Konsep dan Aplikasi Analisis. Proses Kebijakan Publik*. Malang: MNC.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)

B. JURNAL

- Arminda, A. D. P., Lituhayu, D., & Maesaroh. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang. 12 (3) : 1-11. DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39853
- Arrigo, J., Taheri, M., Fitzpatrick, S., & McCormack, L. (2025). Domestic violence, behavior change programs, positive and negative outcomes: a scoping review.. *Psychology of Violence*, 15(2), 164-180. <https://doi.org/10.1037/vio0000540>
- Bagaskara, I. A. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak

- Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*. 2 (2) : 157-176
- Bagus, N. (2022). Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu. *Reformasi*. 12 (1) : 148-155
- Barez, M., Babazadeh, R., Roudsari, R., Bazaz, M., & Najmabadi, K. (2022). Women's strategies for managing domestic violence during pregnancy: a qualitative study in iran. *Reproductive Health*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01276-8>
- Boxhall, E. and Birch, P. (2022). Domestic and family violence behaviour change programs: an examination of gendered and non-gendered frameworks. *Journal of Community Safety and Well-Being*, 7(2), 75-80. <https://doi.org/10.35502/jcswb.240>
- Fanani, A. F., Iqbal. M. M, Astutik, W., & Lestari, Y. (2020). Kepemimpinan Transformasional Sektor Publik. *Journal Of Public Innovation*. 4 (2) : 84-90.
- Kertati, I., Setyohadi Pratomo, & Harsoyo. (2022). Pemberdayaan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, 1(3), 101–109. <https://doi.org/10.56444/perigel.v1i3.884>
- Mahkfudz. (2021). Desain dan Peran Collaborative Governance Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya. *Cakrawala : Jurnal Litbang Kebijakan*. 15 (1) : 11-23
- Mauludin, A. (2018). Collaboration Of Triple Helix Actors In The Production Of Public Space: The Thematic Park In Bandung *Jurnal Ilmu Sosial : Mamangan*. 7 (2) : 51-61
- Ponnamperuma, T. and Kudagama, V. (2022). Domestic violence exposure and depression symptoms among adolescents in a rural area in the galle district. *Galle Medical Journal*, 27(2), 46-53. <https://doi.org/10.4038/gmj.v27i2.8155>
- Putri, N. A. K., Haryani, T. N., Yuliani, S. (2023). Implementasi Program Perlindungan Anak dalam Menekan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*. 3 (2) : 448-454
- Salsabila, D. N., Sujana, N., & Maya, T. M. (2024). Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 10 (6) : 180-189
- Sitanggang, G. S., & Panjaitan, J. D. (2023). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di DKI Jakarta. *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. 3 (7) : 2598-2605
- Su, Z., McDonnell, D., Roth, S., Li, Q., Šegalo, S., Shi, F., ... & Wagers, S. (2021). Mental health solutions for domestic violence victims amid covid-19: a review of the literature. *Globalization and Health*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00710-7>

Syaura, R. (2022). Implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dalam ruang publik di kota tangerang Selatan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Taaki, F., Ghahhari, S., Lotfi, M., & Memaryan, N. (2023). Evaluation of the short-time empowerment intervention package of the ministry of health and medical education of iran to reduce domestic violence. *Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences*, 17(4). <https://doi.org/10.5812/ijpbs-132172>

Vahdani, F., Ghaemi, M., Panahi, Z., Eshraghi, N., Piri, M., & Akbari, R. (2023). The association between intimate partner violence during pregnancy and maternal and neonatal outcomes: a cross-sectional study. *Fertility Gynecology and Andrology*, 3(1). <https://doi.org/10.5812/fga-137800>

C. REGULASI

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Walikota Semarang No. 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

D. WEBSITE

DP3A kota Semarang (2024). ASIKK PAK - Data Kekerasan Kota Semarang 1 Januari 2024 - 25 Oktober 2024. <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/> diakses 25 Oktober 2024

Lampiran 1 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

Sesuai dengan tempat penelitian yang telah di tentukan oleh peneliti, penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang yang beralamat di Jl. Prof. Soedarto No.116, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat di bawah ini :

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Juli - Agst 2024	Sept- Okt 2024	Nov- Des 2024	Jan- Feb 2024
1.	Perencanaan				
2.	Penyusunan Proposal				
3.	Penelitian				
4.	Penyusunan Hasil				

Lampiran 2 Surat Permohonan Ijin Penelitian Kepada Kepala DP3A Kota Semarang



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

E-mail : isip@untagsmg.ac.id

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Telp. (024) 8441821 Fax. 8441821 Semarang - 50233

Nomor : 770/2/S2/F.03.03/X/2024

Semarang, 19 Oktober 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang
Di
Tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon bantuannya untuk memberikan ijin penelitian bagi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Tiara Ayunindya
NIM : 231003631010597
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang

Data tersebut semata-mata adalah untuk penyusunan Tesis Program Magister Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

Atas bantuan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami sampaikan hormat dan terima kasih.



Prof. Dr. Dra. Rini Werdiningsih, M.S.
NIDN. 0621105901

Lampiran 3 Surat Permohonan Ijin Penelitian Kepada Lurah Tegalsari



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

E-mail : isip@untagsmg.ac.id

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Telp. (024) 8441821 Fax. 8441821 Semarang - 50233

Nomor : 770-b/2/S2/F.03.03/X/2024

Semarang, 19 Oktober 2024

Lamp. : -

H a l : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth Lurah Tegalsari
Kota Semarang
Di
Tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon bantuannya untuk memberikan ijin penelitian bagi mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : Tiara Ayunindya
N I M : 231003631010597
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang

Data tersebut semata-mata adalah untuk penyusunan Tesis Program Magister Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

Atas bantuan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami sampaikan hormat dan terima kasih.



Dekan

Prof. Dr. Dra. Rini Werdiningsih, M.S.

UNIDN. 0621105901

Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Penelitian Kepada Lurah Kemijen



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

E-mail : isip@untagsmg.ac.id

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Telp. (024) 8441821 Fax. 8441821 Semarang - 50233

Nomor : 770-c/2/S2/F.03.03/X/2024

Semarang, 19 Oktober 2024

Lamp. : -

H a l : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. Lurah Kemijen
Kota Semarang
Di
Tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon bantuannya untuk memberikan ijin penelitian bagi mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : Tiara Ayunindya
N I M : 231003631010597
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang

Data tersebut semata-mata adalah untuk penyusunan Tesis Program Magister Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

Atas bantuan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami sampaikan hormat dan terima kasih.



Dekan

Prof. Dr. Dra. Rini Werdiningsih, M.S.

NIDN 0621105901

Lampiran 5 Pedoman Wawancara Untuk Instansi

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Semarang

Selamat pagi/siang/sore, Bapak/Ibu. Perkenalkan, nama saya **Tiara Ayunindya Larashati** dengan NIM **231003631010597**. Saat ini saya sedang menempuh studi pada Program Magister Administrasi Publik dengan konsentrasi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengikuti wawancara ini.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait ****implementasi** Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kami berharap wawancara ini berlangsung dengan durasi sekitar 60-90 menit.

Sebagai bagian dari etika wawancara, saya ingin memastikan bahwa seluruh informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian akademis ini. Selain itu, dengan izin Bapak/Ibu, saya juga memohon persetujuan untuk merekam sesi wawancara ini guna memastikan keakuratan data yang diperoleh. Rekaman ini hanya akan digunakan untuk analisis dan tidak akan dipublikasikan.

Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk melanjutkan wawancara dan memberikan persetujuan atas hal-hal yang telah dijelaskan? Terima kasih sekali lagi atas kerja sama dan dukungan Bapak/Ibu.

1. **Pertanyaan Umum:**
 - Bisakah Anda menceritakan latar belakang Anda dan bagaimana keterlibatan Anda dalam Program JPPA?
2. **Pertanyaan Terkait Program:**
 - Apa yang Anda ketahui tentang tujuan utama Program JPPA?
3. **Pertanyaan tentang Implementasi:**
 - Bagaimana proses implementasi Program JPPA dalam menangani kasus KDRT di daerah Anda?
4. **Pertanyaan tentang Tantangan:**
 - Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam pelaksanaan Program JPPA?

5. **Pertanyaan Spesifik Berdasarkan Dimensi (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap, Struktur Birokrasi)**

1) **Komunikasi**

a. Dimensi Transmisi

- **Pertanyaan terkait Program:** Bagaimana informasi tentang Program JPPA disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan?
- **Pertanyaan Implementasi:** Apakah ada kendala dalam menyampaikan informasi ke lapangan? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?
- **Pertanyaan tentang Tantangan:** Apa tantangan terbesar dalam mengoordinasikan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat?
- **Pertanyaan tentang Efektivitas:** Seberapa efektif proses komunikasi dalam memastikan semua pihak memahami tujuan JPPA?
- **Pertanyaan Penutup:** Apa saran Anda untuk meningkatkan jalur komunikasi agar lebih efisien dalam JPPA?

b. Dimensi Kejelasan

- **Pertanyaan terkait Program:** Bagaimana kejelasan pesan atau informasi yang disampaikan kepada tim terkait Program JPPA?
- **Pertanyaan Implementasi:** Apakah setiap instruksi dalam program JPPA sudah cukup jelas bagi semua pihak yang terlibat?
- **Pertanyaan tentang Tantangan:** Bagaimana Anda mengatasi ketidakjelasan atau miskomunikasi yang terjadi?
- **Pertanyaan tentang Efektivitas:** Menurut Anda, apakah kejelasan informasi mendukung efektivitas pelaksanaan program?
- **Pertanyaan Penutup:** Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kejelasan komunikasi di Program JPPA?

c. Dimensi Konsistensi

- **Pertanyaan terkait Program:** Seberapa konsisten informasi yang diterima oleh seluruh tim JPPA?
- **Pertanyaan Implementasi:** Apakah ada perubahan atau penyesuaian dalam pesan yang disampaikan selama implementasi?
- **Pertanyaan tentang Tantangan:** Apa dampak dari ketidakkonsistenan pesan terhadap pelaksanaan program?
- **Pertanyaan tentang Efektivitas:** Apakah konsistensi komunikasi berdampak pada keberhasilan program dalam menekan KDRT?
- **Pertanyaan Penutup:** Bagaimana cara terbaik untuk menjaga konsistensi dalam komunikasi pada Program JPPA?

2) Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

- **Pertanyaan terkait Program:** Seberapa penting peran sumber daya manusia dalam keberhasilan Program JPPA?
- **Pertanyaan Implementasi:** Apakah personel yang terlibat dalam JPPA sudah memadai secara jumlah dan kompetensi?
- **Pertanyaan tentang Tantangan:** Apa kendala utama yang Anda hadapi terkait sumber daya manusia?
- **Pertanyaan tentang Efektivitas:** Bagaimana Anda menilai efektivitas sumber daya manusia dalam mendukung program JPPA?
- **Pertanyaan Penutup:** Bagaimana Anda menyarankan agar kualitas SDM dapat ditingkatkan?

b. Sumber Daya Anggaran

- **Pertanyaan terkait Program:** Apakah anggaran yang tersedia cukup untuk mendukung operasional JPPA?
- **Pertanyaan Implementasi:** Bagaimana pengelolaan anggaran untuk berbagai kegiatan dalam Program JPPA?
- **Pertanyaan tentang Tantangan:** Apa hambatan terbesar terkait pendanaan yang memengaruhi implementasi JPPA?
- **Pertanyaan tentang Efektivitas:** Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi efektivitas program JPPA dalam menekan KDRT?
- **Pertanyaan Penutup:** Apa saran Anda dalam pengelolaan anggaran agar mendukung keberhasilan JPPA?

c. Sumber Daya Peralatan

- **Pertanyaan terkait Program:** Apakah peralatan yang tersedia sudah cukup untuk melaksanakan program JPPA dengan baik?
- **Pertanyaan Implementasi:** Bagaimana penggunaan fasilitas dan peralatan untuk mendukung program JPPA?
- **Pertanyaan tentang Tantangan:** Apa kendala yang dihadapi terkait ketersediaan peralatan?
- **Pertanyaan tentang Efektivitas:** Bagaimana keterbatasan peralatan memengaruhi pelaksanaan program JPPA?
- **Pertanyaan Penutup:** Menurut Anda, peralatan apa yang perlu ditambahkan?

d. Sumber Daya Kewenangan

- **Pertanyaan terkait Program:** Apakah kewenangan yang diberikan kepada tim JPPA sudah cukup untuk menangani berbagai kasus KDRT secara efektif?

- **Pertanyaan Implementasi:** Bagaimana Anda memanfaatkan kewenangan yang ada dalam proses pelaksanaan Program JPPA, terutama dalam penanganan kasus KDRT?
- **Pertanyaan tentang Tantangan:** Apa saja kendala yang Anda hadapi terkait kewenangan dalam menjalankan tugas JPPA? Apakah ada situasi di mana kewenangan yang ada dirasa kurang mendukung pelaksanaan program?
- **Pertanyaan tentang Efektivitas:** Menurut Anda, apakah kewenangan yang dimiliki JPPA saat ini cukup efektif untuk mencapai tujuan penurunan angka KDRT?
- **Pertanyaan Penutup:** Apa rekomendasi Anda untuk memperkuat kewenangan JPPA agar lebih optimal dalam menangani kasus KDRT?

3) Disposisi/Sikap

a. Disiplin Aparatur

- **Pertanyaan terkait Program:** Bagaimana disiplin aparatur yang terlibat dalam Program JPPA?
- **Pertanyaan Implementasi:** Apakah ada kebijakan disiplin yang diterapkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana?
- **Pertanyaan tentang Tantangan:** Apa kendala dalam menjaga kedisiplinan tim JPPA?
- **Pertanyaan tentang Efektivitas:** Menurut Anda, apakah disiplin aparatur berkontribusi pada keberhasilan program JPPA?
- **Pertanyaan Penutup:** Apa saran Anda untuk meningkatkan kedisiplinan dalam tim?

b. Kejujuran Aparatur

- **Pertanyaan terkait Program:** Bagaimana kejujuran dipupuk dalam JPPA, terutama dalam menangani data atau kasus KDRT?
- **Pertanyaan Implementasi:** Apakah ada upaya tertentu untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan program?
- **Pertanyaan tentang Tantangan:** Apa tantangan terbesar dalam memastikan kejujuran di antara tim?
- **Pertanyaan tentang Efektivitas:** Seberapa penting transparansi dan kejujuran dalam mencapai tujuan JPPA?
- **Pertanyaan Penutup:** Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kejujuran dalam tim?

c. Budaya Kerja Aparatur

- **Pertanyaan terkait Program:** Bagaimana budaya kerja dikembangkan di antara aparatur yang terlibat dalam Program JPPA, terutama dalam menangani kasus KDRT?
- **Pertanyaan Implementasi:** Apakah ada nilai-nilai atau kebiasaan tertentu yang diterapkan dalam tim JPPA untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kerja?
- **Pertanyaan tentang Tantangan:** Apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun budaya kerja yang solid dan kooperatif di JPPA?
- **Pertanyaan tentang Efektivitas:** Menurut Anda, bagaimana budaya kerja di JPPA mempengaruhi keberhasilan program dalam menangani kasus KDRT?
- **Pertanyaan Penutup:** Apa saran Anda untuk meningkatkan budaya kerja di JPPA agar lebih mendukung pencapaian tujuan program?

d. Sifat Demokratis

- **Pertanyaan terkait Program:** Sejauh mana aspek demokratis diterapkan dalam pengambilan keputusan terkait Program JPPA?"
- **Pertanyaan Implementasi:** Bagaimana proses pengambilan keputusan yang melibatkan masukan dari seluruh anggota tim atau pihak-pihak terkait di JPPA?
- **Pertanyaan tentang Tantangan:** Apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga proses yang demokratis dalam tim JPPA, terutama saat menangani situasi yang membutuhkan keputusan cepat?
- **Pertanyaan tentang Efektivitas:** Seberapa besar pengaruh sifat demokratis dalam tim terhadap efektivitas program JPPA, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif?
- **Pertanyaan Penutup:** Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sifat demokratis dalam tim JPPA agar program berjalan lebih efektif dan transparan?

4) Struktur Birokrasi

a. Pengangkatan Birokrasi

- **Pertanyaan terkait Program:** Bagaimana proses pengangkatan aparatur dalam JPPA dilakukan?
- **Pertanyaan Implementasi:** Apakah sistem pengangkatan di JPPA mendukung efisiensi program?
- **Pertanyaan tentang Tantangan:** Apa tantangan dalam hal perekrutan yang memengaruhi pelaksanaan program?
- **Pertanyaan tentang Efektivitas:** Apakah prosedur pengangkatan yang ada saat ini mendukung tujuan JPPA?

- **Pertanyaan Penutup:** Apa yang dapat diperbaiki dalam sistem pengangkatan di JPPA?
- b. Insentif
- **Pertanyaan terkait Program:** Bagaimana kebijakan insentif bagi aparatur yang terlibat dalam Program JPPA?
 - **Pertanyaan Implementasi:** Apakah insentif yang diberikan cukup memotivasi tim untuk mencapai target program?
 - **Pertanyaan tentang Tantangan:** Apa hambatan dalam memberikan insentif kepada tim JPPA?
 - **Pertanyaan tentang Efektivitas:** Seberapa besar pengaruh insentif terhadap keberhasilan program dalam mengurangi KDRT?
 - **Pertanyaan Penutup:** Menurut Anda, insentif seperti apa yang bisa meningkatkan kinerja tim JPPA?

Lampiran 6 Pedoman Wawancara Untuk Korban KDRT

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (JPPA) Dalam Menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Semarang

Selamat pagi/siang/sore, Bapak/Ibu. Perkenalkan, nama saya **Tiara Ayunindya Larashati** dengan NIM **231003631010597**. Saat ini saya sedang menempuh studi pada Program Magister Administrasi Publik dengan konsentrasi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengikuti wawancara ini.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait Implementasi Program Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) dalam menekan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kami berharap wawancara ini berlangsung dengan durasi sekitar 60-90 menit.

Sebagai bagian dari etika wawancara, saya ingin memastikan bahwa seluruh informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian akademis ini. Selain itu, dengan izin Bapak/Ibu, saya juga memohon persetujuan untuk merekam sesi wawancara ini guna memastikan keakuratan data yang diperoleh. Rekaman ini hanya akan digunakan untuk analisis dan tidak akan dipublikasikan.

Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk melanjutkan wawancara dan memberikan persetujuan atas hal-hal yang telah dijelaskan? Terima kasih sekali lagi atas kerja sama dan dukungan Bapak/Ibu.

I. Pertanyaan Umum dan Pengalaman Pribadi

1. Latar Belakang dan Informasi Awal:

- "Bisakah Anda menceritakan secara singkat latar belakang Anda dan bagaimana Anda mengetahui tentang adanya Program JPPA?"

2. Keterlibatan dengan Program:

- "Bagaimana Anda pertama kali terlibat atau mendapatkan bantuan melalui Program JPPA?"

II. Pertanyaan Mengenai Informasi dan Pemahaman Program (Komunikasi)

A. Dimensi Transmisi (Cara Penyampaian Informasi)

1. "Bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang layanan yang disediakan oleh JPPA?"

2. "Apakah informasi tersebut disampaikan secara langsung (misalnya, melalui petugas) atau melalui media lain (seperti brosur, pengumuman, atau media sosial)?"
3. "Menurut Anda, apakah cara penyampaian informasi tersebut memudahkan Anda memahami apa saja yang ditawarkan oleh program?"

B. Dimensi Kejelasan (Keterbukaan dan Kemudahan Memahami Informasi)

1. "Apakah penjelasan mengenai layanan yang akan Anda terima dari JPPA terasa jelas dan mudah dipahami?"
2. "Pernahkah Anda merasa bingung atau kurang jelas tentang langkah-langkah yang harus diikuti untuk mendapatkan bantuan? Jika ya, bisakah Anda ceritakan pengalamannya?"

C. Dimensi Konsistensi (Kesamaan Informasi dari Berbagai Sumber)

1. "Apakah informasi yang Anda terima dari petugas atau sumber lain tentang JPPA terasa konsisten?"
2. "Jika pernah ada perbedaan informasi, bagaimana hal tersebut memengaruhi pemahaman dan kenyamanan Anda dalam mengikuti layanan?"

III. Pertanyaan Mengenai Pengalaman Layanan (Sumber Daya dan Kewenangan dari Perspektif Korban)

A. Kualitas Layanan dan Kesiapan Petugas

1. "Bagaimana Anda menilai sikap dan kesiapan petugas yang membantu Anda selama mendapatkan layanan dari JPPA?"
2. "Apakah Anda merasa petugas yang menangani kasus Anda memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk membantu situasi yang Anda alami?"

B. Fasilitas dan Aksesibilitas Layanan

1. "Bagaimana kondisi fasilitas atau tempat yang digunakan untuk memberikan layanan kepada Anda? Apakah merasa nyaman dan aman?"
2. "Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam mengakses fasilitas atau peralatan yang mendukung proses perlindungan dan pendampingan?"

C. Kewenangan dan Kepercayaan

1. "Apakah Anda merasa petugas yang membantu Anda memiliki kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan demi keselamatan dan perlindungan Anda?"
2. "Bagaimana perasaan Anda mengenai kemampuan petugas untuk menindaklanjuti kasus Anda secara cepat dan efektif?"

IV. Pertanyaan Mengenai Pendekatan dan Sikap Pelayanan (Disposisi/Sikap)

Sikap dan Perilaku Petugas

1. "Bagaimana Anda menilai sikap dan perilaku petugas JPPA selama proses pendampingan?"

2. "Apakah Anda merasa diperlakukan dengan hormat, empati, dan profesional selama mendapatkan layanan?"

B. Transparansi dan Kejujuran

1. "Sejauh mana informasi yang diberikan kepada Anda bersifat jujur dan transparan mengenai proses bantuan?"
2. "Apakah Anda merasa ada keterbukaan dalam komunikasi, sehingga Anda memahami langkah-langkah yang akan diambil untuk melindungi Anda?"

C. Partisipasi dan Keterlibatan

1. "Dalam proses pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah perlindungan, apakah Anda merasa dilibatkan atau diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat?"
2. "Bagaimana perasaan Anda tentang kesempatan untuk memberikan masukan terkait pelayanan yang Anda terima?"

V. Pertanyaan Mengenai Proses Administratif dan Navigasi Birokrasi (Struktur Birokrasi)

A. Kemudahan Mengakses Layanan

1. "Bagaimana Anda menilai kemudahan dalam mengakses layanan melalui sistem yang ada, mulai dari pendaftaran hingga pendampingan?"
2. "Apakah proses administratif yang harus dilalui terasa mudah atau justru membingungkan bagi Anda?"

B. Waktu Tunggu dan Prosedur

1. "Bagaimana pengalaman Anda terkait waktu tunggu sebelum mendapatkan bantuan? Apakah dirasa terlalu lama atau sudah sesuai kebutuhan?"
2. "Adakah prosedur tertentu yang menurut Anda perlu disederhanakan agar korban seperti Anda dapat lebih cepat mendapatkan perlindungan?"

C. Saran untuk Perbaikan Proses

1. "Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang menurut Anda perlu diperbaiki dalam proses administratif agar pelayanan JPPA menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan korban?"
2. "Apakah ada saran atau masukan yang ingin Anda sampaikan agar sistem birokrasi di bidang layanan perlindungan ini lebih ramah bagi korban KDRT?"

Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi Wawancara dengan Dr. Noegroho Edy Rijanto selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang



Dokumentasi Wawancara dengan Ata Nuridha, SH. Selaku Kepala Sub Koordinator JPPA



Dokumentasi Wawancara dengan Catur Karyanti, SE. Selaku Kepala UPTD PPA Kota Semarang



Dokumentasi Wawancara dengan Fauzan selaku Ketua Forum JPPA Kota Semarang



Dokumentasi Wawancara dengan Iis Amalia, S.Psi., M.Psi. Selaku Psikolog UPTD PPA Kota Semarang



Dokumentasi Wawancara dengan Mugi Marjoko, SH. Selaku Lurah Tegalsari kecamatan Candisari



Dokumentasi Wawancara dengan Bambang Sumbodo, SH. Selaku lurah Kemijen Kecamatan Semarang Timur



Dokumentasi Wawancara dengan Korban KDRT berinisial SN



Dokumentasi kegiatan pemberian bantuan dari ketua JPPA Kota Semarang



Dokumentasi JPPA menerima aduan adanya kasus kekerasan



Dokumentasi kegiatan mediasi yang dilakukan JPPA bersama UPTD PPA, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas



Dokumentasi kegiatan pemberian konseling untuk anak korban KDRT



Lampiran 8 Hasil Wawancara dengan Dr. Noegroho Edy Rijanto selaku Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Interviewer: Selamat pagi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Bisa cerita sedikit tentang latar belakang Anda dan bagaimana Anda terlibat dalam Program JPPA?

Interviewee: Selamat pagi, terima kasih juga. Saya sudah lama bekerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sejak menjadi Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang, saya terlibat langsung dalam pengelolaan dan implementasi Program JPPA, yang fokus pada pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya untuk perempuan dan anak. Tugas saya lebih kepada memastikan program ini berjalan efektif di lapangan, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Interviewer: Menarik sekali. Lalu, apa yang Anda ketahui tentang tujuan utama dari Program JPPA?

Interviewee: Tujuan utama Program JPPA adalah untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, program ini bertujuan untuk memberikan akses pemulihan bagi korban dan memastikan bahwa mereka mendapat perlindungan hukum serta dukungan psikososial. Kami juga berusaha mengedukasi masyarakat agar lebih sadar tentang pentingnya pencegahan KDRT dan membangun jaringan kerja yang solid di tingkat daerah.

Interviewer: Bagaimana proses implementasi Program JPPA di Kota Semarang dalam menangani kasus KDRT?

Interviewee: Kami bekerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi, mulai dari polisi, rumah sakit, hingga lembaga sosial lainnya. Prosesnya dimulai dari pengaduan masyarakat, yang kemudian kami tindak lanjuti dengan pendampingan untuk korban. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan kepada aparat terkait agar lebih paham dalam menangani kasus KDRT. Semua langkah ini kami lakukan untuk memastikan korban mendapat perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan.

Interviewer: Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam pelaksanaan Program JPPA?

Interviewee: Salah satu tantangan terbesar adalah masih adanya stigma masyarakat terhadap korban KDRT, yang menyebabkan mereka enggan melapor. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini. Kami juga menghadapi tantangan dalam koordinasi antar instansi yang harus lebih optimal agar program ini berjalan efektif.

Komunikasi – Dimensi Transmisi

Interviewer: Bagaimana informasi tentang Program JPPA disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan?

Interviewee: Informasi mengenai Program JPPA disampaikan melalui berbagai saluran, seperti pertemuan rutin dengan pemangku kepentingan, media sosial, dan kampanye publik. Kami juga mengadakan Pelatihan juga diberikan kepada anggota JPPA, kader, serta Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah setempat untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam menangani kasus KDRT. Selain itu, informasi juga disebarluaskan lewat kolaborasi dengan media lokal.

Interviewer: Apakah ada kendala dalam menyampaikan informasi ke lapangan? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?

Interviewee: Kadang-kadang informasi yang disampaikan tidak sampai dengan jelas ke lapangan, terutama di daerah yang lebih terpencil. Untuk mengatasi ini, kami mengandalkan koordinasi dengan kader-kader di tingkat kelurahan yang sudah lebih dekat dengan masyarakat dan bisa meneruskan informasi dengan cara yang lebih efektif.

Interviewer: Apa tantangan terbesar dalam mengoordinasikan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat?

Interviewee: Tantangan terbesar adalah perbedaan tingkat pemahaman dan prioritas antar pihak yang terlibat, seperti aparat kepolisian, lembaga sosial, dan pemerintah daerah.

Kami terus berusaha untuk menjaga komunikasi tetap terbuka dan melakukan evaluasi secara berkala agar semua pihak tetap berada pada jalur yang sama.

Interviewer: Seberapa efektif proses komunikasi dalam memastikan semua pihak memahami tujuan JPPA?

Interviewee: Secara keseluruhan, proses komunikasi cukup efektif, meskipun masih ada beberapa pihak yang perlu lebih memahami urgensi dan tujuan program ini. Kami terus berupaya untuk memastikan semua pihak paham dan bergerak dengan visi yang sama melalui pelatihan dan koordinasi yang lebih intens.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan jalur komunikasi agar lebih efisien dalam JPPA?

Interviewee: Saran saya adalah untuk meningkatkan penggunaan teknologi, seperti aplikasi komunikasi khusus antar instansi, sehingga informasi bisa lebih cepat dan akurat. Selain itu, penting untuk memiliki jadwal koordinasi yang tetap agar semua pihak bisa saling bertukar informasi dan mengatasi masalah yang muncul dengan cepat.

Komunikasi – Dimensi Kejelasan

Interviewer: Bagaimana kejelasan pesan atau informasi yang disampaikan kepada tim terkait Program JPPA?

Interviewee: Kami berusaha agar setiap informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Misalnya, kami memberikan panduan tertulis dan melibatkan mereka dalam diskusi untuk memastikan tidak ada yang salah paham.

Interviewer: Apakah setiap instruksi dalam program JPPA sudah cukup jelas bagi semua pihak yang terlibat?

Interviewee: Sebagian besar instruksi sudah cukup jelas, tapi kadang ada beberapa bagian yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut agar lebih mudah dipahami, terutama bagi pihak-pihak yang baru terlibat. Kami sering melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa tidak ada bagian yang membingungkan.

Interviewer: Bagaimana Anda mengatasi ketidakjelasan atau miskomunikasi yang terjadi?

Interviewee: Jika terjadi miskomunikasi, kami segera melakukan klarifikasi melalui pertemuan langsung atau komunikasi tertulis. Kami juga memastikan bahwa setiap instruksi dilengkapi dengan penjelasan dan contoh praktis agar lebih mudah dipahami oleh tim.

Interviewer: Menurut Anda, apakah kejelasan informasi mendukung efektivitas pelaksanaan program?

Interviewee: Tentu, kejelasan informasi sangat penting agar setiap pihak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Tanpa kejelasan, program bisa terhambat dan tujuan kami untuk menangani KDRT bisa terabaikan.

Interviewer: Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kejelasan komunikasi di Program JPPA?

Interviewee: Kami bisa memperbaiki sistem komunikasi dengan menyediakan pelatihan lebih rutin dan meningkatkan materi komunikasi, seperti buku panduan atau video tutorial yang lebih mudah dipahami oleh semua pihak.

Komunikasi – Dimensi Konsistensi

Interviewer: Seberapa konsisten informasi yang diterima oleh seluruh tim JPPA?

Interviewee: Kami berusaha untuk menjaga konsistensi informasi dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala dan memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan selalu relevan dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas.

Interviewer: Apakah ada perubahan atau penyesuaian dalam pesan yang disampaikan selama implementasi?

Interviewee: Tentu, beberapa penyesuaian dilakukan sesuai dengan perkembangan situasi dan feedback yang diterima dari lapangan. Namun, kami berusaha agar perubahan tersebut tidak membingungkan tim dan selalu diinformasikan dengan jelas.

Interviewer: Apa dampak dari ketidakkonsistenan pesan terhadap pelaksanaan program?

Interviewee: Ketidakkonsistenan bisa menyebabkan kebingungannya tim atau masyarakat, yang pada akhirnya bisa menghambat keberhasilan program. Misalnya, bisa menyebabkan kurangnya kepercayaan atau keterlambatan dalam penanganan kasus.

Interviewer: Apakah konsistensi komunikasi berdampak pada keberhasilan program dalam menekan KDRT?

Interviewee: Iya, konsistensi komunikasi sangat berpengaruh. Jika informasi yang disampaikan tidak konsisten, akan sulit bagi tim untuk melaksanakan program dengan maksimal. Oleh karena itu, kami sangat menjaga agar semua pesan tetap selaras dan terus diinformasikan dengan tepat.

Interviewer: Bagaimana cara terbaik untuk menjaga konsistensi dalam komunikasi pada Program JPPA?

Interviewee: Cara terbaik adalah dengan memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi yang terstruktur, serta memastikan semua pihak terlibat aktif dalam setiap pembaruan informasi. Kami juga melibatkan semua pihak dalam setiap proses keputusan agar mereka bisa menyampaikan pesan yang sama di lapangan.

Sumber Daya – Sumber Daya Manusia

Interviewer: Seberapa penting peran sumber daya manusia dalam keberhasilan Program JPPA?

Interviewee: Peran sumber daya manusia sangat krusial dalam keberhasilan Program JPPA, karena tanpa tim yang terlatih dan memiliki komitmen, program ini sulit untuk berjalan efektif. SDM yang kompeten dan bersemangat akan memastikan bahwa setiap proses, mulai dari penanganan kasus hingga pendampingan korban, dapat dilakukan dengan optimal.

Interviewer: Apakah personel yang terlibat dalam JPPA sudah memadai secara jumlah dan kompetensi?

Interviewee: Secara jumlah, kami masih bisa mengelola dengan baik, meskipun terkadang ada kebutuhan lebih pada tenaga pendamping di lapangan. Namun, kompetensi personel yang terlibat, terutama dalam hal penanganan kasus KDRT, memang perlu ditingkatkan. Beberapa petugas terkadang belum cukup terlatih dalam menghadapi situasi yang kompleks, seperti penanganan pertama psikologis korban.

Interviewer: Apa kendala utama yang Anda hadapi terkait sumber daya manusia?

Interviewee: Kendala utamanya adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi personel yang menangani kasus KDRT. Selain itu, ada juga masalah rotasi tenaga kerja yang cukup sering, sehingga kadang-kadang kita harus kembali melakukan orientasi terhadap anggota tim yang baru.

Interviewer: Bagaimana Anda menilai efektivitas sumber daya manusia dalam mendukung program JPPA?

Interviewee: Efektivitas SDM cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Tim yang ada sudah bekerja dengan semangat tinggi, tetapi mereka membutuhkan pelatihan lanjutan agar lebih mampu menangani berbagai jenis kasus yang lebih kompleks, termasuk aspek psikologis dan sosial dari korban.

Interviewer: Bagaimana Anda menyarankan agar kualitas SDM dapat ditingkatkan?

Interviewee: Saya menyarankan agar ada pelatihan rutin yang tidak hanya terkait teknis penanganan KDRT, tapi juga pemahaman mengenai hak asasi manusia dan cara berkomunikasi dengan korban yang trauma. Penguatan kapasitas mental dan emosional para petugas juga penting, agar mereka tidak terbebani dengan beban psikologis dalam pekerjaan ini.

Sumber Daya – Sumber Daya Anggaran

Interviewer: Apakah anggaran yang tersedia cukup untuk mendukung operasional JPPA?

Interviewee: Anggaran yang tersedia cukup terbatas anggaran untuk JPPA digabung dengan anggaran Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di kelurahan. Prioritas anggaran diberikan untuk penguatan kapasitas tim. Disarankan untuk mencari dana tambahan dari pihak swasta atau lembaga donor.

Interviewer: Bagaimana pengelolaan anggaran untuk berbagai kegiatan dalam Program JPPA?

Interviewee: Pengelolaan anggaran dilakukan dengan prioritas utama pada kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan penanganan korban KDRT dan penguatan kapasitas tim. Kami juga memastikan bahwa dana digunakan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari pemborosan.

Interviewer: Apa hambatan terbesar terkait pendanaan yang memengaruhi implementasi JPPA?

Interviewee: Hambatan terbesar adalah keterbatasan anggaran yang hanya cukup untuk kegiatan-kegiatan dasar. Misalnya, untuk pelatihan lanjutan atau kampanye publik yang lebih besar, kami terkadang kesulitan mencari dana tambahan, padahal kegiatan tersebut sangat penting untuk kesuksesan program.

Interviewer: Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi efektivitas program JPPA dalam menekan KDRT?

Interviewee: Tentu, keterbatasan anggaran sangat memengaruhi efektivitas program. Misalnya, dalam hal peningkatan kapasitas SDM dan penyuluhan yang lebih luas kepada masyarakat, kami terpaksa mengurangi cakupan kegiatan karena dana yang terbatas. Ini membuat dampaknya tidak bisa sebesar yang diharapkan.

Interviewer: Apa saran Anda dalam pengelolaan anggaran agar mendukung keberhasilan JPPA?

Interviewee: Saya menyarankan agar ada peningkatan anggaran yang lebih signifikan untuk mendukung program ini, terutama dalam hal pelatihan dan penguatan tim. Selain itu, pencarian sumber dana tambahan dari pihak swasta atau lembaga donor bisa menjadi alternatif yang membantu meningkatkan efektivitas program.

Sumber Daya – Sumber Daya Peralatan

Interviewer: Apakah peralatan yang tersedia sudah cukup untuk melaksanakan program JPPA dengan baik?

Interviewee: Peralatan yang ada saat ini masih belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal. Kami membutuhkan beberapa peralatan tambahan, seperti sistem informasi yang lebih canggih untuk pemantauan kasus dan peralatan yang mendukung proses pelatihan.

Interviewer: Bagaimana penggunaan fasilitas dan peralatan untuk mendukung program JPPA?

Interviewee: Kami sudah memanfaatkan fasilitas yang ada sebaik mungkin, tetapi karena keterbatasan jumlah dan jenis peralatan, terkadang kami harus berbagi fasilitas antara berbagai kegiatan. Hal ini membuat beberapa kegiatan harus dijadwalkan ulang agar bisa menggunakan peralatan dengan maksimal.

Interviewer: Apa kendala yang dihadapi terkait ketersediaan peralatan?

Interviewee: Kendala utama adalah keterbatasan dana untuk membeli peralatan yang lebih canggih dan lengkap. Kami juga kekurangan perangkat untuk dokumentasi yang lebih modern, sehingga proses pelaporan dan pengawasan menjadi kurang efisien.

Interviewer: Bagaimana keterbatasan peralatan memengaruhi pelaksanaan program JPPA?

Interviewee: Keterbatasan peralatan memengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. Tanpa peralatan yang memadai, seperti perangkat pendukung data atau peralatan untuk pelatihan yang lebih interaktif, kami merasa terbatas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada korban KDRT.

Interviewer: Menurut Anda, peralatan apa yang perlu ditambahkan?

Interviewee: Peralatan yang perlu ditambahkan antara lain perangkat lunak untuk pemantauan kasus secara digital dan lebih baik dalam hal pengarsipan data. Selain itu, kami juga membutuhkan alat komunikasi yang lebih baik, seperti sistem jaringan yang lebih stabil untuk koordinasi antar instansi.

Sumber Daya – Sumber Daya Kewenangan

Interviewer: Apakah kewenangan yang diberikan kepada tim JPPA sudah cukup untuk menangani berbagai kasus KDRT secara efektif?

Interviewee: Kewenangan yang ada saat ini cukup, namun ada beberapa situasi di mana kewenangan tersebut perlu diperluas, terutama dalam hal penanganan hukum dan perlindungan korban. Beberapa langkah perlu dilakukan dengan segera, dan kadang kewenangan yang terbatas memperlambat proses tersebut.

- Interviewer: Bagaimana Anda memanfaatkan kewenangan yang ada dalam proses pelaksanaan Program JPPA, terutama dalam penanganan kasus KDRT?
- Interviewee: Kami memanfaatkan kewenangan yang ada untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan penanganan kasus berjalan sesuai prosedur. Kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga hukum lainnya untuk memastikan korban mendapatkan keadilan.
- Interviewer: Apa saja kendala yang Anda hadapi terkait kewenangan dalam menjalankan tugas JPPA? Apakah ada situasi di mana kewenangan yang ada dirasa kurang mendukung pelaksanaan program?
- Interviewee: Kadang-kadang kami merasa terbatas dalam memberikan perlindungan hukum secara langsung, karena kewenangan kami tidak mencakup penyidikan atau penuntutan kasus. Kami sering kali harus berkoordinasi dengan pihak lain, yang membuat proses menjadi lebih lama.
- Interviewer: Menurut Anda, apakah kewenangan yang dimiliki JPPA saat ini cukup efektif untuk mencapai tujuan penurunan angka KDRT?
- Interviewee: Secara umum, kewenangan yang ada cukup efektif, namun ada beberapa aspek yang perlu diperkuat, seperti kewenangan untuk memberikan bantuan hukum secara langsung kepada korban. Ini akan mempercepat proses pemulihan dan pengadilan bagi korban.
- Interviewer: Apa rekomendasi Anda untuk memperkuat kewenangan JPPA agar lebih optimal dalam menangani kasus KDRT?
- Interviewee: Saya rasa perlu adanya peraturan atau kebijakan yang memberikan kewenangan lebih dalam hal penanganan hukum dan perlindungan bagi korban. Selain itu, memperkuat kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait agar proses penanganan kasus KDRT bisa lebih cepat dan tepat.

Disposisi/Sikap – Disiplin Aparatur

- Interviewer: Bagaimana disiplin aparaturnya yang terlibat dalam Program JPPA?
- Interviewee: Disiplin aparaturnya di tim JPPA umumnya sudah cukup baik. Mereka sadar akan tanggung jawabnya, terutama dalam menangani kasus KDRT. Namun, tetap ada tantangan dalam menjaga kedisiplinan, terutama saat ada tugas yang memerlukan koordinasi antar instansi atau ada tekanan waktu yang tinggi.
- Interviewer: Apakah ada kebijakan disiplin yang diterapkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana?
- Interviewee: Ya, kami memiliki kebijakan disiplin yang mengatur waktu kerja, pelaporan rutin, dan tanggung jawab setiap anggota. Kami juga melakukan evaluasi berkala untuk memastikan semua pihak bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sanksi bagi yang tidak mematuhi kebijakan tentu ada, namun lebih banyak kami fokus pada pembinaan dan peningkatan kualitas.
- Interviewer: Apa kendala dalam menjaga kedisiplinan tim JPPA?
- Interviewee: Kendalanya biasanya terkait dengan beban kerja yang tidak selalu bisa diprediksi. Kadang, karena banyaknya kasus yang harus ditangani dalam waktu singkat, kedisiplinan bisa sedikit terganggu. Selain itu, beberapa anggota tim juga terkadang harus menghadapi situasi di lapangan yang cukup menantang, sehingga pengawasan langsung menjadi sulit.
- Interviewer: Menurut Anda, apakah disiplin aparaturnya berkontribusi pada keberhasilan program JPPA?
- Interviewee: Tentu, kedisiplinan sangat berkontribusi pada keberhasilan program. Tanpa disiplin yang baik, proses penanganan kasus dan pengambilan keputusan akan terlambat, yang akhirnya memengaruhi kualitas layanan kepada korban. Kedisiplinan juga penting dalam menjaga ketepatan waktu dalam setiap langkah program.
- Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan kedisiplinan dalam tim?
- Interviewee: Saya rasa perlu ada sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan pelatihan disiplin yang lebih sering. Selain itu, memberikan penghargaan kepada anggota tim yang menunjukkan kedisiplinan tinggi bisa menjadi motivasi positif untuk seluruh tim.

Disposisi/Sikap – Kejujuran Aparatur

Interviewer: Bagaimana kejujuran dipupuk dalam JPPA, terutama dalam menangani data atau kasus KDRT?

Interviewee: Kejujuran sangat dijaga dalam tim JPPA, terutama dalam penanganan data dan kasus. Kami selalu memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan adalah akurat dan transparan. Kami juga membangun budaya keterbukaan untuk memastikan bahwa setiap proses yang terjadi dilaporkan dengan jujur, tanpa manipulasi.

Interviewer: Apakah ada upaya tertentu untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan program?

Interviewee: Kami melakukan beberapa upaya, seperti memberikan laporan terbuka mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran kepada pihak terkait. Selain itu, setiap tim diharuskan untuk melakukan verifikasi data dan berbagi informasi secara terbuka dalam rapat evaluasi yang rutin.

Interviewer: Apa tantangan terbesar dalam memastikan kejujuran di antara tim?

Interviewee: Tantangan utamanya adalah menjaga integritas di tengah tekanan kerja yang tinggi. Beberapa kasus KDRT memang sangat sensitif, dan kadang ada godaan untuk menyembunyikan fakta demi mempercepat penyelesaian kasus. Oleh karena itu, kami terus mengingatkan pentingnya kejujuran dalam setiap langkah yang diambil.

Interviewer: Seberapa penting transparansi dan kejujuran dalam mencapai tujuan JPPA?

Interviewee: Transparansi dan kejujuran adalah hal yang sangat penting. Tanpa itu, kepercayaan antara tim dan masyarakat akan hilang, yang tentunya akan menghambat efektivitas program. Kami ingin masyarakat dan korban merasa aman dan yakin bahwa mereka mendapat perlakuan yang adil.

Interviewer: Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kejujuran dalam tim?

Interviewee: Kami perlu memastikan bahwa ada sistem pengawasan yang baik, dan setiap anggota tim merasa bahwa mereka akan dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Membangun budaya integritas dalam tim sejak awal dan memberikan pelatihan tentang pentingnya kejujuran juga sangat diperlukan.

Disposisi/Sikap – Budaya Kerja Aparatur

Interviewer: Bagaimana budaya kerja dikembangkan di antara aparatur yang terlibat dalam Program JPPA, terutama dalam menangani kasus KDRT?

Interviewee: Budaya kerja yang kami kembangkan di JPPA sangat fokus pada kolaborasi dan kepedulian. Kami selalu mengingatkan tim untuk bekerja dengan hati, mengutamakan kepentingan korban, dan saling mendukung. Setiap anggota diharapkan untuk bekerja dengan integritas, serta selalu mengutamakan kerjasama.

Interviewer: Apakah ada nilai-nilai atau kebiasaan tertentu yang diterapkan dalam tim JPPA untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kerja?

Interviewee: Kami menerapkan nilai-nilai seperti empati, keterbukaan, dan profesionalisme. Dalam menjalani tugas, setiap anggota tim diharapkan untuk menjaga komunikasi yang jelas dan saling menghargai peran masing-masing. Kami juga menekankan pentingnya evaluasi diri untuk meningkatkan profesionalisme.

Interviewer: Apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun budaya kerja yang solid dan kooperatif di JPPA?

Interviewee: Tantangannya adalah menjaga kerjasama antar instansi dan memastikan bahwa semua pihak bekerja dengan visi yang sama. Selain itu, seringkali ada perbedaan pandangan antar anggota tim terkait penanganan kasus yang sangat kompleks, sehingga membutuhkan waktu dan usaha lebih untuk menyatukan pemahaman.

Interviewer: Menurut Anda, bagaimana budaya kerja di JPPA mempengaruhi keberhasilan program dalam menangani kasus KDRT?

Interviewee: Budaya kerja yang solid dan kooperatif sangat mempengaruhi keberhasilan program. Tim yang memiliki kultur saling mendukung dan berbagi informasi akan lebih cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah, termasuk menangani kasus KDRT dengan lebih efektif dan efisien.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan budaya kerja di JPPA agar lebih mendukung pencapaian tujuan program?

Interviewee: Saya rasa penting untuk terus memperkuat kerjasama antar instansi dan memberikan pelatihan yang berfokus pada pengembangan soft skills, seperti komunikasi dan resolusi konflik. Budaya kerja yang terbuka dan mendukung akan membantu tim lebih cepat beradaptasi dan bekerja lebih baik.

Disposisi/Sikap – Sifat Demokratis

Interviewer: Sejauh mana aspek demokratis diterapkan dalam pengambilan keputusan terkait Program JPPA?

Interviewee: Kami berusaha menerapkan prinsip demokratis dalam setiap pengambilan keputusan, baik di tingkat internal tim maupun dengan pihak luar. Proses pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan pimpinan, tetapi juga melibatkan masukan dari anggota tim dan pihak terkait lainnya.

Interviewer: Bagaimana proses pengambilan keputusan yang melibatkan masukan dari seluruh anggota tim atau pihak-pihak terkait di JPPA?

Interviewee: Pengambilan keputusan selalu melibatkan diskusi terbuka. Kami sering mengadakan rapat koordinasi, di mana setiap anggota tim bisa menyampaikan pendapatnya. Masukan dari pihak eksternal juga kami terima untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk penanganan kasus KDRT.

Interviewer: Apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga proses yang demokratis dalam tim JPPA, terutama saat menangani situasi yang membutuhkan keputusan cepat?

Interviewee: Tantangannya adalah ketika situasi mendesak, misalnya saat ada kasus KDRT yang membutuhkan penanganan segera. Dalam kondisi seperti ini, proses demokratis bisa jadi lebih lambat, karena setiap pihak perlu memberi masukan. Namun, kami berusaha tetap menjaga keterbukaan dan partisipasi meskipun keputusan harus cepat diambil.

Interviewer: Seberapa besar pengaruh sifat demokratis dalam tim terhadap efektivitas program JPPA, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif?

Interviewee: Sifat demokratis sangat berpengaruh pada efektivitas program. Dengan adanya lingkungan kerja yang inklusif, setiap anggota merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi lebih. Ini juga menciptakan kepercayaan antara anggota tim dan dengan masyarakat, yang sangat penting dalam menangani kasus KDRT.

Interviewer: Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sifat demokratis dalam tim JPPA agar program berjalan lebih efektif dan transparan?

Interviewee: Untuk meningkatkan sifat demokratis, kami perlu lebih sering melibatkan seluruh anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Pelatihan tentang pengambilan keputusan yang partisipatif dan penyelenggaraan diskusi yang lebih terbuka akan sangat membantu. Dengan cara ini, setiap anggota tim akan merasa lebih berperan aktif dan bertanggung jawab atas keberhasilan program.

Struktur Birokrasi

Pengangkatan Birokrasi

Interviewer: Bagaimana proses pengangkatan aparatur dalam JPPA dilakukan?

Informan 1: Proses pengangkatan aparatur di JPPA dilakukan secara sukarela. Tidak ada seleksi formal atau persyaratan khusus bagi anggota yang ingin bergabung. Biasanya, mereka yang memiliki kepedulian terhadap isu perempuan dan anak dapat langsung bergabung melalui jaringan yang sudah ada, baik dari rekomendasi anggota lama maupun melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh JPPA.

Interviewer: Apakah sistem pengangkatan di JPPA mendukung efisiensi program?

Informan 1: Dari satu sisi, sistem ini memungkinkan siapa saja yang memiliki kepedulian untuk ikut berkontribusi tanpa terhalang prosedur administratif yang rumit. Namun, di sisi lain, karena tidak ada seleksi berbasis kompetensi, sering kali ada perbedaan pemahaman dan kemampuan di antara anggota, yang bisa memengaruhi efektivitas program.

Interviewer: Apa tantangan dalam hal perekrutan yang memengaruhi pelaksanaan program?

Informan 1: Tantangan utamanya adalah memastikan anggota yang bergabung memiliki komitmen jangka panjang. Karena sifatnya sukarela, ada kecenderungan beberapa anggota tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, kurangnya standar kompetensi juga bisa menjadi kendala dalam menangani kasus-kasus yang membutuhkan keterampilan khusus, seperti pendampingan hukum atau psikososial bagi korban KDRT.

Interviewer: Apakah prosedur pengangkatan yang ada saat ini mendukung tujuan JPPA?

Informan 1: Secara umum, prosedur pengangkatan yang fleksibel membantu memperluas jaringan perlindungan. Namun, untuk mencapai tujuan JPPA secara maksimal, mungkin perlu ada sistem seleksi atau pelatihan awal bagi anggota baru agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka.

Interviewer: Apa yang dapat diperbaiki dalam sistem pengangkatan di JPPA?

Informan 1: Saya rasa perlu ada sistem pelatihan awal sebelum seseorang benar-benar bergabung. Bisa dalam bentuk pelatihan singkat tentang peran dan tanggung jawab mereka, serta pemahaman dasar tentang hukum dan psikologi terkait KDRT. Selain itu, ada baiknya dibuat mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan bahwa anggota yang bergabung tetap aktif dan berkontribusi secara optimal.

Insentif

Interviewer: Bagaimana kebijakan insentif bagi aparaturnya yang terlibat dalam Program JPPA?

Informan 1: Saat ini, JPPA tidak memberikan gaji tetap bagi anggotanya karena sifatnya yang berbasis kesukarelaan. Namun, ada bentuk insentif lain seperti penghargaan non-finansial dan uang transport untuk kegiatan penjangkauan. Beberapa anggota juga mendapat kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka.

Interviewer: Apakah insentif yang diberikan cukup memotivasi tim untuk mencapai target program?

Informan 1: Insentif yang ada saat ini memang membantu dalam operasional, tetapi untuk jangka panjang, masih banyak yang merasa kurang. Beberapa anggota yang memiliki kesibukan lain kadang sulit untuk tetap aktif karena keterbatasan insentif yang bisa mendukung keberlanjutan kerja mereka di lapangan.

Interviewer: Apa hambatan dalam memberikan insentif kepada tim JPPA?

Informan 1: Hambatan utamanya adalah keterbatasan anggaran. Karena JPPA tidak memiliki sumber pendanaan tetap, insentif yang diberikan sering kali bergantung pada proyek atau hibah dari pihak tertentu. Selain itu, mekanisme pencairan dana juga sering kali memakan waktu, sehingga insentif tidak selalu bisa diberikan tepat waktu.

Interviewer: Seberapa besar pengaruh insentif terhadap keberhasilan program dalam mengurangi KDRT?

Informan 1: Insentif berperan penting dalam mempertahankan keterlibatan anggota JPPA. Jika insentif lebih memadai, kemungkinan besar lebih banyak orang yang tertarik dan bisa memberikan kontribusi lebih optimal. Dengan anggota yang lebih aktif dan termotivasi, tentu penanganan kasus KDRT bisa lebih cepat dan efektif.

Interviewer: Menurut Anda, insentif seperti apa yang bisa meningkatkan kinerja tim JPPA?

Informan 1: Selain uang transport, mungkin bisa dipertimbangkan bentuk insentif lain seperti tunjangan bagi mereka yang aktif dalam kurun waktu tertentu. Insentif non-finansial seperti sertifikasi, akses ke pelatihan eksklusif, atau peluang kerja sama dengan lembaga lain juga bisa menjadi dorongan yang baik bagi anggota JPPA.

Interviewer: Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya. Wawancara ini sangat membantu dalam memahami lebih dalam tentang implementasi JPPA.

Informan 1: Sama-sama, saya senang bisa berbagi pengalaman terkait program ini. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan JPPA ke depan

Lampiran 9 Hasil Wawancara dengan Ata Nuridha, SH. Selaku Kepala Sub Koordinator JPPA

Interviewer: "Halo, Bu Ata. Gimana kabarnya hari ini? Siap ngobrol-ngobrol soal Program JPPA?"

Interviewee: "Halo, kabar baik, terima kasih. Siap banget! Program JPPA ini penting banget buat daerah kita, jadi saya senang bisa berbagi."

1. Pertanyaan Umum

Interviewer: "Bu Ata, sebelum menjabat sebagai Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak di DP3A Kota Semarang, apa saja pengalaman jabatan yang pernah Ibu emban?"

Interviewee: "Sebelumnya, saya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset di Satpol PP pada tahun 2021. Dalam posisi itu, saya bertanggung jawab mengelola keuangan dan aset organisasi dengan memastikan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran."

Interviewer: "Latar belakang Bapak sangat menarik. Bagaimana awalnya keterlibatan Anda dalam Program JPPA ini?"

Interviewee: "Terima kasih. Keterlibatan saya dalam JPPA berawal ketika saya ditugaskan sebagai Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak. Program JPPA menjadi salah satu prioritas karena kasus KDRT memerlukan penanganan yang sistematis dan kolaboratif. Saya merasa tantangan di posisi ini lebih berat, tetapi juga memberikan peluang besar untuk berkontribusi langsung terhadap masyarakat, terutama perempuan dan anak."

Interviewer: "Menurut Anda, apa tujuan utama dari Program JPPA?"

Interviewee: "Tujuan utamanya adalah menekan angka KDRT dengan cara menyediakan layanan perlindungan yang mudah diakses dan memberdayakan perempuan dan anak. Selain itu, program ini juga mendorong edukasi dan kesadaran masyarakat agar bisa mencegah kekerasan sejak dini."

Interviewer: "Bagaimana proses implementasi Program JPPA di daerah Anda dalam menangani kasus KDRT?"

Interviewee: "Prosesnya dimulai dari pelaporan kasus melalui langsung ke kantor layanan. Kami punya tim reaksi cepat yang bekerja sama dengan pihak berwenang dan tenaga medis. Setelah itu, korban diberi pendampingan psikologis dan hukum sesuai kebutuhannya."

Interviewer: "Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam pelaksanaan Program JPPA?"

Interviewee: "Tantangan terbesar itu kurangnya sumber daya, terutama tenaga ahli dan dana. Selain itu, stigma sosial juga sering menghambat korban untuk melapor. Belum lagi koordinasi antarinstansi yang kadang kurang lancar."

Dimensi Komunikasi: Transmisi

Interviewer: "Bagaimana informasi tentang Program JPPA disampaikan ke pemangku kepentingan?"

Interviewee: "Kami menggunakan berbagai metode, seperti sosialisasi langsung, media sosial, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat. Fokus kami adalah memastikan pesan sampai ke semua lapisan masyarakat, termasuk yang di pelosok."

Interviewer: "Ada kendala nggak waktu menyampaikan informasi ke lapangan? Kalau ada, gimana cara Anda mengatasinya?"

Interviewee: "Ada, terutama akses komunikasi yang terbatas. Kami biasanya bekerja sama dengan kepala desa atau perangkat lokal untuk menjangkau masyarakat setempat."

Interviewer: "Apa tantangan terbesar dalam koordinasi komunikasi antar pihak yang terlibat?"

Interviewee: "Kadang ada perbedaan interpretasi kebijakan antara instansi pusat dan daerah. Kami coba atasi dengan pertemuan rutin untuk menyamakan pemahaman dan mendiskusikan solusi."

Interviewer: "Seberapa efektif proses komunikasi dalam memastikan semua pihak memahami tujuan JPPA?"

Interviewee: "Secara umum cukup efektif, tapi ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam penyampaian teknis. Beberapa pihak masih butuh penjelasan lebih rinci agar benar-benar paham."

Interviewer: "Apa saran Anda untuk meningkatkan jalur komunikasi agar lebih efisien?"

Interviewee: "Mungkin perlu ditambah pelatihan komunikasi untuk petugas lapangan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi berbasis mobile juga bisa sangat membantu."

Dimensi Komunikasi: Kejelasan

Interviewer: "Menurut Anda, sudah jelas belum pesan-pesan yang disampaikan ke tim terkait JPPA?"

Interviewee: "Pesan yang disampaikan sebenarnya cukup jelas, tapi kadang ada istilah teknis yang sulit dipahami oleh petugas di tingkat bawah. Ini perlu lebih disederhanakan."

Interviewer: "Apakah setiap instruksi dalam Program JPPA sudah cukup jelas bagi semua pihak yang terlibat?"

Interviewee: "Instruksi umumnya sudah jelas, tapi untuk kasus khusus seperti anak di bawah umur, masih butuh penjelasan tambahan supaya nggak ada miskomunikasi."

Interviewer: "Kalau ada ketidakjelasan atau miskomunikasi, biasanya gimana cara Anda mengatasinya?"

Interviewee: "Kami langsung adakan briefing tambahan atau diskusi grup untuk meluruskan informasi. Kadang kami juga libatkan ahli untuk menjelaskan bagian yang lebih rumit."

Interviewer: "Menurut Anda, apakah kejelasan informasi ini mendukung efektivitas pelaksanaan program?"

Interviewee: "Tentu saja, kejelasan informasi sangat penting. Kalau pesan nggak jelas, pelaksana di lapangan jadi bingung, dan itu bisa memperlambat penanganan."

Interviewer: "Apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kejelasan komunikasi di JPPA?"

Interviewee: "Buat panduan atau SOP yang lebih sederhana, mungkin dengan infografis atau video. Selain itu, feedback dari lapangan juga harus lebih sering dikumpulkan."

Dimensi Komunikasi: Konsistensi

Interviewer: "Menurut Anda, seberapa konsisten informasi yang diterima oleh tim JPPA?"

Interviewee: "Secara umum konsisten, tapi ada beberapa kasus di mana informasi berubah karena kebijakan baru, dan itu kadang bikin bingung di lapangan."

Interviewer: "Ada nggak perubahan atau penyesuaian dalam pesan yang disampaikan selama implementasi?"

Interviewee: "Ada, terutama waktu ada perubahan regulasi dari pusat. Kami biasanya langsung revisi panduan dan sosialisasikan ulang ke tim."

Interviewer: "Kalau pesan nggak konsisten, dampaknya ke pelaksanaan program gimana?"

Interviewee: "Dampaknya cukup besar, karena bisa bikin koordinasi jadi kacau dan menghambat penyelesaian kasus. Korban juga bisa kehilangan kepercayaan pada layanan kami."

Interviewer: "Menurut Anda, konsistensi komunikasi ini berdampak besar nggak ke keberhasilan program?"

Interviewee: "Iya, sangat berdampak. Kalau komunikasinya konsisten, semua pihak bisa bekerja lebih efisien, dan korban merasa lebih terlayani."

Interviewer: "Apa cara terbaik untuk menjaga konsistensi dalam komunikasi JPPA?"

Interviewee: "Penting buat punya tim khusus yang fokus pada manajemen komunikasi. Selain itu, setiap perubahan kebijakan harus segera disosialisasikan dengan media yang tepat."

Interviewer: "Tadi kita udah ngobrol soal komunikasi. Sekarang saya mau tanya soal sumber daya di Program JPPA. Siap, ya, Bu?"

Interviewee: "Tentu saja, siap banget. Sumber daya ini kan salah satu pondasi utama buat keberhasilan JPPA."

1. Sumber Daya: Sumber Daya Manusia

Interviewer: "Seberapa penting peran sumber daya manusia dalam keberhasilan Program JPPA?"

Interviewee: "Sangat penting. SDM adalah ujung tombak dalam program ini, baik dalam penanganan korban KDRT maupun edukasi masyarakat. Tanpa SDM yang kompeten, tujuan program nggak akan tercapai."

Interviewer: "Apakah personel yang terlibat dalam JPPA sudah memadai secara jumlah dan kompetensi?"

Interviewee: "Jumlah personel masih kurang. Dari segi kompetensi, sebagian besar sudah terlatih, tapi ada beberapa yang masih perlu pelatihan tambahan terkait penanganan pertama saat ada aduan masuk dan aturan hukum."

Interviewer: "Apa kendala utama yang Anda hadapi terkait sumber daya manusia?"

Interviewee: "Rotasi pegawai yang terlalu cepat sering jadi kendala, karena mereka perlu waktu untuk beradaptasi. Selain itu, beban kerja yang tinggi sering membuat tim cepat lelah secara fisik dan mental."

Interviewer: "Bagaimana Anda menilai efektivitas sumber daya manusia dalam mendukung program JPPA?"

Interviewee: "Mereka sudah sangat berdedikasi, tapi efektivitasnya masih bisa ditingkatkan dengan pembagian tugas yang lebih jelas dan pelatihan berkelanjutan."

Interviewer: "Bagaimana Anda menyarankan agar kualitas SDM dapat ditingkatkan?"

Interviewee: "Perlu lebih banyak pelatihan, khususnya dalam penanganan korban dengan latar belakang berbeda. Selain itu, insentif dan penghargaan juga penting untuk meningkatkan motivasi tim."

Sumber Daya: Anggaran

Interviewer: "Apakah anggaran yang tersedia cukup untuk mendukung operasional JPPA?"

Interviewee: "Anggaran yang ada sebenarnya belum cukup, apalagi untuk menjangkau semua daerah. Banyak kebutuhan program yang terpaksa diprioritaskan karena keterbatasan dana."

Interviewer: "Bagaimana pengelolaan anggaran untuk berbagai kegiatan dalam Program JPPA?"

Interviewee: "Kami sangat berhati-hati dalam pengelolaan anggaran. Sebagian besar digunakan untuk operasional, seperti pelatihan, pendampingan korban, dan sosialisasi. Tapi, pengelolaan ini tetap terasa berat karena dananya terbatas."

Interviewer: "Apa hambatan terbesar terkait pendanaan yang memengaruhi implementasi JPPA?"

Interviewee: "Hambatan terbesar itu proses pengajuan dana yang sering kali lambat. Selain itu, alokasi dana dari pemerintah daerah kadang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan."

Interviewer: "Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi efektivitas program JPPA dalam menekan KDRT?"

Interviewee: "Pasti, keterbatasan anggaran membuat beberapa kegiatan seperti pelatihan dan sosialisasi harus dikurangi. Ini tentu berdampak pada jangkauan program."

Interviewer: "Apa saran Anda dalam pengelolaan anggaran agar mendukung keberhasilan JPPA?"

Interviewee: "Perlu ada peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, bisa juga mencari dana tambahan dari CSR atau kemitraan dengan lembaga swasta."

Sumber Daya: Peralatan

Interviewer: "Apakah peralatan yang tersedia sudah cukup untuk melaksanakan program JPPA dengan baik?"

Interviewee: "Saat ini masih belum cukup, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan teknologi. Misalnya, komputer dan alat komunikasi masih sangat terbatas."

Interviewer: "Bagaimana penggunaan fasilitas dan peralatan untuk mendukung program JPPA?"

Interviewee: "Kami berusaha memaksimalkan fasilitas yang ada, seperti menggunakan balai desa atau kantor kecamatan untuk kegiatan. Tapi, ini hanya solusi sementara."

Interviewer: "Apa kendala yang dihadapi terkait ketersediaan peralatan?"

Interviewee: "Ketersediaan alat sering tidak merata. Di beberapa daerah, fasilitas dasar seperti kendaraan operasional juga masih kurang."

Interviewer: "Bagaimana keterbatasan peralatan memengaruhi pelaksanaan program JPPA?"

Interviewee: "Keterbatasan ini memperlambat respons kami, terutama untuk kasus darurat. Kadang, tim harus bergantung pada alat pribadi untuk mendukung operasional."

Interviewer: "Menurut Anda, peralatan apa yang perlu ditambahkan?"

Interviewee: "Kami sangat membutuhkan kendaraan operasional, komputer, dan perangkat komunikasi yang lebih modern. Selain itu, ruang konseling yang layak juga penting."

Sumber Daya: Kewenangan

Interviewer: "Apakah kewenangan yang diberikan kepada tim JPPA sudah cukup untuk menangani berbagai kasus KDRT secara efektif?"

Interviewee: "Secara umum cukup, tapi ada beberapa situasi di mana kami membutuhkan kewenangan tambahan, misalnya untuk mendesak pelaku menjalani rehabilitasi."

Interviewer: "Bagaimana Anda memanfaatkan kewenangan yang ada dalam pelaksanaan JPPA, terutama dalam penanganan kasus KDRT?"

Interviewee: "Kami memanfaatkan kewenangan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan. Koordinasi dengan pihak kepolisian juga jadi bagian penting."

Interviewer: "Apa saja kendala yang Anda hadapi terkait kewenangan dalam menjalankan tugas JPPA?"

Interviewee: "Kadang ada kebingungan di tingkat lokal terkait batas kewenangan kami, misalnya dalam kasus yang melibatkan keluarga berpengaruh atau pejabat setempat."

Interviewer: "Menurut Anda, apakah kewenangan yang dimiliki JPPA saat ini cukup efektif untuk mencapai tujuan penurunan angka KDRT?"

Interviewee: "Efektif, tapi masih perlu diperluas. Misalnya, akses langsung ke dana darurat untuk korban bisa mempercepat penanganan."

Interviewer: "Apa rekomendasi Anda untuk memperkuat kewenangan JPPA agar lebih optimal dalam menangani kasus KDRT?"

Interviewee: "Kewenangan kami perlu diperluas, khususnya dalam pendampingan hukum dan akses ke sumber daya darurat. Selain itu, aturan hukum yang lebih tegas juga bisa membantu memperkuat posisi JPPA."

Interviewer: "Sekarang kita masuk ke topik disposisi atau sikap dari aparat JPPA. Saya penasaran bagaimana sikap dan perilaku tim ini bisa mendukung keberhasilan program. Bisa, ya, kita mulai?"

Interviewee: "Tentu, disposisi ini memang penting banget untuk keberhasilan program, jadi ayo kita bahas!"

1. Disposisi/Sikap: Disiplin Aparatur

Interviewer: "Bagaimana disiplin aparat yang terlibat dalam Program JPPA?"

Interviewee: "Secara umum, disiplin tim cukup baik. Kebanyakan dari mereka sangat sadar akan pentingnya tugas yang diemban, terutama dalam menangani kasus KDRT yang sensitif."

Interviewer: "Apakah ada kebijakan disiplin yang diterapkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana?"

Interviewee: "Ada, seperti absensi harian, laporan berkala, dan evaluasi rutin. Selain itu, kami juga punya mekanisme sanksi jika ada anggota yang lalai."

Interviewer: "Apa kendala dalam menjaga kedisiplinan tim JPPA?"

Interviewee: "Kendalanya sering kali berasal dari beban kerja yang tinggi, terutama di daerah yang padat kasus. Hal ini kadang membuat jadwal kerja jadi tidak teratur."

Interviewer: "Menurut Anda, apakah disiplin aparaturnya berkontribusi pada keberhasilan program JPPA?"

Interviewee: "Sangat berkontribusi. Disiplin itu kunci untuk memastikan semua proses berjalan sesuai jadwal dan tujuan program tercapai."

Interviewer: "Apa saran Anda untuk meningkatkan kedisiplinan dalam tim?"

Interviewee: "Perlu ada penghargaan untuk tim yang disiplin, selain pelatihan manajemen waktu untuk membantu mereka menangani beban kerja."

Disposisi/Sikap: Kejujuran Aparatur

Interviewer: "Bagaimana kejujuran dipupuk dalam JPPA, terutama dalam menangani data atau kasus KDRT?"

Interviewee: "Kejujuran jadi prinsip utama di JPPA. Kami sering mengingatkan tim tentang tanggung jawab mereka, terutama soal kerahasiaan data korban."

Interviewer: "Apakah ada upaya tertentu untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan program?"

Interviewee: "Kami menerapkan sistem pelaporan terbuka, di mana setiap kegiatan tercatat dengan jelas dan bisa diaudit kapan saja."

Interviewer: "Apa tantangan terbesar dalam memastikan kejujuran di antara tim?"

Interviewee: "Kadang ada tekanan dari pihak luar, misalnya keluarga pelaku atau pejabat setempat, yang bisa menguji integritas tim."

Interviewer: "Seberapa penting transparansi dan kejujuran dalam mencapai tujuan JPPA?"

Interviewee: "Sangat penting, karena kepercayaan masyarakat pada program ini bergantung pada seberapa jujur dan transparan kami dalam bekerja."

Interviewer: "Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kejujuran dalam tim?"

Interviewee: "Pelatihan etika kerja secara rutin dan memastikan adanya pengawasan internal yang ketat bisa sangat membantu."

Disposisi/Sikap: Budaya Kerja Aparatur

Interviewer: "Bagaimana budaya kerja dikembangkan di antara aparaturnya yang terlibat dalam Program JPPA, terutama dalam menangani kasus KDRT?"

Interviewee: "Budaya kerja yang kami bangun fokus pada kolaborasi dan empati. Kami selalu mendorong tim untuk bekerja bersama dan mendahulukan kebutuhan korban."

Interviewer: "Apakah ada nilai-nilai atau kebiasaan tertentu yang diterapkan dalam tim JPPA untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kerja?"

Interviewee: "Ada, seperti nilai kerja sama, komitmen pada perlindungan korban, dan pendekatan berbasis solusi. Ini sering kami tekankan dalam pertemuan rutin."

Interviewer: "Apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun budaya kerja yang solid dan kooperatif di JPPA?"

Interviewee: "Tantangan utamanya adalah perbedaan latar belakang tim, karena ada yang berasal dari dinas lain. Kadang, ini memengaruhi cara kerja mereka."

Interviewer: "Menurut Anda, bagaimana budaya kerja di JPPA memengaruhi keberhasilan program dalam menangani kasus KDRT?"

Interviewee: "Budaya kerja yang baik membuat tim lebih efisien dan solid. Ini penting, terutama saat menangani kasus yang membutuhkan respons cepat."

Interviewer: "Apa saran Anda untuk meningkatkan budaya kerja di JPPA agar lebih mendukung pencapaian tujuan program?"

Interviewee: "Meningkatkan sesi pelatihan bersama dan kegiatan team building bisa membantu menyatukan tim lebih baik."

Disposisi/Sikap: Sifat Demokratis

Interviewer: "Sejauh mana aspek demokratis diterapkan dalam pengambilan keputusan terkait Program JPPA?"

Interviewee: "Kami selalu mencoba melibatkan seluruh anggota tim, terutama dalam menyusun strategi atau menyelesaikan masalah."

Interviewer: "Bagaimana proses pengambilan keputusan yang melibatkan masukan dari seluruh anggota tim atau pihak-pihak terkait di JPPA?"

Interviewee: "Kami biasanya mengadakan rapat koordinasi, di mana setiap anggota bebas memberikan masukan. Masukan ini kemudian dirumuskan bersama menjadi keputusan final."

Interviewer: "Apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga proses yang demokratis dalam tim JPPA, terutama saat menangani situasi yang membutuhkan keputusan cepat?"

Interviewee: "Kadang, proses demokratis memakan waktu lebih lama. Di situasi darurat, kami perlu mengambil keputusan langsung tanpa konsultasi yang luas."

Interviewer: "Seberapa besar pengaruh sifat demokratis dalam tim terhadap efektivitas program JPPA, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif?"

Interviewee: "Sifat demokratis sangat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap anggota merasa dihargai dan didengar. Ini meningkatkan motivasi mereka."

Interviewer: "Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sifat demokratis dalam tim JPPA agar program berjalan lebih efektif dan transparan?"

Interviewee: "Meningkatkan frekuensi rapat evaluasi dan menyediakan platform komunikasi yang lebih terbuka, seperti grup diskusi online, bisa memperkuat demokrasi dalam tim."

Struktur Birokrasi

Pengangkatan Birokrasi

Interviewer: Bagaimana proses pengangkatan aparatur dalam JPPA dilakukan?

Informan 2: Proses pengangkatan di JPPA lebih bersifat terbuka dan berbasis kesukarelaan. Siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap isu perempuan dan anak dapat bergabung tanpa adanya proses seleksi ketat. Biasanya, calon anggota mendapatkan informasi melalui jaringan sosial, rekomendasi dari anggota lama, atau melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh JPPA.

Interviewer: Apakah sistem pengangkatan di JPPA mendukung efisiensi program?

Informan 2: Ada kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya, sistem ini membuat JPPA lebih inklusif dan dapat menarik banyak pihak untuk terlibat. Namun, di sisi lain, tanpa adanya standar kompetensi yang jelas, ada risiko ketidakseimbangan dalam kualitas tenaga yang terlibat, terutama dalam menangani kasus-kasus yang kompleks.

Interviewer: Apa tantangan dalam hal perekrutan yang memengaruhi pelaksanaan program?

Informan 2: Tantangan terbesarnya adalah memastikan anggota yang bergabung benar-benar memiliki komitmen jangka panjang. Karena sifatnya sukarela, beberapa anggota mungkin tidak memiliki dedikasi yang kuat, sehingga dalam praktiknya ada yang tidak aktif atau hanya terlibat dalam waktu singkat. Selain itu, minimnya pelatihan awal membuat sebagian anggota kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Interviewer: Apakah prosedur pengangkatan yang ada saat ini mendukung tujuan JPPA?

Informan 2: Pada dasarnya, prosedur ini memungkinkan keterlibatan masyarakat secara luas, yang memang menjadi salah satu tujuan JPPA. Namun, jika ingin meningkatkan efektivitas program, perlu ada sistem seleksi minimal atau pelatihan dasar bagi anggota baru agar mereka lebih siap dalam menjalankan tugasnya.

Interviewer: Apa yang dapat diperbaiki dalam sistem pengangkatan di JPPA?

Informan 2: Saya pikir perlu ada pelatihan dasar yang wajib diikuti oleh calon anggota sebelum resmi bergabung. Selain itu, ada baiknya dibuat sistem monitoring terhadap keaktifan anggota, sehingga mereka yang tidak aktif dalam waktu tertentu bisa dievaluasi dan digantikan dengan anggota baru yang lebih siap.

Insentif

Interviewer: Bagaimana kebijakan insentif bagi aparatur yang terlibat dalam Program JPPA?

Informan 2: Saat ini, insentif bagi anggota JPPA masih terbatas. Karena sifatnya sukarela, tidak ada gaji tetap yang diberikan. Namun, ada kompensasi dalam bentuk uang transport untuk kegiatan lapangan, penghargaan non-finansial, serta kesempatan mengikuti

pelatihan atau sertifikasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Interviewer: Apakah insentif yang diberikan cukup memotivasi tim untuk mencapai target program?

Informan 2: Insentif yang ada saat ini memang membantu, tetapi bagi sebagian anggota, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, masih kurang untuk mendukung keterlibatan jangka panjang. Banyak yang harus membagi waktu antara kegiatan JPPA dengan pekerjaan lain, sehingga komitmen mereka tidak selalu maksimal.

Interviewer: Apa hambatan dalam memberikan insentif kepada tim JPPA?

Informan 2: Hambatan utamanya tentu dari segi anggaran. Karena pendanaan program ini tidak tetap, insentif yang diberikan juga tergantung pada ketersediaan dana dari hibah atau kerja sama dengan pihak lain. Selain itu, proses pencairan dana yang cukup birokratis sering kali membuat insentif terlambat diterima oleh anggota.

Interviewer: Seberapa besar pengaruh insentif terhadap keberhasilan program dalam mengurangi KDRT?

Informan 2: Insentif cukup berpengaruh terhadap motivasi anggota. Jika insentif lebih memadai, anggota bisa lebih fokus dan konsisten dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas program dalam menangani kasus KDRT. Jika terlalu mengandalkan kesukarelaan tanpa dukungan finansial yang layak, dikhawatirkan banyak anggota yang tidak bisa bertahan lama di program ini.

Interviewer: Menurut Anda, insentif seperti apa yang bisa meningkatkan kinerja tim JPPA?

Informan 2: Selain uang transport, mungkin bisa dipertimbangkan insentif berbasis kinerja, misalnya penghargaan bagi anggota yang aktif dalam periode tertentu. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah atau lembaga lain untuk memberikan beasiswa, pelatihan lanjutan, atau peluang karier bagi anggota JPPA juga bisa menjadi bentuk insentif yang menarik dan berkelanjutan.

Interviewer: Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Wawancara ini sangat membantu dalam memahami lebih dalam tentang implementasi JPPA.

Informan 2: Sama-sama, saya berharap hasil penelitian ini bisa memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan program JPPA ke depan.

Lampiran 10 Hasil Wawancara dengan Catur Karyanti, SE. Selaku Kepala UPTD PPA Kota Semarang

Pertanyaan Umum

Interviewer: Bisakah Anda menceritakan latar belakang Anda dan bagaimana keterlibatan Anda dalam Program JPPA?

Catur Karyanti: Saya sudah cukup lama berkecimpung di bidang perlindungan perempuan dan anak. Sebelum di UPTD PPA, saya bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan data informasi. Keterlibatan saya dalam Program JPPA dimulai ketika saya mulai melihat kebutuhan akan koordinasi yang lebih kuat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari situ, saya mulai aktif mendorong optimalisasi program ini di Kota Semarang.

Interviewer: Apa yang Anda ketahui tentang tujuan utama Program JPPA?

Catur Karyanti: Tujuan utama Program JPPA adalah untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan dan anak. Kami ingin memastikan bahwa korban mendapatkan akses yang cepat terhadap perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan pemulihan psikologis.

Interviewer: Bagaimana proses implementasi Program JPPA dalam menangani kasus KDRT di daerah Anda?

Catur Karyanti: Program JPPA di Kota Semarang telah berjalan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, lembaga sosial, dan pihak terkait lainnya. Kami memiliki mekanisme untuk merujuk korban ke tempat yang tepat, mulai dari pelayanan medis, konseling, hingga pendampingan hukum. Proses ini melibatkan koordinasi yang baik di antara pihak-pihak terkait untuk memastikan kasus-kasus KDRT dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Interviewer: Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam pelaksanaan Program JPPA?

Catur Karyanti: Tantangan utama adalah koordinasi antar lembaga yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kami juga menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga kerja yang berkompeten maupun anggaran yang terbatas. Meskipun begitu, kami terus berusaha untuk mencari solusi agar program ini bisa tetap berjalan efektif.

Komunikasi

a. Dimensi Transmisi

Interviewer: Bagaimana informasi tentang Program JPPA disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan?

Catur Karyanti: Informasi disampaikan melalui berbagai saluran, seperti rapat koordinasi rutin, surat resmi, dan media sosial. Kami juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang program ini.

Interviewer: Apakah ada kendala dalam menyampaikan informasi ke lapangan? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?

Catur Karyanti: Kendala utamanya adalah kurangnya sarana komunikasi yang memadai di beberapa daerah. Kami mengatasinya dengan memanfaatkan teknologi, seperti WhatsApp Group, untuk memudahkan pertukaran informasi secara langsung.

Interviewer: Apa tantangan terbesar dalam mengoordinasikan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat?

Catur Karyanti: Tantangan terbesar adalah perbedaan tingkat pemahaman dan prioritas di antara berbagai pihak. Beberapa instansi lebih fokus pada tugas mereka sendiri, sehingga kadang kesulitan untuk bekerja bersama dengan lebih efisien.

Interviewer: Seberapa efektif proses komunikasi dalam memastikan semua pihak memahami tujuan JPPA?

Catur Karyanti: Proses komunikasi cukup efektif, tetapi tentu saja masih perlu ditingkatkan. Kami terus memperbaiki cara menyampaikan pesan agar lebih jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan jalur komunikasi agar lebih efisien dalam JPPA?

Catur Karyanti: Saya rasa penting untuk memiliki sistem komunikasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Misalnya, dengan menggunakan platform digital yang memungkinkan semua pihak untuk mengakses informasi secara real-time.

b. Dimensi Kejelasan

Interviewer: Bagaimana kejelasan pesan atau informasi yang disampaikan kepada tim terkait Program JPPA?

Catur Karyanti: Kami berusaha agar pesan yang disampaikan selalu jelas dan mudah dipahami. Namun, ada kalanya pesan harus disampaikan berulang kali agar bisa dipahami dengan lebih baik.

Interviewer: Apakah setiap instruksi dalam program JPPA sudah cukup jelas bagi semua pihak yang terlibat?

Catur Karyanti: Secara umum, instruksi sudah cukup jelas, namun ada beberapa hal yang perlu penegasan lebih lanjut, terutama dalam hal prosedur teknis yang melibatkan beberapa pihak.

Interviewer: Bagaimana Anda mengatasi ketidakjelasan atau miskomunikasi yang terjadi?

Catur Karyanti: Kami selalu mengadakan evaluasi rutin dan diskusi tim untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dengan jelas apa yang perlu dilakukan. Jika terjadi miskomunikasi, kami langsung melakukan klarifikasi.

Interviewer: Menurut Anda, apakah kejelasan informasi mendukung efektivitas pelaksanaan program?

Catur Karyanti: Tentu saja, kejelasan informasi sangat mendukung efektivitas program. Tanpa pemahaman yang jelas, pelaksanaan program bisa terganggu dan tidak berjalan sesuai harapan.

Interviewer: Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kejelasan komunikasi di Program JPPA?

Catur Karyanti: Salah satu langkah yang bisa diambil adalah membuat dokumentasi yang lebih rinci dan terstruktur mengenai prosedur yang harus diikuti oleh setiap pihak yang terlibat, serta mengadakan pelatihan secara berkala.

c. Dimensi Konsistensi

Interviewer: Seberapa konsisten informasi yang diterima oleh seluruh tim JPPA?

Catur Karyanti: Secara umum, informasi yang diterima cukup konsisten. Namun, kadang ada perubahan yang disebabkan oleh perkembangan situasi atau kebijakan terbaru yang mempengaruhi pelaksanaan program.

Interviewer: Apakah ada perubahan atau penyesuaian dalam pesan yang disampaikan selama implementasi?

Catur Karyanti: Ada beberapa penyesuaian, terutama ketika ada kebijakan baru atau perubahan dalam regulasi yang mempengaruhi program. Kami selalu berusaha untuk segera menyampaikan perubahan tersebut kepada seluruh tim.

Interviewer: Apa dampak dari ketidakkonsistenan pesan terhadap pelaksanaan program?

Catur Karyanti: Ketidakkonsistenan pesan bisa menyebabkan kebingungan di lapangan dan berdampak pada ketidaktepatan dalam pelaksanaan program. Hal ini tentu harus dihindari agar program bisa berjalan dengan baik.

Interviewer: Apakah konsistensi komunikasi berdampak pada keberhasilan program dalam menekan KDRT?

Catur Karyanti: Konsistensi komunikasi sangat penting karena memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan prosedur program. Tanpa konsistensi, program bisa berjalan kurang efektif.

Interviewer: Bagaimana cara terbaik untuk menjaga konsistensi dalam komunikasi pada Program JPPA?

Catur Karyanti: Cara terbaik adalah dengan melakukan monitoring secara berkala, memastikan bahwa setiap instruksi dan informasi yang disampaikan tetap sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan.

Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Interviewer: Seberapa penting peran sumber daya manusia dalam keberhasilan Program JPPA?

Catur Karyanti: Sumber daya manusia adalah faktor utama dalam keberhasilan Program JPPA. Tanpa tenaga profesional yang kompeten dan berdedikasi, sulit bagi program ini untuk berjalan efektif. Petugas lapangan, konselor, psikolog, serta tenaga hukum harus memiliki keterampilan yang tepat agar dapat menangani kasus dengan baik.

Interviewer: Apakah personel yang terlibat dalam JPPA sudah memadai secara jumlah dan kompetensi?

Catur Karyanti: Saat ini, jumlah personel masih terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Dari segi kompetensi, sebagian besar personel sudah memiliki latar belakang yang sesuai, tetapi perlu pelatihan lanjutan secara berkala agar mereka dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam menangani kasus-kasus kekerasan.

Interviewer: Apa kendala utama yang Anda hadapi terkait sumber daya manusia?

Catur Karyanti: Kendala utama adalah jumlah tenaga yang belum mencukupi dan tingkat kelelahan petugas yang tinggi karena beban kerja yang besar. Selain itu, ada keterbatasan dalam anggaran untuk merekrut tenaga tambahan dan memberikan pelatihan yang lebih intensif.

Interviewer: Bagaimana Anda menilai efektivitas sumber daya manusia dalam mendukung program JPPA?

Catur Karyanti: Meskipun ada keterbatasan, tim kami bekerja dengan maksimal dan berusaha memberikan layanan terbaik. Namun, efektivitasnya bisa lebih optimal jika jumlah tenaga kerja ditambah dan diberikan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Interviewer: Bagaimana Anda menyarankan agar kualitas SDM dapat ditingkatkan?

Catur Karyanti: Salah satu cara adalah dengan memberikan pelatihan rutin, baik secara internal maupun melalui kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki keahlian di bidang perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, perlu adanya insentif yang lebih baik agar motivasi kerja tetap tinggi.

Sumber Daya Anggaran

Interviewer: Apakah anggaran yang tersedia cukup untuk mendukung operasional JPPA?

Catur Karyanti: Saat ini, anggaran masih terbatas lain untuk mendukung operasional JPPA. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan sangat efisien agar tetap bisa memberikan layanan yang optimal.

Interviewer: Bagaimana pengelolaan anggaran untuk berbagai kegiatan dalam Program JPPA?

Catur Karyanti: Anggaran digunakan untuk beberapa aspek utama, seperti operasional kantor, pelatihan tenaga kerja, bantuan hukum bagi korban, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat. Kami juga memastikan ada anggaran untuk layanan psikososial bagi korban.

Interviewer: Apa hambatan terbesar terkait pendanaan yang memengaruhi implementasi JPPA?

Catur Karyanti: Hambatan terbesar adalah keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah. Selain itu, prosedur pencairan dana yang cukup panjang kadang menghambat respons cepat terhadap kasus darurat.

Interviewer: Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi efektivitas program JPPA dalam menekan KDRT?

Catur Karyanti: Ya, keterbatasan anggaran berdampak pada berbagai aspek, termasuk jumlah tenaga kerja, fasilitas yang bisa digunakan, dan cakupan layanan yang bisa diberikan. Ini membuat beberapa kasus tidak bisa ditangani secepat yang diharapkan.

Interviewer: Apa saran Anda dalam pengelolaan anggaran agar mendukung keberhasilan JPPA?

Catur Karyanti: Salah satu solusinya adalah memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga donor untuk mendapatkan tambahan pendanaan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana yang lebih besar agar program ini bisa berjalan lebih optimal.

Sumber Daya Peralatan

Interviewer: Apakah peralatan yang tersedia sudah cukup untuk melaksanakan program JPPA dengan baik?

Catur Karyanti: Beberapa fasilitas sudah cukup memadai, tetapi masih ada kekurangan, terutama dalam hal teknologi pendukung seperti sistem database untuk pencatatan kasus dan alat komunikasi bagi petugas lapangan.

Interviewer: Bagaimana penggunaan fasilitas dan peralatan untuk mendukung program JPPA?

Catur Karyanti: Kami memanfaatkan fasilitas yang ada seoptimal mungkin. Ruang konseling, ruang aduan, dan transportasi untuk mendukung mobilitas petugas adalah beberapa fasilitas utama yang kami gunakan.

Interviewer: Apa kendala yang dihadapi terkait ketersediaan peralatan?

Catur Karyanti: Kendala utamanya adalah keterbatasan jumlah dan kualitas peralatan, terutama alat komunikasi dan kendaraan operasional untuk penjangkauan kasus di wilayah yang sulit diakses.

Interviewer: Bagaimana keterbatasan peralatan memengaruhi pelaksanaan program JPPA?

Catur Karyanti: Jika peralatan kurang memadai, respons terhadap laporan kasus bisa terhambat. Misalnya, jika tidak ada kendaraan operasional, petugas sulit bergerak cepat dalam menangani kasus di semua daerah.

Interviewer: Menurut Anda, peralatan apa yang perlu ditambahkan?

Catur Karyanti: Kami membutuhkan tambahan komputer untuk sistem pencatatan kasus yang lebih baik, kendaraan operasional untuk mobilitas petugas, serta alat komunikasi yang lebih modern untuk mempercepat koordinasi.

Sumber Daya Kewenangan

Interviewer: Apakah kewenangan yang diberikan kepada tim JPPA sudah cukup untuk menangani berbagai kasus KDRT secara efektif?

Catur Karyanti: Secara umum, kewenangan sudah ada, tetapi dalam beberapa kasus, masih ada keterbatasan, terutama dalam melakukan intervensi langsung tanpa melibatkan pihak lain seperti kepolisian.

Interviewer: Bagaimana Anda memanfaatkan kewenangan yang ada dalam proses pelaksanaan Program JPPA, terutama dalam penanganan kasus KDRT?

Catur Karyanti: Kami menggunakan kewenangan yang ada untuk memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial kepada korban. Kami juga berperan dalam memfasilitasi koordinasi antara korban dengan aparat penegak hukum.

Interviewer: Apa saja kendala yang Anda hadapi terkait kewenangan dalam menjalankan tugas JPPA?

Catur Karyanti: Kendala utama adalah masih adanya batasan dalam intervensi langsung ke rumah tangga yang mengalami KDRT, terutama jika tidak ada laporan resmi dari korban.

Interviewer: Menurut Anda, apakah kewenangan yang dimiliki JPPA saat ini cukup efektif untuk mencapai tujuan penurunan angka KDRT?

Catur Karyanti: Masih perlu penguatan, terutama dalam aspek pencegahan dan perlindungan bagi korban sebelum terjadi eskalasi kekerasan lebih lanjut.

Interviewer: Apa rekomendasi Anda untuk memperkuat kewenangan JPPA agar lebih optimal dalam menangani kasus KDRT?

Catur Karyanti: Salah satunya adalah memberikan lebih banyak ruang bagi JPPA untuk mengambil tindakan preventif, seperti pendampingan wajib bagi keluarga yang berisiko mengalami KDRT, serta memperkuat kerja sama dengan pihak kepolisian untuk mempercepat proses hukum terhadap pelaku kekerasan.

Dimensi Disposisi/Sikap

Disiplin Aparatur

Interviewer: Bagaimana disiplin aparat yang terlibat dalam Program JPPA?

Catur Karyanti: Secara umum, disiplin aparat dalam Program JPPA cukup baik. Para petugas memahami bahwa pekerjaan ini membutuhkan respons cepat dan ketepatan dalam menangani kasus. Kami selalu menekankan pentingnya tanggung jawab dan kehadiran tepat waktu dalam setiap tugas.

Interviewer: Apakah ada kebijakan disiplin yang diterapkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana?

Catur Karyanti: Ya, ada kebijakan disiplin berupa absensi harian, laporan harian mengenai perkembangan kasus, serta evaluasi kinerja berkala. Jika ada yang tidak memenuhi standar kerja, kami memberikan pembinaan dan teguran agar tidak terulang kembali.

Interviewer: Apa kendala dalam menjaga kedisiplinan tim JPPA?

Catur Karyanti: Kendala utamanya adalah beban kerja yang tinggi yang terkadang membuat petugas merasa kelelahan. Selain itu, beberapa petugas juga memiliki tugas tambahan di luar JPPA sehingga perlu manajemen waktu yang lebih baik.

Interviewer: Menurut Anda, apakah disiplin aparat berkontribusi pada keberhasilan program JPPA?

Catur Karyanti: Sangat berkontribusi. Dengan disiplin yang tinggi, setiap kasus dapat ditangani dengan lebih cepat dan tepat. Disiplin juga memastikan bahwa layanan terhadap korban tetap optimal.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan kedisiplinan dalam tim?

Catur Karyanti: Kami bisa meningkatkan kedisiplinan dengan memberikan penghargaan bagi petugas yang bekerja dengan baik serta pelatihan manajemen waktu agar mereka dapat menangani beban kerja dengan lebih efisien.

Kejujuran Aparatur

Interviewer: Bagaimana kejujuran dipupuk dalam JPPA, terutama dalam menangani data atau kasus KDRT?

Catur Karyanti: Kejujuran sangat ditekankan dalam JPPA, terutama dalam pencatatan kasus dan pelaporan. Kami memiliki mekanisme audit dan supervisi untuk memastikan tidak ada manipulasi data atau penyalahgunaan informasi.

Interviewer: Apakah ada upaya tertentu untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan program?

Catur Karyanti: Ya, kami menerapkan sistem pelaporan yang dapat diakses oleh pihak terkait, serta mengadakan evaluasi rutin dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan akuntabilitas.

Interviewer: Apa tantangan terbesar dalam memastikan kejujuran di antara tim?

Catur Karyanti: Tantangan terbesar adalah adanya tekanan dari pihak luar dalam beberapa kasus yang sensitif. Oleh karena itu, kami selalu mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas.

Interviewer: Seberapa penting transparansi dan kejujuran dalam mencapai tujuan JPPA?

Catur Karyanti: Transparansi dan kejujuran sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan program berjalan dengan efektif. Tanpa kejujuran, kepercayaan masyarakat terhadap JPPA bisa berkurang.

Interviewer: Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kejujuran dalam tim?

Catur Karyanti: Kami dapat meningkatkan pengawasan internal serta memberikan pelatihan etika kerja secara rutin untuk memperkuat nilai-nilai kejujuran dalam tim.

Budaya Kerja Aparatur

Interviewer: Bagaimana budaya kerja dikembangkan di antara aparat yang terlibat dalam Program JPPA, terutama dalam menangani kasus KDRT?

Catur Karyanti: Kami mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan cepat, empati terhadap korban, serta kerja sama tim yang solid. Setiap anggota tim didorong untuk selalu siap sedia dalam menangani kasus.

Interviewer: Apakah ada nilai-nilai atau kebiasaan tertentu yang diterapkan dalam tim JPPA untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kerja?

Catur Karyanti: Kami menanamkan nilai-nilai responsivitas, keadilan, dan profesionalisme dalam setiap tugas. Selain itu, kami juga menerapkan kebiasaan berbagi informasi dan diskusi kasus secara rutin.

Interviewer: Apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun budaya kerja yang solid dan kooperatif di JPPA?

Catur Karyanti: Tantangannya adalah perbedaan latar belakang dan cara kerja di antara anggota tim. Namun, dengan komunikasi yang baik, kami bisa membangun budaya kerja yang lebih harmonis.

Interviewer: Menurut Anda, bagaimana budaya kerja di JPPA mempengaruhi keberhasilan program dalam menangani kasus KDRT?

Catur Karyanti: Budaya kerja yang baik meningkatkan efektivitas layanan dan kepuasan korban dalam mendapatkan perlindungan. Hal ini juga mempercepat penanganan kasus.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan budaya kerja di JPPA agar lebih mendukung pencapaian tujuan program?

Catur Karyanti: Saya menyarankan adanya lebih banyak sesi pelatihan bersama dan kegiatan membangun tim agar rasa kebersamaan dalam tim semakin kuat.

Sifat Demokratis

Interviewer: Sejauh mana aspek demokratis diterapkan dalam pengambilan keputusan terkait Program JPPA?

Catur Karyanti: Aspek demokratis diterapkan dengan melibatkan berbagai pihak dalam setiap pengambilan keputusan, terutama dalam merancang strategi program dan menangani kasus yang kompleks.

Interviewer: Bagaimana proses pengambilan keputusan yang melibatkan masukan dari seluruh anggota tim atau pihak-pihak terkait di JPPA?

Catur Karyanti: Kami mengadakan rapat koordinasi secara rutin, di mana setiap anggota tim dapat menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan diambil.

Interviewer: Apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga proses yang demokratis dalam tim JPPA, terutama saat menangani situasi yang membutuhkan keputusan cepat?

Catur Karyanti: Tantangan utamanya adalah bagaimana menyeimbangkan diskusi dengan kebutuhan untuk bertindak cepat dalam situasi darurat. Dalam kondisi tertentu, keputusan cepat harus diambil oleh pimpinan tanpa banyak diskusi.

Interviewer: Seberapa besar pengaruh sifat demokratis dalam tim terhadap efektivitas program JPPA, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif?

Catur Karyanti: Sifat demokratis sangat berpengaruh karena memungkinkan setiap anggota tim merasa dihargai dan berkontribusi secara maksimal. Ini juga menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan kolaboratif.

Interviewer: Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sifat demokratis dalam tim JPPA agar program berjalan lebih efektif dan transparan?

Catur Karyanti: Saya menyarankan agar ada lebih banyak forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak, serta penerapan sistem umpan balik agar setiap anggota merasa lebih didengar dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan.

Bagian 1: Struktur Birokrasi

a. Pengangkatan Birokrasi

Interviewer: Bagaimana proses pengangkatan aparatur dalam JPPA dilakukan?

Informan 3: Pengangkatan aparatur dalam JPPA dilakukan secara sukarela tanpa seleksi formal. Biasanya, calon anggota bergabung melalui rekomendasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh JPPA. Tidak ada syarat khusus, tetapi mereka yang bergabung diharapkan memiliki kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak serta kesiapan untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan.

Interviewer: Apakah sistem pengangkatan di JPPA mendukung efisiensi program?

Informan 3: Dari segi fleksibilitas, sistem ini memang memungkinkan keterlibatan yang luas. Namun, karena tidak ada seleksi yang ketat, beberapa anggota yang bergabung terkadang kurang memahami tugas mereka atau tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam menangani kasus KDRT. Hal ini bisa menjadi tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Interviewer: Apa tantangan dalam hal perekrutan yang memengaruhi pelaksanaan program?

Informan 3: Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa anggota yang bergabung memiliki komitmen jangka panjang. Banyak yang awalnya antusias, tetapi seiring waktu mereka menjadi kurang aktif karena kesibukan lain atau kurangnya dukungan finansial. Selain itu, karena tidak ada proses seleksi yang ketat, ada kesenjangan dalam pemahaman dan keterampilan antaranggota.

Interviewer: Apakah prosedur pengangkatan yang ada saat ini mendukung tujuan JPPA?

Informan 3: Secara umum, prosedur ini mendukung tujuan inklusivitas JPPA, tetapi untuk efektivitas jangka panjang, perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa anggota yang bergabung memiliki pemahaman yang cukup tentang tugas dan tanggung jawab mereka. Mungkin bisa ada pelatihan dasar sebelum seseorang benar-benar aktif dalam program ini.

Interviewer: Apa yang dapat diperbaiki dalam sistem pengangkatan di JPPA?

Informan 3: Saya pikir bisa dibuat sistem orientasi atau pelatihan dasar bagi anggota baru, sehingga mereka bisa lebih siap sebelum terjun langsung menangani kasus. Selain itu, mungkin perlu ada mekanisme evaluasi berkala untuk menilai keaktifan dan kontribusi anggota agar program bisa berjalan lebih efektif.

Bagian 2: Insentif

Interviewer: Bagaimana kebijakan insentif bagi aparaturnya yang terlibat dalam Program JPPA?

Informan 3: Saat ini, insentif yang diberikan masih sangat terbatas. Tidak ada gaji tetap bagi anggota JPPA, tetapi ada dukungan seperti uang transport untuk kegiatan tertentu, penghargaan non-finansial, serta kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan seminar terkait perlindungan perempuan dan anak.

Interviewer: Apakah insentif yang diberikan cukup memotivasi tim untuk mencapai target program?

Informan 3: Insentif yang ada memang membantu, tetapi masih kurang untuk memastikan keterlibatan penuh anggota dalam jangka panjang. Banyak anggota yang akhirnya harus membagi waktu dengan pekerjaan lain, sehingga keterlibatan mereka di JPPA tidak selalu maksimal. Jika ada dukungan insentif yang lebih baik, mungkin mereka bisa lebih fokus dalam menjalankan tugasnya.

Interviewer: Apa hambatan dalam memberikan insentif kepada tim JPPA?

Informan 3: Hambatan utamanya tentu dari segi pendanaan. Karena program ini tidak memiliki anggaran tetap, insentif sering kali bergantung pada donasi atau hibah dari pihak lain. Selain itu, birokrasi dalam pencairan dana sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pemberian insentif, yang tentu saja berpengaruh pada motivasi anggota.

Interviewer: Seberapa besar pengaruh insentif terhadap keberhasilan program dalam mengurangi KDRT?

Informan 3: Insentif memiliki pengaruh yang cukup besar. Jika anggota mendapatkan dukungan finansial yang layak, mereka bisa lebih berkomitmen dan fokus dalam menjalankan tugasnya. Dengan begitu, respons terhadap kasus KDRT bisa lebih cepat dan lebih efektif. Sebaliknya, jika insentif terbatas, banyak anggota yang akhirnya kurang aktif atau bahkan meninggalkan program.

Interviewer: Menurut Anda, insentif seperti apa yang bisa meningkatkan kinerja tim JPPA?

Informan 3: Selain insentif finansial seperti uang transport atau tunjangan tertentu, bisa juga diberikan bentuk apresiasi lain, misalnya sertifikasi profesional, peluang beasiswa, atau pelatihan lanjutan. Hal ini bisa meningkatkan kompetensi anggota sekaligus memberi mereka manfaat tambahan yang lebih berkelanjutan.

Interviewer: Terima kasih atas waktu dan informasinya. Wawancara ini sangat bermanfaat untuk memahami lebih dalam tantangan dan peluang dalam implementasi JPPA.

Informan 3: Sama-sama. Saya berharap hasil penelitian ini bisa menjadi rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan JPPA ke depan.

Lampiran 11 Hasil wawancara dengan Fauzan selaku Ketua Forum JPPA Kota Semarang

Pertanyaan Umum

Interviewer: Selamat siang, Pak Fauzan. Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Anda dan bagaimana keterlibatan Anda dalam Program JPPA?

Fauzan: Selamat siang. Saya sebelumnya aktif di Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sendangguwo, fokus di pengembangan kampung tematik dan wisata berbasis sejarah. Dari sana, saya sering berinteraksi dengan masyarakat dan melihat langsung berbagai permasalahan sosial, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sejak melihat banyaknya kasus yang belum tertangani dengan baik, saya mulai terlibat dalam advokasi dan akhirnya bergabung serta dipercaya memimpin JPPA Kota Semarang.

Interviewer: Apa yang Anda ketahui tentang tujuan utama Program JPPA?

Fauzan: Tujuan utama JPPA itu untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Kami berusaha menjadi jembatan antara korban dengan pihak-pihak terkait, seperti dinas sosial, kepolisian, dan komunitas yang bisa memberikan pendampingan. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat supaya mereka lebih sadar akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Interviewer: Bagaimana proses implementasi Program JPPA dalam menangani kasus KDRT di daerah Anda?

Fauzan: Kami punya mekanisme pelaporan berbasis komunitas, di mana masyarakat bisa langsung melapor ke JPPA tingkat kelurahan atau kecamatan. Begitu ada laporan, tim akan melakukan asesmen awal untuk memahami kondisi korban. Kalau butuh bantuan medis atau hukum, kami segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, kami juga punya program pendampingan psikologis agar korban bisa pulih dari trauma dan berdaya kembali.

Interviewer: Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam pelaksanaan Program JPPA?

Fauzan: Tantangan terbesar itu kurangnya kesadaran masyarakat, terutama soal anggapan bahwa KDRT itu urusan rumah tangga yang tidak boleh dicampuri orang lain. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga pendamping maupun fasilitas, juga menjadi kendala. Kadang, korban takut melapor karena ada ancaman dari pelaku atau rasa malu. Kami terus berusaha mengatasi ini dengan edukasi dan membangun jaringan yang lebih kuat.

Komunikasi

Transmisi

Interviewer: Bagaimana informasi tentang Program JPPA disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan?

Fauzan: Kami menggunakan berbagai cara, mulai dari sosialisasi langsung di komunitas, penyebaran leaflet, hingga media sosial. Kami juga sering bekerja sama dengan RT/RW, PKK, dan organisasi lokal agar informasi ini bisa menyebar lebih luas.

Interviewer: Apakah ada kendala dalam menyampaikan informasi ke lapangan? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?

Fauzan: Kendala paling sering itu kurangnya akses ke beberapa kelompok masyarakat yang belum aktif di komunitas. Solusinya, kami menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh lokal yang dipercaya masyarakat, seperti ketua RT atau pemuka agama, agar pesan lebih mudah diterima.

Interviewer: Apa tantangan terbesar dalam mengoordinasikan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat?

Fauzan: Koordinasi antara berbagai pihak sering terkendala oleh kesibukan masing-masing instansi. Untuk mengatasi ini, kami membangun grup komunikasi yang aktif dan rutin mengadakan pertemuan koordinasi.

Interviewer: Seberapa efektif proses komunikasi dalam memastikan semua pihak memahami tujuan JPPA?

Fauzan: Cukup efektif, meskipun masih ada beberapa pihak yang perlu pendekatan lebih lanjut. Kami terus melakukan evaluasi agar pesan yang disampaikan semakin mudah dipahami dan diterapkan.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan jalur komunikasi agar lebih efisien dalam JPPA?

Fauzan: Perlu pemanfaatan teknologi lebih maksimal, seperti aplikasi berbasis komunitas, supaya proses pelaporan dan koordinasi bisa lebih cepat.

Kejelasan

Interviewer: Bagaimana kejelasan pesan atau informasi yang disampaikan kepada tim terkait Program JPPA?

Fauzan: Kami selalu berusaha membuat pesan sesederhana dan sejelas mungkin. Dalam setiap pelatihan, kami menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar semua pihak bisa mengerti perannya.

Interviewer: Apakah setiap instruksi dalam program JPPA sudah cukup jelas bagi semua pihak yang terlibat?

Fauzan: Secara umum sudah cukup jelas, tetapi dalam beberapa kasus, ada kebingungan terkait prosedur tertentu. Makanya, kami terus melakukan penyempurnaan panduan dan SOP agar lebih mudah diikuti.

Interviewer: Bagaimana Anda mengatasi ketidakjelasan atau miskomunikasi yang terjadi?

Fauzan: Kami segera melakukan klarifikasi dan diskusi dengan pihak terkait. Jika diperlukan, kami buat pertemuan tambahan untuk meluruskan informasi yang kurang jelas.

Interviewer: Menurut Anda, apakah kejelasan informasi mendukung efektivitas pelaksanaan program?

Fauzan: Sangat mendukung. Ketika informasi jelas, tim bisa bekerja lebih efektif dan mengurangi kesalahan dalam implementasi program.

Interviewer: Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kejelasan komunikasi di Program JPPA?

Fauzan: Kami perlu memperbanyak pelatihan dan membuat panduan yang lebih praktis, termasuk video tutorial agar lebih mudah dipahami.

Konsistensi

Interviewer: Seberapa konsisten informasi yang diterima oleh seluruh tim JPPA?

Fauzan: Kami berusaha menjaga konsistensi dengan memberikan informasi yang sama ke semua pihak. Namun, ada kalanya terjadi perbedaan pemahaman, terutama jika ada pembaruan kebijakan.

Interviewer: Apakah ada perubahan atau penyesuaian dalam pesan yang disampaikan selama implementasi?

Fauzan: Ada beberapa penyesuaian, terutama dalam teknis pelaporan dan pendampingan kasus. Kami selalu memperbarui informasi ini melalui rapat koordinasi dan materi tertulis.

Interviewer: Apa dampak dari ketidakkonsistenan pesan terhadap pelaksanaan program?

Fauzan: Bisa menghambat proses, terutama dalam penanganan kasus yang membutuhkan keputusan cepat. Ketidakkonsistenan juga bisa membuat masyarakat bingung tentang mekanisme pelaporan.

Interviewer: Apakah konsistensi komunikasi berdampak pada keberhasilan program dalam menekan KDRT?

Fauzan: Sangat berdampak. Semakin konsisten informasi yang kami sampaikan, semakin efektif program ini dalam menangani dan mencegah KDRT.

Interviewer: Bagaimana cara terbaik untuk menjaga konsistensi dalam komunikasi pada Program JPPA?

Fauzan: Rutin melakukan pembaruan informasi secara tertulis dan memperkuat jalur komunikasi dengan tim di lapangan agar tidak ada kesenjangan informasi.

Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Interviewer: Seberapa penting peran sumber daya manusia dalam keberhasilan Program JPPA?

Fauzan: Sumber daya manusia sangat krusial dalam menjalankan JPPA. Tanpa tim yang kompeten dan berdedikasi, sulit untuk memberikan perlindungan dan pendampingan yang optimal bagi korban KDRT. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan tenaga pendamping.

Interviewer: Apakah personel yang terlibat dalam JPPA sudah memadai secara jumlah dan kompetensi?

Fauzan: Saat ini, jumlah personel masih terbatas dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah dan banyaknya kasus yang harus ditangani. Dari segi kompetensi, sebagian besar relawan dan petugas sudah cukup berpengalaman, tetapi pelatihan lanjutan masih sangat diperlukan agar mereka lebih siap menangani berbagai situasi yang kompleks.

Interviewer: Apa kendala utama yang Anda hadapi terkait sumber daya manusia?

Fauzan: Salah satu kendala utama adalah kurangnya tenaga pendamping yang memiliki latar belakang psikologi atau hukum. Selain itu, keterbatasan dana membuat kami sulit memberikan insentif yang layak bagi para relawan, sehingga banyak yang tidak bisa bertahan lama dalam program ini.

Interviewer: Bagaimana Anda menilai efektivitas sumber daya manusia dalam mendukung program JPPA?

Fauzan: Meskipun ada keterbatasan, saya melihat bahwa tim JPPA cukup efektif dalam menangani kasus dengan sumber daya yang ada. Mereka bekerja dengan penuh komitmen dan sering kali berusaha lebih dari yang diharapkan, tetapi tetap perlu ada peningkatan kapasitas agar lebih optimal.

Interviewer: Bagaimana Anda menyarankan agar kualitas SDM dapat ditingkatkan?

Fauzan: Saya menyarankan adanya pelatihan berkala yang lebih terstruktur, terutama dalam bidang hukum, psikologi, dan komunikasi. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi dengan universitas atau lembaga pelatihan yang dapat membantu meningkatkan keterampilan tim kami.

Sumber Daya Anggaran

Interviewer: Apakah anggaran yang tersedia cukup untuk mendukung operasional JPPA?

Fauzan: Anggaran yang ada masih jauh dari cukup. Banyak kebutuhan yang belum bisa terpenuhi, seperti fasilitas pendampingan dan insentif bagi relawan. Kami sering mengandalkan donasi dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menutupi kekurangan tersebut.

Interviewer: Bagaimana pengelolaan anggaran untuk berbagai kegiatan dalam Program JPPA?

Fauzan: Anggaran dikelola dengan ketat dan transparan. Kami prioritaskan untuk biaya operasional utama seperti pendampingan korban, sosialisasi, dan pelatihan. Sebisa mungkin, kami mencari sponsor atau hibah untuk menambah dana.

Interviewer: Apa hambatan terbesar terkait pendanaan yang memengaruhi implementasi JPPA?

Fauzan: Salah satu hambatan terbesar adalah ketergantungan pada dana hibah yang tidak selalu stabil. Selain itu, alokasi dana dari pemerintah masih terbatas dan sering kali tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan program.

Interviewer: Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi efektivitas program JPPA dalam menekan KDRT?

Fauzan: Tentu saja. Dengan anggaran yang terbatas, kami tidak bisa menjangkau semua korban atau memberikan layanan yang optimal. Banyak program pencegahan yang belum bisa dijalankan karena keterbatasan dana.

Interviewer: Apa saran Anda dalam pengelolaan anggaran agar mendukung keberhasilan JPPA?

Fauzan: Saya menyarankan diversifikasi sumber pendanaan, misalnya dengan menjalin kerja sama lebih luas dengan sektor swasta, crowdfunding, atau program CSR. Selain itu, penting juga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran agar mendapatkan kepercayaan lebih dari para donatur.

Sumber Daya Peralatan

Interviewer: Apakah peralatan yang tersedia sudah cukup untuk melaksanakan program JPPA dengan baik?

Fauzan: Saat ini, peralatan masih terbatas. Kami masih kekurangan ruang konseling yang memadai, alat komunikasi yang efektif, serta bahan edukasi yang cukup untuk sosialisasi di lapangan.

Interviewer: Bagaimana penggunaan fasilitas dan peralatan untuk mendukung program JPPA?

Fauzan: Kami berusaha memanfaatkan apa yang ada semaksimal mungkin. Beberapa fasilitas dipinjam dari instansi terkait atau komunitas lokal. Namun, ini masih jauh dari ideal.

Interviewer: Apa kendala yang dihadapi terkait ketersediaan peralatan?

Fauzan: Kendala utama adalah keterbatasan dana untuk membeli peralatan yang lebih baik. Selain itu, beberapa alat yang kami miliki sudah usang dan perlu diperbarui.

Interviewer: Bagaimana keterbatasan peralatan memengaruhi pelaksanaan program JPPA?

Fauzan: Tanpa peralatan yang memadai, beberapa layanan tidak bisa berjalan maksimal. Misalnya, keterbatasan alat rekam atau dokumentasi membuat pendataan kasus menjadi lebih sulit.

Interviewer: Menurut Anda, peralatan apa yang perlu ditambahkan?

Fauzan: Kami sangat membutuhkan perangkat komunikasi yang lebih baik, komputer untuk pengelolaan data, serta ruang konseling yang lebih nyaman dan aman bagi korban.

Sumber Daya Kewenangan

Interviewer: Apakah kewenangan yang diberikan kepada tim JPPA sudah cukup untuk menangani berbagai kasus KDRT secara efektif?

Fauzan: Kewenangan yang ada saat ini masih terbatas. Kami lebih banyak berperan sebagai fasilitator, tetapi belum memiliki wewenang lebih dalam proses hukum atau pemulihan korban.

Interviewer: Bagaimana Anda memanfaatkan kewenangan yang ada dalam proses pelaksanaan Program JPPA, terutama dalam penanganan kasus KDRT?

Fauzan: Kami memanfaatkan kewenangan yang ada dengan memperkuat kerja sama dengan pihak berwenang, seperti kepolisian dan dinas sosial. Namun, kami sering kali terkendala dalam intervensi langsung.

Interviewer: Apa saja kendala yang Anda hadapi terkait kewenangan dalam menjalankan tugas JPPA?

Fauzan: Beberapa kasus memerlukan tindakan cepat, tetapi kami harus menunggu proses hukum yang lama. Selain itu, keterbatasan kewenangan membuat beberapa kasus sulit diselesaikan dengan cepat.

Interviewer: Menurut Anda, apakah kewenangan yang dimiliki JPPA saat ini cukup efektif untuk mencapai tujuan penurunan angka KDRT?

Fauzan: Belum sepenuhnya efektif. Tanpa kewenangan lebih dalam hal pendampingan hukum dan perlindungan korban, banyak kasus yang akhirnya berlarut-larut.

Interviewer: Apa rekomendasi Anda untuk memperkuat kewenangan JPPA agar lebih optimal dalam menangani kasus KDRT?

Fauzan: Saya berharap ada kebijakan yang memberikan JPPA peran lebih besar dalam proses hukum dan rehabilitasi korban. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan pihak terkait juga perlu diperkuat agar proses penanganan lebih cepat dan efektif.

Disposisi/Sikap

Disiplin Aparatur

Interviewer: Bagaimana disiplin aparatur yang terlibat dalam Program JPPA?

Fauzan: Secara umum, disiplin aparatur dalam JPPA cukup baik. Kami memiliki tim yang berdedikasi dan siap bekerja dalam berbagai kondisi. Namun, tantangan muncul dalam menjaga konsistensi karena tugas di lapangan sering kali memerlukan fleksibilitas waktu dan tenaga.

Interviewer: Apakah ada kebijakan disiplin yang diterapkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana?

Fauzan: Ya, kami memiliki aturan kehadiran, laporan berkala, serta evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin. Selain itu, kami menerapkan sistem rotasi tugas untuk memastikan setiap anggota tetap aktif dan bertanggung jawab.

Interviewer: Apa kendala dalam menjaga kedisiplinan tim JPPA?

Fauzan: Salah satu kendala utama adalah kesibukan masing-masing anggota, terutama yang bekerja secara sukarela. Terkadang, ada yang kesulitan membagi waktu antara tanggung jawab pribadi dan tugas di JPPA.

Interviewer: Menurut Anda, apakah disiplin aparaturnya berkontribusi pada keberhasilan program JPPA?

Fauzan: Tentu saja. Disiplin yang baik membuat program berjalan lebih terstruktur dan meningkatkan respons terhadap kasus yang masuk. Tanpa disiplin, efektivitas program bisa menurun.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan kedisiplinan dalam tim?

Fauzan: Saya menyarankan adanya insentif atau penghargaan bagi anggota yang menunjukkan dedikasi tinggi. Selain itu, peningkatan rasa kepemilikan terhadap program melalui pelibatan aktif dalam perencanaan juga bisa meningkatkan disiplin.

Kejujuran Aparatur

Interviewer: Bagaimana kejujuran dipupuk dalam JPPA, terutama dalam menangani data atau kasus KDRT?

Fauzan: Kami menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap laporan dan dokumentasi kasus. Semua anggota diwajibkan mengikuti kode etik yang mengutamakan kejujuran dan transparansi.

Interviewer: Apakah ada upaya tertentu untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan program?

Fauzan: Ya, setiap laporan harus melalui proses verifikasi dan disimpan dalam sistem yang bisa diakses oleh pihak terkait. Kami juga membuka ruang pengaduan jika ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.

Interviewer: Apa tantangan terbesar dalam memastikan kejujuran di antara tim?

Fauzan: Tantangan terbesar adalah adanya tekanan dari pihak luar yang kadang mencoba mempengaruhi keputusan kami. Selain itu, keterbatasan pengawasan di lapangan juga bisa menjadi hambatan.

Interviewer: Seberapa penting transparansi dan kejujuran dalam mencapai tujuan JPPA?

Fauzan: Transparansi dan kejujuran sangat penting agar korban merasa aman dan percaya kepada kami. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat terhadap JPPA bisa berkurang.

Interviewer: Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kejujuran dalam tim?

Fauzan: Penerapan audit internal secara berkala serta peningkatan budaya keterbukaan dalam tim sangat diperlukan. Selain itu, membangun komunikasi yang jujur dan terbuka antar anggota juga bisa meningkatkan kepercayaan satu sama lain.

Budaya Kerja Aparatur

Interviewer: Bagaimana budaya kerja dikembangkan di antara aparaturnya yang terlibat dalam Program JPPA, terutama dalam menangani kasus KDRT?

Fauzan: Kami membangun budaya kerja yang kolaboratif dan responsif. Setiap anggota didorong untuk bekerja sama dalam menangani kasus dan berbagi informasi agar tidak ada korban yang terabaikan.

Interviewer: Apakah ada nilai-nilai atau kebiasaan tertentu yang diterapkan dalam tim JPPA untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kerja?

Fauzan: Ya, kami menerapkan nilai-nilai seperti empati, keterbukaan, dan kerja sama. Selain itu, ada kebiasaan untuk selalu melakukan evaluasi setelah menangani kasus agar ada perbaikan berkelanjutan.

Interviewer: Apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun budaya kerja yang solid dan kooperatif di JPPA?

Fauzan: Tantangan utamanya adalah perbedaan latar belakang dan cara kerja masing-masing anggota. Kadang ada perbedaan pendapat yang bisa menghambat koordinasi.

Interviewer: Menurut Anda, bagaimana budaya kerja di JPPA mempengaruhi keberhasilan program dalam menangani kasus KDRT?

Fauzan: Budaya kerja yang baik sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi korban dan memastikan bahwa setiap kasus mendapat perhatian yang layak.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan budaya kerja di JPPA agar lebih mendukung pencapaian tujuan program?

Fauzan: Saya menyarankan adanya pelatihan kepemimpinan dan komunikasi, serta lebih banyak kegiatan tim yang memperkuat rasa kebersamaan dan kerja sama.

Sifat Demokratis

Interviewer: Sejauh mana aspek demokratis diterapkan dalam pengambilan keputusan terkait Program JPPA?

Fauzan: Kami selalu berusaha menerapkan pendekatan demokratis dengan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal strategi program dan penanganan kasus.

Interviewer: Bagaimana proses pengambilan keputusan yang melibatkan masukan dari seluruh anggota tim atau pihak-pihak terkait di JPPA?

Fauzan: Setiap keputusan penting dibahas dalam rapat koordinasi, di mana setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Kami juga mengumpulkan masukan dari mitra dan pihak eksternal jika diperlukan.

Interviewer: Apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga proses yang demokratis dalam tim JPPA, terutama saat menangani situasi yang membutuhkan keputusan cepat?

Fauzan: Tantangan utamanya adalah keterbatasan waktu dalam kasus darurat. Dalam situasi seperti ini, terkadang keputusan harus diambil dengan cepat oleh pemimpin tim tanpa konsultasi panjang.

Interviewer: Seberapa besar pengaruh sifat demokratis dalam tim terhadap efektivitas program JPPA, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif?

Fauzan: Sifat demokratis sangat membantu dalam meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program. Dengan adanya keterlibatan aktif dari semua pihak, implementasi program menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Interviewer: Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sifat demokratis dalam tim JPPA agar program berjalan lebih efektif dan transparan?

Fauzan: Saya menyarankan adanya forum diskusi rutin dan mekanisme umpan balik yang lebih sistematis. Selain itu, memastikan bahwa semua anggota memiliki akses informasi yang sama juga penting untuk meningkatkan transparansi.

Bagian 1: Struktur Birokrasi

a. Pengangkatan Birokrasi

Interviewer: Bagaimana proses pengangkatan aparatur dalam JPPA dilakukan?

Informan 4: Proses pengangkatan aparatur di JPPA lebih bersifat sukarela dan terbuka untuk siapa saja yang ingin berkontribusi dalam perlindungan perempuan dan anak. Biasanya, anggota bergabung setelah mendapatkan informasi dari sosialisasi atau rekomendasi dari anggota yang sudah aktif. Tidak ada seleksi formal, tetapi mereka yang ingin bergabung diharapkan memiliki kepedulian dan kesediaan untuk bekerja di bidang ini.

Interviewer: Apakah sistem pengangkatan di JPPA mendukung efisiensi program?

Informan 4: Dari sisi aksesibilitas, sistem ini memang memudahkan banyak orang untuk bergabung, sehingga jaringan perlindungan bisa lebih luas. Namun, dari sisi efektivitas, kurangnya proses seleksi yang ketat terkadang menyebabkan ketidakseimbangan dalam kemampuan anggota, karena ada yang sangat berpengalaman, tetapi ada juga yang masih minim pengetahuan tentang penanganan KDRT.

Interviewer: Apa tantangan dalam hal perekrutan yang memengaruhi pelaksanaan program?

Informan 4: Tantangannya adalah memastikan bahwa anggota yang bergabung memiliki komitmen jangka panjang. Banyak yang antusias di awal, tetapi setelah beberapa waktu,

mereka mulai kurang aktif karena tuntutan pekerjaan atau faktor ekonomi. Selain itu, tidak adanya standar kompetensi membuat kualitas layanan bisa bervariasi, tergantung pada siapa yang menangani kasusnya.

Interviewer: Apakah prosedur pengangkatan yang ada saat ini mendukung tujuan JPPA?

Informan 4: Tujuan utama JPPA adalah memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Dalam hal ini, prosedur pengangkatan yang terbuka memang bisa membantu memperluas jaringan dan partisipasi masyarakat. Tetapi, agar lebih efektif, mungkin perlu ada proses seleksi minimal atau pelatihan dasar bagi anggota baru agar mereka lebih siap dalam menjalankan tugas.

Interviewer: Apa yang dapat diperbaiki dalam sistem pengangkatan di JPPA?

Informan 4: Saya rasa perlu ada pelatihan dasar bagi anggota baru agar mereka memahami prosedur dan standar layanan yang berlaku. Selain itu, ada baiknya dibuat mekanisme evaluasi berkala untuk melihat keaktifan dan kinerja anggota, sehingga hanya mereka yang benar-benar berkomitmen yang tetap aktif dalam program ini.

Bagian 2: Insentif

Interviewer: Bagaimana kebijakan insentif bagi aparaturnya yang terlibat dalam Program JPPA?

Informan 4: Saat ini, insentif bagi anggota JPPA masih sangat terbatas. Tidak ada gaji tetap, tetapi ada dukungan seperti uang transport, penghargaan non-finansial, serta kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau seminar. Namun, karena jumlahnya terbatas, tidak semua anggota bisa mendapatkan insentif secara merata.

Interviewer: Apakah insentif yang diberikan cukup memotivasi tim untuk mencapai target program?

Informan 4: Sebenarnya, banyak anggota yang bergabung di JPPA karena kepedulian mereka terhadap isu KDRT, bukan semata-mata karena insentif. Namun, tanpa dukungan yang memadai, lama-kelamaan semangat mereka bisa menurun, terutama jika mereka harus mengorbankan waktu dan tenaga tanpa adanya kompensasi yang jelas.

Interviewer: Apa hambatan dalam memberikan insentif kepada tim JPPA?

Informan 4: Hambatan utama adalah keterbatasan anggaran. Karena JPPA bukan lembaga yang memiliki dana tetap, insentif sering kali bergantung pada donasi atau hibah dari pihak luar. Selain itu, birokrasi dalam pencairan dana sering menyebabkan keterlambatan dalam pemberian insentif, yang tentunya berpengaruh pada motivasi anggota.

Interviewer: Seberapa besar pengaruh insentif terhadap keberhasilan program dalam mengurangi KDRT?

Informan 4: Insentif sangat berpengaruh terhadap efektivitas program. Jika anggota mendapatkan dukungan finansial yang cukup, mereka bisa lebih fokus dalam menangani kasus dan lebih aktif dalam sosialisasi. Sebaliknya, jika insentif minim, banyak anggota yang akhirnya kurang aktif atau bahkan meninggalkan program, yang tentu saja berdampak pada keberlanjutan JPPA dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT.

Interviewer: Menurut Anda, insentif seperti apa yang bisa meningkatkan kinerja tim JPPA?

Informan 4: Selain insentif finansial seperti tunjangan transportasi atau uang operasional, bentuk penghargaan lain seperti sertifikat, peluang beasiswa, atau pelatihan lanjutan bisa sangat membantu. Dengan begitu, anggota tidak hanya merasa diapresiasi tetapi juga mendapatkan manfaat tambahan yang bisa meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus KDRT.

Interviewer: Terima kasih atas waktu dan informasinya. Wawancara ini sangat membantu dalam memahami lebih lanjut tantangan dan peluang dalam implementasi JPPA.

Informan 4: Sama-sama. Saya harap penelitian ini bisa memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan program ke depan.

Lampiran 12 Hasil wawancara dengan Iis Amalia, S.Psi., M.Psi. Selaku Psikolog UPTD PPA Kota Semarang

Pertanyaan Umum

Interviewer: Terima kasih Ibu Iis sudah meluangkan waktu untuk berbincang. Bisa ceritakan sedikit latar belakang Anda dan bagaimana Anda terlibat dalam Program JPPA?

Iis Amalia : Tentu! Saya adalah seorang psikolog yang bekerja di UPTD PPA Kota Semarang. Sebelumnya, saya memiliki pengalaman bekerja dengan berbagai program yang mendukung perlindungan perempuan dan anak. Terlibat dalam Program JPPA ini adalah langkah yang sangat sesuai dengan latar belakang saya. Di sini, saya bertanggung jawab untuk memberikan layanan psikologis kepada korban KDRT dan membantu program ini berjalan dengan baik di daerah kami.

Interviewer: Terima kasih atas penjelasannya. Nah, apa yang Anda ketahui tentang tujuan utama dari Program JPPA?

Iis Amalia, : Tujuan utama dari Program JPPA adalah untuk melindungi dan memberikan pemulihan kepada korban KDRT, terutama perempuan dan anak-anak. Kami juga berupaya untuk menciptakan sistem yang bisa mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Program ini bukan hanya memberikan perlindungan, tapi juga memastikan ada pendampingan psikologis dan bantuan hukum bagi korban.

Interviewer: Menarik! Lalu, bagaimana proses implementasi Program JPPA dalam menangani kasus KDRT di daerah Anda?

Iis Amalia, : Di UPTD PPA Kota Semarang, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, dinas sosial, dan lembaga-lembaga lain, untuk menangani kasus KDRT. Kami menerima laporan dari masyarakat, kemudian melakukan asesmen untuk menilai kondisi korban, apakah mereka membutuhkan perlindungan sementara atau terapi psikologis. Proses ini cukup intensif, karena kami ingin memastikan bahwa setiap korban mendapat penanganan yang tepat.

Interviewer:

Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam pelaksanaan Program JPPA?

Iis Amalia, : Tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan KDRT. Banyak korban yang merasa takut atau malu untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu, kami juga menghadapi kendala dalam koordinasi antar lembaga terkait, karena masing-masing instansi memiliki prosedur yang berbeda. Hal ini sering kali memperlambat respons terhadap kasus-kasus yang muncul.

Dimensi Komunikasi

Interviewer: Bagaimana informasi tentang Program JPPA disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan?

Iis Amalia, : Informasi tentang Program JPPA disampaikan melalui berbagai saluran, seperti pertemuan rutin antar instansi, media sosial, dan bahkan melalui kampanye publik. Kami juga mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas untuk memastikan masyarakat mengetahui adanya program ini dan bagaimana cara melapor jika mereka mengalami atau mengetahui kasus KDRT.

Interviewer: Apakah ada kendala dalam menyampaikan informasi ke lapangan? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?

Iis Amalia, : Salah satu kendala yang sering muncul adalah terbatasnya akses informasi. Beberapa masyarakat belum begitu paham cara mengakses informasi tentang program ini. Untuk mengatasinya, kami berusaha bekerja sama dengan puskesmas dan RT/RW setempat untuk menyebarkan informasi langsung ke masyarakat.

Interviewer: Apa tantangan terbesar dalam mengoordinasikan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat?

Iis Amalia, : Tantangan terbesar adalah memastikan setiap pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang peran dan tanggung jawab mereka. Terkadang, ada kebingungannya terkait siapa yang harus bertanggung jawab dalam situasi tertentu. Kami mencoba

mengatasi ini dengan membuat panduan yang jelas dan melakukan rapat koordinasi secara berkala.

Interviewer: Seberapa efektif proses komunikasi dalam memastikan semua pihak memahami tujuan JPPA?

Iis Amalia, : Secara umum, komunikasi sudah cukup efektif, terutama setelah kami mulai melakukan rapat koordinasi lebih rutin. Namun, kami masih perlu terus meningkatkan keselarasan antar pihak, karena setiap lembaga sering memiliki prioritas yang berbeda. Oleh karena itu, kami berusaha menjaga komunikasi tetap terbuka dan transparan.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan jalur komunikasi agar lebih efisien dalam JPPA?

Iis Amalia, : Saya rasa, kami perlu memanfaatkan teknologi lebih banyak, seperti menggunakan aplikasi atau sistem digital untuk melacak kasus dan mempercepat proses komunikasi. Ini akan mengurangi ketergantungan pada komunikasi manual yang sering kali lambat. Selain itu, pelatihan komunikasi antar instansi juga sangat penting agar semua pihak bisa bekerja sama lebih efisien.

Dimensi Kejelasan

Interviewer: Bagaimana kejelasan pesan atau informasi yang disampaikan kepada tim terkait Program JPPA?

Iis Amalia, : Kejelasan informasi sangat kami jaga, terutama dalam hal prosedur dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kami selalu mengirimkan materi secara tertulis dan memberikan penjelasan secara langsung dalam setiap pertemuan. Meskipun demikian, kami masih menemukan beberapa kebingungan di lapangan, yang biasanya bisa kami tangani dengan memberikan penjelasan lebih lanjut.

Interviewer: Apakah setiap instruksi dalam program JPPA sudah cukup jelas bagi semua pihak yang terlibat?

Iis Amalia, : Sebagian besar instruksi sudah cukup jelas, namun dalam prakteknya, beberapa pihak masih mengalami kesulitan dalam implementasi, terutama ketika berhadapan dengan situasi yang tidak biasa. Kami terus melakukan evaluasi untuk memperbaiki instruksi agar lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Interviewer: Bagaimana Anda mengatasi ketidakjelasan atau miskomunikasi yang terjadi?

Iis Amalia, : Biasanya, kami segera mengadakan pertemuan untuk menjelaskan kembali hal yang kurang jelas. Jika ada miskomunikasi, kami mencoba untuk membuka ruang diskusi, mendengarkan masalah yang dihadapi, dan memberikan klarifikasi. Proses ini penting untuk memastikan tidak ada pihak yang bingung dengan instruksi yang ada.

Interviewer: Menurut Anda, apakah kejelasan informasi mendukung efektivitas pelaksanaan program?

Iis Amalia, : Tentu saja, kejelasan informasi sangat mendukung efektivitas pelaksanaan program. Semakin jelas instruksi yang diberikan, semakin mudah bagi tim untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan. Kejelasan juga mengurangi kesalahan yang bisa terjadi selama proses penanganan kasus.

Interviewer: Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kejelasan komunikasi di Program JPPA?

Iis Amalia, : Langkah pertama adalah memperbarui materi dan prosedur yang kami gunakan agar lebih mudah dipahami. Kami juga akan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses perencanaan dan komunikasi, agar tidak ada informasi yang terlewat. Selain itu, penggunaan alat bantu visual dan teknologi juga bisa membantu memperjelas instruksi.

Dimensi Konsistensi

Interviewer: Seberapa konsisten informasi yang diterima oleh seluruh tim JPPA?

Iis Amalia, : Konsistensi informasi cukup baik, meskipun ada beberapa kasus di mana informasi bisa berubah tergantung pada situasi. Kami berusaha untuk menyampaikan

informasi secara rutin dan selalu memperbarui tim jika ada perubahan dalam prosedur atau kebijakan yang relevan.

Interviewer: Apakah ada perubahan atau penyesuaian dalam pesan yang disampaikan selama implementasi?

Iis Amalia, : Ya, ada penyesuaian terutama dalam hal prosedur operasional standar (SOP) karena setiap kasus KDRT bisa memiliki kondisi yang berbeda. Kami menyesuaikan pesan atau instruksi berdasarkan kasus yang sedang ditangani, tetapi tetap memastikan bahwa semua pihak memahami perubahan tersebut.

Interviewer: Apa dampak dari ketidakkonsistenan pesan terhadap pelaksanaan program?

Iis Amalia, : Ketidakkonsistenan pesan bisa menyebabkan kebingungan di lapangan, yang berpotensi menghambat penanganan kasus. Ketika tim tidak menerima informasi yang konsisten, mereka mungkin mengambil langkah yang tidak sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan.

Interviewer: Apakah konsistensi komunikasi berdampak pada keberhasilan program dalam menekan KDRT?

Iis Amalia, : Iya, konsistensi komunikasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan program. Jika pesan yang disampaikan berbeda-beda atau tidak jelas, maka hal itu bisa menurunkan efektivitas pelaksanaan program. Dengan komunikasi yang konsisten, program bisa berjalan lebih terstruktur dan terarah.

Interviewer: Bagaimana cara terbaik untuk menjaga konsistensi dalam komunikasi pada Program JPPA?

Iis Amalia, : Untuk menjaga konsistensi, kami harus memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi yang sama, baik melalui rapat koordinasi atau alat komunikasi lain yang terorganisir. Selain itu, penting untuk memiliki dokumen standar yang jelas yang bisa dijadikan pedoman bagi setiap anggota tim dalam menjalankan tugasnya.

Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Interviewer: Sekarang kita lanjut ke bagian sumber daya. Pertama, seberapa penting peran sumber daya manusia dalam keberhasilan Program JPPA?

Iis Amalia, : Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor yang sangat penting dalam keberhasilan Program JPPA. Tanpa adanya tenaga ahli yang berkompeten dan berdedikasi, program ini tidak akan berjalan dengan maksimal. Setiap anggota tim, mulai dari psikolog, tenaga sosial, hingga petugas hukum, memiliki peran yang vital dalam mendukung korban dan memastikan layanan berjalan efektif.

Interviewer: Apakah personel yang terlibat dalam JPPA sudah memadai secara jumlah dan kompetensi?

Iis Amalia, : Secara umum, jumlah personel yang terlibat sudah cukup, namun kompetensi mereka masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengetahuan mengenai penanganan kasus KDRT yang kompleks. Kami memang memiliki tenaga yang berkompeten, namun pelatihan dan peningkatan keterampilan secara berkala sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang.

Interviewer: Apa kendala utama yang Anda hadapi terkait sumber daya manusia?

Iis Amalia, : Kendalanya adalah kurangnya tenaga ahli di beberapa bidang, seperti tenaga medis dan pendamping hukum yang memahami secara mendalam tentang KDRT. Selain itu, banyak tenaga yang sudah terlatih, namun masih terbatas dalam hal jumlah dan waktu yang bisa mereka sediakan untuk menangani kasus secara optimal.

Interviewer: Bagaimana Anda menilai efektivitas sumber daya manusia dalam mendukung program JPPA?

Iis Amalia, : Secara keseluruhan, SDM yang ada cukup efektif dalam mendukung program JPPA, meskipun ada beberapa area yang perlu perbaikan. Komunikasi dan koordinasi antara anggota tim sudah cukup baik, namun ada kalanya beban kerja yang terlalu banyak mempengaruhi kualitas kerja. Peningkatan dalam hal pelatihan dan penyediaan waktu lebih fleksibel untuk para petugas akan sangat membantu.

Interviewer: Bagaimana Anda menyarankan agar kualitas SDM dapat ditingkatkan?

Iis Amalia, : Saran saya adalah untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif mengenai KDRT, baik dalam aspek psikologis maupun hukum. Selain itu, penguatan kapasitas mental dan keterampilan untuk menangani kasus yang emosional dan berat juga sangat diperlukan. Program mentoring atau pengawasan rutin bagi staf juga bisa menjadi langkah yang baik.

Sumber Daya Anggaran

Interviewer: Lanjut ke sumber daya anggaran. Apakah anggaran yang tersedia cukup untuk mendukung operasional JPPA?

Iis Amalia, : Anggaran yang tersedia memang cukup, tapi terkadang tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada. Banyak kegiatan yang membutuhkan dana lebih, terutama untuk pelatihan SDM, pemenuhan fasilitas, dan pendampingan yang lebih intensif kepada korban. Kami perlu lebih banyak anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Interviewer: Bagaimana pengelolaan anggaran untuk berbagai kegiatan dalam Program JPPA?

Iis Amalia, : Pengelolaan anggaran kami lakukan dengan cukup hati-hati. Prioritas diberikan pada kegiatan yang langsung berdampak pada korban, seperti pendampingan psikologis dan bantuan hukum. Namun, beberapa kegiatan penting lainnya seperti pelatihan atau sosialisasi terkadang harus dipangkas karena keterbatasan dana.

Interviewer: Apa hambatan terbesar terkait pendanaan yang memengaruhi implementasi JPPA?

Iis Amalia, : Hambatan terbesar adalah ketidakpastian alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Sering kali, anggaran yang diterima tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan, dan kami harus mencari dana tambahan melalui sumber lain, seperti donasi atau kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat.

Interviewer: Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi efektivitas program JPPA dalam menekan KDRT?

Iis Amalia, : Iya, keterbatasan anggaran memang memengaruhi efektivitas program. Misalnya, kami tidak bisa mengadakan lebih banyak pelatihan untuk masyarakat atau meningkatkan kualitas pendampingan untuk korban. Tanpa dana yang cukup, beberapa langkah pencegahan dan pemulihan korban tidak dapat dilakukan secara optimal.

Interviewer: Apa saran Anda dalam pengelolaan anggaran agar mendukung keberhasilan JPPA?

Iis Amalia, : Saran saya adalah agar ada perencanaan anggaran yang lebih fleksibel dan memastikan alokasi dana yang cukup untuk kegiatan utama yang berfokus pada korban. Selain itu, penting juga untuk mengoptimalkan kerja sama dengan lembaga lain atau sektor swasta untuk mencari sumber pendanaan tambahan.

Sumber daya peralatan

Interviewer: Sekarang kita bahas soal sumber daya peralatan. Apakah peralatan yang tersedia sudah cukup untuk melaksanakan program JPPA dengan baik?

Iis Amalia, : Secara keseluruhan, peralatan yang ada sudah cukup, namun ada beberapa kekurangan dalam hal fasilitas untuk terapi psikologis atau pendampingan yang lebih privat. Beberapa alat untuk mendukung psikoterapi juga masih terbatas, sehingga perlu ada investasi untuk peralatan yang lebih lengkap dan canggih.

Interviewer: Bagaimana penggunaan fasilitas dan peralatan untuk mendukung program JPPA?

Iis Amalia, : Kami memanfaatkan fasilitas yang ada semaksimal mungkin, namun ada kalanya peralatan yang kami butuhkan tidak tersedia atau kondisinya kurang memadai. Misalnya, ruang terapi yang seharusnya lebih nyaman dan mendukung pemulihan korban seringkali kurang memadai. Kami berusaha menggunakan apa yang ada, tapi tentu saja keterbatasan ini cukup berpengaruh.

Interviewer: Apa kendala yang dihadapi terkait ketersediaan peralatan?

Iis Amalia, : Kendala utamanya adalah kurangnya anggaran untuk memperbaiki atau membeli peralatan yang lebih lengkap. Kami membutuhkan lebih banyak peralatan psikoterapi, ruang konseling yang lebih nyaman, dan perlengkapan lain yang mendukung kegiatan pelatihan atau sosialisasi.

Interviewer: Bagaimana keterbatasan peralatan memengaruhi pelaksanaan program JPPA?

Iis Amalia, : Keterbatasan peralatan membuat kami harus kreatif dalam mencari solusi, misalnya dengan menggunakan ruang yang ada untuk berbagai kegiatan. Namun, kadang hal ini mengurangi kenyamanan dan efektivitas kegiatan, terutama saat kami melakukan sesi terapi atau pelatihan untuk korban. Peralatan yang lebih memadai tentu akan meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Interviewer: Menurut Anda, peralatan apa yang perlu ditambahkan?

Iis Amalia, : Peralatan yang perlu ditambahkan termasuk perangkat untuk terapi psikologis, seperti alat untuk membantu relaksasi atau mengelola trauma, serta ruang yang lebih nyaman dan aman bagi korban untuk berkonsultasi. Selain itu, pelatihan untuk para tenaga terkait penggunaan peralatan ini juga sangat diperlukan.

Sumber Daya Kewenangan

Interviewer: Mari kita bahas sumber daya kewenangan. Apakah kewenangan yang diberikan kepada tim JPPA sudah cukup untuk menangani berbagai kasus KDRT secara efektif?

Iis Amalia, : Kewenangan yang ada saat ini sudah cukup, tetapi kami tetap merasa ada beberapa kendala. Misalnya, dalam hal penanganan hukum, terkadang kewenangan kami terbatas karena kami bukan lembaga yang menangani proses hukum secara langsung. Kami lebih banyak berfokus pada pendampingan psikologis dan sosial, sementara aspek hukum terkadang kurang diperhatikan.

Interviewer: Bagaimana Anda memanfaatkan kewenangan yang ada dalam proses pelaksanaan Program JPPA, terutama dalam penanganan kasus KDRT?

Iis Amalia, : Kami memanfaatkan kewenangan dalam hal memberikan dukungan psikologis dan membantu korban dalam mengakses layanan hukum. Kami juga berperan dalam melakukan asesmen psikologis untuk menentukan kebutuhan korban. Namun, dalam beberapa kasus, kami perlu berkoordinasi dengan pihak kepolisian atau lembaga hukum lainnya untuk tindakan lebih lanjut.

Interviewer: Apa saja kendala yang Anda hadapi terkait kewenangan dalam menjalankan tugas JPPA? Apakah ada situasi di mana kewenangan yang ada dirasa kurang mendukung pelaksanaan program?

Iis Amalia, : Kendala utamanya adalah kewenangan terbatas dalam hal penanganan kasus hukum. Kadang-kadang kami menghadapi situasi di mana kami merasa perlu mengambil tindakan lebih cepat, tetapi kewenangan kami tidak cukup untuk itu. Kami harus menunggu prosedur yang panjang atau bergantung pada lembaga lain untuk melakukan langkah-langkah hukum yang lebih tegas.

Interviewer: Menurut Anda, apakah kewenangan yang dimiliki JPPA saat ini cukup efektif untuk mencapai tujuan penurunan angka KDRT?

Iis Amalia, : Kewenangan yang ada sudah cukup untuk menjalankan sebagian besar program, tetapi untuk menurunkan angka KDRT secara signifikan, kami perlu lebih banyak dukungan hukum. Jika JPPA memiliki kewenangan lebih dalam hal penegakan hukum, akan lebih mudah bagi kami untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada korban.

Interviewer: Apa rekomendasi Anda untuk memperkuat kewenangan JPPA agar lebih optimal dalam menangani kasus KDRT?

Iis Amalia, : Saya rasa, JPPA perlu diberi kewenangan lebih dalam penanganan kasus hukum, seperti pemberian perlindungan sementara atau langkah-langkah preventif yang lebih cepat. Selain itu, kolaborasi yang lebih kuat dengan aparat penegak hukum juga akan sangat membantu agar penanganan kasus lebih komprehensif dan terkoordinasi dengan baik.

Disposisi/Sikap

Disiplin Aparatur

Interviewer: Sekarang kita masuk ke bagian disposisi atau sikap. Pertama, bagaimana disiplin aparat yang terlibat dalam Program JPPA?

Iis Amalia, : Disiplin aparat di tim JPPA cukup baik, namun tentu ada beberapa tantangan dalam menjaga konsistensi. Sebagian besar anggota tim sudah memahami pentingnya

peran mereka, tapi tantangan seperti beban kerja yang tinggi dan adanya tugas tambahan terkadang memengaruhi kedisiplinan. Secara umum, mereka sangat berdedikasi, namun dalam situasi tertentu, ketepatan waktu dan pemenuhan kewajiban perlu lebih ditegaskan.

Interviewer: Apakah ada kebijakan disiplin yang diterapkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana?

Iis Amalia, : Kami memiliki beberapa kebijakan internal terkait disiplin, seperti ketepatan waktu dalam pelaporan, pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, serta evaluasi rutin untuk memastikan target-target tercapai. Meski begitu, kami juga lebih menekankan pada pendekatan berbasis kolaborasi dan saling pengertian agar disiplin terjaga dengan baik tanpa terasa kaku.

Interviewer: Apa kendala dalam menjaga kedisiplinan tim JPPA?

Iis Amalia, : Kendalanya adalah terbatasnya jumlah personel dan banyaknya kasus yang harus ditangani, sehingga terkadang beberapa anggota tim merasa kelelahan atau kewalahan dengan beban kerja. Selain itu, kadang ada perbedaan prioritas atau jadwal yang tidak selalu sesuai antaranggota tim, yang bisa mengganggu disiplin secara keseluruhan.

Interviewer: Menurut Anda, apakah disiplin aparaturnya berkontribusi pada keberhasilan program JPPA?

Iis Amalia : Tentu saja. Disiplin sangat berperan dalam memastikan program berjalan sesuai rencana dan tepat waktu. Semakin disiplin tim dalam menjalankan tugasnya, semakin mudah bagi kami untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa kedisiplinan, koordinasi dan pencapaian target akan terganggu, yang tentu mempengaruhi hasil akhir program.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan kedisiplinan dalam tim?

Iis Amalia, : Untuk meningkatkan kedisiplinan, saya rasa penting untuk memberikan penghargaan kepada anggota tim yang menunjukkan kedisiplinan yang baik. Selain itu, perlu ada pembahasan rutin tentang pentingnya kedisiplinan dalam setiap pertemuan tim, agar semuanya saling mengingatkan dan mendukung untuk tetap bekerja sesuai target.

Kejujuran Aparatur

Interviewer: Lanjut ke soal kejujuran aparaturnya. Bagaimana kejujuran dipupuk dalam JPPA, terutama dalam menangani data atau kasus KDRT?

Iis Amalia, : Kejujuran sangat penting, terutama dalam pengelolaan data kasus KDRT yang sangat sensitif. Kami selalu menekankan pada tim untuk menjaga integritas dalam setiap proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan. Kami juga melakukan pengecekan berkala untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan tidak ada manipulasi.

Interviewer: Apakah ada upaya tertentu untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan program?

Iis Amalia, : Kami selalu berusaha untuk transparan dalam setiap langkah, baik itu dalam pelaporan, penggunaan anggaran, maupun penanganan kasus. Misalnya, setiap tindakan yang diambil selalu didokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga terbuka terhadap masukan dan kritik dari pihak lain yang terkait dalam program ini.

Interviewer: Apa tantangan terbesar dalam memastikan kejujuran di antara tim?

Iis Amalia, : Tantangan terbesar adalah ketika ada tekanan untuk memenuhi target atau hasil yang cepat, yang bisa memengaruhi integritas dalam pengambilan keputusan atau pelaporan. Oleh karena itu, kami terus mengingatkan tim untuk selalu mengutamakan kejujuran, meskipun terkadang ada situasi yang bisa menguji integritas mereka.

Interviewer: Seberapa penting transparansi dan kejujuran dalam mencapai tujuan JPPA?

Iis Amalia, : Transparansi dan kejujuran adalah fondasi dari keberhasilan program. Tanpa transparansi, tidak akan ada kepercayaan antara tim dan pihak-pihak terkait, yang

bisa menghambat koordinasi dan kerjasama. Kejujuran juga menjamin bahwa setiap langkah yang diambil adalah untuk kepentingan terbaik korban, tanpa ada kepentingan lain yang menyimpang.

Interviewer: Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kejujuran dalam tim?

Iis Amalia, : Salah satu cara untuk menjaga kejujuran adalah dengan memberikan pelatihan rutin tentang etika kerja dan pentingnya integritas dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, penting juga untuk menciptakan budaya yang mendukung keterbukaan, sehingga anggota tim merasa aman untuk melaporkan masalah atau ketidakakuratan yang mereka temui.

Budaya Kerja Aparatur

Interviewer: Sekarang tentang budaya kerja aparatur. Bagaimana budaya kerja dikembangkan di antara aparatur yang terlibat dalam Program JPPA, terutama dalam menangani kasus KDRT?

Iis Amalia, : Budaya kerja di JPPA sangat mengutamakan kerja sama tim dan empati terhadap korban. Kami mendorong anggota tim untuk saling berbagi pengetahuan, berdiskusi tentang solusi terbaik untuk kasus tertentu, dan selalu mendahulukan kepentingan korban. Kami juga mendorong mereka untuk tetap profesional meski situasi yang dihadapi seringkali sangat emosional.

Interviewer: Apakah ada nilai-nilai atau kebiasaan tertentu yang diterapkan dalam tim JPPA untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kerja?

Iis Amalia, : Kami selalu menanamkan nilai kolaborasi, empati, dan profesionalisme dalam setiap pekerjaan. Kami juga rutin mengadakan pertemuan evaluasi untuk membahas pencapaian dan kendala yang dihadapi. Hal ini membantu tim untuk tetap fokus pada tujuan dan meningkatkan kualitas kerja mereka.

Interviewer: Apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun budaya kerja yang solid dan kooperatif di JPPA?

Iis Amalia, : Salah satu tantangannya adalah keberagaman latar belakang dan keahlian yang dimiliki oleh anggota tim. Terkadang, perbedaan pendekatan atau pemahaman bisa menjadi hambatan dalam berkolaborasi. Namun, dengan komunikasi yang baik dan komitmen bersama terhadap tujuan program, kami dapat mengatasi perbedaan tersebut.

Interviewer: Menurut Anda, bagaimana budaya kerja di JPPA mempengaruhi keberhasilan program dalam menangani kasus KDRT?

Iis Amalia, : Budaya kerja yang baik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Ketika tim bekerja dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, saling mendukung, dan memiliki komitmen yang kuat, maka penanganan kasus KDRT menjadi lebih efektif. Selain itu, budaya kerja yang kooperatif juga menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung bagi korban.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan budaya kerja di JPPA agar lebih mendukung pencapaian tujuan program?

Iis Amalia, : Saran saya adalah terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antar tim, serta memberi kesempatan lebih banyak untuk anggota tim berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Penguatan kerja tim melalui pelatihan bersama atau kegiatan bonding juga bisa meningkatkan hubungan interpersonal dan mempererat kerjasama.

Sifat Demokratis

Interviewer: Terakhir, tentang sifat demokratis. Sejauh mana aspek demokratis diterapkan dalam pengambilan keputusan terkait Program JPPA?

Iis Amalia, : Dalam program JPPA, kami selalu berusaha untuk mengutamakan keputusan yang demokratis, dimana setiap anggota tim diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Pengambilan keputusan yang transparan dan melibatkan semua pihak terkait sangat penting agar keputusan yang diambil lebih objektif dan menyeluruh.

Interviewer: Bagaimana proses pengambilan keputusan yang melibatkan masukan dari seluruh anggota tim atau pihak-pihak terkait di JPPA?

Iis Amalia, : Proses pengambilan keputusan biasanya dimulai dengan diskusi kelompok. Semua anggota tim, baik psikolog, pekerja sosial, maupun aparat hukum, diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Kami selalu mencoba mencari titik temu yang memperhatikan semua masukan, agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Interviewer: Apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga proses yang demokratis dalam tim JPPA, terutama saat menangani situasi yang membutuhkan keputusan cepat?

Iis Amalia, : Tantangannya adalah ketika situasi memerlukan keputusan cepat, seperti dalam kasus darurat. Dalam kondisi seperti ini, seringkali tidak semua pihak bisa dilibatkan dalam proses diskusi yang panjang, dan keputusan harus diambil dengan cepat. Namun, kami tetap berusaha sebisa mungkin untuk mendengarkan masukan dari pihak-pihak yang relevan.

Interviewer: Seberapa besar pengaruh sifat demokratis dalam tim terhadap efektivitas program JPPA, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif?

Iis Amalia, : Sifat demokratis sangat berpengaruh besar. Dengan proses yang terbuka dan inklusif, setiap anggota merasa dihargai dan diberi peran dalam pengambilan keputusan. Hal ini meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas kerja tim.

Interviewer: Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sifat demokratis dalam tim JPPA agar program berjalan lebih efektif dan transparan?

Iis Amalia, : Kami bisa meningkatkan sifat demokratis dengan lebih sering melakukan pertemuan tim untuk mendiskusikan isu-isu penting, dan memastikan bahwa setiap suara didengar. Selain itu, memberikan ruang bagi anggota tim untuk lebih aktif dalam pengambilan keputusan akan membuat mereka merasa lebih berperan dalam keberhasilan program.

Bagian 1: Struktur Birokrasi

a. Pengangkatan Birokrasi

Interviewer: Bagaimana proses pengangkatan aparatur dalam JPPA dilakukan?

Informan 5: Proses pengangkatan aparatur di JPPA sejauh ini lebih bersifat terbuka dan sukarela. Tidak ada seleksi formal seperti tes atau wawancara khusus, sehingga siapa saja yang berminat dan memiliki kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak bisa bergabung. Biasanya, mereka yang aktif di komunitas sosial lebih mudah terlibat karena sudah memiliki pemahaman dasar mengenai isu ini.

Interviewer: Apakah sistem pengangkatan di JPPA mendukung efisiensi program?

Informan 5: Dari sisi keterjangkauan, sistem ini cukup baik karena memungkinkan banyak orang untuk bergabung dan memperluas jaringan perlindungan. Tetapi, dari sisi efektivitas, kadang kurang optimal karena tidak semua anggota memiliki latar belakang atau keterampilan yang sesuai. Ada yang sangat berkomitmen, tetapi ada juga yang hanya aktif di awal dan kemudian pasif.

Interviewer: Apa tantangan dalam hal perekrutan yang memengaruhi pelaksanaan program?

Informan 5: Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa anggota yang bergabung memiliki komitmen jangka panjang. Banyak yang semangat di awal, tetapi setelah melihat tantangan di lapangan, mereka mulai menghilang. Selain itu, karena tidak ada standar perekrutan yang jelas, ada perbedaan kompetensi yang cukup signifikan di antara anggota, yang bisa memengaruhi kualitas layanan JPPA.

Interviewer: Apakah prosedur pengangkatan yang ada saat ini mendukung tujuan JPPA?

Informan 5: Dalam beberapa aspek, iya, karena lebih banyak orang bisa terlibat dan membantu penyebaran informasi. Namun, jika ingin lebih profesional dan efektif, mungkin perlu ada pelatihan wajib atau semacam sertifikasi dasar bagi anggota baru agar mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik.

Interviewer: Apa yang dapat diperbaiki dalam sistem pengangkatan di JPPA?

Informan 5: Saya pikir perlu ada sistem pelatihan dasar sebelum seseorang bisa bergabung secara resmi. Selain itu, ada baiknya dibuat sistem evaluasi untuk melihat apakah seseorang masih aktif dan berkontribusi, sehingga keanggotaan bisa lebih terstruktur dan tidak hanya sekadar nama dalam daftar.

Bagian 2: Insentif

Interviewer: Bagaimana kebijakan insentif bagi aparaturnya yang terlibat dalam Program JPPA?

Informan 5: Saat ini, insentif yang diberikan lebih berupa dukungan transportasi, penghargaan moral, dan kesempatan mengikuti pelatihan. Tidak ada gaji tetap atau insentif finansial yang besar, sehingga banyak anggota yang tetap bergabung karena kepedulian mereka, bukan karena keuntungan materi.

Interviewer: Apakah insentif yang diberikan cukup memotivasi tim untuk mencapai target program?

Informan 5: Bagi beberapa orang, mungkin cukup, terutama mereka yang memang memiliki dedikasi tinggi terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Tapi bagi yang memiliki keterbatasan ekonomi, kurangnya insentif finansial bisa menjadi hambatan besar untuk tetap aktif di JPPA.

Interviewer: Apa hambatan dalam memberikan insentif kepada tim JPPA?

Informan 5: Hambatan utama adalah keterbatasan anggaran. Karena JPPA bukan lembaga yang memiliki pendanaan tetap, maka insentif sering bergantung pada hibah atau dana dari pemerintah daerah dan organisasi mitra. Proses pencairan dana yang birokratis juga sering menyebabkan keterlambatan dalam pemberian insentif.

Interviewer: Seberapa besar pengaruh insentif terhadap keberhasilan program dalam mengurangi KDRT?

Informan 5: Insentif memiliki pengaruh besar, terutama dalam mempertahankan motivasi anggota. Jika mereka merasa diapresiasi dan didukung secara finansial, mereka akan lebih aktif dalam menjalankan tugas dan melakukan sosialisasi. Sebaliknya, jika insentif terlalu minim, banyak anggota yang akhirnya kurang aktif atau berhenti berkontribusi.

Interviewer: Menurut Anda, insentif seperti apa yang bisa meningkatkan kinerja tim JPPA?

Informan 5: Selain insentif finansial seperti tunjangan operasional, bentuk penghargaan seperti sertifikasi, kesempatan pelatihan lanjutan, atau akses ke beasiswa pendidikan juga bisa menjadi motivasi tambahan. Jika ada pengakuan resmi atas kerja keras mereka, anggota akan lebih merasa dihargai dan termotivasi untuk terus aktif.

Interviewer: Terima kasih atas waktu dan informasinya. Wawancara ini sangat membantu dalam memahami lebih dalam mengenai implementasi JPPA.

Informan 5: Sama-sama. Saya harap hasil penelitian ini bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi JPPA dan perlindungan perempuan serta anak di Kota Semarang.

Lampiran 13 Hasil wawancara dengan Mugi Marjoko, SH. Selaku Lurah Tegalsari kecamatan Candisari

Pertanyaan Umum

Interviewer: Bisakah Anda menceritakan latar belakang Anda dan bagaimana keterlibatan Anda dalam Program JPPA?

Mugi Marjoko: Saya Mugi Marjoko, S.H., saat ini menjabat sebagai Lurah Tegalsari, Kecamatan Candisari. Saya telah lama berkiprah di dunia pemerintahan dan memiliki fokus pada program yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam Program JPPA, saya terlibat langsung dalam implementasi di wilayah saya untuk membantu menanggulangi kasus KDRT, serta memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan psikologis.

Interviewer: Apa yang Anda ketahui tentang tujuan utama Program JPPA?

Mugi Marjoko: Program JPPA bertujuan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, terutama KDRT. Program ini menekankan upaya preventif dan responsif dengan melibatkan pemerintah, kepolisian, serta lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban.

Interviewer: Bagaimana proses implementasi Program JPPA dalam menangani kasus KDRT di daerah Anda?

Mugi Marjoko: Implementasi dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian, Dinas Sosial, dan lembaga mitra lainnya. Kami memastikan setiap laporan KDRT segera diterima dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Selain itu, kami menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan terhadap korban KDRT.

Interviewer: Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam pelaksanaan Program JPPA?

Mugi Marjoko: Tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban KDRT, sehingga mereka enggan melapor. Selain itu, koordinasi antarinstansi sering kali menjadi hambatan, terutama dalam pendataan dan tindak lanjut kasus. Kami terus mengatasi hal ini dengan memperkuat komunikasi dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

1) Komunikasi

a. Dimensi Transmisi

Interviewer: Bagaimana informasi tentang Program JPPA disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan?

Mugi Marjoko: Informasi disampaikan melalui pertemuan langsung dengan warga, distribusi brosur, media sosial, dan website kelurahan. Kami juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk memastikan informasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Interviewer: Apakah ada kendala dalam menyampaikan informasi ke lapangan? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?

Mugi Marjoko: Kendalanya adalah keterbatasan akses informasi di beberapa wilayah. Untuk mengatasinya, kami mengoptimalkan penggunaan WA Group dan media sosial agar informasi dapat tersebar lebih cepat dan merata.

Interviewer: Apa tantangan terbesar dalam mengoordinasikan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat?

Mugi Marjoko: Tantangan terbesar adalah memastikan semua pihak aktif berpartisipasi dan menghindari miskomunikasi. Setiap lembaga memiliki cara kerja yang berbeda, sehingga perlu komunikasi yang teratur agar tidak ada informasi yang terlewatkan.

Interviewer: Seberapa efektif proses komunikasi dalam memastikan semua pihak memahami tujuan JPPA?

Mugi Marjoko: Proses komunikasi cukup efektif dengan adanya pertemuan rutin dan pelatihan bagi pihak yang terlibat. Namun, evaluasi berkala tetap diperlukan untuk memastikan pemahaman yang seragam.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan jalur komunikasi agar lebih efisien dalam JPPA?

Mugi Marjoko: Perlu penguatan teknologi dalam komunikasi, seperti aplikasi berbasis web untuk berbagi data secara cepat dan akurat, serta pelatihan komunikasi yang lebih intensif.

b. Dimensi Kejelasan

Interviewer: Bagaimana kejelasan pesan atau informasi yang disampaikan kepada tim terkait Program JPPA?

Mugi Marjoko: Kami memastikan pesan tersampaikan dengan jelas melalui dokumen resmi dan pertemuan rutin agar setiap anggota memahami tugasnya.

Interviewer: Apakah setiap instruksi dalam program JPPA sudah cukup jelas bagi semua pihak yang terlibat?

Mugi Marjoko: Secara umum jelas, tetapi ada beberapa pihak yang masih memerlukan penjelasan tambahan, terutama yang baru terlibat dalam program ini.

Interviewer: Bagaimana Anda mengatasi ketidakjelasan atau miskomunikasi yang terjadi?

Mugi Marjoko: Jika terjadi miskomunikasi, kami segera mengadakan pertemuan klarifikasi agar tidak ada kesalahpahaman yang menghambat program.

Interviewer: Menurut Anda, apakah kejelasan informasi mendukung efektivitas pelaksanaan program?

Mugi Marjoko: Tentu saja. Kejelasan informasi memastikan bahwa semua pihak memahami tugasnya dengan baik dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelaksanaan.

Interviewer: Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kejelasan komunikasi di Program JPPA?

Mugi Marjoko: Membuat laporan tertulis yang lebih rinci dan meningkatkan frekuensi pertemuan langsung untuk memastikan pemahaman yang lebih baik.

c. Dimensi Konsistensi

Interviewer: Seberapa konsisten informasi yang diterima oleh seluruh tim JPPA?

Mugi Marjoko: Kami berusaha menjaga konsistensi informasi, meskipun terkadang ada perubahan atau penyesuaian tergantung situasi di lapangan.

Interviewer: Apakah ada perubahan atau penyesuaian dalam pesan yang disampaikan selama implementasi?

Mugi Marjoko: Ya, terkadang ada perubahan kebijakan atau strategi yang harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, tetapi kami selalu memastikan agar semua pihak segera mengetahui perubahan tersebut.

Interviewer: Apa dampak dari ketidakkonsistenan pesan terhadap pelaksanaan program?

Mugi Marjoko: Ketidakkonsistenan dapat menyebabkan kebingungan di lapangan dan memperlambat penanganan kasus KDRT, sehingga kami selalu berusaha menjaga informasi tetap seragam.

Interviewer: Apakah konsistensi komunikasi berdampak pada keberhasilan program dalam menekan KDRT?

Mugi Marjoko: Sangat berdampak. Dengan komunikasi yang konsisten, koordinasi menjadi lebih baik, sehingga kasus dapat ditangani lebih cepat dan efektif.

Interviewer: Bagaimana cara terbaik untuk menjaga konsistensi dalam komunikasi pada Program JPPA?

Mugi Marjoko: Memastikan bahwa semua informasi mengikuti pedoman yang berlaku dan mengadakan rapat berkala agar tidak ada informasi yang terlewat atau berubah tanpa koordinasi.

Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Interviewer: Seberapa penting peran sumber daya manusia dalam keberhasilan Program JPPA?

Mugi Marjoko: Peran sumber daya manusia sangat vital dalam keberhasilan Program JPPA. Tanpa SDM yang berkualitas dan memiliki komitmen tinggi, program ini sulit untuk berjalan dengan maksimal. Para petugas yang terlibat, mulai dari lurah, petugas sosial, hingga aparat keamanan, harus memiliki pemahaman yang mendalam

tentang masalah KDRT dan cara penanganannya agar dapat memberikan dukungan yang tepat bagi korban.

Interviewer: Apakah personel yang terlibat dalam JPPA sudah memadai secara jumlah dan kompetensi?

Mugi Marjoko: Secara jumlah, kami sudah cukup memadai, namun untuk kompetensi, masih perlu ditingkatkan. Beberapa personel masih baru dalam menangani kasus KDRT, sehingga mereka membutuhkan pelatihan dan pembekalan lebih lanjut. Kami juga terus berusaha untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya penanganan kasus KDRT secara tepat dan profesional.

Interviewer: Apa kendala utama yang Anda hadapi terkait sumber daya manusia?

Mugi Marjoko: Kendala utama adalah minimnya pelatihan khusus untuk penanganan kasus KDRT. Meskipun ada beberapa pelatihan umum, namun pengetahuan teknis dan sensitivitas terhadap korban masih perlu ditingkatkan. Kami juga sering menghadapi keterbatasan tenaga ahli yang mampu menangani masalah psikologis korban KDRT dengan baik.

Interviewer: Bagaimana Anda menilai efektivitas sumber daya manusia dalam mendukung program JPPA?

Mugi Marjoko: Secara umum, efektivitasnya cukup baik, meskipun ada beberapa area yang perlu perbaikan. Tim kami sudah bekerja keras dalam mendampingi korban dan memastikan mereka mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Namun, ada kalanya kami merasa kekurangan tenaga di beberapa titik, terutama ketika volume kasus meningkat.

Interviewer: Bagaimana Anda menyarankan agar kualitas SDM dapat ditingkatkan?

Mugi Marjoko: Saya rasa pelatihan lebih intensif dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, kami juga perlu merekrut lebih banyak tenaga ahli, seperti psikolog dan konselor, agar penanganan korban KDRT bisa lebih menyeluruh. Membangun jejaring dengan lembaga-lembaga lain juga penting agar SDM kami bisa terus belajar dan berkembang.

Sumber Daya Anggaran

Interviewer: Apakah anggaran yang tersedia cukup untuk mendukung operasional JPPA?

Mugi Marjoko: Sayangnya, anggaran yang tersedia masih terbatas dan seringkali tidak mencukupi untuk mendukung semua kegiatan yang kami rencanakan. Kami seringkali harus mencari alternatif sumber dana lain, baik dari pemerintah pusat maupun kerjasama dengan organisasi non-pemerintah.

Interviewer: Bagaimana pengelolaan anggaran untuk berbagai kegiatan dalam Program JPPA?

Mugi Marjoko: Pengelolaan anggaran dilakukan dengan sangat hati-hati. Kami memprioritaskan kegiatan yang langsung berkaitan dengan bantuan untuk korban, seperti biaya pengobatan atau pendampingan psikologis. Namun, kami juga harus memperhitungkan biaya operasional lain, seperti kegiatan sosialisasi atau pelatihan untuk petugas.

Interviewer: Apa hambatan terbesar terkait pendanaan yang memengaruhi implementasi JPPA?

Mugi Marjoko: Hambatan terbesar adalah ketidakpastian anggaran tahunan. Terkadang dana yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga menghambat pelaksanaan program yang lebih besar atau perluasan kegiatan yang direncanakan. Selain itu, pencairan anggaran yang lambat juga menjadi masalah.

Interviewer: Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi efektivitas program JPPA dalam menekan KDRT?

Mugi Marjoko: Tentu saja, keterbatasan anggaran mempengaruhi efektivitas program. Beberapa kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan untuk memperluas jangkauan program, seperti sosialisasi lebih luas atau pelatihan untuk masyarakat, terpaksa tertunda karena dana yang terbatas.

Interviewer: Apa saran Anda dalam pengelolaan anggaran agar mendukung keberhasilan JPPA?

Mugi Marjoko: Saya menyarankan agar ada alokasi dana yang lebih spesifik dan terjamin untuk program ini. Selain itu, penting juga untuk menjalin kerja sama dengan berbagai

pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta, untuk mendapatkan dana tambahan atau dukungan lainnya yang bisa menunjang kelancaran program.

Sumber Daya Peralatan

Interviewer: Apakah peralatan yang tersedia sudah cukup untuk melaksanakan program JPPA dengan baik?

Mugi Marjoko: Peralatan yang ada saat ini memang cukup, namun kami merasa masih ada beberapa yang kurang, terutama dalam hal fasilitas untuk korban, seperti ruang konsultasi atau ruang perlindungan yang lebih memadai. Selain itu, kami juga membutuhkan lebih banyak alat bantu untuk kegiatan pelatihan atau sosialisasi.

Interviewer: Bagaimana penggunaan fasilitas dan peralatan untuk mendukung program JPPA?

Mugi Marjoko: Fasilitas yang ada saat ini sudah digunakan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kekurangan dalam hal kenyamanan dan keamanan bagi korban. Kami berusaha memaksimalkan peralatan yang ada, namun tentu saja masih ada ruang untuk perbaikan.

Interviewer: Apa kendala yang dihadapi terkait ketersediaan peralatan?

Mugi Marjoko: Kendala utama adalah keterbatasan anggaran untuk membeli peralatan yang lebih memadai. Beberapa peralatan penting, seperti komputer dan perangkat komunikasi, sudah usang dan kurang optimal untuk menunjang kerja tim. Kami sering harus berhemat dalam pengadaan peralatan baru.

Interviewer: Bagaimana keterbatasan peralatan memengaruhi pelaksanaan program JPPA?

Mugi Marjoko: Keterbatasan peralatan memengaruhi kelancaran koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program. Misalnya, keterbatasan alat komunikasi bisa memperlambat respons tim saat menghadapi kasus mendesak. Selain itu, fasilitas yang kurang memadai juga bisa mengurangi kenyamanan bagi korban yang membutuhkan tempat yang aman dan nyaman untuk berproses.

Interviewer: Menurut Bapak, peralatan apa yang perlu ditambahkan?

Mugi Marjoko: Saya rasa peralatan yang perlu ditambahkan adalah ruang yang lebih aman dan nyaman bagi korban, seperti ruang konseling yang lebih representatif dan dilengkapi dengan peralatan pendukung, seperti komputer dan alat komunikasi yang lebih modern.

Sumber Daya Kewenangan

Interviewer: Apakah kewenangan yang diberikan kepada tim JPPA sudah cukup untuk menangani berbagai kasus KDRT secara efektif?

Mugi Marjoko: Secara umum, kewenangan yang diberikan sudah cukup, namun kadang kami merasa ada batasan dalam menangani kasus yang lebih kompleks, seperti yang melibatkan pihak-pihak berkuasa. Kami merasa perlu adanya kebijakan yang lebih fleksibel agar tim dapat mengambil tindakan lebih cepat dan tepat.

Interviewer: Bagaimana Anda memanfaatkan kewenangan yang ada dalam proses pelaksanaan Program JPPA, terutama dalam penanganan kasus KDRT?

Mugi Marjoko: Kami memanfaatkan kewenangan yang ada untuk melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dinas Sosial, serta memberikan perlindungan sementara bagi korban. Kami juga menggunakan kewenangan ini untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan segera dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Interviewer: Apa saja kendala yang Anda hadapi terkait kewenangan dalam menjalankan tugas JPPA? Apakah ada situasi di mana kewenangan yang ada dirasa kurang mendukung pelaksanaan program?

Mugi Marjoko: Kadang, kami merasa bahwa kewenangan yang ada tidak cukup untuk segera bertindak di lapangan, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan fisik yang lebih berat. Terkadang kami harus menunggu keputusan dari pihak lain, seperti kepolisian, sebelum bisa memberikan bantuan lebih lanjut kepada korban.

Interviewer: Menurut Anda, apakah kewenangan yang dimiliki JPPA saat ini cukup efektif untuk mencapai tujuan penurunan angka KDRT?

Mugi Marjoko: Kewenangan yang dimiliki sudah cukup efektif dalam banyak kasus, tetapi ada kalanya proses birokrasi yang panjang membuat kami terlambat dalam menangani

kasus-kasus yang mendesak. Sebuah sistem yang lebih cepat dan fleksibel tentu akan lebih membantu dalam hal ini.

Interviewer: Apa rekomendasi Anda untuk memperkuat kewenangan JPPA agar lebih optimal dalam menangani kasus KDRT?

Mugi Marjoko: Rekomendasi saya adalah agar ada peraturan yang memberikan kewenangan lebih besar pada tim JPPA, khususnya dalam hal respons cepat terhadap kasus KDRT. Mempercepat proses administrasi dan memberikan akses langsung kepada tim untuk mengambil langkah-langkah awal dalam melindungi korban akan sangat membantu.

Disposisi/Sikap

a. Disiplin Aparatur

Interviewer: Bagaimana disiplin aparatur yang terlibat dalam Program JPPA?

Mugi Marjoko: Disiplin aparatur yang terlibat dalam Program JPPA cukup baik, tetapi tentu saja ada beberapa tantangan. Tim kami sebagian besar memahami betul pentingnya peran mereka dalam menangani kasus KDRT, namun terkadang kesibukan administratif atau ketergantungan pada jadwal yang padat bisa memengaruhi tingkat kedisiplinan. Kami terus berupaya agar setiap anggota tim tetap fokus pada tugas utama mereka.

Interviewer: Apakah ada kebijakan disiplin yang diterapkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana?

Mugi Marjoko: Ada beberapa kebijakan disiplin yang kami terapkan, seperti rapat evaluasi berkala untuk memastikan bahwa setiap langkah program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Selain itu, kami juga memiliki sistem pengawasan untuk memantau apakah setiap tim melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu.

Interviewer: Apa kendala dalam menjaga kedisiplinan tim JPPA?

Mugi Marjoko: Kendala utamanya adalah terkadang adanya perbedaan prioritas antara tugas utama dan tugas tambahan yang membuat tim kesulitan fokus sepenuhnya pada program. Selain itu, kurangnya pengawasan langsung dari atasan juga kadang menjadi masalah dalam menjaga disiplin.

Interviewer: Menurut Anda, apakah disiplin aparatur berkontribusi pada keberhasilan program JPPA?

Mugi Marjoko: Tentu saja, disiplin aparatur sangat berkontribusi pada keberhasilan program. Dengan kedisiplinan yang tinggi, program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target-target yang ditetapkan bisa tercapai. Jika tim disiplin, mereka bisa lebih cepat merespons kasus-kasus KDRT yang terjadi.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan kedisiplinan dalam tim?

Mugi Marjoko: Saya rasa perlu adanya sistem reward and punishment yang jelas. Dengan memberikan penghargaan bagi anggota tim yang konsisten dan disiplin, serta sanksi yang tegas bagi yang melanggar, kedisiplinan akan lebih terjaga. Selain itu, komunikasi yang terbuka tentang pentingnya disiplin juga sangat diperlukan.

b. Kejujuran Aparatur

Interviewer: Bagaimana kejujuran dipupuk dalam JPPA, terutama dalam menangani data atau kasus KDRT?

Mugi Marjoko: Kejujuran sangat dijaga dalam JPPA, terutama dalam penanganan data dan informasi terkait kasus KDRT. Kami selalu menekankan pentingnya transparansi kepada setiap anggota tim. Semua informasi yang diperoleh harus dilaporkan dengan jujur dan akurat agar dapat diambil tindakan yang tepat.

Interviewer: Apakah ada upaya tertentu untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan program?

Mugi Marjoko: Ya, kami selalu melakukan audit internal dan memberikan ruang bagi setiap anggota tim untuk menyampaikan masalah atau kendala yang mereka hadapi. Selain itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam program JPPA juga dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat, agar tidak ada yang merasa tertutup.

Interviewer: Apa tantangan terbesar dalam memastikan kejujuran di antara tim?

Mugi Marjoko: Tantangan terbesar adalah menjaga integritas ketika ada tekanan dari luar, seperti dari keluarga korban atau pihak lain yang mungkin meminta penanganan khusus. Kami harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tetap berlandaskan pada kebenaran dan prinsip keadilan.

Interviewer: Seberapa penting transparansi dan kejujuran dalam mencapai tujuan JPPA?

Mugi Marjoko: Transparansi dan kejujuran sangat penting karena ini membangun kepercayaan antara tim, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Tanpa itu, sulit untuk melaksanakan program dengan efektif karena masyarakat dan korban akan merasa ragu untuk berpartisipasi.

Interviewer: Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kejujuran dalam tim?

Mugi Marjoko: Saya rasa yang utama adalah menciptakan budaya kerja yang terbuka dan mendukung. Setiap anggota tim harus merasa nyaman untuk menyampaikan kebenaran tanpa takut ada konsekuensi negatif. Selain itu, pemimpin juga harus memberi contoh dalam hal transparansi dan kejujuran.

c. Budaya Kerja Aparatur

Interviewer: Bagaimana budaya kerja dikembangkan di antara aparatur yang terlibat dalam Program JPPA, terutama dalam menangani kasus KDRT?

Mugi Marjoko: Budaya kerja yang kami bangun di JPPA adalah budaya kerja yang berbasis pada empati, kolaborasi, dan profesionalisme. Kami memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran mereka dalam melindungi korban dan menangani kasus KDRT dengan penuh perhatian dan ketelitian.

Interviewer: Apakah ada nilai-nilai atau kebiasaan tertentu yang diterapkan dalam tim JPPA untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kerja?

Mugi Marjoko: Ada beberapa nilai yang kami tanamkan, seperti saling menghargai, bekerja sama secara tim, dan selalu menjaga profesionalisme dalam setiap langkah. Kami juga sering mengadakan diskusi bersama untuk meningkatkan pemahaman tim terhadap masalah-masalah yang dihadapi korban KDRT, serta memperbaiki cara-cara penanganannya.

Interviewer: Apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun budaya kerja yang solid dan kooperatif di JPPA?

Mugi Marjoko: Tantangannya adalah perbedaan latar belakang dan pandangan setiap anggota tim. Beberapa anggota mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dalam menangani kasus KDRT, sehingga memerlukan waktu untuk menyatukan visi dan misi. Selain itu, adanya tekanan dari luar yang mempengaruhi fokus kerja juga bisa menjadi tantangan.

Interviewer: Menurut Anda, bagaimana budaya kerja di JPPA mempengaruhi keberhasilan program dalam menangani kasus KDRT?

Mugi Marjoko: Budaya kerja yang solid sangat mempengaruhi keberhasilan program. Ketika tim bekerja dengan saling menghargai dan mendukung, tugas-tugas yang dihadapi bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif. Selain itu, budaya kerja yang kooperatif juga membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan budaya kerja di JPPA agar lebih mendukung pencapaian tujuan program?

Mugi Marjoko: Saya menyarankan agar ada pelatihan tim secara rutin untuk meningkatkan keterampilan kerja sama dan komunikasi antaranggota tim. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan mendukung akan sangat membantu dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

d. Sifat Demokratis

Interviewer: Sejauh mana aspek demokratis diterapkan dalam pengambilan keputusan terkait Program JPPA?

Mugi Marjoko: Kami selalu berusaha untuk menerapkan prinsip demokratis dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal-hal yang melibatkan banyak pihak. Setiap keputusan penting dalam penanganan KDRT biasanya melibatkan diskusi dengan semua pihak yang terlibat, termasuk pihak kepolisian dan Dinas Sosial.

Interviewer: Bagaimana proses pengambilan keputusan yang melibatkan masukan dari seluruh anggota tim atau pihak-pihak terkait di JPPA?

Mugi Marjoko: Proses pengambilan keputusan di JPPA biasanya dilakukan melalui rapat koordinasi dengan semua pihak terkait. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan mereka. Setelah itu, keputusan diambil berdasarkan konsensus yang paling menguntungkan bagi korban.

Interviewer: Apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga proses yang demokratis dalam tim JPPA, terutama saat menangani situasi yang membutuhkan keputusan cepat?

Mugi Marjoko: Tantangannya adalah terkadang keputusan yang harus diambil bersifat mendesak, dan dalam situasi seperti itu, sulit untuk melibatkan semua pihak untuk berdiskusi panjang lebar. Kami sering kali harus membuat keputusan dengan cepat, meskipun tidak semua pihak terlibat secara langsung dalam prosesnya.

Interviewer: Seberapa besar pengaruh sifat demokratis dalam tim terhadap efektivitas program JPPA, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif?

Mugi Marjoko: Sifat demokratis sangat berpengaruh karena menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling mendengarkan. Ketika setiap pihak merasa dihargai dan dilibatkan, mereka akan lebih berkomitmen dalam menjalankan tugasnya dan merasa bahwa kontribusinya dihargai.

Interviewer: Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sifat demokratis dalam tim JPPA agar program berjalan lebih efektif dan transparan?

Mugi Marjoko: Untuk meningkatkan sifat demokratis, kami perlu terus memfasilitasi diskusi terbuka dan mendengarkan masukan dari setiap anggota tim. Kami juga perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak, dengan tetap mengutamakan kepentingan korban KDRT.

Bagian 1: Struktur Birokrasi

a. Pengangkatan Birokrasi

Interviewer: Bagaimana proses pengangkatan aparatur dalam JPPA dilakukan?

Informan 6: Sejauh yang saya tahu, pengangkatan aparatur di JPPA lebih bersifat sukarela. Tidak ada mekanisme seleksi yang ketat, sehingga siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak dapat bergabung. Biasanya, mereka yang sudah aktif di organisasi sosial atau memiliki pengalaman dalam menangani kasus kekerasan lebih mudah diterima.

Interviewer: Apakah sistem pengangkatan di JPPA mendukung efisiensi program?

Informan 6: Dari segi fleksibilitas, sistem ini memang memudahkan keterlibatan banyak pihak, tetapi dari sisi efisiensi, ada tantangan tersendiri. Karena tidak semua anggota memiliki latar belakang yang sesuai, sering kali ada kesenjangan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab. Ini bisa berdampak pada kualitas layanan yang diberikan.

Interviewer: Apa tantangan dalam hal perekrutan yang memengaruhi pelaksanaan program?

Informan 6: Tantangan utamanya adalah memastikan anggota yang direkrut benar-benar memiliki komitmen. Banyak yang bergabung di awal karena tertarik, tetapi setelah melihat tantangan di lapangan, mereka menjadi kurang aktif. Selain itu, kurangnya pelatihan awal juga membuat beberapa anggota kurang siap dalam menangani kasus dengan pendekatan yang profesional.

Interviewer: Apakah prosedur pengangkatan yang ada saat ini mendukung tujuan JPPA?

Informan 6: Secara umum, sistem ini memungkinkan lebih banyak orang terlibat, tetapi agar lebih efektif, perlu ada mekanisme seleksi atau setidaknya pelatihan dasar sebelum seseorang benar-benar bisa aktif dalam program ini.

Interviewer: Apa yang dapat diperbaiki dalam sistem pengangkatan di JPPA?

Informan 6: Perlu ada sistem seleksi yang lebih terstruktur, mungkin dengan pelatihan wajib sebelum seseorang bergabung. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kinerja anggota juga penting agar hanya mereka yang benar-benar aktif dan kompeten yang tetap berkontribusi dalam program ini.

Bagian 2: Insentif

Interviewer: Bagaimana kebijakan insentif bagi aparaturnya yang terlibat dalam Program JPPA?

Informan 6: Saat ini, insentif yang diberikan masih terbatas. Biasanya berupa dukungan transportasi, penghargaan moral, dan kesempatan mengikuti pelatihan. Tidak ada gaji tetap atau honorarium khusus, sehingga banyak anggota yang tetap aktif karena rasa kepedulian mereka.

Interviewer: Apakah insentif yang diberikan cukup memotivasi tim untuk mencapai target program?

Informan 6: Untuk beberapa orang, mungkin cukup. Tapi bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi atau kesibukan lain, kurangnya insentif finansial bisa menjadi alasan untuk mengurangi keterlibatan mereka dalam program ini.

Interviewer: Apa hambatan dalam memberikan insentif kepada tim JPPA?

Informan 6: Hambatan utamanya adalah keterbatasan anggaran. Karena JPPA bukan lembaga yang memiliki pendanaan tetap, insentif sering kali bergantung pada hibah atau dukungan dari pemerintah daerah dan mitra organisasi. Proses pencairan dana juga cukup birokratis, sehingga sering ada keterlambatan dalam pemberian insentif.

Interviewer: Seberapa besar pengaruh insentif terhadap keberhasilan program dalam mengurangi KDRT?

Informan 6: Insentif berperan besar dalam menjaga motivasi anggota. Jika mereka merasa dihargai, mereka akan lebih aktif dalam menjalankan tugas dan melakukan sosialisasi. Namun, jika insentif minim, ada kecenderungan anggota menjadi kurang aktif, yang tentu saja berdampak pada efektivitas program.

Interviewer: Menurut Anda, insentif seperti apa yang bisa meningkatkan kinerja tim JPPA?

Informan 6: Selain insentif finansial, bisa juga diberikan bentuk penghargaan lain seperti sertifikasi resmi, kesempatan mengikuti pelatihan lanjutan, atau akses ke beasiswa pendidikan. Hal-hal seperti itu bisa meningkatkan motivasi anggota dan membuat mereka merasa kontribusi mereka benar-benar dihargai.

Interviewer: Terima kasih atas waktu dan informasinya. Wawancara ini sangat membantu dalam memahami lebih dalam mengenai implementasi JPPA.

Informan 6: Sama-sama. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan JPPA di masa depan.

Lampiran 14 Hasil wawancara dengan Bambang Sumbodo, SH. Selaku lurah Kemijen Kecamatan Semarang Timur

Pertanyaan Umum

Interviewer: Bisakah Anda menceritakan latar belakang Anda dan bagaimana keterlibatan Anda dalam Program JPPA?

Bambang S: Tentu. Saya sudah cukup lama berkecimpung dalam pelayanan masyarakat, terutama dalam bidang pemerintahan kelurahan. Sebelum menjadi lurah di Kemijen, saya pernah menjabat beberapa posisi di kelurahan lainnya. Saya terlibat dalam Program JPPA sejak awal diluncurkan di sini, terutama untuk membantu penanganan kasus KDRT. Program ini sangat penting karena memberi ruang bagi masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya dan bagaimana cara melaporkan kekerasan domestik yang terjadi.

Interviewer: Apa yang Anda ketahui tentang tujuan utama Program JPPA?

Bambang S: Tujuan utama Program JPPA adalah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mereka lebih paham tentang cara mencegah, melaporkan, dan menangani kasus KDRT. Kami di Kemijen berusaha memastikan bahwa setiap korban mendapatkan akses ke layanan yang mereka butuhkan.

Interviewer: Bagaimana proses implementasi Program JPPA dalam menangani kasus KDRT di daerah Anda?

Bambang S: Implementasi dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, Puskesmas, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membentuk tim penanganan KDRT. Setelah menerima laporan, kami akan memfasilitasi korban dengan perlindungan sementara dan akses ke layanan yang diperlukan.

Interviewer: Apa saja tantangan utama yang Anda hadapi dalam pelaksanaan Program JPPA?

Bambang S: Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Banyak korban takut atau malu melapor. Selain itu, masalah koordinasi antar pihak terkait juga menjadi hambatan, terutama jika ada perbedaan prosedur atau pemahaman dalam menangani kasus tersebut.

Komunikasi

Transmisi

Interviewer: Bagaimana informasi tentang Program JPPA disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan?

Bambang S: Informasi disampaikan melalui pertemuan rutin, sosialisasi langsung, hingga media sosial. Kami juga mengadakan pelatihan dan workshop untuk perangkat kelurahan agar mereka bisa menjadi ujung tombak dalam menyampaikan informasi kepada warga.

Interviewer: Apakah ada kendala dalam menyampaikan informasi ke lapangan? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya?

Bambang S: Kendala utama adalah terbatasnya akses informasi di daerah yang minim teknologi. Untuk mengatasi hal ini, kami memanfaatkan kegiatan door-to-door dan pertemuan tatap muka dengan masyarakat. Kami juga melibatkan tokoh masyarakat untuk membantu menyampaikan pesan tersebut.

Interviewer: Apa tantangan terbesar dalam mengoordinasikan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat?

Bambang S: Tantangannya adalah memastikan semua pihak saling berbicara dengan bahasa yang sama. Kadang ada perbedaan prosedur antar lembaga pemerintah dan LSM, yang bisa menyebabkan kebingungan. Kami berusaha menyamakan persepsi lewat rapat koordinasi rutin.

Interviewer: Seberapa efektif proses komunikasi dalam memastikan semua pihak memahami tujuan JPPA?

Bambang S: Proses komunikasi cukup efektif, meskipun selalu ada ruang untuk perbaikan. Kami memastikan informasi yang tepat sampai, namun tantangan dalam memastikan pemahaman yang sama tetap ada. Kami terus mengevaluasi dan memperbaiki cara komunikasi agar lebih efektif.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan jalur komunikasi agar lebih efisien dalam JPPA?

Bambang S: Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan memaksimalkan penggunaan teknologi, seperti membuat platform komunikasi untuk menghubungkan semua pihak, sehingga informasi bisa cepat tersebar dan diakses oleh semua pihak terkait.

Dimensi Kejelasan

Interviewer: Bagaimana kejelasan pesan atau informasi yang disampaikan kepada tim terkait Program JPPA?

Bambang S: Kami selalu berusaha menyampaikan pesan dengan jelas dan tidak bertele-tele. Setiap instruksi sudah diperinci sesuai tugas masing-masing pihak, namun kadang ada kalanya informasi teknis sulit dipahami pihak yang tidak terbiasa.

Interviewer: Apakah setiap instruksi dalam program JPPA sudah cukup jelas bagi semua pihak yang terlibat?

Bambang S: Sebagian besar sudah cukup jelas, tetapi terkadang ada kesulitan di lapangan dalam implementasi instruksi, terutama di tingkat bawah. Kami terus memperbaiki cara penyampaian agar lebih mudah dipahami oleh semua pihak.

Interviewer: Bagaimana Anda mengatasi ketidakjelasan atau miskomunikasi yang terjadi?

Bambang S: Kami melakukan klarifikasi langsung. Jika ada ketidakjelasan, kami segera memanggil pihak terkait untuk duduk bersama dan mencari solusi agar masalah tidak terulang lagi.

Interviewer: Menurut Anda, apakah kejelasan informasi mendukung efektivitas pelaksanaan program?

Bambang S: Kejelasan informasi sangat penting. Tanpa kejelasan, pelaksanaan program bisa terhambat dan menimbulkan kebingungan. Kami terus menjaga agar setiap informasi yang disampaikan selalu jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak.

Interviewer: Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kejelasan komunikasi di Program JPPA?

Bambang S: Kami berencana memperkuat pelatihan bagi semua pihak terkait agar mereka bisa menyampaikan pesan lebih jelas. Selain itu, penggunaan media visual atau contoh konkret dalam sosialisasi akan mempermudah pemahaman.

Dimensi Konsistensi

Interviewer: Seberapa konsisten informasi yang diterima oleh seluruh tim JPPA?

Bambang S: Secara umum, informasi yang diterima oleh seluruh tim cukup konsisten. Kami berusaha untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan pesan yang sama melalui pertemuan rutin dan komunikasi yang terus-menerus. Namun, tentu saja ada tantangan untuk memastikan konsistensi, terutama karena banyak pihak yang terlibat.

Interviewer: Apakah ada perubahan atau penyesuaian dalam pesan yang disampaikan selama implementasi?

Bambang S: Ada beberapa penyesuaian dalam pesan yang disampaikan, terutama dalam hal prosedur operasional yang terkadang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan yang berubah. Namun, perubahan tersebut selalu diinformasikan secara jelas kepada seluruh tim agar tidak terjadi kebingungannya.

Interviewer: Apa dampak dari ketidakkonsistenan pesan terhadap pelaksanaan program?

Bambang S: Ketidakkonsistenan pesan bisa menyebabkan kebingungan di lapangan dan memperlambat penanganan kasus. Misalnya, jika ada pihak yang menerima informasi yang berbeda, mereka bisa melaksanakan tugas dengan cara yang berbeda pula, yang akhirnya bisa mengganggu kelancaran program.

Interviewer: Apakah konsistensi komunikasi berdampak pada keberhasilan program dalam menekan KDRT?

Bambang S: Ya, konsistensi komunikasi sangat berdampak pada keberhasilan program. Jika informasi yang diterima seluruh pihak konsisten, maka program akan berjalan lebih lancar, dan upaya pencegahan serta penanganan KDRT bisa lebih efektif.

Interviewer: Bagaimana cara terbaik untuk menjaga konsistensi dalam komunikasi pada Program JPPA?

Bambang S: Cara terbaik untuk menjaga konsistensi adalah dengan selalu memperbarui informasi dan mengkomunikasikannya dengan jelas ke seluruh tim secara teratur. Selain itu, rapat koordinasi rutin dan penggunaan platform komunikasi yang efisien akan sangat membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki informasi yang sama.

Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Interviewer: Seberapa penting peran sumber daya manusia dalam keberhasilan Program JPPA?

Bambang S : Sumber daya manusia sangat penting dalam keberhasilan program ini. Tanpa SDM yang berkualitas dan memiliki komitmen yang kuat, tujuan Program JPPA untuk menangani KDRT akan sulit tercapai. SDM yang terlibat harus paham betul tentang prosedur penanganan kasus KDRT dan memiliki empati yang tinggi terhadap korban.

Interviewer: Apakah personel yang terlibat dalam JPPA sudah memadai secara jumlah dan kompetensi?

Bambang S : Secara jumlah, kami cukup terbantu dengan adanya berbagai relawan dan petugas dari lembaga terkait, namun memang masih ada kekurangan dalam hal kompetensi. Beberapa personel terkadang kurang paham soal detail teknis dalam menangani kasus KDRT yang kompleks. Kami perlu terus meningkatkan pelatihan dan pemahaman mereka.

Interviewer: Apa kendala utama yang Anda hadapi terkait sumber daya manusia?

Bambang S : Kendala utama adalah kurangnya pelatihan khusus yang memadai bagi petugas di lapangan. Banyak yang terlibat secara sukarela, tetapi tidak semua memiliki pemahaman yang sama tentang penanganan kasus KDRT. Kadang ada juga keterbatasan waktu untuk melibatkan mereka dalam kegiatan yang bersifat mendalam.

Interviewer: Bagaimana Anda menilai efektivitas sumber daya manusia dalam mendukung program JPPA?

Bambang S : Secara umum, efektivitasnya cukup baik meski ada tantangan. Petugas yang terlibat punya komitmen yang tinggi, meskipun terkadang mereka belum memiliki keterampilan yang mumpuni. Dengan pelatihan yang lebih intensif, saya yakin efektivitas mereka bisa meningkat pesat.

Interviewer: Bagaimana Anda menyarankan agar kualitas SDM dapat ditingkatkan?

Bambang S : Saya menyarankan agar dilakukan pelatihan berkala, tidak hanya mengenai teknis penanganan KDRT, tetapi juga bagaimana berinteraksi dengan korban secara psikologis. Selain itu, perlu ada sistem mentoring di lapangan, di mana mereka yang lebih berpengalaman bisa membimbing rekan-rekan baru.

b. Sumber Daya Anggaran

Interviewer: Apakah anggaran yang tersedia cukup untuk mendukung operasional JPPA?

Bambang S : Anggaran yang ada saat ini cukup terbatas untuk mendukung semua kegiatan yang kami rencanakan. Terutama untuk pelatihan SDM dan sosialisasi yang lebih luas ke masyarakat. Kami masih perlu anggaran tambahan untuk memperluas cakupan dan mendukung operasional yang lebih optimal.

Interviewer: Bagaimana pengelolaan anggaran untuk berbagai kegiatan dalam Program JPPA?

Bambang S : Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan efisien. Kami prioritaskan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang langsung berdampak pada pelaksanaan program, seperti pelatihan, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kami juga berusaha memaksimalkan dana dengan bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki anggaran terkait.

Interviewer: Apa hambatan terbesar terkait pendanaan yang memengaruhi implementasi JPPA?

Bambang S : Hambatan terbesar adalah terbatasnya dana yang tersedia untuk pelaksanaan program ini, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembaga pendukung. Dengan anggaran yang terbatas kami harus memilih mana yang prioritas padahal setiap aspek dari program ini sebenarnya membutuhkan perhatian yang cukup besar.

Interviewer: Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi efektivitas program JPPA dalam menekan KDRT?

Bambang S : Ya, keterbatasan anggaran sangat memengaruhi efektivitas program ini. Beberapa kegiatan yang seharusnya bisa menjangkau lebih banyak orang atau memberikan dampak lebih besar terhambat oleh dana yang terbatas. Misalnya, sosialisasi yang seharusnya lebih luas dan intensif terkendala anggaran.

Interviewer: Apa saran Anda dalam pengelolaan anggaran agar mendukung keberhasilan JPPA?

Bambang S : Pengelolaan anggaran perlu lebih fokus pada hal-hal yang langsung mendukung pengurangan KDRT, seperti pendampingan korban dan peningkatan kapasitas petugas. Selain itu, kami juga perlu mencari sumber pendanaan alternatif, seperti bekerja sama dengan sektor swasta atau lembaga donor yang peduli terhadap isu ini.

c. Sumber Daya Peralatan

Interviewer: Apakah peralatan yang tersedia sudah cukup untuk melaksanakan program JPPA dengan baik?

Bambang S : Peralatan yang tersedia masih terbatas. Kami memiliki peralatan dasar, tetapi banyak yang perlu ditambah untuk mendukung pelaksanaan program dengan lebih baik, seperti alat untuk pendokumentasian kasus sistem pelaporan yang lebih efisien, dan peralatan yang mendukung kegiatan sosialisasi.

Interviewer: Bagaimana penggunaan fasilitas dan peralatan untuk mendukung program JPPA?

Bambang S : Fasilitas yang ada masih terbatas namun kami mencoba untuk memaksimalkan penggunaan ruang kelurahan dan fasilitas yang sudah ada. Kendalanya, beberapa fasilitas belum memadai untuk pelaksanaan program yang lebih intensif. Kami juga butuh lebih banyak peralatan untuk mendukung pelatihan dan sosialisasi.

Interviewer: Apa kendala yang dihadapi terkait ketersediaan peralatan?

Bambang S : Kendala utamanya adalah kurangnya peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan lapangan. Beberapa alat yang dibutuhkan untuk mendukung pendampingan korban atau kegiatan edukasi masyarakat masih kurang, dan hal ini sedikit membatasi efektivitas program.

Interviewer: Bagaimana keterbatasan peralatan memengaruhi pelaksanaan program JPPA?

Bambang S : Keterbatasan peralatan membuat pelaksanaan program menjadi kurang maksimal. Misalnya, dalam kegiatan sosialisasi atau pelatihan, tanpa alat yang memadai, komunikasi dan penyampaian materi menjadi kurang efektif. Kami sangat bergantung pada alat sederhana, yang terkadang tidak cukup untuk mendukung kebutuhan lapangan.

Interviewer: Menurut Bapak, peralatan apa yang perlu ditambahkan?

Bambang S : Kami perlu peralatan untuk mendokumentasikan setiap kasus dengan baik, seperti kamera dan perangkat elektronik untuk merekam laporan. Selain itu, kami juga membutuhkan peralatan pendukung untuk kegiatan pelatihan dan workshop, seperti proyektor dan materi visual yang bisa membantu menjelaskan program lebih jelas kepada masyarakat.

d. Sumber Daya Kewenangan

Interviewer: Apakah kewenangan yang diberikan kepada tim JPPA sudah cukup untuk menangani berbagai kasus KDRT secara efektif?

Bambang S : Secara umum, kewenangan yang diberikan sudah cukup untuk menangani kasus KDRT, namun ada beberapa aspek yang perlu diperkuat. Misalnya, kami memerlukan kewenangan lebih dalam memberikan perlindungan langsung kepada korban dan menindaklanjuti kasus dengan lebih cepat.

Interviewer: Bagaimana Anda memanfaatkan kewenangan yang ada dalam proses pelaksanaan Program JPPA, terutama dalam penanganan kasus KDRT?

Bambang S : Saya memanfaatkan kewenangan yang ada untuk segera mengarahkan korban ke tempat aman, menghubungi pihak kepolisian atau lembaga terkait lainnya untuk penanganan lebih lanjut. Kami juga menggunakan kewenangan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Interviewer: Apa saja kendala yang Anda hadapi terkait kewenangan dalam menjalankan tugas JPPA? Apakah ada situasi di mana kewenangan yang ada dirasa kurang mendukung pelaksanaan program?

Bambang S : Kadang-kadang, kewenangan yang ada dirasa kurang mencakup semua aspek yang diperlukan untuk penanganan kasus secara menyeluruh. Misalnya, dalam hal pengambilan keputusan cepat yang menyangkut keamanan korban, kami seringkali merasa harus menunggu keputusan dari lembaga lain yang punya kewenangan lebih besar.

Interviewer: Menurut Bapak, apakah kewenangan yang dimiliki JPPA saat ini cukup efektif untuk mencapai tujuan penurunan angka KDRT?

Bambang S : Kewenangan yang ada sudah cukup efektif dalam konteks penanganan kasus tapi untuk penurunan angka KDRT, kami perlu lebih banyak kewenangan untuk melakukan pencegahan yang lebih luas dan menyeluruh. Misalnya, kewenangan untuk mengatur pelatihan bagi masyarakat dan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku.

Interviewer: Apa rekomendasi Anda untuk memperkuat kewenangan JPPA agar lebih optimal dalam menangani kasus KDRT?

Bambang S : Saya merekomendasikan agar JPPA diberi kewenangan lebih dalam hal pengambilan keputusan di tingkat kelurahan, seperti hak untuk langsung memberikan perlindungan atau bantuan hukum bagi korban tanpa harus melalui banyak birokrasi. Ini akan mempercepat penanganan kasus dan membuat program lebih efektif.

Disposisi/Sikap

a. Disiplin Aparatur

Interviewer: Bagaimana disiplin aparat yang terlibat dalam Program JPPA?

Bambang S : Disiplin aparat dalam Program JPPA cukup baik. Mereka memahami pentingnya program ini, sehingga mereka berusaha untuk melaksanakan tugas mereka dengan serius. Namun, kadang ada beberapa anggota tim yang masih perlu diberi pengertian tentang urgensi program ini dalam menangani kasus KDRT. Disiplin di lapangan memang bisa lebih ditingkatkan.

Interviewer: Apakah ada kebijakan disiplin yang diterapkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana?

Bambang S : Ya, kami menerapkan kebijakan disiplin yang cukup ketat, terutama dalam hal ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaan tugas. Kami mengatur agar setiap tim mematuhi prosedur yang telah disepakati, seperti jadwal pertemuan rutin dan laporan berkala. Namun, meskipun sudah ada kebijakan, beberapa anggota kadang kesulitan menjalankannya karena kekurangan waktu atau sumber daya.

Interviewer: Apa kendala dalam menjaga kedisiplinan tim JPPA?

Bambang S : Kendalanya terutama pada beban kerja yang cukup berat, dan kadang tidak semua anggota tim dapat hadir secara konsisten dalam setiap kegiatan. Beberapa anggota juga memiliki tugas lain di luar Program JPPA, yang kadang membuat mereka sulit untuk fokus penuh. Kami juga perlu lebih mempertegas komitmen agar kedisiplinan lebih terjaga.

Interviewer: Menurut Anda, apakah disiplin aparat berkontribusi pada keberhasilan program JPPA?

Bambang S : Tentu saja. Disiplin aparat sangat berkontribusi terhadap keberhasilan program ini. Tanpa disiplin yang baik, koordinasi akan terganggu dan program bisa terhambat. Ketepatan dalam pelaksanaan tugas dan waktu sangat mempengaruhi hasil akhirnya dalam menekan KDRT di wilayah kami.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan kedisiplinan dalam tim?

Bambang S : Saya rasa penting untuk melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja tim dan memberikan penghargaan kepada anggota yang menunjukkan disiplin yang baik. Selain itu, perlu ada sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya disiplin dalam keberhasilan program ini agar semua anggota menyadari peranannya.

b. Kejujuran Aparatur

Interviewer: Bagaimana kejujuran dipupuk dalam JPPA, terutama dalam menangani data atau kasus KDRT?

Bambang S : Kejujuran sangat penting dalam penanganan data dan kasus KDRT. Kami selalu menekankan pentingnya transparansi dalam setiap langkah. Setiap data yang dikumpulkan harus valid, dan setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan fakta yang ada. Kami juga melakukan pelatihan tentang etika dan integritas untuk memastikan kejujuran terjaga.

Interviewer: Apakah ada upaya tertentu untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan program?

Bambang S : Kami selalu memastikan bahwa semua proses pelaksanaan program dapat diakses oleh pihak yang berwenang, dan semua laporan dilakukan secara terbuka. Setiap kegiatan yang kami lakukan, termasuk anggaran dan hasil evaluasi, kami buat terbuka untuk pengawasan masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Interviewer: Apa tantangan terbesar dalam memastikan kejujuran di antara tim?

Bambang S : Tantangan terbesar adalah menjaga agar semua pihak selalu menjaga integritas terutama saat menghadapi tekanan atau godaan dalam menangani kasus yang sensitif. Kami perlu memastikan bahwa setiap petugas memahami pentingnya kejujuran, terutama dalam melaporkan hasil atau perkembangan kasus tanpa ada manipulasi.

Interviewer: Seberapa penting transparansi dan kejujuran dalam mencapai tujuan JPPA?

Bambang S : Sangat penting. Tanpa transparansi dan kejujuran, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap program ini, yang dapat menghambat efektivitas dalam menangani KDRT. Kejujuran menjamin bahwa setiap langkah yang diambil adalah berdasarkan data yang benar dan relevan, sehingga hasilnya lebih tepat sasaran.

Interviewer: Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kejujuran dalam tim?

Bambang S : Kami perlu melakukan pengecekan berkala dan pelatihan yang menekankan nilai-nilai integritas. Selain itu, harus ada sistem pengawasan internal yang baik, sehingga setiap petugas merasa diawasi dan terdorong untuk selalu jujur dalam setiap langkah yang diambil.

c. Budaya Kerja Aparatur

Interviewer: Bagaimana budaya kerja dikembangkan di antara aparatur yang terlibat dalam Program JPPA, terutama dalam menangani kasus KDRT?

Bambang S : Budaya kerja yang kami bangun di JPPA adalah budaya kerja yang kooperatif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Kami selalu berusaha menciptakan suasana kerja yang terbuka dan saling mendukung antar anggota tim. Setiap anggota diminta untuk saling berbagi informasi dan berkolaborasi, sehingga penanganan kasus bisa dilakukan dengan baik.

Interviewer: Apakah ada nilai-nilai atau kebiasaan tertentu yang diterapkan dalam tim JPPA untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kerja?

Bambang S : Tentu. Kami menekankan nilai-nilai seperti empati, kejujuran, dan profesionalisme. Setiap anggota tim diharapkan untuk selalu menjaga etika dalam berinteraksi dengan korban dan sesama anggota tim. Kami juga menerapkan prinsip gotong royong dalam setiap langkah penanganan kasus.

Interviewer: Apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun budaya kerja yang solid dan kooperatif di JPPA?

Bambang S : Tantangannya adalah adanya perbedaan latar belakang dan pemahaman dari setiap anggota tim. Beberapa anggota tim ada yang lebih berpengalaman, sementara yang lain masih belajar. Membangun budaya kerja yang kooperatif di tengah perbedaan

ini butuh waktu dan kesabaran. Kami perlu selalu mengingatkan pentingnya kerjasama tim.

Interviewer: Menurut Anda, bagaimana budaya kerja di JPPA mempengaruhi keberhasilan program dalam menangani kasus KDRT?

Bambang S : Budaya kerja yang solid dan kooperatif sangat berpengaruh pada keberhasilan program ini. Semakin baik kerjasama antar anggota tim, semakin cepat dan efektif kita bisa menangani kasus. Budaya yang baik juga menciptakan suasana kerja yang nyaman, sehingga petugas dapat bekerja dengan maksimal tanpa merasa tertekan.

Interviewer: Apa saran Anda untuk meningkatkan budaya kerja di JPPA agar lebih mendukung pencapaian tujuan program?

Bambang S : Saya rasa penting untuk memperkuat pelatihan mengenai budaya kerja dan nilai-nilai bersama, serta memberikan ruang bagi setiap anggota tim untuk menyuarakan pendapatnya. Kami juga perlu mengadakan kegiatan bersama di luar pekerjaan agar anggota tim lebih akrab dan membangun rasa saling percaya.

d. Sifat Demokratis

Interviewer: Sejauh mana aspek demokratis diterapkan dalam pengambilan keputusan terkait Program JPPA?

Bambang S : Aspek demokratis sangat diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap anggota tim diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan mereka, baik itu terkait strategi penanganan kasus maupun langkah-langkah lainnya. Keputusan yang diambil biasanya berdasarkan konsensus meskipun terkadang ada keputusan cepat yang perlu diambil di lapangan.

Interviewer: Bagaimana proses pengambilan keputusan yang melibatkan masukan dari seluruh anggota tim atau pihak-pihak terkait di JPPA?

Bambang S : Proses pengambilan keputusan di tim biasanya dimulai dengan diskusi terbuka. Kami mengadakan rapat rutin di mana setiap anggota bisa memberikan masukan. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti kepolisian dan dinas sosial untuk memastikan keputusan yang diambil sudah tepat.

Interviewer: Apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga proses yang demokratis dalam tim JPPA, terutama saat menangani situasi yang membutuhkan keputusan cepat?

Bambang S : Tantangannya adalah ketika kita menghadapi situasi yang sangat mendesak, seperti kasus KDRT yang memerlukan tindakan cepat. Dalam situasi seperti itu, pengambilan keputusan seringkali harus dilakukan secara cepat dan mungkin tidak semua anggota tim bisa dilibatkan dalam setiap keputusan. Namun, kami selalu berusaha untuk menjaga agar prosesnya tetap terbuka dan melibatkan pihak terkait.

Interviewer: Seberapa besar pengaruh sifat demokratis dalam tim terhadap efektivitas program JPPA, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif?

Bambang S : Pengaruhnya sangat besar. Sifat demokratis menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua anggota tim merasa dihargai dan didengarkan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kerjasama yang solid dan meningkatkan semangat kerja tim dalam menghadapi tantangan-tantangan di lapangan.

Interviewer: Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sifat demokratis dalam tim JPPA agar program berjalan lebih efektif dan transparan?

Bambang S : Saya rasa penting untuk memperbanyak forum diskusi dan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat dan korban KDRT itu sendiri. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, program akan lebih transparan dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat.

Bagian 1: Struktur Birokrasi

a. Pengangkatan Birokrasi

Interviewer: Bagaimana proses pengangkatan aparatur dalam JPPA dilakukan?

Informan 7: Pengangkatan aparatur dalam JPPA lebih bersifat sukarela. Siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan perempuan dan anak dapat bergabung, tanpa adanya proses seleksi formal. Biasanya, orang yang sudah memiliki pengalaman

dalam organisasi sosial atau pernah menangani kasus kekerasan lebih mudah diterima.

Interviewer: Apakah sistem pengangkatan di JPPA mendukung efisiensi program?

Informan 7: Dari sisi aksesibilitas, sistem ini cukup baik karena memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Namun, dari segi efisiensi, ada beberapa kendala. Karena tidak ada proses seleksi yang ketat, sering kali ada anggota yang kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi.

Interviewer: Apa tantangan dalam hal perekrutan yang memengaruhi pelaksanaan program?

Informan 7: Tantangan utama adalah memastikan bahwa anggota yang direkrut benar-benar memiliki komitmen jangka panjang. Banyak yang awalnya antusias, tetapi setelah menghadapi kesulitan di lapangan, mereka menjadi kurang aktif. Selain itu, tidak semua anggota memiliki latar belakang yang sesuai, sehingga perlu ada pelatihan sebelum mereka mulai bekerja.

Interviewer: Apakah prosedur pengangkatan yang ada saat ini mendukung tujuan JPPA?

Informan 7: Sebagian besar mendukung, karena memungkinkan lebih banyak masyarakat terlibat. Namun, untuk meningkatkan efektivitas, sebaiknya ada sistem rekrutmen yang lebih terstruktur dan pelatihan yang memadai sebelum anggota terjun langsung menangani kasus.

Interviewer: Apa yang dapat diperbaiki dalam sistem pengangkatan di JPPA?

Informan 7: Seharusnya ada mekanisme seleksi yang lebih jelas, misalnya dengan menentukan kriteria tertentu bagi calon anggota. Selain itu, pelatihan wajib sebelum bergabung juga penting agar mereka siap dalam menjalankan tugasnya dengan profesional.

Bagian 2: Insentif

Interviewer: Bagaimana kebijakan insentif bagi aparaturnya yang terlibat dalam Program JPPA?

Informan 7: Saat ini, insentif yang diberikan masih terbatas. Sebagian besar berupa dukungan transportasi dan penghargaan moral. Ada juga kesempatan mengikuti pelatihan, tetapi tidak ada gaji tetap atau honorarium khusus bagi anggota.

Interviewer: Apakah insentif yang diberikan cukup memotivasi tim untuk mencapai target program?

Informan 7: Bagi mereka yang benar-benar memiliki kepedulian sosial, mungkin cukup. Namun, bagi sebagian anggota yang harus membagi waktu dengan pekerjaan lain, kurangnya insentif finansial bisa menjadi faktor yang mengurangi keterlibatan mereka dalam program ini.

Interviewer: Apa hambatan dalam memberikan insentif kepada tim JPPA?

Informan 7: Hambatan utamanya adalah keterbatasan anggaran. Karena JPPA bukan lembaga dengan pendanaan tetap, insentif sering kali bergantung pada hibah atau bantuan dari pemerintah dan mitra organisasi. Selain itu, proses administrasi yang panjang juga sering menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana insentif.

Interviewer: Seberapa besar pengaruh insentif terhadap keberhasilan program dalam mengurangi KDRT?

Informan 7: Insentif sangat berpengaruh terhadap motivasi anggota. Jika mereka merasa dihargai, mereka akan lebih aktif dalam melaksanakan program. Sebaliknya, jika insentif kurang, ada kemungkinan tingkat partisipasi mereka menurun, yang tentu saja berdampak pada efektivitas program dalam menekan angka KDRT.

Interviewer: Menurut Anda, insentif seperti apa yang bisa meningkatkan kinerja tim JPPA?

Informan 7: Selain insentif finansial, bentuk penghargaan lain seperti sertifikasi, kesempatan mengikuti pelatihan lanjutan, atau akses ke beasiswa pendidikan bisa menjadi motivasi tambahan. Hal-hal ini dapat meningkatkan profesionalisme anggota dan membuat mereka merasa kontribusinya dihargai.

Interviewer: Terima kasih atas waktu dan informasinya. Wawancara ini sangat membantu dalam memahami lebih dalam mengenai implementasi JPPA.

Informan 7: Sama-sama. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan JPPA di masa depan.

Lampiran 15 Hasil Wawancara dengan Korban KDRT berinisial SN

I. Pertanyaan Umum dan Pengalaman Pribadi

- Interviewer : Bisakah Anda menceritakan secara singkat latar belakang Anda dan bagaimana Anda mengetahui tentang adanya Program JPPA?
- SN : Saya seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun, tinggal di Semarang. Saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama beberapa tahun sebelum akhirnya memberanikan diri mencari bantuan. Saya pertama kali mengetahui tentang Program JPPA dari seorang teman yang juga pernah mengakses layanan ini. Dia memberi tahu saya bahwa ada tempat yang bisa membantu korban KDRT seperti saya.
- Interviewer : Bagaimana Anda pertama kali terlibat atau mendapatkan bantuan melalui Program JPPA?
- SN : Setelah mengetahui tentang program ini, saya mencoba mencari informasi lebih lanjut melalui media sosial. Kemudian, saya menghubungi salah satu petugas JPPA dan dijadwalkan untuk konsultasi. Dari sana, saya mendapatkan pendampingan hukum serta perlindungan sementara di rumah aman.

II. Pertanyaan Mengenai Informasi dan Pemahaman Program (Komunikasi)

A. Dimensi Transmisi (Cara Penyampaian Informasi)

- Interviewer : Bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang layanan yang disediakan oleh JPPA?
- SN : Saya mendapat informasi dari media sosial dan teman yang pernah mendapatkan bantuan dari JPPA. Setelah menghubungi ketua JPPA kelurahan di tempat saya tinggal. Petugas yang saya hubungi menjelaskan secara singkat layanan yang tersedia dan bagaimana cara mengaksesnya. Saya juga mencari tahu lebih banyak melalui situs resmi mereka dan membaca pengalaman korban lain yang dibagikan secara online. Hal ini membantu saya memahami lebih dalam mengenai bantuan yang bisa saya dapatkan.
- Interviewer : Apakah informasi tersebut disampaikan secara langsung atau melalui media lain?
- SN : Awalnya, saya melihat informasi di media sosial, tetapi setelah menghubungi ketua JPPA kelurahan, saya mendapatkan penjelasan langsung dari petugas melalui telepon dan pertemuan tatap muka. Dalam pertemuan tersebut, petugas menjelaskan langkah-langkah yang perlu saya lakukan dan memberikan brosur yang berisi informasi lebih rinci. Selain itu, saya juga diarahkan ke pusat layanan untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Hal ini membuat saya merasa lebih yakin untuk melanjutkan proses pendampingan.
- Interviewer : Menurut Anda, apakah cara penyampaian informasi tersebut memudahkan Anda memahami apa saja yang ditawarkan oleh program?
- SN : Ya, cukup membantu, tetapi saya rasa informasi di media sosial bisa dibuat lebih lengkap dan lebih sering diperbarui. Beberapa informasi yang saya temukan awalnya cukup umum dan tidak menjelaskan secara rinci prosedur yang harus diikuti. Saya baru benar-benar memahami layanan yang tersedia setelah berbicara langsung dengan petugas. Jika informasi di media sosial lebih detail dan mencakup pengalaman nyata korban yang telah mendapatkan bantuan, saya yakin lebih banyak orang akan merasa terbantu sejak awal. Selain itu, penggunaan bahasa yang lebih sederhana juga akan membantu korban yang mungkin sedang dalam kondisi emosional yang sulit.

B. Dimensi Kejelasan (Keterbukaan dan Kemudahan Memahami Informasi)

- Interviewer : Apakah penjelasan mengenai layanan yang akan Anda terima dari JPPA terasa jelas dan mudah dipahami?
- SN : Pada awalnya, saya sedikit bingung dengan prosedurnya karena ada banyak informasi yang harus saya pahami. Namun, setelah bertemu langsung dengan petugas, mereka menjelaskan setiap tahap dengan rinci, sehingga saya merasa lebih tenang. Petugas juga memberikan contoh kasus yang serupa dengan situasi

saya, yang membantu saya memahami bagaimana prosesnya berjalan. Selain itu, mereka memberikan panduan tertulis yang bisa saya baca kembali di rumah. Meskipun awalnya terasa rumit, saya akhirnya bisa mengikuti prosedurnya dengan lebih baik.

Interviewer : Pernahkah Anda merasa bingung atau kurang jelas tentang langkah-langkah yang harus diikuti untuk mendapatkan bantuan?

SN : Ya, terutama saat mengurus dokumen hukum karena saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya sempat khawatir jika ada dokumen yang kurang atau tidak sesuai dengan persyaratan. Butuh beberapa kali bertanya kepada petugas untuk memastikan semuanya benar, dan mereka cukup sabar dalam menjelaskan. Ada juga beberapa istilah hukum yang sulit saya pahami, tetapi petugas berusaha menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Dengan bantuan mereka, akhirnya saya bisa menyelesaikan proses administrasi dengan lebih lancar.

C. Dimensi Konsistensi (Kesamaan Informasi dari Berbagai Sumber)

Interviewer : Apakah informasi yang Anda terima dari petugas atau sumber lain tentang JPPA terasa konsisten?

SN : Sebagian besar ya, informasi yang saya terima cukup seragam dan membantu saya memahami layanan yang tersedia. Namun, ada beberapa perbedaan kecil terkait prosedur hukum yang membuat saya sempat bingung. Misalnya, ada petugas yang menyampaikan bahwa saya harus menyiapkan dokumen tertentu lebih dulu, sementara petugas lain mengatakan dokumen tersebut bisa menyusul. Perbedaan ini membuat saya harus mencari klarifikasi lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahan dalam proses hukum. Meskipun begitu, setelah berdiskusi dengan petugas yang lebih berpengalaman, akhirnya saya mendapatkan kejelasan mengenai langkah-langkah yang harus saya tempuh.

Interviewer : Jika pernah ada perbedaan informasi, bagaimana hal tersebut memengaruhi pemahaman dan kenyamanan Anda dalam mengikuti layanan?

SN : Hal itu membuat saya ragu dan takut salah langkah, terutama karena saya tidak ingin ada hambatan dalam proses hukum yang sedang saya jalani. Saya harus memastikan ulang dengan petugas sebelum mengambil keputusan, yang terkadang memakan waktu lebih lama. Ada saat-saat di mana saya merasa frustrasi karena informasi yang berbeda ini membuat saya harus bolak-balik mengonfirmasi ulang. Namun, saya bersyukur karena petugas JPPA tetap bersedia membantu dan menjelaskan dengan sabar. Pada akhirnya, saya bisa lebih memahami prosedur yang benar dan menjalani proses bantuan dengan lebih percaya diri.

III. Pertanyaan Mengenai Pengalaman Layanan (Sumber Daya dan Kewenangan dari Perspektif Korban)

A. Kualitas Layanan dan Kesiapan Petugas

Interviewer : Bagaimana Anda menilai kondisi fasilitas atau tempat yang digunakan untuk memberikan layanan kepada Anda? Apakah merasa nyaman dan aman?

SN : Secara umum, fasilitas yang disediakan cukup memadai, tetapi ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Ruangan tempat saya menerima pendampingan cukup nyaman dan memberikan rasa aman, terutama karena ada petugas yang selalu siap membantu. Namun, ada beberapa area yang menurut saya perlu lebih diperhatikan, seperti ruang tunggu yang bisa lebih privat agar korban tidak merasa canggung saat menunggu giliran. Selain itu, jika fasilitas pendukung seperti ruang konseling lebih dilengkapi dengan perlengkapan yang menunjang kenyamanan, saya rasa korban akan merasa lebih tenang saat berbagi pengalaman mereka. Tapi saya tetap bersyukur karena suasana yang diciptakan petugas cukup mendukung pemulihan mental saya.

Interviewer : Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam mengakses fasilitas atau peralatan yang mendukung proses perlindungan dan pendampingan?

SN : Ada beberapa kendala kecil, misalnya dalam hal ketersediaan transportasi menuju lokasi layanan. Tidak semua korban memiliki akses mudah ke tempat

pendampingan, sehingga perlu adanya dukungan lebih dalam hal ini. Selain itu, terkadang ada keterbatasan dalam hal jadwal layanan, sehingga saya harus menyesuaikan waktu untuk bisa bertemu dengan petugas yang menangani kasus saya. Meskipun begitu, saya merasa JPPA cukup responsif dalam mengatasi kendala ini dengan menyediakan alternatif layanan, seperti konsultasi melalui telepon atau pertemuan yang dijadwalkan ulang. Saya berharap ke depan akses ke layanan ini bisa lebih fleksibel, sehingga korban dapat lebih mudah mendapatkan bantuan tanpa hambatan yang berarti.

B. Fasilitas dan Aksesibilitas Layanan

Interviewer : Bagaimana kondisi fasilitas atau tempat yang digunakan untuk memberikan layanan kepada Anda? Apakah merasa nyaman dan aman?

SN : Tempatnya cukup aman, terutama karena ada petugas yang selalu siaga menjaga keamanan dan memastikan tidak ada ancaman dari pihak luar. Namun, saya merasa fasilitas di rumah aman bisa lebih baik, terutama dalam hal kenyamanan dan privasi bagi korban. Beberapa ruangan terasa kurang nyaman karena kapasitas yang terbatas, sehingga korban harus berbagi ruang dengan yang lain. Selain itu, fasilitas pendukung seperti perlengkapan tidur dan kebutuhan dasar lainnya masih bisa ditingkatkan agar korban merasa lebih tenang selama tinggal di sana. Meskipun begitu, suasana yang diciptakan oleh petugas cukup membantu saya merasa lebih terlindungi dan tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini.

Interviewer : Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam mengakses fasilitas atau peralatan yang mendukung proses perlindungan dan pendampingan?

SN : Ya, ada keterbatasan transportasi menuju tempat perlindungan, terutama bagi korban yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau akses transportasi umum yang memadai. Saat pertama kali menuju rumah aman, saya harus mencari cara sendiri untuk sampai ke lokasi, yang cukup menyulitkan karena saya masih dalam kondisi trauma. Selain itu, beberapa layanan pendampingan tidak selalu tersedia setiap saat, sehingga saya harus menyesuaikan jadwal dengan petugas yang menangani kasus saya. Dalam situasi darurat, sebaiknya ada sistem transportasi yang lebih siap membantu korban agar mereka dapat segera mendapatkan perlindungan tanpa harus khawatir tentang akses ke lokasi. Saya berharap ke depan ada solusi yang lebih efektif untuk mengatasi kendala ini, seperti layanan antar-jemput atau kerja sama dengan pihak transportasi setempat.

C. Kewenangan dan Kepercayaan

Interviewer : Apakah Anda merasa petugas memiliki kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan demi keselamatan Anda?

SN : Saya rasa petugas memiliki kewenangan yang cukup untuk mengambil keputusan demi keselamatan saya. Namun, terkadang ada hambatan birokrasi yang menghambat proses pengambilan keputusan. Misalnya, beberapa keputusan harus melalui beberapa tahapan yang cukup memakan waktu, padahal dalam situasi tertentu, kecepatan pengambilan keputusan sangat penting untuk keselamatan. Meskipun begitu, saya tetap menghargai upaya yang dilakukan oleh petugas untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai prosedur.

Interviewer : Bagaimana perasaan Anda mengenai kemampuan petugas untuk menindaklanjuti kasus Anda secara cepat dan efektif?

SN : Secara umum, saya merasa cukup terbantu dengan cara petugas menindaklanjuti kasus saya. Mereka cukup responsif dalam memberikan solusi dan tindak lanjut. Namun, saya juga merasa ada beberapa prosedur yang bisa dipercepat agar kasus saya bisa diselesaikan lebih cepat. Beberapa langkah yang diambil cukup memakan waktu, padahal dalam kondisi darurat, kecepatan sangat dibutuhkan. Meskipun demikian, saya tetap menghargai komitmen petugas dalam menyelesaikan masalah ini.

IV. Pertanyaan Mengenai Pendekatan dan Sikap Pelayanan (Disposisi/Sikap)

A. Sikap dan Perilaku Petugas

Interviewer : Bagaimana Anda menilai sikap dan perilaku petugas JPPA selama proses pendampingan?

SN : Sikap dan perilaku petugas JPPA sangat baik selama proses pendampingan. Mereka selalu menunjukkan kesabaran dan empati, membuat saya merasa dihargai dan didengar. Setiap kali saya berbicara, mereka memberi perhatian penuh tanpa terburu-buru. Hal ini membuat saya merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam proses pendampingan. Mereka juga memberi dukungan yang saya butuhkan tanpa menilai atau menghakimi, yang sangat penting dalam situasi seperti yang saya alami. Saya benar-benar merasa dibantu oleh mereka.

B. Transparansi dan Kejujuran

Interviewer : Sejauh mana informasi yang diberikan kepada Anda bersifat jujur dan transparan mengenai proses bantuan?

SN : Secara umum, informasi yang diberikan cukup transparan, dan saya merasa diberi penjelasan yang jelas tentang proses bantuan yang akan saya terima. Namun, ada beberapa hal yang baru saya ketahui setelah menjalani proses pendampingan. Terkadang, informasi terkait beberapa tahapan atau prosedur tertentu tidak dijelaskan sepenuhnya di awal, sehingga saya merasa sedikit terkejut ketika menemui hal-hal baru di tengah proses. Meskipun demikian, petugas tetap memberikan penjelasan yang lebih mendalam setelah saya mempertanyakan hal tersebut, sehingga saya merasa lebih paham. Sebagai hasilnya, saya merasa lebih siap menghadapi langkah-langkah berikutnya.

C. Partisipasi dan Keterlibatan

Interviewer : Dalam proses pengambilan keputusan, apakah Anda merasa dilibatkan?

SN : Ya, saya merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Petugas memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pendapat dan perasaan saya mengenai situasi yang saya hadapi. Mereka mendengarkan dengan baik dan mempertimbangkan apa yang saya katakan sebelum mengambil keputusan. Saya merasa dihargai karena suara saya dianggap penting dalam menentukan langkah selanjutnya. Meskipun saya bukan yang memiliki otoritas penuh, saya merasa keputusan yang diambil tetap mencerminkan keinginan dan kebutuhan saya. Ini membuat saya lebih percaya dan nyaman dengan proses yang sedang berjalan.

V. Pertanyaan Mengenai Proses Administratif dan Navigasi Birokrasi (Struktur Birokrasi)

A. Kemudahan Mengakses Layanan

Interviewer : Bagaimana Anda menilai kemudahan dalam mengakses layanan?

SN : Pada awalnya, saya merasa agak sulit untuk mengakses layanan karena ada banyak dokumen yang harus diurus terlebih dahulu. Proses administrasi yang cukup rumit dan memerlukan waktu membuat saya sedikit kesulitan. Saya harus mengumpulkan berbagai dokumen yang tidak selalu mudah didapatkan. Namun, setelah saya melalui tahap awal ini, petugas sangat membantu dalam memberikan penjelasan dan arahan tentang dokumen yang diperlukan. Meskipun prosesnya memakan waktu, pada akhirnya saya merasa lebih mudah mengakses layanan setelah memahami tahapan yang harus ditempuh.

B. Waktu Tunggu dan Prosedur

Interviewer : Bagaimana pengalaman Anda terkait waktu tunggu sebelum mendapatkan bantuan?

SN : Pengalaman saya terkait waktu tunggu sebelum mendapatkan bantuan cukup lama, terutama dalam proses hukum. Saya harus menunggu beberapa waktu sebelum ada perkembangan signifikan dalam kasus saya. Proses hukum yang panjang dan sering kali memerlukan prosedur yang berbelit-belit membuat saya merasa cemas dan tidak sabar. Meskipun begitu, petugas selalu berusaha memberikan informasi dan penjelasan mengenai tahapan yang harus dilalui. Saya memahami bahwa hal

tersebut membutuhkan waktu, tetapi waktu tunggu yang lama tetap menjadi tantangan tersendiri bagi saya.

C. Saran untuk Perbaikan Proses

Interviewer : Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam proses administratif?

SN : Berdasarkan pengalaman saya, prosedur hukum bisa lebih dipermudah, terutama bagi korban yang belum memahami sistem hukum. Banyak langkah yang harus dilalui dan terkadang terasa membingungkan, terutama jika kita tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Proses ini bisa sangat menambah beban psikologis bagi korban yang sudah mengalami trauma. Jika prosedur tersebut lebih sederhana dan jelas, akan sangat membantu korban untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dengan lebih cepat.

Interviewer : Apakah ada saran atau masukan agar sistem birokrasi lebih ramah bagi korban KDRT?

SN : Saya rasa, akan sangat baik jika korban mendapatkan pendampingan hukum sejak awal tanpa harus menunggu lama. Kadang, korban merasa bingung dan terisolasi dalam menghadapi proses hukum yang panjang. Dengan adanya pendampingan hukum yang lebih cepat, korban bisa merasa lebih didukung dan lebih paham tentang hak-haknya. Ini juga bisa mempercepat proses hukum dan memberikan rasa aman kepada korban. Pendampingan sejak awal bisa membantu mengurangi rasa cemas dan meningkatkan rasa percaya diri korban dalam menghadapi situasi sulit ini.